



BAB I. PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Dalam rangka penyelenggaraan *Good Governance*, diperlukan pengembangan dan penerapan sistem pertanggungjawaban yang tepat, jelas, terukur, dan sah sehingga penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dapat berlangsung secara berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggungjawab serta bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme.

Untuk mewujudkan hal tersebut, setiap instansi pemerintah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan negara diwajibkan untuk mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya serta kewenangan pengelolaan sumber daya dengan didasarkan pada suatu perencanaan strategis yang ditetapkan oleh masing-masing instansi. Pertanggungjawaban dimaksud berupa laporan yang disampaikan kepada atasan masing-masing, lembaga-lembaga pengawasan, dan penilai akuntabilitas, dan akhirnya disampaikan kepada Presiden selaku kepala pemerintahan.

Berkenaan dengan laporan tersebut oleh pemerintah telah disikapi dengan membangun suatu sistem kinerja yang terukur dan transparan untuk menggambarkan kinerja instansi pemerintah yang difokuskan pada penyajian informasi kinerja secara akuntabel. Penyajian pelaporan tersebut diatur melalui suatu sistem yang disebut dengan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah atau lazim disebut dengan SAKIP.

Dengan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) ini selanjutnya secara hukum peraturan perundang-undangan ditetapkan dengan Peraturan Presiden yaitu pada Peraturan Presiden RI Nomor : 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Selanjutnya dalam pelaksanaannya



diatur kemudian dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Penyusunan Laporan Kinerja (LK) Pemerintah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2014 ini berpedoman kepada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tersebut, dengan tujuan untuk memberikan gambaran yang jelas, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan tentang kinerja selama kurun waktu Tahun 2014 serta pemenuhan kewajiban atas pertanggungjawaban kinerja atas pelaksanaan program dan kegiatan yang dibiayai oleh APBD Provinsi Sumatera Utara Tahun Anggaran 2014.

B. MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud dan Tujuan penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Provinsi Sumatera Utara dalam rangka capaian kinerja pada Biro Keuangan Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Utara tahun anggaran 2014 adalah :

1. Memberikan laporan atau penyajian informasi tentang capaian kinerja Tahun Anggaran 2014;
2. Mengevaluasi capaian kinerja berdasarkan target kinerja yang diperjanjikan pada Penetapan Kinerja Tahun 2014;
3. Memberikan informasi kinerja yang terukur kepada pemberi mandat/mandataris kinerja yang telah dan seharusnya dicapai;
4. Sebagai upaya perbaikan berkesinambungan bagi Pemerintah Provinsi Sumatera Utara untuk meningkatkan kinerjanya secara periodik.



C. SISTEMATIKAN PENYUSUNAN

Mengacu kepada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, sebagai pedoman yang digunakan dalam rangka penyusunan Laporan Kinerja (LK) Tahun 2014 ini, dimana sistematika penyusunannya adalah sebagai berikut :

- BAB I. PENDAHULUAN
- BAB II. PERENCANAAN KINERJA
- BAB III. AKUNTABILITAS KINERJA
- BAB IV. PENUTUP
- LAMPIRAN-LAMPIRAN.

D. GAMBARAN UMUM DAERAH

D.1. KONDISI GEOGRAFIS DAERAH

Provinsi Sumatera Utara yang berada di bagian Barat Indonesia, terletak pada garis 1° - 4° Lintang Utara dan 98° - 100° Bujur Timur. Di sebelah Utara berbatasan dengan Provinsi Aceh, sebelah Timur dengan Negara Malaysia di Selat Malaka, sebelah Selatan dengan Provinsi Riau dan Sumatera Barat, dan di sebelah Barat berbatasan dengan Samudera Hindia.

Luas Provinsi Sumatera Utara mencapai 181.680,68 km², meliputi lautan 110.000 km² atau sekitar 60,5 % dan daratan mencapai 71.680,68 km² atau sekitar 39,5 %. Sebagian besar wilayah daratan berada di Pulau Sumatera dan sebagian kecil berada di Pulau Nias, Pulau-pulau Batu, serta beberapa pulau kecil, baik di bagian Barat maupun bagian Timur pantai Pulau Sumatera.



Sumatera Utara memiliki 419 pulau yang terdiri dari 237 pulau yang telah memiliki nama, dengan Pulau Berhala sebagai pulau terluar yang berbatasan dengan selat Malaka dan sisanya 182 pulau di wilayah Pantai Barat dengan Pulau Wungu dan Pulau Simuk sebagai pulau terluar di wilayah Pantai Barat berbatasan dengan Samudera Hindia.

Tahun 2014 Provinsi Sumatera Utara memiliki 33 kabupaten/kota yang terdiri dari 25 kabupaten, 8 kota, 436 kecamatan, dan 6.102 desa/kelurahan. Bila dikelompokkan menurut wilayah geografis, Sumatera Utara terbagi atas 3 kawasan yaitu kawasan Pantai Barat seluas 26.189,07 km², kawasan Dataran Tinggi seluas 20.569,62 km², dan kawasan Pantai Timur seluas 24.921,99 km². Kawasan pantai barat seluas 26.189,07 km² meliputi 9 kabupaten dan 3 kota yaitu Kabupaten Nias, Nias Utara, Nias Barat, Mandailing Natal, Tapanuli Selatan, Padang Lawas, Padang Lawas Utara, Tapanuli Tengah, Nias Selatan, Kota Padangsidimpuan, Sibolga, dan Gunungsitoli. Kawasan dataran tinggi seluas 20.569,62 km² meliputi 8 kabupaten dan 1 kota yaitu Kabupaten Tapanuli Utara, Toba Samosir, Simalungun, Dairi, Karo, Humbang Hasundutan, Pakpak Bharat, Samosir, dan Kota Pematangsiantar.

Kawasan pantai timur seluas 24.921,99 km² meliputi 8 kabupaten dan 4 kota yaitu Kabupaten Labuhanbatu, Labuhanbatu Utara, Labuhanbatu Selatan, Asahan, Batu Bara, Deli Serdang, Langkat, Serdang Bedagai dan Kota Tanjungbalai, Tebing Tinggi, Medan dan Binjai.

D.2. GAMBARAN UMUM DEMOGRAFIS

Sumatera Utara merupakan provinsi keempat yang terbesar jumlah penduduknya di Indonesia setelah Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Jawa Timur. Berdasarkan proyeksi penduduk hasil Sensus Penduduk Tahun 2010, mencatat jumlah penduduk Sumatera Utara tahun 2014 sebesar 13.766.852 jiwa dengan penduduk laki-laki adalah 6.868.587 jiwa (49,89%) dan penduduk perempuan sebanyak 6.898.264 jiwa (50,11%). Sebagian besar penduduk berada di Kawasan Pantai Timur yang mencapai 8.573.504 jiwa (62,28%).



Kawasan Dataran Tinggi sebanyak 2.567.377 jiwa (18,65%), dan Kawasan Pantai Barat sebanyak 2.625.970 jiwa (19,07%). Laju pertumbuhan penduduk Sumatera Utara selama kurun waktu sepuluh tahun terakhir 2000 - 2010 mencapai 1,22 % per tahun, lebih tinggi dari laju pertumbuhan penduduk pada periode 1990 - 2000, yang mencapai 1,20 % pertahun.

Tabel 1
Jumlah Penduduk Menurut Kabupaten/Kota dan Jenis Kelamin
Tahun 2014¹⁾

No	Kabupaten/Kota	Laki-laki	Perempuan	Jumlah
1	Medan	1.081.797	1.109.343	2.191.140
2	Binjai	130.551	130.939	261.490
3	Pematangsiantar	119.582	125.522	245.104
4	Padangsidempuan	100.642	105.854	206.496
5	Tanjungbalai	83.006	81.669	164.675
6	Tebing Tinggi	76.488	78.316	154.804
7	Gunungsitoli	65.651	68.545	134.196
8	Sibolga	43.280	42.886	86.166
9	Deli Serdang	998.669	985.929	1.984.598
10	Langkat	506.513	499.452	1.005.965
11	Simalungun	420.591	423.442	844.033
12	Asahan	351.415	348.305	699.720
13	Serdang Bedagai	304.403	301.964	606.367
14	Labuhanbatu	229.110	224.520	453.630
15	Mandailing Natal	209.401	216.981	426.382
16	Batu Bara	199.508	196.971	396.479
17	Karo	189.815	192.807	382.622
18	Labuhanbatu Utara	175.405	172.060	347.465
19	Tapanuli Tengah	172.037	170.865	342.902
20	Labuhanbatu Selatan	156.578	150.593	307.171
21	Nias Selatan	151.380	153.630	305.010
22	Tapanuli Utara	143.794	147.070	290.864
23	Dairi	138.608	138.967	277.575
24	Tapanuli Selatan	135.707	137.425	273.132
25	Padang Lawas	126.313	125.614	251.927
26	Padang Lawas Utara	124.229	123.057	247.286
27	Humbang Hasundutan	89.906	91.120	181.026
28	Tobasamosir	88.680	89.888	178.568
29	Nias	65.933	69.386	135.319
30	Nias Utara	65.705	67.030	132.735
31	Samosir	61.080	61.985	123.065
32	Nias Barat	40.375	44.044	84.419
33	Pakpak Bharat	22.435	22.085	44.520
	Sumatera Utara	6.868.587	6.898.264	13.766.851

Sumber : BPS Provsu
Keterangan : ¹⁾ Angka Proyeksi Hasil Sensus Penduduk 2010



Sebaran penduduk terbesar berada di Kota Medan yang mencapai 2.191.140 jiwa (15,92%) disusul oleh Kabupaten Deli Serdang yang mencapai 1.984.598 jiwa (14,42%), Kabupaten Langkat sebanyak 1.005.965 jiwa (7,31%), Kabupaten Simalungun sebanyak 844.033 jiwa (6,13%), Kabupaten Asahan sebanyak 699.720 jiwa (5,08%) dan Kabupaten Serdang Bedagai sebanyak 606.367 jiwa (4,40%). Sebaran penduduk terendah berada di Kabupaten Pakpak Bharat 44.520 jiwa (0,32%), Kabupaten Nias Barat 84.419 jiwa (0,61%), Kota Sibolga 86.166 jiwa (0,63 %), Kabupaten Samosir 123.065 jiwa (0,89%), Kabupaten Nias Utara 132.735 jiwa (0,96%) dan Kota Gunungsitoli 134.196 jiwa (0,97%). Sedangkan sebaran penduduk yang berada di 21 kabupaten/kota lainnya masing-masing dibawah 4 %.

Tabel 2
Jumlah Penduduk, Kepadatan, dan Distribusi Menurut Kabupaten/Kota
Tahun 2014¹⁾

No	Kabupaten/Kota	Jlh Penduduk (org)	Kepadatan (org/km2)	Distribusi (%)
1	Medan	2.191.140	8.265	15,92
2	Binjai	261.490	2.898	1,90
3	Pematangsiantar	245.104	3.065	1,78
4	Padangsidempuan	206.496	1.801	1,50
5	Tanjungbalai	164.675	2.677	1,20
6	Tebing Tinggi	154.804	4.027	1,12
7	Gunungsitoli	134.196	286	0,97
8	Sibolga	86.166	8.001	0,63
9	Deli Serdang	1.984.598	798	14,42
10	Langkat	1.005.965	161	7,31
11	Simalungun	844.033	193	6,13
12	Asahan	699.720	190	5,08
13	Serdang Bedagai	606.367	317	4,40
14	Labuhanbatu	453.630	177	3,30
15	Mandailing Natal	426.382	64	3,10
16	Batu Bara	396.479	438	2,88
17	Karo	382.622	180	2,78
18	Labuhanbatu Utara	347.465	98	2,52



No	Kabupaten/Kota	Jlh Penduduk (org)	Kepadatan (org/km ²)	Distribusi (%)
19	Tapanuli Tengah	342.902	159	2,49
20	Labuhanbatu Selatan	307.171	99	2,23
21	Nias Selatan	305.010	188	2,22
22	Tapanuli Utara	290.864	77	2,11
23	Dairi	277.575	144	2,02
24	Tapanuli Selatan	273.132	63	1,98
25	Padang Lawas	251.927	65	1,83
26	Padang Lawas Utara	247.286	63	1,80
27	Humbang Hasundutan	181.026	79	1,31
28	Tobasamosir	178.568	76	1,30
29	Nias	135.319	138	0,98
30	Nias Utara	132.735	88	0,96
31	Samosir	123.065	51	0,89
32	Nias Barat	84.419	155	0,61
33	Pakpak Bharat	44.520	37	0,32
Sumatera Utara		13.766.851	192	100,00

Sumber : BPS Provsu

Keterangan : ¹⁾ Angka Proyeksi Hasil Sensus Penduduk 2010

Dengan luas wilayah daratan yang mencapai 71.680,68 km² kepadatan penduduk Sumatera Utara pada tahun 2014 mencapai 192 jiwa per km² dengan kepadatan penduduk tertinggi berada di Kota Medan sebesar 8.265 jiwa per km² disusul oleh Kota Sibolga sebesar 8.001 jiwa per km², Kota Tebing Tinggi sebesar 4.027 jiwa per km², Kota Pematangsiantar sebesar 3.065 jiwa per km², Kota Binjai sebesar 2.898 jiwa per km², Kota Tanjungbalai sebesar 2.677 jiwa per km² dan Kota Padangsidimpuan sebesar 1.801 jiwa per km².

Kepadatan penduduk terendah berada di Kabupaten Pakpak Bharat 37 jiwa per km², Kabupaten Samosir 51 jiwa per km², Kabupaten Tapanuli Selatan 63 jiwa per km², Kabupaten Padang Lawas Utara 63 jiwa per km², Kabupaten Mandailing Natal 64 jiwa per km², Kabupaten Padang Lawas 65 jiwa per km², Kabupaten Toba Samosir 76 jiwa per km², Kabupaten Tapanuli Utara 77 jiwa per km², Kabupaten Humbang Hasundutan 79 jiwa per km², Kabupaten Nias Utara 88



jiwa per km², Kabupaten Labuhanbatu Utara 98 jiwa per km², dan Kabupaten Labuhanbatu Selatan 99 jiwa per km².

Tabel 3
Jumlah Penduduk Menurut Kelompok Umur dan Jenis Kelamin
Tahun 2014¹⁾

Golongan Umur	Laki-Laki	Perempuan	Laki-Laki + Perempuan	Rasio Jenis Kelamin
0- 4	802.375	773.870	1.576.245	103,68
5- 9	759.810	721.943	1.481.753	105,25
10-14	704.663	673.408	1.378.071	104,64
15-19	672.488	648.926	1.321.414	103,63
20-24	600.170	592.525	1.192.695	101,29
25-29	549.776	547.230	1.097.006	100,47
30-34	510.973	519.057	1.030.030	98,44
35-39	472.924	479.688	952.612	98,59
40-44	428.251	439.488	867.739	97,44
45-49	378.235	395.276	773.511	95,69
50-54	324.230	341.124	665.354	95,05
55-59	259.826	270.385	530.211	96,09
60-64	174.601	184.592	359.193	94,59
65-69	102.076	123.445	225.521	82,69
70-74	67.452	89.412	156.864	75,44
75+	60.737	97.895	158.632	62,04
TOTAL	6.868.587	6.898.264	13.766.851	99,57

Sumber : BPS Provsu

Keterangan : ¹⁾ Angka Proyeksi Hasil Sensus Penduduk 2010

D.3. GAMBARAN UMUM PEREKONOMIAN

D.3.1. POTENSI UNGGULAN

1) Sumber Energi

Berbagai kebijakan energi yang diterapkan dalam rangka pengelolaan energi yang berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, rasional, optimal dan terpadu adalah bertujuan untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat, sebagaimana diamanatkan Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945. Kondisi saat ini energi telah berubah menjadi suatu hal yang sangat mendesak dan kondisi ini telah mengakibatkan hal-hal sebagai berikut :



- a. Energi (khususnya fosil) masih diperlakukan sebagai komoditi dagang yang memberikan nilai tambah yang rendah.
- b. Tidak mencukupinya pasokan energi untuk kebutuhan energi domestik, namun produksi energi diekspor dalam jumlah yang besar.
- c. Pemanfaatan energi tidak efisien.
- d. Harga energi belum memenuhi harga keekonomian.
- e. Iklim investasi energi masih rendah.
- f. Kapasitas industri energi nasional masih rendah.
- g. Terbatasnya akses masyarakat terhadap energi.

Potensi energi berupa panas bumi sebagai energi alternatif yang tersebar pada beberapa tempat di Sumatera Utara, diantaranya di Kabupaten Karo, Simalungun, Samosir, Tapanuli Utara, Padang Lawas, Mandailing Natal. Sumber panas bumi ini berpotensi sebagai pembangkit energi listrik Sumatera Utara. Terdapat 4 kabupaten/kota penghasil minyak dan gas yang ada di Sumatera Utara, yaitu : Kabupaten Langkat, Deli Serdang, Padang Lawas, dan Kota Binjai dengan realisasi Lifting Minyak Bumi pada tahun 2013 sebesar 339.120 barel dan pada tahun 2014 sebesar 509.077 barel. Dengan potensi/cadangan minyak bumi Sumatera Utara sampai dengan akhir 2014 sebesar 46.431,88 MSTB.

Tabel 4
Potensi Minyak Bumi Tahun 2014

Kabupaten	Cadangan (MSTB)* Minyak Bumi		
	Terbukti	Mungkin	Harapan
Langkat	19.466	6.884	3.310
Deli Serdang	7.551	31	27
Binjai	5.207	0	0
Medan	674	686	594
Padang Lawas	2.000	0	0
Total	34.898	7.602	3.931

Ket : *MSTB = Million Stock Tank Barrel / Ribu Barrel Tanki Pengumpul.
Sumber : Bappeda Provu



Potensi/cadangan gas bumi Sumatera Utara yang terdata sampai dengan akhir 2014 adalah sebesar 556.219 MMSCF (536.2 BCF) yang terdiri dari potensi/cadangan terbukti sebesar 472.399 MMSCF, potensi/cadangan mungkin sebesar 56.478 MMSCF dan potensi/ cadangan harapan sebesar 27.342 MMSCF, sedangkan untuk realisasi Lifting Gas Bumi pada tahun 2013 sebesar 3.888,1 MMBTU dan pada tahun 2014 sebesar 4.822,4 MMBTU.

Tabel 4
Potensi Gas Bumi Tahun 2014

Kabupaten	Cadangan (MMSCF)* Gas		
	Terbukti	Mungkin	Harapan
Langkat	233.591	54.797	25.893
Deli Serdang	143.065	0	0
Binjai	37.810	0	0
Medan	3.933	1.681	1.449
Offshore Medan - Langkat	54.000	0	0
Total	472.399	56.478	27.342

Ket : *MMSCF = Million Standart Cubic Feet / Juta Kaki Kubik
Sumber : Bappeda Prov. Sumut

Cadangan batubara terdapat di 15 titik dan gambut yang merupakan salah satu sumber energi yang banyak terdapat di Provinsi Sumatera Utara. Selain sebagai sumber energi, juga dapat digunakan sebagai media semai. Timah putih merupakan bahan galian yang berfungsi sebagai bahan industri dan konstruksi. Sebaran lokasi potensi di Sumatera Utara berada pada Aekhabil Kecamatan Sibolga dan Kabupaten Tapanuli Tengah pada 1°45'03,3" LU 99°08'11,2" BT dengan jumlah cadangan sebesar 470 BSCF (*Billion Standard Cubic Feet*) dan Desa Hatapang Kecamatan Na-IX-X Kabupaten Labuhanbatu Utara. Serta beberapa wilayah lain yaitu di Kabupaten Mandailing Natal, Tapanuli Tengah, Tapanuli Selatan, Langkat, Padang Lawas, Labuhanbatu Utara, Nias, Nias Utara, Nias Barat, Nias Selatan dan Kota Gunungsitoli) dimana hingga saat ini dalam tahap Penyelidikan Umum.



Terdapat juga indikasi potensi energi nuklir (radioaktif) yang terdapat di Kelurahan Aekhabil Kecamatan Sibolga Selatan, Kota Sibolga, yakni berupa Radium (Ra).

2) Bahan Tambang Mineral Logam dan Bukan Logam

Provinsi Sumatera Utara mempunyai berbagai jenis bahan galian mineral yang potensial untuk dimanfaatkan dan dikembangkan, yaitu : mineral logam, emas, timah hitam (galena), seng, tembaga, besi dan mineral non logam : batugamping, dolomit, bentonit, zeolit, kaolin, feldspar, marmer, granit, belerang, andesit, serpentinit, pasir kwarsa, perlit serta bahan galian energi : gambut, batubara, panas bumi (geothermal) serta minyak dan gas bumi. Secara umum telah diketahui besarnya cadangan geologi (perkiraan) dan mutu sumberdaya mineral, namun untuk dapat dimanfaatkan dan dikembangkan masih memerlukan penyelidikan eksplorasi secara detail, guna mengetahui cadangan terukur (pasti).

Tabel 5
Potensi Bahan Galian Unggulan di Sumatera Utara

No	Bahan Galian	Lokasi			Keterangan
		Desa	Kecamatan	Kabupaten	
1	Batu Apung	Sitilupu	Pahae Jae	Tapanuli Utara	Cadangan hipotetik = 120.000 Ton
		Huta Tinggi	Parmonangan	Tapanuli Utara	Cadangan hipotetik = 240.000 Ton
		Tiga juhar	STM Hilir	Deli Serdang	Cadangan hipotetik = 5.727.960 Ton
2	Belerang	Sibanggor Tonga	Kotanopan	Madina	Cadangan hipotetik = 220.000 Ton. Hasil analisa = S = 86,72%
		Namora Ilangit	P. Julu	Taput	Cadangan = hipotetik 106.000 Ton
		Gn. Pusuk Buhit	Pangururan	Samosir	Cadangan hipotetik = 33.000 Ton
		Banuaji	Adian Koting	Taput	
		Gn. Sibayak	Sp. Empat	Karo	Cadangan hipotetik = 54.789 Ton



No	Bahan Galian	Lokasi			Keterangan
		Desa	Kecamatan	Kabupaten	
		Gn. Sinabung	Payung	Karo	
3	Bentonit	Pt. Padang	Sosopan	Tapsel	Cadangan hipotetik = 200.000 Ton
		Hasahatan	Sipirok	Tapsel	Cadangan hipotetik = 2.000.000 Ton
		S. Tapus	Saipar Dolok Hole	Tapsel	
		Pangkalan Brandan	Babalan	Langkat	
		Wonosari	Besitang	Langkat	Cadangan hipotetik = 78.000.000 Ton Hasil analisa : SiO ₂ = 8,64%, Al ₂ O ₃ = 9,18%, CaO = 69,13%, MgO = 5,91%, Fe ₂ O ₃ = 4,01%
4	Dolomit	Lau Buluh	Kuta Buluh	Karo	Hasil analisa : CaO = 25,75-34,98%, MgO = 11,90-21,97%, SiO ₂ = 0,14-3,86%, Al ₂ O ₃ = 0,20-0,89%
		Kempawa	Tanah Pinem	Dairi	Hasil analisa : CaO = 34,99%, MgO = 20,31%, Na ₂ O = 0,05%, K ₂ O = 0,2%, Al ₂ O ₃ = 0,07%
		Kutakepar	Payung	Karo	Cadangan hipotetik : 11.520.000 Ton. Hasil analisa : MgO = 21,76 – 22,17%
		Simasom	Pahae Julu	Taput	
5	Granit	Parombuanaan	Sibolga	Tapteng	Cadangan hipotetik : 600.000.000 Ton Hasil analisa : daya serap air = 0,47%, BD = 2,66 berat isi = 2,63 Gr/cm ³ , Aus gesek = 50,14%, Kuat Tekan = 1150,54 Kg/cm ²
		Raut Bosi	Pangaribuan	Taput	Cadangan hipotetik : 1.715.800 Ton
		Muara Sipongi	M. sipongi	Madina	
		Aek Banir	Panyabungan	Madina	
		Hatapang	IX Na X	Lab. Batu	



No	Bahan Galian	Lokasi			Keterangan
		Desa	Kecamatan	Kabupaten	
6	Kaolin	S. Tonga	Kotanopan	Madina	Cadangan hipotetik : 366.163 Ton Hasil analisa :SiO ₂ = 40,34-57,64%, Al ₂ O ₃ =15,52- 23,75%,Fe ₂ O ₃ =1,00- 1,55%, CaO=2,55- 5,09%,TiO ₂ =LOI=49,31- 53,13%
		Purbatua	Sipirok	Tapsel	Hasil analisa :SiO ₂ = 40,34- 61,58%,Al ₂ O ₃ =21,55- 31,64%,Fe ₂ O ₃ =1,00- 1,55%, TiO ₂ =0,53%
		Bulu Payung	Sipirok	Tapsel	Hasil analisa :SiO ₂ = 40,34-60,58%, Al ₂ O ₃ =29,93- 31,64%,Fe ₂ O ₃ =1,00- 1,58%, TiO ₂ =0,53%
			Barus	Tapteng	Hasil analisa :SiO ₂ = 73,32%, Al ₂ O ₃ =13,24%,Fe ₂ O ₃ = 2%,LOI=6,39%
		Pantis	Pahae Jae	Tapteng	
		Pearaja	Tarutung	Taput	
7	Marmer	Aek Banir	Panyabungan	Madina	Hasil analisa : SiO ₂ = 0,04-26,34%, CaO=23,55- 54,68%,Fe ₂ O ₃ =0,16- 9,18%, MgO=0,60- 5,65%,LOI = 9,41-43,30%
		Muara pungkut	Kotanopan	Madina	
		Ranjo batu	Muara sipongi	Madina	
		Sibaganding	GSP Bolon	Simalungun	
		Mardinding	Mardinding	Karo	
		Mbal petarum	Lau baleng	Karo	
		Lau buluh	Kutabuluh	Karo	1,552.233 M ³ Hipotetik
		Kuta buluh	Tanah pinem	Dairi	
8	Toseki	Hutatinggi	Parmonangan	Humbang hasudutan	36.000.000 M ³ Hipotetik

Sumber : Bappeda Provsu



3) Hidrologi

a. Daerah Aliran Sungai

Kondisi hidrologi di Provinsi Sumatera Utara terdiri dari air permukaan yaitu sungai, danau, rawa dan air bawah tanah dimana secara keseluruhan wilayah terbagi atas 71 DAS dan 3 (tiga) DAS lintas provinsi. Jumlah induk sungai di Provinsi Sumatera Utara sebanyak 99 buah, Anak Sungai sebanyak 783 buah, Ranting Sungai 659 buah, anak Ranting Sungai 342 buah.

b. Sungai, Danau dan Rawa

Sesuai dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Penetapan Wilayah Sungai, maka sungai-sungai di Provinsi Sumatera Utara dapat dikelompokkan ke dalam 11 satuan Wilayah Sungai (WS) berdasarkan lintas wilayahnya yaitu WS Strategis Nasional adalah WS Belawan – Ular – Padang dan WS Toba – Asahan. WS Lintas Provinsi yaitu WS Alas Singkil lintas provinsi dengan Provinsi Aceh, WS Batang Natal – Batang Batahan lintas provinsi dengan Sumatera Barat dan WS Rokan lintas Provinsi dengan Riau. Sementara WS Batang Angkola – Batang Gadis, WS Wampu – Besitang, WS Bah Bolon, WS Barumon – Kualuh adalah, WS Pulau Nias, dan WS Sibundong – Batang Toru merupakan WS lintas kabupaten/kota.

Kawasan rawa merupakan sumber daya alam yang potensinya belum dimanfaatkan dengan optimal bagi lahan pertanian dan pertambakan. Luas baku daerah rawa di Sumatera Utara sebesar 1.012.005 Ha yang letaknya tersebar di kawasan Pantai Timur dan Pantai Barat.



c. Debit Air

Beberapa sungai utama di Propinsi Sumatera Utara memiliki debit air rata-rata yang cukup besar seperti Sungai Wampu, Sungai Ular, Sungai Barumon, Sungai Silau, Sungai Asahan yang dapat dimanfaatkan untuk sumber air irigasi dan bahan baku air bersih dan air minum untuk keperluan rumah tangga dan industri. Namun disisi lain dapat menimbulkan ancaman bahaya banjir dimusim penghujan, akibat mulai terdegradasinya lahan pada daerah hulu. Selain itu terdapat badan air yaitu danau dengan debit air cukup besar yang potensial bagi sistem pengairan dan memiliki air terjun yang potensial sebagai sumber energi. Badan air berupa danau kecil yaitu Danau Siais dan Danau Pandan di Tapanuli Tengah, Danau Balimbing di Tapanuli Selatan, Danau Lau Kawar di Kabupaten Karo dan yang terbesar yaitu Danau Toba yang terletak di dataran tinggi di wilayah tengah meliputi 7 (tujuh) kabupaten dengan luas 110.260 ha. Di Pulau Samosir terdapat dua danau kecil yaitu Danau Sidihoni dan Danau Aek Tonang. Juga terdapat potensi air tanah dimana empat diantaranya dari cekungan air bawah permukaan berada pada lintas provinsi.

4) Klimatologi

a. Tipe

Iklim di Sumatera Utara termasuk iklim tropis yang dipengaruhi oleh angin Passat dan angin Muson. Sebagaimana provinsi lainnya di Indonesia, Provinsi Sumatera Utara mempunyai musim kemarau dan musim penghujan. Musim kemarau biasanya terjadi pada bulan Juni sampai dengan September dan musim penghujan biasanya terjadi pada bulan November sampai dengan bulan Maret, diantara kedua musim itu diselingi oleh musim pancaroba.



b. Curah hujan

Curah hujan relatif cukup tinggi yaitu berkisar 1.431 - 2.265 mm per tahun atau rata-rata 2.100 mm per-tahun, dengan jumlah hari hujan rata-rata sebesar 173 - 230 hari per tahun. Pada wilayah kering, curah hujan tahunan rata-rata kurang dari 1.500 mm yang tercatat di beberapa bagian wilayah Simalungun, Tapanuli Selatan, dan Tapanuli Utara, sedang curah hujan tinggi berkisar antara 2.000 sampai 4.500 mm berlangsung sepanjang tahun di daerah Asahan, Dairi, Deli Serdang, Karo, Labuhan Batu, Langkat, Nias, Tapanuli Tengah, dan sebagian besar Tapanuli Selatan. Musim kemarau pada umumnya terjadi pada Juni sampai September dan musim penghujan terjadi pada bulan November sampai Maret.

c. Suhu

Ketinggian permukaan daratan Provinsi Sumatera Utara sangat bervariasi, sebagian daerahnya datar, hanya beberapa meter di atas permukaan laut, beriklim cukup panas bisa mencapai 35,80°C, sebagian daerah berbukit dengan kemiringan yang landai, beriklim sedang dan sebagian lagi berada pada daerah ketinggian yang suhu minimalnya bisa mencapai 13,40° C.

d. Kelembaban

Kelembaban udara rata-rata 78%-91%.

5) Penggunaan Lahan

a. Kawasan lindung

Berdasarkan Keputusan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor SK.579/Menhut-II/2014 tanggal 24 Juni 2014 tentang Kawasan Hutan Provinsi Sumatera Utara, luas kawasan hutan di



Provinsi Sumatera Utara adalah seluas 3.055.795,00 ha atau 42,63 % dari luas Provinsi Sumatera Utara (7.168.068,00 ha).

Berdasarkan fungsinya, kawasan hutan dimaksud terdiri dari :

- Fungsi hutan dalam kawasan lindung (1.633.889,00 ha) :
 - a) Kawasan Suaka Alam (KSA)/ : 427.008,00 Ha
Kawasan Pelestarian Alam (KPA)/
Taman Buru (TB)
 - b) Hutan Lindung (HL) : 1.206.881,00 Ha
- Fungsi hutan dalam kawasan budidaya (1.421.905,00 ha)
 - a) Hutan Produksi Terbatas (HPT) : 641.769,00 Ha
 - b) Hutan Produksi Tetap (HP) : 704.452,00 Ha
 - c) Hutan Produksi yang dapat : 75.684,00 Ha
Dikonversi (HPK)

Di Provinsi Sumatera Utara yang termasuk dalam kawasan hutan lindung adalah kawasan yang berada pada ketinggian 2.000 meter d.p.l. dengan kelerengan lebih besar dari sekitar 45%, mempunyai skor lebih dari 175 menurut Surat Keputusan Menteri Pertanian Nomor 837/KPTS/UM/11/1980, mempunyai jenis tanah sangat peka terhadap erosi, yaitu jenis tanah dengan nilai 5 (regosol, litosol, organosol dan rezina) dan kelas lereng lebih besar dari 15 %, memiliki bercurah hujan tinggi dan mampu meresapkan air ke dalam tanah, termasuk di dalamnya kawasan tanah gambut dengan ketebalan 3 m yang terdapat dibagian hulu sungai/rawa dan yang ditetapkan sebagai hutan lindung. Kawasan ini mencakup juga lahan gambut di Kabupaten Langkat, Humbang Hasundutan, Asahan, Labuhanbatu, Tapanuli Tengah, Mandailing Natal, dan Nias).

b. Kawasan budidaya

Penggunaan lahan untuk kegiatan pertanian yang teridentifikasi hingga Tahun 2012 seluas 380.201 Ha. Kegiatan pertanian mendominasi wilayah Pantai Timur, penggunaan lahan untuk



kegiatan pertanian meliputi areal seluas lebih kurang 57% dari luas areal pertanian Sumatera Utara, sedangkan wilayah Pantai Barat didominasi oleh kegiatan pertanian dan hutan secara relatif berimbang.

Wilayah Pantai Timur yang merupakan dataran rendah merupakan wilayah yang subur, suhu udara tinggi, kelembaban udara tinggi, dan curah hujan juga relatif tinggi, meliputi Kabupaten Langkat, Deli Serdang, Serdang Bedagai, Asahan, Batu Bara, Labuhanbatu, Labuhanbatu Utara, Labuhanbatu Selatan, Kota Binjai, Medan, dan Tebing Tinggi. Kegiatan di wilayah ini umumnya heterogen, dengan kawasan perkotaan yang relatif besar dan prasarana wilayah yang memadai. Wilayah Pantai Barat meliputi Kabupaten Tapanuli Selatan, Padang Lawas Utara, Mandailing Natal, Tapanuli Tengah, Nias, Nias Selatan dan Kota Sibolga, wilayah ini sesuai untuk pengembangan berbagai jenis kegiatan budidaya, terutama perkebunan dan tanaman pangan.

Potensi sumber daya alam Provinsi Sumatera Utara cukup berlimpah, diantaranya tanaman pangan dan hortikultura, perkebunan, perikanan dan pariwisata. Potensi pertanian Provinsi Sumatera Utara diantaranya adalah tanaman pangan, sayuran dan buah-buahan yang sebagian besar telah dipasarkan dengan baik dan sudah di ekspor keluar negeri maupun provinsi lain. Komoditi bidang pertanian pada dataran tinggi Bukit Barisan Sumatera Utara, seperti jagung, kentang, kopi, ikan mas, sapi, bawang merah sangat berpotensi untuk dikembangkan. Untuk perkebunan, luas areal perkebunan rakyat sampai tahun 2013 adalah sekitar 1,1 juta Ha, dengan total produksi sebesar \pm 5,9 juta ton dengan komoditi kelapa sawit, karet, kopi, kakao, tembakau, kelapa dan komoditi lainnya.



Provinsi Sumatera Utara memiliki potensi kelautan dan perikanan, dengan luas laut 110.000 Km² dan panjang pantai 1.300 Km meliputi Pantai Timur (WPP 571) sepanjang 545 Km dan Pantai Barat, Nias, Pulau-Pulau Batu (WPP572) sepanjang 755 Km. Potensi perikanan tangkap sebesar 841.200 ton/tahun terdiri dari potensi perikanan tangkap di WPP 571 Selat Malaka (Pantai Timur) sebanyak 276.00 ton/tahun dan WPP 572 Samudera Hindia (Pantai Barat) sebanyak 565.200 ton/tahun serta penangkapan di perairan umum sebesar 155.797 hektar. Potensi perikanan budidaya terdiri dari Budidaya laut seluas 100.000 hektar, budidaya air tawar seluas 18.647,5 hektar dan air payau seluas 20.000 Ha.

Potensi pariwisata di Provinsi Sumatera Utara meliputi pariwisata alam (kawasan Danau Toba, Berastagi, Kawasan Ekosistem Gunung Leuser dan Bukit Lawang Bahorok, Sibolangit, pantai di Kepulauan Nias, dan lain-lain), pariwisata budaya (Istana Maimun, kediaman Chong A Fie, makam Sisingamangaraja XII, peninggalan megalit di Pulau Nias, dan lain-lain) dan pariwisata minat khusus (Arung Jeram Sei Asahan, Taman Iman, Paralayang di Sitopsi, dan lain-lain).

6) Ketahanan Pangan

Kondisi layanan umum terkait dengan ketahanan pangan dapat digambarkan sebagai berikut:

Berdasarkan Angka Tetap (ATAP) produksi padi tahun 2013 di Sumatera Utara sebesar 3.727.680 ton Gabah Kering Giling (GKG), naik 12.166 ton dibanding produksi tahun 2012 sebesar 3.715.514 ton GKG. Walaupun dari sisi luas lahan terjadi penurunan dari 765.099 hektar pada tahun 2012 menjadi 742.968 hektar pada tahun 2013 akan tetapi untuk produktivitas padi mengalami peningkatan dari 48,56Kw/Ha tahun 2012 menjadi 50,17Kw/Ha pada tahun 2013.



Angka Ramalan II (ARAM II) produksi padi tahun 2014 sebesar 3.604.602 ton GKG, mengalami penurunan sebesar 123.078 ton GKG dibanding produksi ATAP tahun 2013 sebesar 3.727.680 ton GKG. Kondisi ini sama dengan yang terjadi pada tahun 2013 dimana produksi dan luas panen mengalami penurunan akan tetapi untuk produktivitas mengalami peningkatan. Hal ini dikarenakan adanya usaha intensifikasi dengan berbagai upaya dalam rangka peningkatan produktivitas seiring dengan sulitnya melakukan ekstensifikasi luas lahan pertanian walaupun ada upaya dengan melakukan perlindungan terhadap lahan pangan berkelanjutan.

Tabel 6
Luas Panen, Produksi dan Produktivitas Padi dan Palawija
di Sumatera Utara Tahun 2010-2014

Komoditas	Uraian	Satuan	2010	2011	2012	2013	ARAM II 2014*)
Padi	Luas Panen	Ha	754.674	757.547	765.099	742.968	713.254
	Produktivitas	Kw/Ha	47,47	47,62	48,56	50,17	50,54
	Produksi ¹⁾	Ton	3.582.302	3.607.403	3.715.514	3.727.680	3.604.602
Padi Sawah	Luas Panen	Ha	702.308	703.168	714.307	697.344	NA
	Produktivitas	Kw/Ha	48,73	48,93	49,73	51,21	NA
	Produksi ¹⁾	Ton	3.422.264	3.440.262	3.552.373	3.571.141	NA
Padi Ladang	Luas Panen	Ha	52.366	54.379	50.792	45.624	NA
	Produktivitas	Kw/Ha	30,56	30,74	32,12	34,31	NA
	Produksi ¹⁾	Ton	160.038	167.141	163.140	45.624	NA
Jagung	Luas Panen	Ha	274.822	255.291	243.098	211.750	199.337
	Produktivitas	Kw/Ha	50,13	50,71	55,41	55,86	56,02
	Produksi ²⁾	Ton	1.377.718	1.294.645	1.347.124	1.182.928	1.116.649
Kedelai	Luas Panen	Ha	7.803	11.413	5.475	3.126	4.363
	Produktivitas	Kw/Ha	12,10	10,01	9,90	10,33	10,73
	Produksi ³⁾	Ton	9.439	11.426	5.419	3.126	4.680
Kacang Tanah	Luas Panen	Ha	14.520	10.773	10.154	9.377	8.344
	Produktivitas	Kw/Ha	11,33	10,30	11,89	12,11	11,93
	Produksi ³⁾	Ton	16.449	11.093	12.074	11.352	9.952
Kacang Hijau	Luas Panen	Ha	3.110	3.004	3.498	2.130	2.508
	Produktivitas	Kw/Ha	10,76	10,82	10,91	11,01	11,1
	Produksi ³⁾	Ton	3.345	3.250	3.817	2.345	2.783
Ubi Kayu	Luas Panen	Ha	32.402	37.929	38.749	47.141	43.134
	Produktivitas	Kw/Ha	279,48	287,83	302,34	322,06	329,36
	Produksi ⁴⁾	Ton	905.571	1.091.711	1.171.520	1.518.221	1.420.658
Ubi Jalar	Luas Panen	Ha	14.874	15.466	14.595	9.101	10.128
	Produktivitas	Kw/Ha	120,61	123,56	127,84	128,19	131,01
	Produksi ⁴⁾	Ton	179.388	191.104	186.583	116.670	132.687

Sumber : BPS Provsu

Keterangan : 1) = bentuk hasil Gabah Kering Giling (GKG)

2) = bentuk hasil pipilan kering

3) = bentuk hasil biji kering

4) = bentuk hasil umbi basah



Produksi peternakan dan perikanan dapat digambarkan sebagai berikut : peternakan, terdiri dari ternak kecil (kambing, domba, babi), ternak besar kuda, sapi, kerbau dan unggas (ayam ras, ayam kampung, itik manila). Produksi daging ternak besar pada tahun 2013 mengalami penurunan dibanding tahun 2012 untuk semua jenis ternak, sedangkan produksi daging

pada ternak kecil pada tahun 2013 mengalami peningkatan dibanding tahun 2012 untuk semua jenis ternak. Tahun 2014 produksi daging mengalami peningkatan dibanding tahun 2013 untuk semua jenis ternak. Produksi telur terus mengalami peningkatan dari tahun 2010 hingga tahun 2014.

Produksi ikan Sumatera Utara pada tahun 2014 sebesar 770.540,47 ton terdiri atas 515.325 ton ikan laut, 50.471,27 ikan perairan umum dan 204.744,2 perikanan darat. Produksi tahun 2014 meningkat dibanding tahun 2013 sebesar 756.922,3ton, yang terdiri atas 510.551,6 ton ikan laut, 52.580,7 ton ikan perairan umum dan 193.790,00 ton perikanan darat.

Tabel 7
Produksi Peternakan Provinsi Sumatera Utara
Tahun 2010-2014 (Ton)

No	Uraian	2010	2011	2012	2013	2014*)
1	Kuda	98,98	101,45	100.02	56.79	62.41
2	Sapi	15.707,60	18.299,60	24,546.60	18,436.60	25,695.67
3	Kerbau	6.191,89	4.942,37	7,307.89	3,395.12	7,759.88
4	Kambing	3.188,99	3.268,71	3,352.55	3,469.81	3,556.55
5	Domba	1.549,87	1.588,58	1,706.98	1,852.71	1,901.62
6	Babi	35.206,21	35.786,36	38,221.38	39,211.68	39,584.19
7	Unggas	66.536,18	67.056,96	60,393.01	69,427.20	72.785.40
8	Telur	92.832,87	104.939,74	131,261.33	164,977.21	176,193.09

Sumber : BPS Provinsi Sumatera Utara (SUDA 2013-2014)

Keterangan : *) Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Sumatera Utara, 2015



Tabel 8
Produksi Perikanan Provinsi Sumatera Utara
Tahun 2010-2014

No	Uraian	2010	2011	2012	2013	2014*)
1	Laut	363.158,30	363.158,30	549.479,40	510.551,60	515.325
2	Perairan Umum	17.494,10	23.131,50	24.491,90	52.580,70	50.471,27
3	Darat	118.942,91	118.942,91	NA	193.790,00	204.744,2

Sumber : BPS Provinsi Sumatera Utara (SUDA 2013-2014)

Keterangan : *) Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sumatera Utara, 2015

D.3.2. PERTUMBUHAN EKONOMI

Secara makro kinerja perekonomian Provinsi Sumatera Utara yang diukur berdasarkan atas perubahan nilai Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) atas dasar harga konstan 2010. Pertumbuhan ekonomi Sumatera Utara tahun 2014 mencapai 5,23 % melebihi pencapaian pertumbuhan ekonomi nasional sebesar 5,03 % pada tahun yang sama.

Tabel 9
Laju Pertumbuhan PDRB Sumatera Utara Menurut Lapangan Usaha
Tahun Dasar 2010 Tahun 2011-2014 (persen)

Lapangan Usaha/ Kategori	Tahun			
	2011	2012	2013 ^{*)}	2014 ^{**)}
A. Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	5,88	5,31	4,71	4,37
B. Pertambangan & Penggalian	10,72	11,95	26,03	5,33
C. Industri Pengolahan	3,22	5,64	4,84	2,97
D. Pengadaan Listrik, dan Gas	13,87	-3,03	-3,88	3,71
E. Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah dan Daur Ulang	6,30	5,13	5,68	6,04
F. Konstruksi	8,46	6,67	7,66	6,79
G. Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	7,13	7,91	5,57	6,94



Lapangan Usaha/ Kategori	Tahun			
	2011	2012	2013 ^{*)}	2014 ^{**)}
H. Transportasi dan Pergudangan	10,24	8,25	7,41	5,71
I. Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	8,52	6,75	7,81	6,48
J. Informasi dan Komunikasi	9,96	8,79	7,78	7,23
K. Jasa Keuangan dan Asuransi	8,71	10,09	9,99	2,84
L. Real Estate	9,66	6,96	6,94	6,59
M,N. Jasa Perusahaan	10,68	6,04	6,68	6,76
O. Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	8,93	2,53	3,34	6,92
P. Jasa Pendidikan	4,79	4,94	8,34	6,37
Q. Jasa Kesehatan, dan Kegiatan Sosial	16,00	10,58	10,82	7,00
R,S,T,U. Jasa Lainnya	9,00	7,83	7,45	7,04
PDRB	6,66	6,45	6,08	5,23

Sumber : BPS Provinsi Sumatera Utara

Keterangan : ^{*)} Angka sementara

^{**)} Angka sangat sementara

Kinerja perekonomian Sumatera Utara pada tahun 2014 bila dibandingkan dengan tahun 2013, yang digambarkan oleh PDRB atas dasar harga konstan 2010, mengalami peningkatan sebesar 5,23%. Peningkatan ini didukung oleh pertumbuhan positif pada semua lapangan usaha. Lapangan usaha informasi dan komunikasi merupakan lapangan usaha yang berhasil mencapai pertumbuhan tertinggi yaitu sebesar 7,23% dibanding dengan lapangan usaha lainnya. Disusul oleh lapangan usaha jasa lainnya 7,04%, lapangan usaha jasa kesehatan dan kegiatan sosial 7,00%, lapangan usaha perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil dan sepeda motor 6,94%, lapangan usaha administrasi pemerintah, pertahanan dan jaminan sosial wajib 6,92%, lapangan usaha konstruksi 6,79%, lapangan usaha jasa perusahaan 6,76%, lapangan usaha *real state* 6,59%, lapangan usaha penyediaan akomodasi dan makan minum 6,48 persen, lapangan usaha jasa pendidikan 6,37%, lapangan usaha pengadaan air, pengelolaan sampah dan daur ulang 6,04%, lapangan usaha transportasi dan pergudangan 5,71%, lapangan usaha pertambangan dan penggalian 5,33% dan sektor pertanian, kehutanan dan perikanan 4,37%. Sedangkan 3 (tiga) lapangan usaha lainnya tumbuh di bawah 4%.



Tabel 10
PDRB Sumatera Utara Menurut Lapangan Usaha/Kategori
2013-2014 (miliar rupiah)

Lapangan Usaha/Kategori	Atas Dasar Harga Berlaku		Atas Dasar Harga Konstan 2010	
	Tahun 2013 ^{*)}	Tahun 2014 ^{**)}	Tahun 2013 ^{*)}	Tahun 2014 ^{**)}
1. Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	115.194,75	121.435,44	99.899,57	104.269,61
2. Pertambangan & Pengalihan	6.581,44	6.944,81	5.211,65	5.489,37
3. Industri Pengolahan	93.241,47	104.224,00	80.648,62	83.042,09
4. Pengadaan Listrik, dan Gas	586,21	514,67	531,92	551,65
5. Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah dan Daur Ulang	441,82	501,06	373,84	396,43
6. Konstruksi	60.997,62	71.225,77	48.144,38	51.411,36
7. Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	78.324,82	89.597,00	69.025,21	73.817,64
8. Transportasi dan Pergudangan	22.990,25	25.923,44	18.075,25	19.107,06
9. Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	10.598,78	12.283,32	8.663,61	9.225,42
10. Informasi dan Komunikasi	9.594,39	10.287,35	9.625,11	10.321,29
11. Jasa Keuangan dan Asuransi	15.738,02	17.155,25	12.738,47	13.100,35
12. Real Estate	20.078,79	22.786,42	16.072,86	17.132,22
13. M,N. Jasa Perusahaan	4.224,04	4.836,42	3.395,10	3.624,70
14. Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	16.427,96	18.832,08	12.940,56	13.836,00
15. Jasa Pendidikan	8.848,51	9.930,06	7.970,45	8.478,26
16. Jasa Kesehatan, dan Kegiatan Sosial	4.020,16	4.604,43	3.554,52	3.803,27
17. Jasa Lainnya	2.332,95	2.690,05	1.908,14	2.042,55
PDRB	470.221,98	523.771,57	398.779,25	419.649,28

Sumber : BPS Provinsi Sumatera Utara

Keterangan : ^{*)} Angka sementara

^{**)} Angka sangat sementara

Pada tahun 2014 PDRB Sumatera Utara atas dasar harga berlaku mencapai Rp. 523,77 triliun, sedangkan berdasar atas dasar harga konstan



2010 tercapai sebesar Rp. 419,65 triliun. Atas dasar harga berlaku, lapangan usaha yang menghasilkan nilai tambah bruto yang terbesar pada tahun 2014 adalah lapangan usaha pertanian, kehutanan, dan perikanan sebesar Rp. 121,44 triliun, disusul oleh lapangan usaha industri pengolahan sebesar Rp.104,22 triliun, lapangan usaha perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil dan sepeda motor sebesar Rp. 89,60 triliun, lapangan usaha konstruksi sebesar Rp. 71,23 triliun, lapangan usaha transportasi dan pergudangan sebesar Rp. 25,92 triliun, lapangan usaha *real estate* sebesar Rp.22,79 triliun, lapangan usaha administrasi pemerintahan, pertahanan dan jaminan sosial wajib sebesar Rp. 18,83 triliun, lapangan usaha jasa keuangan dan asuransi sebesar Rp. 17,16 triliun, lapangan usaha penyediaan akomodasi dan makan minum sebesar Rp.12,28 triliun, lapangan usaha informasi dan komunikasi sebesar Rp.10,29 triliun, lapangan usaha jasa pendidikan sebesar Rp. 9,93 triliun, lapangan usaha pertambangan dan penggalian sebesar Rp. 6,94 triliun, lapangan usaha jasa perusahaan sebesar Rp. 4,84 triliun, lapangan usaha jasa kesehatan dan kegiatan sosial sebesar Rp.4,60 triliun, dan lapangan usaha jasa lainnya sebesar Rp. 2,69 triliun. Lapangan usaha lainnya yaitu lapangan usaha pengadaan listrik, dan gas menghasilkan nilai tambah bruto sebesar Rp. 514,67 miliar, dan lapangan usaha pengadaan air, pengelolaan sampah, dan daur ulang sebesar Rp. 501,06 miliar.

Pada tahun 2014, lapangan usaha pertanian, kehutanan, dan perikanan mendominasi struktur PDRB Sumatera Utara sebesar 23,18%, diikuti oleh lapangan usaha industri pengolahan sebesar 19,90%, lapangan usaha perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil dan sepeda motor sebesar 17,11%, lapangan usaha konstruksi sebesar 13,60%, lapangan usaha transportasi dan pergudangan sebesar 4,95%, lapangan usaha *real estate* sebesar 4,35%, lapangan usaha administrasi pemerintahan, pertahanan dan jaminan sosial wajib sebesar 3,60%, lapangan usaha jasa keuangan dan asuransi sebesar 3,28%, lapangan usaha penyediaan



akomodasi dan makan minum sebesar 2,35%, lapangan usaha informasi dan komunikasi sebesar 1,96%, lapangan usaha jasa pendidikan sebesar 1,90%, dan lapangan usaha pertambangan dan penggalian sebesar 1,33%. Sedangkan 5 (lima) lapangan usaha lainnya memiliki peranan di bawah 1%.

Tabel 11
PDRB Sumatera Utara menurut Komponen Pengeluaran
2013-2014 (miliar rupiah)

Komponen Pengeluaran	Atas Dasar Harga Berlaku		Atas Dasar Harga Konstan 2010	
	Tahun 2013 ^{*)}	Tahun 2014 ^{**)}	Tahun 2013 ^{*)}	Tahun 2014 ^{**)}
1. Konsumsi Rumah Tangga	254.143,00	287.749,04	204.960,54	215.632,89
2. Konsumsi LNPR	4.675,82	5.128,86	4.329,80	4.533,95
3. Konsumsi Pemerintah	37.073,84	41.220,31	29.486,57	30.757,35
4. Pembentukan Modal Tetap Domestik Bruto	149.264,33	165.345,85	120.540,43	124.069,63
5. Perubahan Inventori	6.064,22	5.770,57	5.667,68	4.290,17
6. Ekspor Barang dan Jasa	170.702,98	182.703,65	177.412,25	185.076,47
7. Dikurangi Impor Barang dan Jasa	151.702,21	164.146,71	143.618,02	144.711,18
PDRB	470.221,98	523.771,57	398.779,25	419.649,28

Sumber : BPS Provinsi Sumatera Utara

Keterangan : ^{*)} Angka sementara

^{**)} Angka sangat sementara

Pada tahun 2014, komponen konsumsi rumah tangga bila dibandingkan dengan tahun 2013, merupakan komponen pengeluaran yang mencapai pertumbuhan tertinggi sebesar 5,21%, atau dari Rp.204,96 triliun pada tahun 2013 menjadi Rp. 215,63 triliun pada tahun 2014. Disusul oleh komponen pengeluaran konsumsi lembaga non profit meningkat 4,72% atau dari Rp.4,33 triliun pada tahun 2013 menjadi Rp.4,53 triliun pada tahun 2014. Komponen ekspor barang dan jasa meningkat 4,32% atau dari Rp.177,41 triliun pada tahun 2013 menjadi Rp.185,08 triliun pada tahun 2014. Komponen pengeluaran konsumsi pemerintah meningkat 4,31%, atau dari Rp.29,49 triliun pada tahun 2013 menjadi Rp.30,76 triliun pada tahun 2014.



Komponen pengeluaran pembentukan modal tetap domestik bruto meningkat 2,93% atau dari Rp. 120,54 triliun pada tahun 2013 menjadi Rp. 124,07 triliun pada tahun 2014. dan Komponen impor barang dan jasa naik 0,76% atau dari Rp. 143,62 triliun pada tahun 2013 menjadi Rp. 144,71 triliun pada tahun 2014.

Atas dasar harga berlaku, komponen pengeluaran konsumsi rumah tangga naik dari Rp.254,14 triliun pada tahun 2013 menjadi Rp.287,75 triliun pada tahun 2014 atau naik 13,22%. Komponen pengeluaran konsumsi lembaga non profit atas dasar harga berlaku juga naik dari Rp.4,68 triliun pada tahun 2013 menjadi Rp.5,13 triliun pada tahun 2014, atau naik 9,69%. Komponen pengeluaran konsumsi pemerintah atas dasar harga berlaku meningkat dari Rp.37,07 triliun pada tahun 2013 menjadi Rp. 41,22 triliun pada tahun 2014, atau meningkat 11,18%. Komponen pengeluaran pembentukan modal tetap domestik bruto (PMTB) atas dasar harga berlaku mengalami peningkatan dari Rp.149,26 triliun pada tahun 2013 menjadi Rp.165,35 triliun pada tahun 2014, atau naik 10,77%.

Nilai ekspor barang dan jasa atas dasar harga berlaku naik dari Rp.170,70 triliun pada tahun 2013 menjadi Rp.182,70 triliun pada tahun 2014, atau naik 7,03%. Nilai impor barang dan jasa Sumatera Utara atas dasar harga berlaku meningkat dari Rp.151,70 triliun pada tahun 2013 menjadi Rp.164,15 triliun pada tahun 2014, atau naik 8,20%.

Komponen pengeluaran konsumsi rumah tangga pada tahun 2014 masih mendominasi pembentukan nilai PDRB atas dasar harga berlaku Sumatera Utara, sebesar 54,94%. Disusul oleh komponen pengeluaran pembentukan modal tetap domestik bruto 31,57%, komponen pengeluaran konsumsi pemerintah 7,87%, komponen ekspor barang dan jasa netto 3,54% (ekspor barang dan jasa 34,88% dan impor barang dan jasa 31,34%),



komponen pengeluaran perubahan inventori 1,10% dan komponen pengeluaran konsumsi lembaga non profit 0,98%.

Terhadap besarnya sumbangan masing-masing lapangan usaha dalam menciptakan laju pertumbuhan ekonomi Sumatera Utara pada tahun 2014 sebesar 5,23%, lapangan usaha perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil dan sepeda motor memberi sumbangan 1,20%, disusul lapangan usaha pertanian, kehutanan, dan perikanan sebesar 1,10%, lapangan usaha konstruksi 0,82%, lapangan usaha industri pengolahan 0,60%, lapangan usaha *real estate* 0,27%, lapangan usaha transportasi dan pergudangan 0,26%, lapangan usaha administrasi pemerintahan, pertahanan dan jaminan sosial wajib 0,22%, lapangan usaha informasi dan komunikasi 0,17%, lapangan usaha penyediaan akomodasi dan makan minum 0,14%, dan lapangan usaha jasa pendidikan sebesar 0,13% dan Sedangkan 7 (tujuh) lapangan usaha lainnya menyumbang pertumbuhan di bawah 0,1%.

Dari sisi penggunaan, pertumbuhan ekonomi Sumatera Utara tahun 2014 yang mencapai 5,23%, komponen pengeluaran konsumsi rumah tangga memberi sumbangan sebesar 2,68%, disusul oleh komponen pengeluaran ekspor barang dan jasa neto 1,65% (ekspor barang dan jasa 1,92% dan impor barang dan jasa 0,27%), komponen pengeluaran pembentukan modal tetap domestik bruto 0,89%, komponen pengeluaran konsumsi pemerintah 0,32%, komponen pengeluaran konsumsi lembaga non profit 0,05% dan komponen pengeluaran perubahan inventori -0,35%.

Laju pertumbuhan ekonomi Kabupaten/Kota Tahun 2013 di Sumatera Utara atas dasar harga konstan 2000 menunjukkan pertumbuhan yang positif, pada kisaran 3 sampai dengan 12%. Kabupaten Deli Serdang merupakan pertumbuhan ekonomi tertinggi sebesar 12,79%, disusul oleh Kota Tebing Tinggi sebesar 6,91%, Kabupaten Tapanuli Tengah sebesar 6,85%, Kota Binjai sebesar 6,58%, dan Kabupaten Samosir sebesar



6,46%. Sedangkan Kabupaten Batu Bara merupakan kabupaten dengan laju pertumbuhan paling rendah sebesar 3,35%, diikuti Kota Medan sebesar 4,30%, Kabupaten Simalungun sebesar 4,48%, Kota Tanjungbalai sebesar 4,52% dan Kabupaten Karo sebesar 4,72%.

Tabel 12
Laju Pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto Sumatera Utara
Atas Dasar Harga Konstan 2000 Menurut Kabupaten/Kota Tahun 2009-2013 (Persen)

Kabupaten/Kota	Tahun				
	2009	2010	2011	2012	2013
01. Nias	6,62	6,75	6,81	6,24	6,43
02. Mandailing Natal	6,40	6,41	6,40	6,41	6,41
03. Tapanuli Selatan	4,05	5,06	5,30	5,22	5,21
04. Tapanuli Tengah	5,76	6,17	6,28	6,35	6,85
05. Tapanuli Utara	4,98	5,56	5,54	5,95	6,05
06. Tobasamosir	5,30	5,50	5,26	5,52	5,14
07. Labuhanbatu	4,88	5,15	5,72	6,11	6,00
08. Asahan	4,67	4,97	5,37	5,57	5,83
09. Simalungun	4,92	5,12	5,81	6,06	4,48
10. Dairi	4,72	5,02	5,28	5,44	5,46
11. Karo	5,17	6,03	6,59	6,34	4,72
12. Deli Serdang	5,55	5,98	6,01	6,06	12,79
13. Langkat	5,04	5,74	5,78	5,66	5,97
14. Nias Selatan	4,08	4,12	4,46	5,78	5,16
15. Humbang Hasundutan	5,32	5,45	5,94	5,99	6,03
16. Pakpak Bharat	5,83	6,77	5,98	6,02	5,86
17. Samosir	5,10	5,59	5,96	6,07	6,46
18. Serdang Bedagai	5,92	6,14	5,98	6,00	5,97
19. Batubara	4,30	4,65	5,11	4,37	3,35
20. Padang Lawas Utara	5,70	6,74	6,81	6,38	6,13
21. Padang Lawas	5,14	5,56	6,39	6,31	6,12
22. Labuhanbatu Selatan	4,94	5,68	6,21	6,38	6,05
23. Labuhanbatu Utara	5,29	5,61	6,13	6,33	6,33
24. Nias Utara	6,59	6,73	6,68	5,88	6,25
25. Nias Barat	5,66	6,30	6,76	4,93	5,81
26. Sibolga	5,70	6,04	5,09	5,34	5,80
27. Tanjungbalai	4,17	4,75	4,86	4,99	4,52
28. Pematangsiantar	5,36	5,85	6,02	5,71	5,16
29. Tebing Tinggi	5,95	6,04	6,67	6,75	6,91
30. Medan	6,55	7,16	7,69	7,63	4,30
31. Binjai	5,87	6,07	6,28	6,34	6,48
32. Padangsidimpuan	5,83	5,81	5,88	6,23	6,20
33. Gunungsitoli	7,45	6,24	6,46	6,28	6,35
Sumatera Utara	5,07	6,42	6,63	6,22	6,01

Sumber : Badan Pusat Statistik Provsu

Pada tahun 2013, Kota Medan, Kabupaten Deli Serdang, Kabupaten Langkat dan Kabupaten Batu Bara merupakan kabupaten/kota yang



memberikan kontribusi terbesar terhadap pembentukan nilai PDRB atas dasar harga berlaku Sumatera Utara masing-masing sebesar 29,64%, 14,82 %, 6,24 %, dan 5,55 %, sedangkan kabupaten/kota lainnya juga memberikan kontribusi tetapi dalam jumlah persentase yang relatif kecil. Kabupaten Asahan sebesar 4,34%, Kabupaten Simalungun sebesar 3,64%, Kabupaten Serdang Bedagai 3,48 %, Kabupaten Labuhanbatu 2,70 %, Kabupaten Labuhanbatu Utara 2,60 %, Kabupaten Karo 2,36 %, Kabupaten Labuhanbatu Selatan 2,28%, Kota Binjai 1,84 %, Kabupaten Mandailing Natal 1,38%, Kabupaten Dairi 1,32%, Kota Pematangsiantar 1,31%, Kabupaten Tapanuli Utara 1,27%, Kabupaten Tobasamosir 1,24%, Kabupaten Tapanuli Selatan 1,11%, dan Kota Tanjungbalai 1,00%. Kontribusi di bawah 1 % yaitu Kabupaten Humbang Hasundutan 0,89%, Kota Tebing Tinggi 0,86%, Kabupaten Tapanuli Tengah 0,82%, Kabupaten Nias Selatan 0,73%, Kota Gunungsitoli 0,72%, Kota Padangsidimpuan 0,71%, Kabupaten Padang Lawas Utara 0,62 %, Kabupaten Padang Lawas 0,58%, Kabupaten Samosir 0,55 %, Kota Sibolga 0,53 %, Kabupaten Nias 0,41%, Kabupaten Nias Utara 0,41%, Kabupaten Nias Barat 0,21%, dan Kabupaten Pakpak Bharat 0,12 %.

Tabel 13
Produk Domestik Regional Bruto Sumatera Utara Atas Dasar Harga Berlaku
Menurut Kabupaten/Kota Tahun 2009-2013 (Milyar Rupiah)

Kabupaten/Kota	Tahun				
	2009	2010	2011	2012	2013
01. N i a s	982,94	1 140,43	1 299,65	1 439,73	1 638,83
02. Mandailing Natal	3 385,34	3 717,81	4 276,71	4 808,31	5 573,13
03. Tapanuli Selatan	2 761,51	3 145,18	3 573,33	4 006,03	4 485,93
04. Tapanuli Tengah	2 000,27	2 296,07	2 572,05	2 880,68	3 304,28
05. Tapanuli Utara	3 392,63	3 807,80	4 157,53	4 564,75	5 121,10
06 Tobasamosir	3 056,88	3 429,77	3 857,58	4 395,20	5 010,99
07 Labuhanbatu	6 658,79	7 610,59	8 550,34	9 526,34	10 894,86
08 A s a h a n	10 435,94	11 931,68	13 650,24	15 376,29	17 525,62
09 Simalungun	9 272,02	10 360,95	11 627,58	13 055,30	14 694,53
10 D a i r i	3 393,00	3 777,74	4 226,28	4 731,42	5 345,42
11 K a r o	5 646,54	6 676,02	7 634,39	8 512,71	9 550,52
12 Deli Serdang	34 172,48	39 804,28	45 125,83	50 667,52	59 862,75
13 L a n g k a t	14 789,83	17 037,98	19 565,25	22 166,50	25 189,51



Kabupaten/Kota	Tahun				
	2009	2010	2011	2012	2013
14 Nias Selatan	2 014,35	2 244,82	2 442,56	2 678,83	2 947,37
15 Humbang Hasundutan	2 189,65	2 468,65	2 791,89	3 179,57	3 612,23
16 Pakpak Bharat	290,30	331,84	373,19	420,52	479,46
17 Samosir	1 519,32	1 669,60	1 835,40	2 019,69	2 240,76
18 Serdang Bedagai	8 490,36	9 697,60	10 905,56	12 313,15	14 041,79
19 Batubara	14 517,23	16 590,57	18 994,98	21 006,93	22 418,91
20 Padang Lawas Utara	1 424,47	1 725,25	1 957,90	2 189,62	2 487,98
21 Padang Lawas	1 349,42	1 597,82	1 850,14	2 067,67	2 333,84
22 Labuhanbatu Selatan	6 284,98	7 161,09	8 094,36	9 032,13	9 189,50
23 Labuhanbatu Utara	5 472,19	6 288,95	7 101,85	7 984,44	10 501,60
24 Nias Utara	998,84	1 136,17	1 293,29	1 428,39	1 618,49
25 Nias Barat	507,06	589,40	673,15	747,01	844,57
26 Sibolga	1 361,12	1 543,78	1 698,29	1 884,81	2 125,85
27 Tanjungbalai	2 765,28	3 088,52	3 373,86	3 692,18	4 025,36
28 Pematangsiantar	3 746,22	4 163,38	4 531,59	4 897,69	5 281,37
29 Tebing Tinggi	2 033,00	2 302,74	2 608,91	2 964,04	3 453,99
30 Medan	72 630,21	83 315,02	93 610,76	105 400,44	119 715,48
31 Binjai	4 308,94	4 945,36	5 701,43	6 593,39	7 428,96
32 Padangsidimpuan	1 900,04	2 099,89	2 304,04	2 561,84	2 866,37
33 Gunungsitoli	1 781,86	2 009,06	2 305,74	2 543,99	2 927,31
Sumatera Utara	236 353,62	275 056,51	314 372,44	351 118,16	403 933,05

Sumber : Badan Pusat Statistik Provsu

Tabel 14
 Produk Domestik Regional Bruto Sumatera Utara Atas Dasar Harga Konstan 2000
 Menurut Kabupaten/Kota Tahun 2009-2013 (Milyar Rupiah)

Kabupaten/Kota	Tahun				
	2009	2010	2011	2012	2013
01. Nias	478,51	510,79	545,56	579,58	616,87
02. Mandailing Natal	1 909,49	2 031,96	2 161,96	2 300,54	2 447,98
03. Tapanuli Selatan	1 697,91	1 783,88	1 878,42	1 976,50	2 099,00
04. Tapanuli Tengah	1 128,83	1 198,51	1 273,80	1 354,65	1 447,37
05. Tapanuli Utara	1 529,40	1 614,37	1 703,75	1 805,19	1 914,42
06. Tobasamosir	1 670,06	1 761,93	1 854,52	1 956,87	2 057,48
07. Labuhanbatu	3 101,70	3 261,57	3 448,18	3 658,83	3 879,01
08. Asahan	5 134,42	5 389,83	5 679,51	5 995,60	6 345,25
09. Simalungun	5 299,69	5 571,11	5 894,59	6 251,83	6 531,90
10. Dairi	1 952,59	2 050,67	2 158,86	2 276,25	2 400,45



Kabupaten/Kota	Tahun				
	2009	2010	2011	2012	2013
11. Karo	3 175,60	3 367,19	3 589,13	3 816,81	3 996,71
12. Deli Serdang	13 698,06	14 516,73	15 389,01	16 322,03	18 409,80
13. Langkat	6 819,23	7 210,56	7 627,00	8 058,65	8 527,34
14. Nias Selatan	1 182,90	1 231,58	1 286,52	1 360,87	1 431,03
15. Humbang Hasundutan	954,55	1 006,56	1 066,34	1 130,26	1 198,35
16. Pakpak Bharat	154,42	164,88	174,74	185,26	196,13
17. Samosir	1 002,46	1 058,49	1 121,62	1 189,69	1 266,56
18. Serdang Bedagai	4 287,25	4 550,68	4 822,99	5 112,21	5 417,22
19. Batubara	7 066,22	7 394,49	7 772,03	8 111,47	8 382,81
20. Padang Lawas Utara	734,28	783,76	837,15	890,59	945,20
21. Padang Lawas	710,76	750,29	798,26	848,65	900,59
22. Labuhanbatu Selatan	2 993,33	3 163,22	3 359,75	3 574,05	3 393,58
23. Labuhanbatu Utara	2 685,09	2 835,77	3 009,51	3 200,06	3 800,37
24. Nias Utara	459,23	490,12	522,87	553,64	588,25
25. Nias Barat	239,04	254,10	271,27	284,65	301,20
26. Sibolga	697,92	740,04	777,72	819,28	866,83
27. Tanjungbalai	1 333,34	1 396,69	1 464,56	1 537,57	1 607,03
28. Pematangsiantar	1 926,30	2 039,00	2 161,82	2 285,31	2 403,10
29. Tebing Tinggi	1 099,24	1 165,58	1 243,37	1 327,25	1 419,00
30. Medan	33 430,05	35 822,22	38 576,23	41 519,32	43 303,96
31. Binjai	1 905,18	2 020,90	2 147,82	2 284,05	2 426,09
32. Padangsidimpuan	884,66	936,05	991,12	1 052,89	1 118,07
33. Gunungsitoli	817,03	867,97	924,07	982,09	1 044,89
Sumatera Utara	111 559,22	118 718,90	126 587,62	134 463,95	142 537,12

Sumber : Badan Pusat Statistik Provsu

Tabel 15
 Produk Domestik Regional Bruto per Kapita Sumatera Utara
 Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Kabupaten/Kota Tahun 2009-2013 (Rupiah)

Kabupaten/Kota	Tahun				
	2009	2010	2011	2012	2013
01 Nias	7 493 663	8 680 596	9 794 032	10 775 535	12 187 447
02 Mandailing Natal	8 421 832	9 181 016	10 418 838	11 643 290	13 219 666
03 Tapanuli Selatan	10 421 792	11 921 917	13 399 807	14 833 755	16 550 022
04 Tapanuli Tengah	6 548 246	7 377 349	8 020 490	8 777 140	9 846 097
05 Tapanuli Utara	12 263 154	13 635 481	14 692 361	15 970 560	17 755 285
06 Tobasamosir	17 701 752	19 810 463	22 052 114	24 955 767	28 242 211
07 Labuhanbatu	16 312 180	18 333 913	20 041 430	22 040 815	24 497 588
08 Asahan	15 724 277	17 854 521	20 127 633	22 430 374	25 299 321
09 Simalungun	11 313 479	12 670 540	14 071 628	15 686 321	17 529 062
10 Dairi	12 573 501	13 988 884	15 502 978	17 254 559	19 367 097
11 Karo	16 350 255	19 022 157	21 183 934	23 139 082	25 440 787
12 Deli Serdang	19 582 848	22 231 676	24 458 632	26 749 612	30 854 178
13 Langkat	15 329 540	17 609 678	19 974 161	22 431 480	25 264 322
14 Nias Selatan	7 006 615	7 748 575	8 296 801	8 990 138	9 771 060



Kabupaten/Kota	Tahun				
	2009	2010	2011	2012	2013
15 Humbang Hasundutan	12 900 615	14 381 889	15 988 874	17 987 365	20 183 211
16 Pakpak Bharat	7 299 834	8 192 597	8 926 340	9 854 500	10 998 542
17 Samosir	12 614 531	13 953 708	15 191 920	16 607 508	18 299 543
18 Serdang Bedagai	14 271 859	16 332 092	18 217 870	20 480 925	23 252 929
19 Batubara	38 856 947	44 137 361	49 684 117	53 990 109	57 211 227
20 Padang Lawas Utara	6 487 097	7 658 950	8 487 325	9 266 670	10 285 985
21 Padang Lawas	6 151 382	7 148 108	7 930 884	8 626 559	9 499 042
22 Labuhanbatu Selatan	20 103 050	22 648 778	24 789 866	27 342 238	30 589 642
23 Labuhanbatu Utara	19 136 783	21 654 269	24 082 333	26 967 991	30 543 882
24 Nias Utara	7 888 143	8 929 038	10 034 573	10 968 554	12 311 351
25 Nias Barat	6 209 717	7 204 768	8 148 368	8 967 766	10 083 011
26 Sibolga	16 104 340	18 273 656	19 951 909	22 041 307	24 774 739
27 Tanjungbalai	18 097 251	19 997 561	21 338 683	22 983 634	24 778 443
28 Pematangsiantar	16 008 238	17 739 296	18 981 676	20 286 468	21 750 775
29 Tebing Tinggi	14 142 283	15 853 818	17 603 851	19 696 039	22 636 619
30 Medan	34 812 509	39 718 983	43 932 544	48 908 864	55 151 219
31 Binjai	17 672 425	20 090 526	22 723 829	25 904 991	28 792 287
32 Padangsidimpuan	10 260 996	10 963 728	11 749 507	12 834 953	14 109 915
33 Gunungsitoli	14 258 493	15 919 381	17 930 540	19 495 782	22 110 915
Sumatera Utara	18 381 013	21 108 505	23 778 381	26 184 746	29 722 268

Sumber : Badan Pusat Statistik Provsu

Pencapaian kinerja perekonomian Sumatera Utara di tahun 2014 didukung oleh inflasi, yang berdasarkan pengamatan di 4 kota penghitungan inflasi, yakni Kota Medan sebesar 8,24%, Kota Pematangsiantar sebesar 7,94 %, Kota Sibolga sebesar 8,36 %, dan Kota Padangsidimpuan sebesar 7,38 %. Inflasi Sumatera Utara pada tahun 2014 mencapai 8,17%, lebih rendah dari inflasi Nasional yang mencapai 8,36%.



Tabel 16
Perkembangan Inflasi 4 Kota di Provinsi Sumatera Utara dan Nasional
2002-2014 (Persen)

TAHUN	MEDAN	P. SIANTAR	SIBOLGA	P. SIDIMPUAN	SUMUT	NASIONAL
2002	9,49	9,41	11,58	10,18	9,59	10,03
2003	4,46	2,51	3,94	4,07	4,23	5,06
2004	6,64	7,31	6,64	8,99	6,80	6,40
2005	22,91	19,67	22,39	18,47	22,41	17,11
2006	5,97	6,06	5,03	10,02	6,11	6,60
2007	6,42	8,37	7,13	5,87	6,60	6,59
2008	10,63	10,16	12,36	12,34	10,72	11,06
2009	2,69	2,72	1,59	1,87	2,61	2,78
2010	7,65	9,68	11,83	7,42	8,00	6,96
2011	3,54	4,25	3,71	4,66	3,67	3,79
2012	3,79	4,73	3,30	3,54	3,86	4,30
2013	10,09	12,02	10,08	7,82	10,18	8,38
2014	8,24	7,94	8,36	7,38	8,17	8,36

Sumber : BPS Provsu

Kegiatan perdagangan luar negeri Sumatera Utara hingga bulan Desember 2014 telah mencatat surplus sebesar US\$ 4,31 miliar dengan ekspor sebesar US\$ 9,36 miliar dan impor sebesar US\$ 5,05 miliar.

Tabel 17
Neraca Perdagangan Luar Negeri Sumatera Utara 2002-2014

Tahun	Ekspor		Impor		Neraca Perdagangan Luar Negeri (Ribu US\$)
	Berat Bersih (Ton)	Nilai FoB (Ribu US\$)	Berat Bersih (Ton)	Nilai CiF (Ribu US\$)	
2002	6 622 573	2 891 996	2 684 055	819 298	2 072 698
2003	5 490 113	2 687 877	2 343 112	679 810	2 008 067
2004	7 512 890	4 239 409	3 221 858	953 359	3 286 050
2005	8 174 804	4 563 075	3 717 119	1 178 006	3 385 069
2006	8 704 825	5 523 900	4 404 172	1 456 987	4 066 913
2007	7 841 872	7 082 899	4 745 767	2 109 879	4 973 020
2008	8 520 892	9 261 976	5 880 760	3 696 064	5 565 913
2009	8 058 927	6 460 118	5 236 554	2 724 234	3 735 884
2010	7 992 103	9 147 778	6 171 734	3 576 248	5 571 530
2011	8 161 003	11 883 268	6 718 063	4 953 462	6 929 806
2012	8 695 942	10 393 936	6 813 898	5 164 751	5 229 185
2013	9 275 891	9 598 008	6 949 116	5 108 512	4 489 497
2014	9 087 526	9 361 110	7 391 305	5 046 514	4 314 598

Sumber : BPS Provsu

BAB II. PERENCANAAN KINERJA

A. PERENCANAAN STRATEGIS

Arah pembangunan Provinsi Sumatera Utara selama 5 (lima) tahun telah disusun dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) yaitu periode Tahun 2013-2018, yang antara lain memuat tentang arah dan kebijakan pembangunan jangka menengah daerah dan disinergikan dengan potensi daerah serta aspirasi masyarakat, melalui pelaksanaan Musyawarah Pembangunan Daerah (MUSRENBANG).

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) yaitu periode Tahun 2013-2018 tersebut tentu memuat VISI dan MIS Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih, yang akan diupayakan untuk diwujudkan selama 5 (lima) Tahun melalui tahapan-tahapan sebagaimana diatur pada Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomo5 54 Tahun 2010.

A.1. VISI

Adapun VISI SUMATERA UTARA TAHUN 2013-2018, yang tertuang pada RPJMD adalah

“MENJADI PROVINSI YANG BERDAYA SAING MENUJU SUMATERA UTARA SEJAHTERA”

Penjelasan makna atas pernyataan Visi dimaksud adalah:

- 1) Menjadi**, bermakna melakukan upaya pembangunan menuju kearah yang lebih baik;



- 2) **Provinsi**, bermakna pemerintah daerah otonom yang memiliki kewenangan untuk membina dan mengkoordinasikan pemerintah kabupaten/kota;
- 3) **Sumatera Utara**, bermakna seluruh wilayah dan komponen/lapisan masyarakat yang berdiam di Sumatera Utara, yang berasal dari berbagai ragam adat budaya, etnis, agama dan golongan yang memiliki hak dan kesempatan yang sama untuk berpartisipasi dan menikmati hasil pembangunan;
- 4) **Berdaya Saing**, bermakna kondisi perekonomian dan sosial kemasyarakatan berada diatas capaian nasional yang memiliki nilai tambah ekonomi dan mampu berkompetisi dengan memanfaatkan sumber daya, ilmu pengetahuan dan teknologi secara optimal;
- 5) **Sejahtera**, bermakna masyarakat Sumatera Utara memiliki pendapatan perkapita riil yang lebih baik dari nasional dan menurunkan kesenjangan tingkat pendapatan masyarakat.

A.2. MISI :

- 1) Membangun reformasi birokrasi secara berkelanjutan guna mewujudkan tatakelola pemerintahan yang baik dan bersih (*good governance and clean government*).
- 2) Membangun sumber daya manusia yang memiliki integritas dalam berbangsa dan bernegara, religius dan berkompetensi tinggi.
- 3) Membangun dan meningkatkan kualitas infrastruktur daerah untuk menunjang kegiatan ekonomi melalui kerjasama antar daerah, swasta, regional dan internasional.
- 4) Meningkatkan kualitas standar hidup layak, kesetaraan dan keadilan serta mengurangi ketimpangan antar wilayah.
- 5) Membangun dan mengembangkan ekonomi daerah melalui pengelolaan sumberdaya alam lestari berkelanjutan dan berwawasan lingkungan.



Penjelasan makna MISI adalah :

- 1. Pembinaan aparatur pemerintahan yang profesional dan berkompentensi, mendorong penegakan hukum yang konsisten dengan dukungan sistem pemerintahan yang baik (*Good Governance*)**, bermakna bahwa untuk menunjang pembinaan aparatur pemerintahan yang profesional dan berkompentensi, mendorong penegakan hukum yang konsisten maka arah kebijakan pembangunan kedepan diarahkan kepada pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) dalam rangka peningkatan efisiensi, efektifitas dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan, dengan menjunjung tinggi empat pilar kebangsaan.
- 2. Menciptakan sumber daya manusia yang berdaya saing, memiliki integritas dalam berbangsa dan bernegara, bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berkompentensi tinggi (Pengamalan IMTAQ dan Penguasaan IPTEK)**, bermakna bahwa untuk mewujudkan kondisi masyarakat Sumatera Utara yang mandiri dan berdaya saing, memiliki integritas dalam berbangsa dan bernegara serta bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berkompentensi tinggi, maka arah kebijakan pembangunan kedepan difokuskan pada penciptaan suasana kehidupan intern dan antar umat yang saling menghormati dan mencegah konflik antar umat beragama serta meningkatkan kualitas pelayanan kehidupan beragama bagi seluruh lapisan masyarakat, agar tercipta manusia yang sehat jasmani dan rohani dan pembangunan karakter melalui pendidikan yang berkualitas dan berkompentensi sesuai dengan kebutuhan tenaga kerja;
- 3. Membangun prasarana dan sarana daerah untuk menunjang kegiatan ekonomi daerah melalui kerjasama antar daerah, kerjasama dengan swasta dan kerjasama regional dan internasional**, bermakna bahwa untuk menunjang pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan dan pemerataan pembangunan antar wilayah, maka arah kebijakan pembangunan kedepan difokuskan kepada pembangunan sarana dan prasarana penunjang kegiatan



ekonomi (jalan, transportasi, perhubungan, sumber daya air, ketenagalistrikan), menghimpun dan menggerakkan semua potensi yang ada dimasyarakat dan menggalang kerjasama antar daerah, kerjasama antara pemerintah dengan swasta dan kerjasama regional dan internasional, pengembangan sarana dan prasarana pendukung pengembangan wilayah pada kawasan cepat tumbuh dan Kawasan Ekonomi Khusus;

4. **Meningkatkan kualitas pelayanan untuk memenuhi standar hidup layak, kesetaraan dan keadilan serta mengurangi ketimpangan antar wilayah**, bermakna bahwa untuk menunjang peningkatan kualitas layanan masyarakat dalam rangka peningkatan kenyamanan sesuai standard hidup layak, setara dan berkeadilan serta mengurangi ketimpangan antar wilayah, maka arah kebijakan pembangunan kedepan difokuskan kepada peningkatan pelayanan masyarakat melalui pembangunan sarana dan prasarana pendidikan, kesehatan, air minum dan sanitasi, telematika, rehabilitasi rumah tidak layak huni;
5. **Membangun dan mengembangkan ekonomi daerah melalui pengelolaan sumber daya alam lestari berkelanjutan dan pengembangan kualitas sumber daya manusia yang cerdas, terampil, kreatif, inovatif, produktif dan memiliki etos kerja yang tinggi**, bermakna bahwa untuk menunjang pembangunan dan pengembangan ekonomi daerah, maka arah kebijakan pembangunan kedepan diarahkan kepada peningkatan pengelolaan sumber daya alam terbaharukan, menciptakan sumber daya manusia yang kreatif dan inovatif, peningkatan produksi untuk penguatan sistem ketahanan pangan dan peningkatan pendapatan masyarakat petani/nelayan, penciptaan lapangan kerja baru melalui pengembangan industri dan perdagangan, dan pelaksanaan pembangunan dengan memperhatikan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup;

A.3. Tujuan dan Sasaran

A.3.1. Tujuan :

1. Menciptakan tata kelola pemerintahan yang baik;
2. Membangun demokrasi dan partisipasi sosial;



-
3. Menciptakan kehidupan masyarakat yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan harmoni dalam keberagaman;
 4. Mewujudkan pembangunan infrastruktur ekonomi dan sosial berwawasan lingkungan;
 5. Mewujudkan kesejahteraan sosial ekonomi masyarakat yang berkeadilan;
 6. Menciptakan masyarakat maju, mandiri, berdaya saing dan berwawasan lingkungan;

A.3.2. Sasaran :

1. Terwujudnya sistem tata pemerintahan yang baik berlandaskan hukum;
2. Terwujudnya peningkatan indeks demokrasi dan partisipasi masyarakat di dalam pembangunan;
3. Terwujudnya masyarakat Sumatera Utara yang cerdas, sehat, beriman, bermoral, beretika dan berbudaya;
4. Terwujudnya infrastruktur sosial ekonomi dan pengembangan wilayah;
5. Terwujudnya peningkatan kesejahteraan sosial ekonomi masyarakat yang berkeadilan;
6. Terwujudnya peningkatan daya saing Provinsi Sumatera Utara baik di bidang ekonomi maupun sosial budaya.

B. PERENCANAAN KINERJA TAHUN 2014

Guna tercapainya arah dan fokus pembangunan daerah yang diawali dengan proses perencanaan melalui tahapan-tahapan yang cukup panjang termasuk aspirasi dari masyarakat melalui DPRD. Sehingga dengan demikian, berkenaan dengan perencanaan kinerja Tahun 2014 tersebut dapat dijabarkan sebagai berikut :



B.1. Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Pemerintah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2014.

Dokumen RKPD Provinsi Sumatera Utara Tahun 2015 tidak dapat dipisahkan dengan dokumen perencanaan lainnya berdasarkan kerangka waktu, yaitu (1) Rencana Jangka Panjang Daerah (20 tahun), (2) Rencana Jangka Menengah Daerah (5 tahun). Secara substansi, keberadaan RKPD membentuk keterkaitan secara hierarkis dengan RPJP Nasional 2005-2025, RPJPD Provinsi Sumatera Utara 2005-2025 dan RPJMD Provinsi Sumatera Utara 2013-2018.

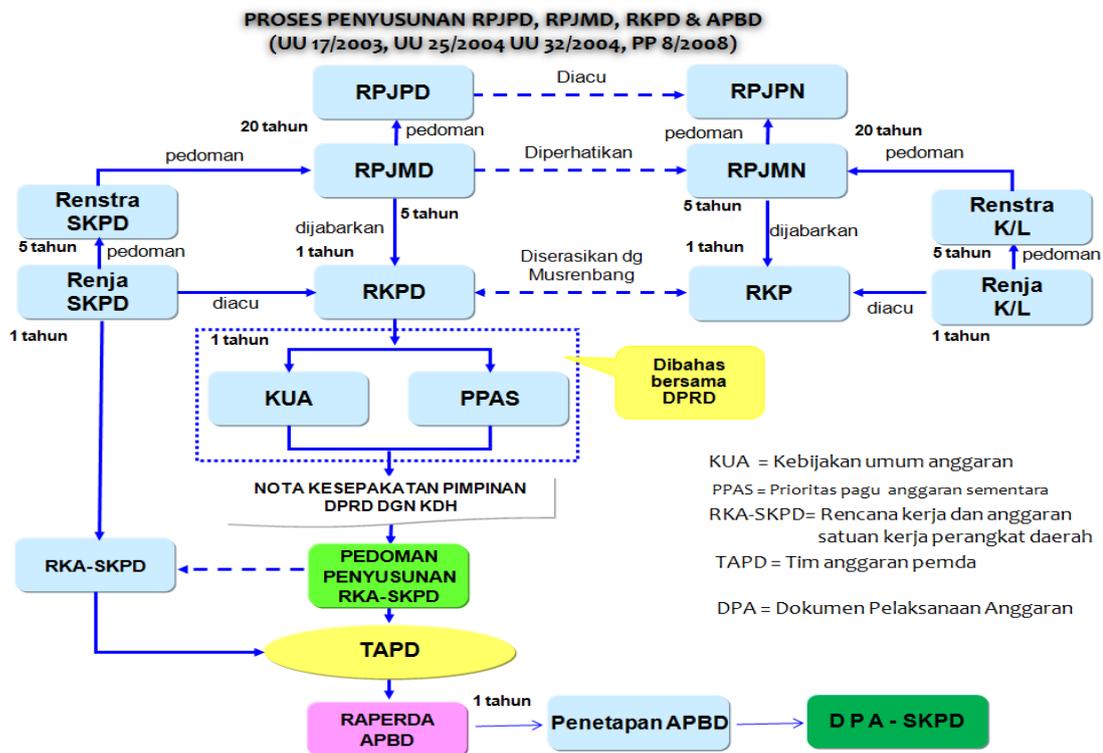
Mengacu pada Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004, tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) berangkat dan disusun dari sebuah proses penjabaran atas visi, misi dan program Kepala Daerah dan kemudian dijabarkan ke dalam perencanaan tahunan (RKPD) dan dijadikan sebagai acuan dalam menentukan arah kebijakan keuangan daerah, strategi pembangunan daerah, kebijakan umum dan program Satuan Kerja Perangkat Daerah, lintas Satuan Kerja Perangkat Daerah dan program kewilayahan disertai dengan rencana-rencana kerja dalam kerangka regulasi dan kerangka pendanaan yang bersifat indikatif. Sebagai suatu produk perencanaan, RKPD tetap tidak dapat dipisahkan keberadaannya dengan dokumen perencanaan dan penganggaran lainnya. RKPD ini terintegrasi dan merupakan satu kesatuan dengan dokumen perencanaan lainnya baik di tingkat nasional maupun daerah, terutama dengan dokumen perencanaan dan penganggaran yang dikeluarkan oleh Pemerintah daerah.

Adapun dokumen perencanaan dan penganggaran tersebut meliputi : (1) Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD); (2) Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renstra-SKPD); (3) Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) dan Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja-SKPD).



Semua dokumen perencanaan sebagaimana dimaksud di atas, dari sisi waktu mencakup 3 kerangka waktu, yaitu rencana jangka panjang (20 tahun), jangka menengah (5 tahun) dan jangka pendek (1 tahun). Secara substansi, keberadaan RKPD ini dengan dokumen perencanaan tersebut membentuk keterkaitan yang bersifat hierarkis, yaitu dokumen dengan jangka waktu yang lebih panjang menjadi rujukan bagi dokumen dengan jangka waktu yang lebih pendek.

Secara diagramatis keterkaitan hubungan RKPD dengan dokumen perencanaan dan penganggaran lainnya tersebut dapat dilihat pada gambar berikut :



Gambar 1. Proses Penyusunan dan Keterkaitan RKPD dengan dokumen perencanaan lainnya
Sumber : RKPD Pemprovsu Tahun 2014

Mengacu pada Gambar 1 dapat diketahui bahwa secara rinci hubungan RKPD dengan dokumen perencanaan dan penganggaran lainnya, adalah sebagai berikut :
RKPD disusun dengan memperhatikan pokok-pokok arah kebijakan dalam RPJP



Nasional dan RPJM Nasional melalui mekanisme Musrenbangnas. RKPD disusun dengan berpedoman pada RPJPD dan RPJMD yang didalamnya memuat mengenai visi, misi dan arah pembangunan daerah. Selanjutnya RKPD ini menjadi pedoman bagi penyusunan Renja SKPD yang disusun sesuai dengan tugas dan fungsi dari tiap SKPD. RKPD ini nantinya dijabarkan ke dalam KUA/PPAS dan selanjutnya menjadi pedoman dalam penyusunan R.APBD.

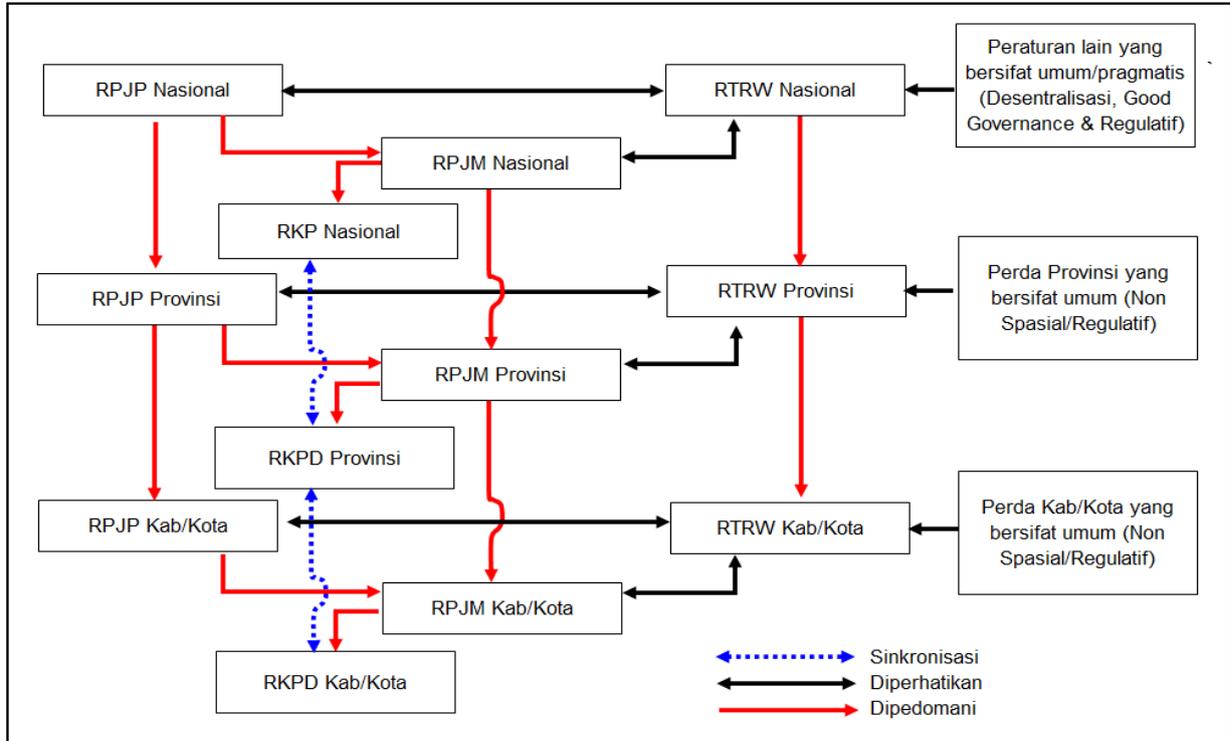
Guna menjamin konsistensi antara perencanaan dan penganggaran, dan efektivitas serta efisiensi pencapaian prioritas dan sasaran pembangunan nasional dan daerah, program dan kegiatan yang ditetapkan dalam RKPD menjadi landasan penyusunan KUA dan PPAS untuk menyusun R.APBD. Hal tersebut sesuai dengan ketentuan sebagai berikut :

- 1) Pasal 17 ayat (2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara menyatakan bahwa penyusunan RAPBD berpedoman kepada RKPD dalam rangka mewujudkan tercapainya tujuan bernegara,
- 2) Pasal 18 Ayat (1) Undang-Undang No 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara yang menyatakan bahwa Pemerintah Daerah menyampaikan KUA tahun anggaran berikutnya sejalan dengan RKPD, sebagai landasan penyusunan RAPBD kepada DPRD selambat-lambatnya pertengahan Juni tahun berjalan.
- 3) Pasal 18 Ayat (3) Undang-Undang No 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara yang menyatakan bahwa Berdasarkan KUA yang telah disepakati dengan DPRD, Pemerintah Daerah bersama DPRD membahas PPAS untuk dijadikan acuan bagi setiap SKPD.
- 4) Pasal 25 ayat (2) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional yang menyatakan bahwa RKPD menjadi pedoman penyusunan R.APBD.

Selanjutnya, dengan memperhatikan hubungan keterkaitan sebagaimana dijelaskan di atas, maka RKPD Provinsi Sumatera Utara Tahun 2015 ini juga harus diselaraskan dengan dokumen RKP Nasional dan Renja K/L dan juga memperhatikan dokumen perencanaan lainnya seperti Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) baik RTRW



Nasional, RTRW Provinsi yang menjadi acuan dalam penyusunan RTRW Kabupaten/Kota. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada Gambar 2 berikut :



Gambar 2. : Bagan keterkaitan RKPD Provinsi dengan dokumen perencanaan tata ruang Provinsi dan Kabupaten/Kota.

Sumber : RKPD Pemprovsu Tahun 2014

Selanjutnya RKPD Pemerintah Provinsi Sumatera Utara selanjutnya ditetapkan dengan Peraturan Gubernur Sumatera Utara Nomor 16 Tahun 2013 Tentang Rencana Kerja Pembangunan Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2014 dan secara rinci dapat dilihat pada Lampiran I Laporan Kinerja (LK) Pemerintah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2014 ini.



B.2. Penetapan Kinerja Pemerintah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2014.

Tahapan selanjutnya dari proses perencanaan kinerja sebagaimana diuraikan di atas, adalah dari RKPD Tahun 2014 yang telah ditetapkan dalam Peraturan Gubernur Sumatera Utara Nomor 16 Tahun 2013 Tentang Rencana Kerja Pembangunan Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2014, tersebut ditindaklanjuti dengan penyusunan Penetapan Kinerja Pemerintah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2014.

Berkenaan dengan Penetapan Kinerja Pemerintah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2014 tersebut, bahwa dalam perjalanannya ternyata dari RPJMD Pemerintah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2013-2018, sebagaimana hasil konsultasi dan pertimbangan dari Kementerian Dalam Negeri terdapat beberapa hal yang disesuaikan dan diperbaiki, sehingga dengan demikian Penetapan Kinerja Pemerintah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2014 yang sebelumnya disampaikan ke Menteri PAN dan Reformasi Birokrasi RI, dipandang perlu diperbaiki dan disesuaikan sehingga menjadi Penetapan Kinerja Pemerintah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2014 perubahan, yang secara rinci dapat dilihat pada Lampiran III dari Laporan Kinerja Tahun 2014 ini.

Oleh sebab itu pada Laporan Kinerja Tahun 2014 ini sudah tentu informasi kinerja yang disajikan adalah dari Penetapan Kinerja Perubahan



BAB III. AKUNTABILITAS KINERJA

Akuntabilitas Kinerja adalah perwujudan kewajiban setiap instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dengan pelaksanaan program dan kegiatan yang telah diamanatkan para pemangku kepentingan dalam rangka mencapai MISI Organisasi Pemerintah secara terukur dengan sasaran/target kinerja yang telah ditetapkan melalui Laporan inerja Instansi Pemerintah dan disusun secara periodik.

Oleh sebab itu Akuntabilitas Kinerja pada Bab ini akan menguraikan tentang perwujudan kewajiban untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan pada Tujuan dan Sasaran selama kurun waktu Tahun 2014 yang lalu. Keberhasilan dan kegagalan yang ada selama kurun waktu Tahun 2014, akan diukur dengan menggunakan Indikator Kinerja Utama (IKU) Sekretariat DPRD Provinsi Sumatera Utara.

Berikut akan diuraikan akuntabilitas kinerja Tahun 2014, yaitu terkait dengan informasi tentang :

- CAPAIAN KINERJA ORGANISASI TAHUN 2014
- REALISASI ANGGARAN TAHUN 2014.

A. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI TAHUN 2014

1. Pengukuran Kinerja

Salah satu fondasi utama dalam menerapkan manajemen kinerja adalah pengukuran kinerja dalam rangka menjamin adanya peningkatan dalam pelayanan publik dan meningkatkan akuntabilitas dengan melakukan klarifikasi output dan outcome yang akan dan seharusnya dicapai untuk memudahkan terwujudnya organisasi akuntabel.



Pengukuran kinerja dilakukan dengan membandingkan antara kinerja yang (seharusnya) terjadi dengan kinerja yang diharapkan. Pengukuran kinerja ini dilakukan secara berkala (triwulan) dan tahunan. Pengukuran dan perbandingan kinerja dalam laporan kinerja harus cukup menggambarkan posisi kinerja Pemerintah Provinsi Sumatera Utara.

Pengumpulan data kinerja diarahkan untuk mendapatkan data kinerja yang akurat, lengkap, tepat waktu dan konsisten yang berguna bagi pengambilan keputusan dalam rangka perbaikan kinerja instansi pemerintah tanpa meninggalkan prinsip-prinsip keseimbangan biaya dan manfaat, efisiensi dan efektivitas.

Sehubungan dengan hal di atas, pengumpulan data kinerja dilakukan melalui sistem informasi kinerja yang mengintegrasikan data kinerja yang dibutuhkan dan unit-unit yang bertanggungjawab dalam pencatatan. Perolehan data kinerja bersumber dari internal yang secara sistematis didasarkan pada laporan triwulanan, semesteran dan tahunan dari unit-unit pelaksana dilingkungannya.

Pada akhir tahun data-data tersebut dirangkum dan diolah serta dikomunikasikan kembali kepada unit-unit pelaksana untuk memperoleh klarifikasi dan penyesuaian seperlunya. Kedua data tersebut selanjutnya diolah dan dirangkum untuk disajikan dalam Laporan Kinerja Tahun 2014 ini.

Sebagai salah satu bentuk transparansi dan akuntabilitas serta untuk memudahkan pengelolaan kinerja, maka data kinerja harus dikumpulkan dan dirangkum. Pengumpulan dan perangkuman harus memperhatikan indikator kinerja yang digunakan, frekwensi pengumpulan data, penanggungjawab, mekanisme perhitungan dan media yang digunakan.

1.1. Indikator Kinerja

Indikator Kinerja adalah ukuran keberhasilan yang menggambarkan terwujudnya kinerja, tercapainya hasil program dan hasil kegiatan. Indikator Kinerja Biro Keuangan Sekretariat Daerah Provinsi selaras antar tingkatan unit organisasi. Indikator kinerja yang digunakan harus



memenuhi kriteria spesifik, dapat diukur, dapat dicapai, relevan dan sesuai dengan kurun waktu tertentu.

1.2. Indikator Kinerja Utama (IKU).

Indikator Kinerja Utama (IKU) merupakan ukuran keberhasilan yang menggambarkan kinerja utama instansi pemerintah sesuai dengan tugas fungsi serta mandat (core business) yang diemban. IKU dipilih dari seperangkat indikator kinerja yang berhasil diidentifikasi dengan memperhatikan proses bisnis organisasi dan kriteria indikator kinerja yang baik. Oleh sebab itu, IKU perlu ditetapkan oleh pimpinan Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah sebagai dasar penilaian untuk setiap tingkatan organisasi.

Untuk Indikator Kinerja Utama (IKU) telah ditetapkan pada RPJMD Pemerintah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2013-2018, yaitu pada Bab V.

2. Pengumpulan Data Kinerja

Pengumpulan data kinerja diarahkan untuk mendapatkan data kinerja yang akurat, lengkap, tepat waktu dan konsisten yang berguna bagi pengambilan keputusan dalam rangka Perbaikan Kinerja Instansi Pemerintah tanpa meninggalkan prinsip-prinsip keseimbangan biaya dan manfaat, efisiensi dan efektifitas. Pengumpulan data kinerja Tahun 2014 ini, dilakukan melalui pengintegrasian data kinerja yang dibutuhkan dengan bagian-bagian yang bertanggungjawab dalam pencatatan.

Perolehan data kinerja bersumber dari internal selama kurun waktu Tahun 2014 yang secara sistematis didasarkan pada Laporan Realisasi Fisik Keuangan Kegiatan APBD TA. 2014, Laporan Triwulanan, Semesteran dan Tahunan. Pada akhir tahun data-data tersebut dirangkum dan diolah serta dikomunikasikan kembali kepada unit-unit pelaksana untuk memperoleh klarifikasi dan penyesuaian seperlunya, dan selanjutnya disajikan dalam LK ini.



3. Cara Pengukuran Kinerja

Pengukuran kinerja sasaran strategis dilakukan dengan menggunakan metode perbandingan antara Rencana Kinerja (*performance plan*) yang diinginkan dengan Realisasi Kinerja (*performance result*) yang dicapai pada Tahun 2014.

Hasil perbandingan tersebut selanjutnya dianalisis untuk menjawab terhadap penyebab terjadinya celah kinerja (*performance gap*) yang terjadi serta tindakan perbaikan yang diperlukan di masa mendatang. Pengukuran kinerja dilakukan dengan menggunakan Formulir Pengukuran Kinerja atas pelaksanaan Program/ Kegiatan yang telah dirumuskan pada Dokumen Penetapan Kinerja Tahun 2014 dan diukur dengan menggunakan Indikator Kinerja Utama (IKU) sebagai tolok ukur dalam pengukuran keberhasilan pencapaian sasaran strategis yang Tahun 2014, dengan rumus seperti dapat dilihat di bawah ini :

$$CK = \frac{RK}{TK} \times 100 \%$$

Keterangan :

CK = Capaian Kinerja

RK = Realisasi Kinerja

Tk = Target Kinerja

4. Hasil Pengukuran Kinerja

Hasil Pengukuran Kinerja yaitu hasil perbandingan antara capaian target kinerja dengan realisasi kinerja, yaitu sebagaimana rumus diatas, sehingga dari hasil pengukuran kinerja ini akan menghasilkan Capaian Kinerja dari masing-masing Indikator Kinerja atau dalam hal ini adalah Indikator Kinerja Utama dari Sasaran Strategis.



Selanjutnya hasil pengukuran kinerja ini akan menjadi gambaran atas Capaian Kinerja Organisasi yaitu Capaian Kinerja Tahun 2014 dan sekaligus menginformasikan tentang tingkat kinerja dari keberhasilan dan kegagalan yang ada.

Hasil pengukuran kinerja tersebut, seyogyanya juga dikaitkan dengan serapan anggaran atau realiasi anggaran dari masing-masing program dan kegiatan yang telah dilaksanakan.

B. EVALUASI DAN ANALISIS CAPAIAN KINERJA TAHUN 2014

Dalam sub bab ini akan disajikan analisis kinerja, yaitu berkenaan dengan penyajian capaian kinerja Tahun 2014 pada setiap pernyataan kinerja masing-masing Sasaran Strategis dalam rangka pencapaian Target Kinerja sesuai dengan Penetapan Kinerja Tahun 2014. Selanjutnya dari setiap pernyataan kinerja pada masing-masing Sasaran Strategis tersebut akan dilakukan analisis capaian kinerja yaitu sebagai berikut :

1. Membandingkan antara target dan realisasi kinerja Tahun 2014;
2. Membandingkan antara realisasi kinerja Tahun 2014 dengan realisasi kinerja Tahun 2013 yaitu sepanjang masih relevan dengan IKU yang digunakan;
3. Membandingkan realisasi kinerja Tahun 2014 dengan target jangka menengah (*target pada RENSTRA Biro Keuangan Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2013-2018*) dan atau Target Tahunan IKU;



4. Membandingkan realisasi kinerja Tahun 2014 dengan standard nasional *(jika ada)* dan untuk hal ini tidak ada realisasi kinerja Sekretariat DPRD Provinsi Sumatera Utara untuk dibandingkan dengan standard nasional.
5. Melakukan analisis terhadap penyebab keberhasilan/ kegagalan atau peningkatan/ penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan;
6. Melakukan analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya, yaitu yang berkenaan dengan efisiensi anggaran.
7. Melakukan analisis atas program/kegiatan yang menunjang dalam rangka keberhasilan ataupun kegagalan atas pencapaian kinerja sebagaimana pernyataan kinerja yang dirumuskan pada Penetapan Kinerja Tahun 2014.
8. Melakukan analisis terhadap serapan anggaran dalam rangka keberhasilan Sasaran Strategis.

Selanjutnya terkait dengan Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja Organisasi Tahun 2014 tersebut, terlebih dahulu dilakukan pengelompokan atas tingkat capaian kinerja, dimana dalam hal ini dilakukan dengan menggunakan metode Skala Linkert. Hal ini dimaksudkan agar dapat diketahui jenis-jenis atas capaian kinerja yang diperoleh, sehingga dengan demikian akan dapat digambarkan secara lebih jelas keberhasilan dan kegagalan organisasi



Sementara itu, bahwa terkait dengan Tingkat pencapaian kinerja tersebut akan dikelompokkan menurut :

1. Sasaran strategis;
2. Indikator kinerja atau Indikator Kinerja Utama yang merupakan tolok ukur keberhasilan/kegagalan Sasaran Strategis;
3. Target Kinerja, yaitu Target Kinerja yang diperjanjikan untuk dicapai dari masing-masing Indikator Kinerja Utama selama Tahun 2014.
4. Realisasi Kinerja, yaitu angka capaian dari Target Kinerja
5. Capaian Kinerja, yaitu angka capaian perbandingan antara Capaian Realisasi dengan target kinerja.

Tabel 18
Pengkategorian dan Pemeringkatan
Capaian Kinerja

No.	INTERVAL TINGKAT CAPAIAN KINERJA	PREDIKAT/ KATEGORI
1.	0 – 45 %	TIDAK BAIK
2.	46 – 65 %	CUKUP BAIK
3.	66 – 85 %	BAIK
4.	> = 86 %	SANGAT BAIK

Berikut akan diuraikan tentang analisis terhadap Capaian Kinerja Tahun 2014, dimana dalam analisis ini dilakukan terhadap Sasaran Strategis, Indikator Kinerja yang digunakan atau dalam hal ini adalah IKU, Target Kinerja yang ditetapkan sampai

dengan Relisasi dan Capaian Kinerja. Adapun analisis dimaksud adalah sebagai berikut:



Sasaran Strategis-1 : Terwujudnya Sistem Tata Pemerintahan Yang Baik Berlandaskan Hukum

Tabel 19
Capaian Kinerja Sasaran Strategis ke-1

INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI KINERJA	CAPAIAN KINERJA (%)
(1)	(2)	(3)	(4)
1. Perbaikan Indeks Persepsi Korupsi (Jumlah Kasus Korupsi Sektor Keuangan)	20 Kasus	1 kasus	5 %
2. Peningkatan Good Governance melalui implementasi e-Government (Sistem Aplikasi) :			
▪ <i>e-Office,</i>	-	-	-
▪ <i>e-Planning,</i>	-	-	-
▪ <i>e-Budgeting,</i>	-	-	-
▪ <i>e-Procurement</i>	1 Sistem Aplikasi	1 Sistem Aplikasi	100
▪ <i>e-Performance</i>	-	-	-
3. APBD dan Perubahan APBD tepat waktu	2 Perda	1 Perda	100
4. Opini BPK terhadap Laporan Keuangan Daerah	WDP	WDP	100
5. Nilai Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah	CC	-	-
6. Persentase SKPD Provinsi menerapkan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah	25 %	42,30 %	169,2
7. Ditetapkannya Sistem Perencanaan dan Penganggaran terpadu melalui Peraturan Daerah (Perda)	-	-	-
8. Tersedianya pusat data informasi Geospasial Provinsi Sumatera Utara	1 Unit	1 Unit	100
9. Lama Perizinan	7 Hari	7 Hari	100

Sebagaimana Tabel 20 di atas dapat dijelaskan bahwa Sasaran Strategis ke-1 yaitu **TERWUJUDNYA SISTEM TATA KEPERINTAHAN YANG BAIK BERLANDASKAN HUKUM** diukur dengan menggunakan 9 (sembilan) Indikator Kinerja Utama (IKU) sebagai tolok ukur keberhasilan dari Sasaran Strategis ke-1 tersebut pada umumnya tercapai dengan baik atau dengan kategori SANGAT BAIK.



Namun untuk indikator kedua yaitu **Peningkatan Good Governance melalui implementasi e-Government (Sistem Aplikasi)**, memiliki 5 (lima) sub indikator kinerja yaitu : e-Office, e-Planning, e-Budgeting, e-Procurement dan e-Performance. Sementara itu untuk Tahun 2014 hanya 1 (satu) sub indikator yang diukur sebagai tolok ukur keberhasilan dari Sasaran Strategis ke-1 yaitu **e-Procurement**.

- Dari 9 (sembilan) Indikator Kinerja yang digunakan pada umumnya ternyata telah menunjukkan capaian kinerja yang SANGAT BAIK, sekalipun tidak dipungkiri bahwa masih ada yang belum menunjukkan capaian kinerja yang seharusnya, yaitu pada Indikator Kinerja “**Perbaikan Indeks Persepsi Korupsi (Jumlah Kasus Korupsi Sektor Keuangan)**”.
- Capaian Indikator Kinerja “**Opini BPK RI terhadap laporan keuangan daerah**”. Sebagaimana target yang ditetapkan pada Penetapan Kinerja Tahun 2014 yaitu WDP, dan ternyata realisasi diperoleh setingkat lebih baik dari WDP, yaitu menjadi WTP, sehingga dengan demikian capaian kinerja pada indikator ini berada pada kategori **SANGAT BAIK**. Sedangkan Tahun 2013, Opini BPK RI Perwakilan Provinsi Sumatera Utara terhadap laporan keuangan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara adalah WDP (Wajar Dengan Pengecualian). Menurut opini BPK, kecuali untuk dampak kekurangan penyaluran bagi hasil pajak daerah sebesar Rp. 2.185.460.178.314,72 dan dampak penyesuaian tersebut, jika ada, yang mungkin perlu dilakukan jika BPK dapat memeriksa bukti – bukti transaksi pada Rumah Sakit Haji Medan, aset tetap, dan aset lainnya, laporan keuangan yang disebut diatas menyajikan secara wajar, dalam semua hal yang material, posisi keuangan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara tanggal 31 Desember 2013 dan 2012, dan realisasi anggaran, serta arus kas untuk tahun yang berakhir pada tanggal – tanggal tersebut sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintah.
- Capaian Indikator Kinerja “**Nilai Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah**”, yaitu dalam hal ini adalah Nilai Akuntabilitas Kinerja untuk Pemerintah Provinsi Sumatera Utara sebagaimana yang ditargetkan pada Tahun 2014 adalah CC, namun



relaisasi kinerjanya belum dapat diukur berhubung Nilai Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Provinsi Sumatera Utara hanya akan diperoleh setelah dilaksanakannya Evaluasi AKIP oleh Kementerian PAN dan Reformasi Birokrasi RI pada Tahun 2015 ini. Sehingga dengan demikian capaian kinerja pada Indikator Kinerja ini belum dapat diukur. Namun sekalipun demikian, diharapkan evaluasi AKIP tahun 2014, dapat mencapai Target yang ditentukan atau kalau bisa lebih dari target.

- **Capaian Indikator Kinerja “Persentase SKPD Provinsi menerapkan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)”**, target 25%, realisasi 42,30%. Sehingga capaian kinerja 169,2%. Dari 52 SKPD di lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara sebanyak 22 SKPD telah menerapkan SPIP dengan membentuk Tim Satgas SPIP. Adapun 22 SKPD tersebut adalah Inspektorat, Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan, Dinas Perindustrian dan Perdagangan, Biro Organisasi Setdaprov Sumatera Utara, Dinas Perkebunan, Sekwan, Dinas Koperasi dan UKM, Rumah Sakit Jiwa, Badan Perpustakaan, Arsip dan Dokumentasi, Dinas Pertanian, Dispenda, BKD, Dinas PSDA, Badan Penanaman Modal dan Promosi, Badan Ketahanan Pangan, Satpol PP, BPPT, Badan Lingkungan Hidup, Badan Kesbang dan Linmas, Dinas Perhubungan, Dinas Kesejahteraan dan Sosial dan Dinas Kelautan dan Perikanan.
- **Capaian Indikator Kinerja “Ditetapkannya Sistem Perencanaan dan Penganggaran Terpadu melalui Peraturan Daerah (PERDA)”**. Pada indikator kinerja ini, target untuk tahun 2014 belum ada. Bentuk implementasinya adalah dengan penerapan *e-planning* dan *e-budgeting* yang seluruh proses pelaksanaannya akan dapat diakses dan diawasi oleh seluruh lapisan masyarakat. Penerapan sistem ini memerlukan komitmen seluruh stakeholder terutama oleh Kepala Daerah dan DPRD terkait dengan implementasinya baik dari segi dana dan sumberdaya manusia.
- **Capaian Indikator Kinerja “Tersedianya pusat data informasi Geospasial Provinsi Sumatera Utara”**, telah dicapai sebagaimana target yang diperjanjikan pada Penetapan Kinerja Pemerintah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2014.



Kegiatan Perencanaan dan Koordinasi Pengembangan Pusat Data Informasi Geospasial Provinsi Sumatera Utara ini merupakan salah satu program kegiatan Peningkatan Kapasitas Perencanaan Daerah. Kegiatan ini dimaksudkan untuk menghasilkan ketersediaan dan aksesibilitas terhadap data informasi spasial berbagai produk perencanaan pembangunan dan penataan ruang Provinsi Sumatera Utara, antara lain berupa peta-peta tematik. Lingkup kegiatan Perencanaan dan Koordinasi Pengembangan Pusat Data Informasi Geospasial Provinsi Sumatera Utara, yaitu :

- 1) melakukan pertemuan/rapat-rapat koordinasi antar-sektor dan wilayah dalam rangka penguatan jaringan data informasi geospasial Provinsi Sumatera Utara;
- 2) melakukan perjalanan dinas dalam rangka pengumpulan dan penguatan data;
- 3) koordinasi dan inventarisasi tentang data informasi geospasial serta hal lainnya yang terkait dengan pengembangan perencanaan pembangunan dan penataan ruang Provinsi Sumatera Utara;
- 4) menyusun dokumen terkait pengelolaan data informasi geospasial Provinsi Sumatera Utara;
- 5) mengikuti pelatihan/bimbingan teknis terkait data informasi geospasial dalam rangka peningkatan kualitas SDM pengelola data informasi geospasial Provinsi Sumatera Utara; dan
- 6) memanfaatkan kerjasama tenaga ahli dalam bidang informasi dan data geospasial guna mendukung kelancaran kegiatan

Hasil/output kegiatan berupa Website/Portal simpul jaringan yang content utamanya berupa Peta-peta tematik perencanaan pembangunan (berbasis GIS dan Web) yang dikelola oleh Kelompok Kerja Simpul Jaringan yang berkoordinasi dengan Badan Koordinasi Penataan Ruang Daerah (BKPRD) Provinsi Sumatera Utara.



- Capaian Indikator Kinerja “**Lama Perizinan**”, Hasil yang dicapai dari kegiatan pelayanan perizinan ini selama tahun 2014 adalah telah diterbitkannya 155 ijin terdiri dari :

1. Ijin Usaha Perkebunan Untuk Pengolahan (IUP-P)	:	5 Ijin
2. Ijin Usaha Perkebunan (IUP)	:	3 Ijin
3. Ijin Usaha Industri Primer Hasil Hutan Kayu (UIPHHK) Dengan Kapasitas Produksi di atas 2.000 m ³ s.d 6.000 m ³ ;	:	16 Ijin
4. Perluasan Ijin Usaha Industri Primer Hasil Hutan Kayu (IPHKK) Produksi 2.000 m ³ s.d 6.000 m ³ per tahun;	:	9 Ijin
5. Ijin Lingkungan;	:	22 Ijin
6. Penerbitan Ijin Usaha Industri (IUI) Yang Skala Investasinya di atas Rp. 10 Milyar Tidak Termasuk Tanah Bangunan dan Tempat Usaha (masih berlangsung);	:	7 Ijin
7. Perubahan Alamat dan Penanggung Jawab Industri.	:	1 Ijin
8. Ijin Pemakaian Bahu Jalan Atas Pemasangan Papan Reklame, Neon Box Yang Terkena Jalan Provinsi;	:	2 Ijin
9. Angkutan Pemasu Moda.	:	2 Ijin
10. Angkutan Antar Kota Dalam Provinsi untuk Angkutan Antar Jemput	:	2 Ijin
11. Surat Ijin Usaha Perusahaan Ekspedisi Muatan Kapal Laut (SIUP EMKL);	:	1 Ijin
12. Penetapan Ijin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik Untuk Badan Usaha yang Wilayah Usahanya Lintas Kabupaten/Kota;	:	1 Ijin
13. Penetapan Ijin Operasional Pembangkit Listrik yang Fasilitas Instalasinya Mencakup Lintas Kabupaten/Kota;	:	1 Ijin
14. Pemberian Ijin Usaha Pertambangan (IUP) Eksplorasi Mineral dan Batubara yang Lintas Kabupaten/Kota;	:	3 Ijin
15. Ijin Pengambilan dan Pemanfaatan Air Permukaan (SIPAP)	:	80 Ijin



Sasaran Strategis-2 : Terwujudnya Peningkatan Indeks Demokrasi dan Partisipasi Masyarakat di dalam Pembangunan

Tabel 20
Capaian Kinerja Sasaran Strategis ke-2

INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI KINERJA	CAPAIAN KINERJA (%)
(1)	(2)	(3)	(4)
1. Jumlah Peraturan Daerah (PERDA) yang dikeluarkan atas inisiatif DPRD	1 Perda	1 Perda	100
2. Partisipasi masyarakat dalam perumusan kebijakan publik (%) kehadiran dalam pelaksanaan Musrenbang	100 %	100 %	100
3. Persentase usulan masyarakat yang ditampung dalam dokumen perencanaan RKPd (minimal)	10 %	1,5 %	15
4. Tersedianya Dokumen Perencanaan : RPJMD yg telah ditetapkan dgn PERDA/PERKADA (Jlh dokumen)	1 Dokumen	1 Dokumen	100
5. Tersedianya Dokumen Perencanaan : RKPd yg telah ditetapkan dgn PERKADA (Jlh dokumen)	1 Dokumen	1 Dokumen	100
6. Penjabaran Program RPJMD ke dalam RKPd (Jlh dokumen)	1 Dokumen	1 Dokumen	100

Sebagaimana Tabel 21 di atas dapat dijelaskan bahwa Sasaran Strategis ke-2 yaitu **“TERWUJUDNYA PENINGKATAN INDEKS DEMOKRASI DAN PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PEMBANGUNAN”**, dimana keberhasilan maupun kegagalan pada Sasaran Strategis ini diukur dengan menggunakan sebanyak 6 (enam) Indikator Kinerja dan secara umum menunjukkan capaian kinerja yang SANGAT BAIK, sekalipun masih ada 1 (satu) indikator kinerja yang belum mencapai target yang diperjanjikan



yaitu Indikator Kinerja **“Persentase usulan masyarakat yang ditampung dalam dokumen perencanaan RKPD (Minimal)”**.

Capaian Kinerja dari masing-masing Indikator Kinerja yang digunakan dapat diuraikan sebagai berikut :

- **Capaian Indikator Kinerja “Jumlah Peraturan Daerah (PERDA) yang dikeluarkan atas inisiatif DPRD”**, menunjukkan bahwa relisasi kinerja telah tercapai sebagaimana yang diperjanjikan di awal tahun anggaran 2014 yang kemudian ditetapkan pada Dokumen Penetapan Kinerja Tahun 2014.
- **Capaian Indikator Kinerja “Partisipasi masyarakat dalam perumusan kebijakan publik (%) kehadiran dalam pelaksanaan Musrenbang”**, menunjukkan bahwa relisasi kinerja telah tercapai sebagaimana yang diperjanjikan di awal tahun anggaran 2014 yang kemudian ditetapkan pada Dokumen Penetapan Kinerja Tahun 2014. Pendekatan perencanaan pembangunan yang salah satunya adalah pendekatan partisipatif dimana usulan diperoleh dari seluruh lapisan masyarakat yang disampaikan pada saat pelaksanaan Musrenbang, baik ditingkat Desa/Kelurahan, Kabupaten/Kota, Provinsi maupun Pusat. Pada saat pelaksanaan Musrenbang elemen masyarakat diwakili oleh Asosiasi, tokoh agama, tokoh pemuda dan tokoh masyarakat, organisasi wanita, pers, dan organisasi masyarakat lainnya, dimana tingkat kehadirannya mencapai 100 %.
- **Capaian Indikator Kinerja “Persentase usulan masyarakat yang ditampung dalam dokumen perencanaan RKPD (Minimal)”**, belum menunjukkan kinerja yang seharusnya karena realisasi kinerja hanya 1,5 % saja. Dari 100 % usulan masyarakat yang disampaikan DPRD melalui laporan hasil Reses Dewan yang disampaikan ke Bappeda Provinsi Sumatera Utara, setelah ditelaah pada saat proses penyusunan Ranwal RKPD, pada tahun 2014 ditargetkan sebesar 10% usulan masyarakat yang akan ditampung dalam dokumen RKPD 2015. Realisasi yang dicapai adalah sebesar 1,5 % yang kegiatannya dilaksanakan melalui SKPD terkait, BKP, Hibah dan Bansos.



- **Capaian Indikator Kinerja “Tersedianya Dokumen Perencanaan : RPJMD yg telah ditetapkan dgn PERDA/PERKADA (Jlh dokumen)”**, juga menunjukkan bahwa relisasi kinerja telah tercapai sebagaimana yang diperjanjikan di awal tahun anggaran 2014 yang kemudian ditetapkan pada Dokumen Penetapan Kinerja Tahun 2014. Target yang ditetapkan pada tahun tahun 2014 adalah 1 (satu) dokumen dan pada tahun 2014 telah ditetapkan dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Provinsi Sumatera Utara melalui **Perda Provsu Nomor 5 Tahun 2014 tentang RPJMD Provinsi Sumatera Utara Tahun 2013-2018** tanggal 13 Mei 2014 (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2014 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 22) sehingga pencapaian kerjanya menjadi 100%.
- **Capaian Indikator Kinerja “Tersedianya Dokumen Perencanaan : RKPD yg telah ditetapkan dgn PERKADA (Jlh dokumen)”**, menunjukkan bahwa relisasi kinerja telah tercapai sebagaimana yang diperjanjikan di awal tahun anggaran 2014 yang kemudian ditetapkan pada Dokumen Penetapan Kinerja Tahun 2014 yaitu 1 Dokumen RKPD. Target yang ditetapkan pada tahun tahun 2014 adalah 1 (satu) dokumen dan pada tahun 2014 telah ditetapkan dokumen Rencana Kerja Pembangunan Daerah Tahun 2015 melalui **Pergubsu Nomor 21 Tahun 2014 tentang RKPD Provinsi Sumatera Utara Tahun 2015** tanggal 23 Mei 2014 (Berita Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2014 Nomor 21) sehingga pencapaian kerjanya menjadi 100%.
- **Capaian Indikator Kinerja “Penjabaran Program RPJMD ke dalam RKPD (Jlh dokumen)”**, juga menunjukkan bahwa relisasi kinerja telah tercapai sebagaimana yang diperjanjikan di awal tahun anggaran 2014 yang kemudian ditetapkan pada Dokumen Penetapan Kinerja Tahun 2014. Target yang ditetapkan pada tahun tahun 2014 adalah 1 (satu) dokumen. Penjabaran program RPJMD yang dijabarkan



oleh masing-masing SKPD di dalam Renstra SKPD lima tahun yang kemudian dituangkan ke dalam Rencana Kerja (Renja) SKPD yang akan menjadi acuan dalam menyusun Rencana Kerja Anggaran Tahunan dan sebagai bahan dalam penyusunan RKPDP Provinsi. Rekapitulasi dokumen Renja seluruh SKPD yang memuat program dan kegiatan SKPD sebagai bagian dari RPJMD dan Renstra SKPD yang telah diverifikasi oleh Bappeda Provsu dijadikan sebagai satu dokumen untuk dimasukkan ke dalam dokumen RKPDP Provinsi.

Keberhasilan kinerja pelaksanaan pembangunan daerah salah satunya dapat dilihat dari capaian Indikator makro pembangunan, baik indikator makro pembangunan sosial, maupun indikator makro pembangunan ekonomi. Salah satu indikator makro pembangunan sosial yang dapat dijadikan ukuran dalam melihat gambaran keberhasilan pelaksanaan pembangunan yaitu Indeks Pembangunan Manusia (IPM).

Pembangunan manusia merupakan paradigma pembangunan yang menempatkan manusia sebagai fokus dan sasaran akhir dari seluruh kegiatan pembangunan, yaitu : meningkatnya derajat pendidikan, meningkatnya derajat kesehatan masyarakat dan tercapainya kehidupan yang layak.

Selanjutnya, salah satu indikator makro pembangunan ekonomi yang dapat dijadikan ukuran dalam melihat gambaran keberhasilan pelaksanaan pembangunan, khususnya kemampuan suatu daerah dalam menghasilkan pendapatan yaitu : PDRB, Laju Pertumbuhan Ekonomi (atas dasar harga Konstan), Pendapatan per Kapita dan Tingkat Inflasi.



Sasaran Strategis-3 : Terwujudnya masyarakat Sumatera Utara yang cerdas, sehat beriman, bermoral, beretika dan berbudaya

Keberhasilan Sasaran Strategis ke-3 ini, mencakup 2 (dua) aspek yaitu Aspek Pendidikan dan Aspek Kesehatan. Untuk aspek pendidikan pada prinsipnya diukur dengan menggunakan 17 (tujuh belas) Indikator Kinerja Utama, sedangkan pada Aspek



Kesehatan diukur dengan menggunakan 4 (empat) Indikator Kinerja Utama (IKU). Capaian Kinerja secara rinci dapat dilihat pada Tabel 22 berikut ini.

Tabel 21
Capaian Kinerja Sasaran Strategis ke-3

▪ APEK PENDIDIKAN.

INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI KINERJA	CAPAIAN KINERJA (%)
(1)	(2)	(3)	(4)
1. Lama Usia Sekolah (tahun)	9,5 Tahun	9,13 Tahun	96,11
2. Angka Melek Huruf Penduduk Usia >= 15 Tahun (%)	97,80 %	97,84 %	100,04
3. APK PAUD Non Formal (%)	44,06 %	65,02 %	147,57
4. APM SD/ MI (%)	93,75 %	93,59 %	99,83
5. APK SD/ MI (%)	106,40 %	114,38 %	107,50
6. APK SMP/MTs (%)	90,05 %	101,22 %	112,40
7. APM SMP /MTs (%)	72,23 %	80,90 %	112,00
8. Angka kelulusan SD/ MI (%)	99,60 %	100,00 %	100,40
9. Angka kelulusan SMP/ MTs (%)	100 %	99,92 %	99,92
10. APK SMA/MA/SMK (%)	82,92 %	86,74 %	104,61
11. APM SMA/MA/SMK (%)	64,00 %	64,36 %	100,56
12. Angka kelulusan SMA/MA/SMK (%)	90,60 %	99,72 %	110,07
13. Persentase Guru SD/SDLB berkualifikasi akademik S1/D4 (%)	40,20 %	68,70 %	170,90
14. Persentase Guru SMP/SMPLB berkualifikasi S1/D4 (%)	76,56 %	82,65 %	107,95
15. Persentase guru SMA berkualifikasi S1/D4 (%)	88,72 %	4,00 %	4,51
16. Persentase guru SMK bersertifikat kompetensi (%)	84,74 %	27,00 %	31,86
17. APK Perguruan Tinggi Usia 19- 23 (%)	26,96 %	36,59 %	135,72

Sebagaimana Tabel 22 di atas untuk Aspek Pendidikan pada Sasaran Strategis ke-3 pada umumnya menunjukkan capaian kinerja yang SANGAT BAIK, hal ini dapat dijelaskan pada uraian di bawah ini :

Pendidikan merupakan hak dasar setiap penduduk dan pemenuhan atas hak ini menjadi kewajiban pemerintah. Selain jumlah penduduk yang besar, tantangan yang dihadapi dalam pengembangan pendidikan adalah relative besarnya disparitas ketersediaan sarana pendidikan. Di satu pihak, di wilayah perkotaan umumnya memiliki sekolah yang berkualitas dengan biaya pendidikan yang relative mahal dan



dikelola secara mandiri. Dipihak lain, beberapa daerah masih terfokus pada peningkatan cakupan, atau masih berkuat pada peningkatan kualitas.

- Capaian Indikator “**Lama Usia Sekolah (tahun)**”, Peningkatan Lama usia sekolah (tahun) untuk mendukung tuntasnya Wajib Belajar Pendidikan Dasar 9 (sembilan) Tahun. Tingkat ketercapaian sasaran strategis ini dilihat melalui indikator kinerja “Lama Usia Sekolah (Tahun). Adapun tingkat pencapaiannya adalah sebagai berikut :

Tabel 22
Capaian Kinerja Lama Usia Sekolah (Tahun) Tahun 2014

Indikator Kinerja	Tahun 2014		
	Target	Realisasi	(%)
Lama Usia Sekolah (Tahun)	9,50	9,13	96,11

Sumber : Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara

Realisasi indikator kinerja Lama Usia Sekolah (Tahun) Tahun 2014 mencapai 9,13% dengan target yang ditetapkan yaitu sebesar 9,50%. Sehingga Capaian Kinerja pada ini adalah 96.11 % atau pada kategori **SANGAT BAIK**.

- Capaian Indikator Kinerja “**Angka Melek Huruf Penduduk Usia >= 15 Tahun (%)**”. Berkenaan dengan pencapaian Kinerja pada Indikator Kinerja **Angka Melek Huruf Penduduk Usia \geq 15 Tahun**, dimana tingkat ketercapaian sasaran strategis ini dilihat melalui indikator kinerja “Angka Melek Huruf Penduduk Usia \geq 15 Tahun ini **SANGAT BAIK**. Adapun tingkat pencapaiannya dapat digambarkan pada Tabel di bawah ini :

Tabel 23
Capaian Kinerja Angka Melek huruf Penduduk Usia \geq 15 Tahun Tahun 2014

Indikator Kinerja	Tahun 2014		
	Target	Realisasi	(%)
Angka Melek Huruf Penduduk Usia \geq 15 Tahun	97.80	97,84	100,04

Sumber : Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara



Program yang dilaksanakan dalam mewujudkan sasaran diatas adalah Program Pendidikan Non Formal. Indikator kinerja adalah Angka Melek Huruf Penduduk Usia ≥ 15 tahun, target yang direncanakan sebesar 97,80 %, dimana realisasi pelaksanaan sebesar 97,84% dengan capaian presentase kinerja yang baik yaitu mencapai sebesar 100,04%. dimana perbandingan antara target dan realisasi terjadi kenaikan sebesar 0,04% .

Untuk menunjang dan mempertahankan capaian kinerja dari Angka Partisipasi Kasar (APK) PAUD Non Formal dan Angka Melek Huruf Penduduk Usia ≥ 15 tahun pada tahun 2014 ini didukung dari 10 (sepuluh) kegiatan yang dilaksanakan Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara melalui Bidang PNFI dan PAUD yaitu :

- 1) Koordinasi Teknis Tingkat Provinsi,** tujuan kegiatan Koordinasi Teknis Tingkat Provinsi Tahun 2014 adalah mensosialisasikan seluruh Program Pendidikan Formal, Informal dan Pendidikan Anak Usia Dini (PNFI dan PAUD). Hasil yang dicapai dari kegiatan Koordinasi Teknis Tingkat Provinsi ini adalah tersosialisasinya seluruh Program Pendidikan Formal, Informal dan Pendidikan Anak Usia Dini (PNFI dan PAUD);
- 2) Workshop PAUD Tingkat Dasar (Diklat berjenjang) Bagi Guru PAUD,** Tujuan kegiatan Workshop PAUD Tingkat Dasar (Diklat berjenjang) Bagi Guru PAUD Tahun 2014 adalah meningkatkan pemahaman tentang dasar-dasar pengembangan PAUD melalui materi kebutuhan PAUD secara komprehensif bagi guru-guru PAUD. Hasil yang dicapai dari kegiatan Workshop PAUD Tingkat Dasar (Diklat berjenjang) Bagi Guru PAUD ini adalah termotivasinya guru-guru PAUD dalam memahami dasar-dasar pengembangan PAUD melalui materi kebutuhan PAUD secara komprehensif;



- 3) **Workshop Penyelenggaraan TK/KB (PAUD Binaan PKK)**, tujuan kegiatan Workshop Penyelenggaraan TK/KB (PAUD Binaan PKK) Tahun 2014 adalah meningkatkan Program Non Formal, Informal dan Pendidikan Anak Usia Dini (PNFI dan PAUD). Hasil yang dicapai dari kegiatan Workshop Penyelenggaraan TK/KB (PAUD Binaan PKK) ini adalah termotivasinya pemahaman pengelola, penyelenggara dan tenaga pendidik/guru PAUD dalam melaksanakan penyelenggaraan TK/KB.
- 4) **Semiloka dan Advokasi Kurikulum PAUD Bagi Guru-guru PAUD (PAUD Binaan PKK)**, Tujuan kegiatan Penyelenggaraan Apresiasi PTK PAUDNI Tahun 2014 adalah meningkatkan pemahaman kurikulum PAUD bagi guru-guru PAUD (PAUD Binaan PKK). Hasil yang dicapai dari kegiatan Penyelenggaraan Apresiasi PTK PAUDNI ini adalah guru-guru PAUD mampu dan memahami tentang kurikulum PAUD;
- 5) **Sosialisasi dan Lokakarya Akreditasi Lembaga PAUD**, tujuan kegiatan Sosialisasi dan Lokakarya Akreditasi Lembaga PAUD Tahun 2014 adalah meningkatkan pemahaman Akreditasi Lembaga PAUD bagi para pengelola lembaga dan guru-guru PAUD secara komprehensif. Hasil yang dicapai dari kegiatan Sosialisasi dan Lokakarya Akreditasi Lembaga PAUD ini adalah para pengelola mampu memahami dan melakukan peningkatan dalam menjalankan Lembaga PAUD yang berkualitas; 6) **Penyelenggara Apresiasi PTK PAUDNI**, tujuan kegiatan Penyelenggaraan Apresiasi PTK PAUDNI Tahun 2014 adalah; a) Memberikan penghargaan terhadap PTK PAUDNI yang dinilai memiliki prestasi yang inovatif dalam kegiatan pembelajaran dan pengelolaan satuan PAUDNI; b) Meningkatkan mutu pembinaan PTK PAUDNI melalui pengembangan kreativitas dan inovasi dalam bidang karya tulis, karya nyata, olahraga dan seni; c) Meningkatkan mutu dalam melaksanakan tugas dan fungsi agar lebih kompetitif, profesional dan berkarakter; d) Mengaktualisasikan potensi yang dimiliki;



e) Memberikan umpan balik dalam rangka meningkatkan mutu pembinaan dan pengembangan karir PTK PAUDNI. Hasil yang dicapai dari kegiatan Penyelenggaraan Apresiasi PTK PAUDNI ini adalah a) Terbentuknya pola pemberian apresiasi bagi PTK PAUDNI; b) Meningkatnya motivasi PTK PAUDNI dalam meningkatkan mutu pelaksanaan tugasnya; c) Meningkatnya mutu pembinaan PTK PAUDNI melalui pengembangan kreativitas dan inovasi melalui olahraga dan seni; d) Adanya aktualisasi keberadaan dan peran PTK PAUDNI dalam melaksanakan program untuk mencerdaskan kehidupan bangsa; e) Terjalannya komunikasi yang konstruktif dan edukatif antara PTK PAUDNI yang berasal dari daerah Kabupaten/Kota se-Sumatera Utara.

▪ Capaian Indikator Kinerja “**APK PAUD Non Formal (%)**”,

Sasarannya adalah meningkatnya penduduk mengikuti pendidikan non formal bagi penduduk yang tidak mengikuti pendidikan keaksaraan, pendidikan kecakapan hidup serta tuntasnya Wajib Belajar Pendidikan Dasar 9 (Sembilan) Tahun serta peningkatan angka partisipasi pada semua jenjang pendidikan. Pencapaian Indikator Kinerja pada **Angka Partisipasi Kasar (APK) PAUD Non Formal**, dengan Tujuan utama yang diharapkan dalam upaya pencapaian sasaran strategis meningkatnya “Angka Partisipasi Kasar (APK) PAUD Non Formal”. Adapun tingkat pencapaiannya adalah sebagai berikut :

Tabel 24
Capaian Kinerja APK PAUD Non Formal Tahun 2014

Indikator Kinerja	Tahun 2012			Tahun 2013			Tahun 2014		
	Target	Realisasi	(%)	Target	Realisasi	(%)	Target	Realisasi	(%)
APK PAUD Non Formal	39,15	33,87	86,51	39,15	33,87	90,24	44,06	65,02	147,57

Sumber : Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara

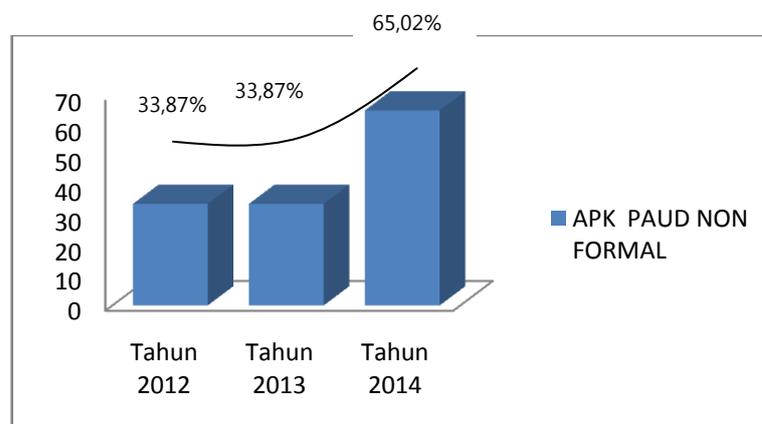


Program yang dilaksanakan dalam mewujudkan sasaran diatas adalah Program Pendidikan Non Formal. Indikator kinerja adalah APK PAUD/ Non Formal yang direncanakan sebesar 44,06 %, dimana realisasi pelaksanaan Pendidikan Non Formal untuk Pendidikan Anak Usia Dini sebesar 65,02 % dengan capaian presentase kinerja yang baik yaitu mencapai sebesar 147,57 % dimana perbandingan antara target dan realisasi terjadi kenaikan sebesar 0,96% . Sedangkan perbandingan antara realisasi kinerja tahun 2013 dan tahun 2014 kenaikannya mencapai 31,15 % yaitu pada tahun 2013 realisasi kinerja sebesar 33,87 % menjadi 65,02 % pada tahun 2014.

Dimana jumlah penduduk usia 3-6 Tahun adalah 1.220.000 orang sedangkan jumlah siswa PAUD berjumlah 793.249 siswa

Keberhasilan melebihi target tersebut salah satunya didukung oleh kebijakan mengangkat bunda-bunda PAUD ditingkat kabupaten/kota guna mensosialisasi kan program PAUD serta adanya perubahan cara perhitungan APK PAUD yang semula menghitung pembaginya berdasarkan usia anak 0-6 tahun menjadi anak usia 3-6 tahun. Berikut grafik Angka Partisipasi Kasar Paud Non Formal dari Tahun 2012 sampai dengan Tahun 2014 :

Grafik 1
APK PAUD Non Formal Tahun 2014





- Capaian Indikator Kinerja “APM SD/ MI (%)”.

Pencapaian Indikator Kinerja Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI

Tingkat ketercapaian sasaran strategis ini dilihat melalui indikator kinerja “APM SD/MI”. Adapun tingkat pencapaiannya adalah sebagai berikut :

Tabel 25
Capaian Kinerja APM SD/MI Tahun 2012-2014

Indikator Kinerja	Tahun 2012			Tahun 2013			Tahun 2014		
	Target	Realisasi	(%)	Target	Realisasi	(%)	Target	Realisasi	(%)
APM SD/MI	90,17	93,26	96,69	103,43	93,26	100,65	93,75	93,59	99,83

Sumber : Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara

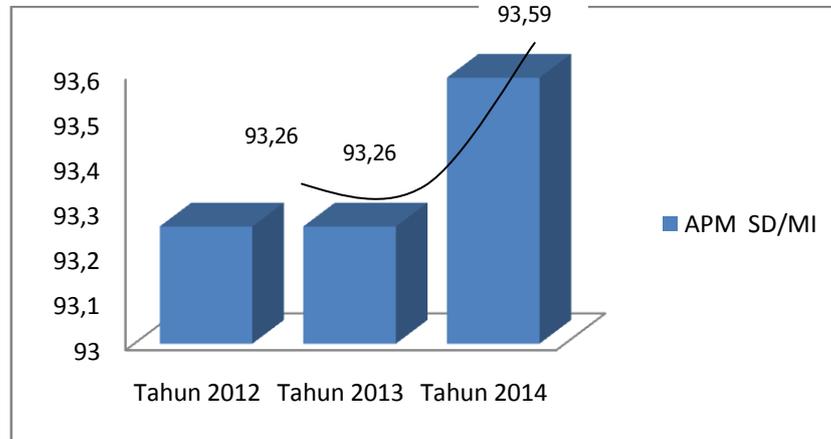
Realisasi APM SD/MI Tahun 2014 mencapai 93,59 % dengan target yang ditetapkan yaitu sebesar 93,75% . Persentase pencapaian Indikator Kinerja adalah 99,83 %, dimana perbandingan antara target dan realisasi terjadi kenaikan sebesar 0,16% . Sedangkan perbandingan antara realisasi kinerja tahun 2013 dan tahun 2014 kenaikannya mencapai 0,33% yaitu pada tahun 2013 realisasi kinerja sebesar 93,26 % menjadi 93,59 % pada tahun 2014.

Perhitungan APM SD/MI berdasarkan Jumlah penduduk usia 7-12 adalah 1.690.800 orang sedangkan anak yang sekolah Tahun 2014 di SD/MI usia 7-12 tahun berjumlah 1.582.419 siswa.

Berikut grafik Angka Partisipasi Murni SD/MI dari Tahun 2012 sampai dengan Tahun 2014 :



Grafik 2
Capaian Kinerja APM SD/MI Tahun 2012-2014



- Capaian Indikator Kinerja “APK SD/ MI (%)”,

Tingkat ketercapaian sasaran strategis ini dilihat melalui indikator kinerja “APK SD/MI”. Adapun tingkat pencapaiannya adalah sebagai berikut :

Tabel 26
Capaian Kinerja APK SD/MI Tahun 2012-2014

Indikator Kinerja	Tahun 2012			Tahun 2013			Tahun 2014		
	Target	Realisasi	(%)	Target	Realisasi	(%)	Target	Realisasi	(%)
APK SD/MI	111,64	106,26	95,18	112,59	113	100,36	106,40	114,38	107,50

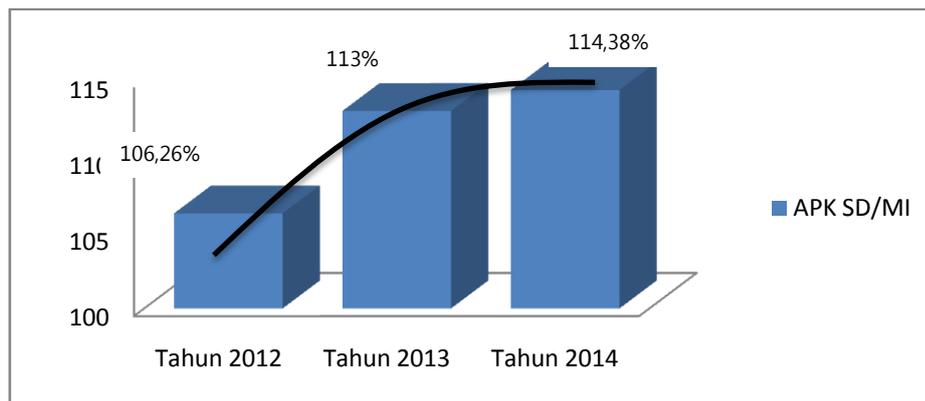
Sumber : Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara

Realisasi APK SD/MI Tahun 2014 mencapai 114,38 % dengan target yang ditetapkan yaitu sebesar 106,40 % . Persentase pencapaian IKU ini adalah 107,50 %, dimana perbandingan antara target dan realisasi terjadi kenaikan sebesar 7,88% . Sedangkan perbandingan antara realisasi kinerja tahun 2013 dan tahun 2014 kenaikannya mencapai 1,38% yaitu pada tahun 2013 realisasi kinerja sebesar 113 % menjadi 114,38 pada tahun 2014.



Dimana jumlah penduduk usia 7-12 adalah 1.690.800 orang sedangkan jumlah siswa yang sekolah di SD/MI berjumlah 1.933.992 siswa. Berikut grafik Angka Partisipasi Kasar SD/MI dari Tahun 2012 sampai dengan Tahun 2014 :

Grafik 3
Capaian Kinerja APK SD/MI Tahun 2012-2014



Pencapaian realisasi kenaikan APM SD/MI sebesar 0,16 % dari target 93,59 % menjadi 93,75 dan APK SD/MI sebesar 7,88 % dari target 106,40 % menjadi 114,38 didukung dengan adanya beberapa kegiatan yang dapat menunjang kenaikan APM dan APK SD/MI tersebut adalah :

- 1) Seleksi Calon Peserta Olimpiade Sains Nasional (OSN) Jenjang SD Tingkat Provinsi** yang bertujuan a) Meningkatkan kemampuan Siswa Sekolah Dasar (SD) di bidang Mata Pelajaran Matematika dan IPA, baik dalam bentuk pemahaman maupun analisis sebagai salah satu upaya peningkatan mutu pendidikan; b) Meningkatkan kemampuan daya saing siswa SD dalam bidang akademik matematika dan IPA sekaligus merupakan even tingkat Provinsi dalam hal evaluasi prestasi akademik yang diharapkan dapat memotivasi siswa dan sekolah dalam meningkatkan kualitasnya; c) Menjaring siswa-siswa terbaik dari jenjang SD untuk menjadi peserta olimpiade sains tingkat nasional tahun 2014.



Sasaran kegiatan ini adalah Siswa-siswi terbaik jenjang SD hasil seleksi di tingkat kabupaten/kotya tahun 2014 yang berasal dari 2 (dua) mata pelajaran yang diperlombakan yaitu Bidang mata pelajaran Matematika dan IPA. Hasil yang dicapai dari kegiatan ini adalah a) Meningkatnya kemampuan siswa SD di Provinsi Sumatera Utara dalam Bidang Mata Pelajaran Matematika dan IPA; b) Meningkatnya motivasi siswa SD dalam mengembangkan kapasitas intelektual dan kemampuan di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi Prestasi yang dicapai pada Olimpiade Sains Nasional (OSN) di Tingkat Nasional. Hasil yang dicapai pada kegiatan OSN di Tingkat Nasional adalah mendapat perolehan 2 (dua) Medali Perunggu pada Bidang Matematika atas nama **Valentino Iverson SD Sutomo 1 Medan dan Gian Aristo Lim SD Sutomo 1 Medan** serta Bidang IPA mendapat perolehan 1 (satu) Medali Perunggu Atas Nama **Juni Fransisca Onggani SD Sutomo 1 Medan**.

2) **Lomba Seni Siswa SD Tingkat Provinsi** yang bertujuan untuk : a) Memberi motivasi peserta didik sekolah dasar untuk mengekspresikan diri melalui lomba pidato bahasa indonesia, membuat gambar bercerita, menyanyi tunggal, kriya anyam, cipta puisi dan melukis sesuai dengan minat, bakat dan keterampilan yang dimilikinya; b) Memberikan wadah bagi peserta didik sekolah untuk berkreasi, berinovasi dan menumbuhkembangkan sportivitas yang merupakan bagian dari pendidikan karakter; c) Menumbuhkan kemampuan bersosialisasi peserta didik dan menemukan bibit-bibit seniman/seniwati. Sasaran yang dituju adalah Siswa-siswi jenjang SD baik negeri maupun swasta.

Hasil yang dicapai melalui Festival dan Lomba Seni Siswa Nasional jenjang Sekolah Dasar Tingkat Provinsi Sumatera Utara tahun 2014 terseleksi siswa-siswa yang berprestasi dalam bidang seni ditingkat Provinsi yaitu :



NO.	NAMA	SEKOLAH	KABUPATEN/KOTA	KETERANGAN
A.	PIDATO BAHASA INDONESIA			
1.	Tama M. Lubis	SD Harapan 1 Medan	Medan	Juara 1
2.	Clarita A. Blasde Munthe	SD RK 3 Sibolga	Sibolga	Juara 2
3.	Cintia Sonya M. Pasaribu	SD Santa Maria Dolok Sanggul	Humbang Hasundutan	Juara 3
4.	Cindy Irana	SDN 167648 Bajenis	Tebing Tinggi	Harapan 1
5.	Khoirun Nida	SDN 132406 Tj. Balai	Tanjung Balai	Harapan 2
6.	Jamilah Br. Sitompul	MIN Lopian	Tapanuli Tengah	Harapan 3
B.	MEMBUAT GAMBAR BERCERITA			
1.	Ananda Herfina Fitri	SDN 132405 Tanjung Balai	Tanjung Balai	Juara 1
2	Vikram Totonafu Tel.	SDN 070975 Gunung Sitoli	Gunung Sitoli	Juara 2
3.	Diah Ayu Handini	SD Budi Dharma	Tebing Tinggi	Juara 3
4.	Yan C. Deo A. Sembiring	SDN 173416 Pollung	Humbang Hasundutan	Harapan 1
5.	Theo C. A. Siregar	SD Methodist Kabanjahe	Karo	Harapan 2
6.	Dominku D. Situngkir	SD. St. Mikhael	Samosir	Harapan 3
C.	MENYANYI TUNGGAL SOLO			
1.	Vico Grady Sianipar	SD Asisi Medan	Medan	Juara 1
2.	Gian Ananta Samosir	SD HKBP 2 Padang Sidempuan	Padang Sidimpuan	Juara 2
3.	Bunga Gloria Purba	SDN 50664 Lubuk Dalam	Langkat	Juara 3
4.	Clinton Pandapotan Lubis	SD Sultan Hasanuddin	Labuhan Batu Utara	Harapan 1
5.	Ruhut Sion Simanjuntak	SDN 112224 Kota Pinang	Labuhan Batu Selatan	Harapan 2
6.	River Nahato	SDN 0411 Pasar ujung Batu	Padang Lawas	Harapan 3
D.	KRIYA ANYAM			
1.	Nur Hamijah Siregar	SDN 165730 Gunung Tua	Padang Lawas Utara	Juara 1
2	Dedek Andriansyah	SDN 165730 Tebing Tinggi	Tebing Tinggi	Juara 2



NO.	NAMA	SEKOLAH	KABUPATEN/KOTA	KETERANGAN
3.	Deni Firmansyah	SDN 056008 Secanggang	Langkat	Juara 3
4.	Evrida Manalu	SDN 084087 Kota Beringin	Labuhan Batu	Harapan 1
5.	Godang L. Sitanggang	SDN 31 Sinbulan	Samosir	Harapan 2
6.	Ilisawida	SDN 044 Huta Bangun Jae	Mandailing Natal	Harapan 3
E.	PANTONIM			
1.	M. Farid effendi	SD Harapan 1 Medan	Medan	Juara 1
2.	Rishi Fahrezi			
3.	Chris Fernando Zega	SD Lentera Harapan	Gunung Sitoli	Juara 2
4.	Dewi Natalia Zega			
5.	Jaka Al Rido	SDN 106172 Tuntungan	Deli Serdang	Juara 3
6.	Dinda Tri Walri			
7.	Rafli Al Farizi Manurung	SDN 132405 Tanjung Balai	Tanjung Balai	Harapan 1
8.	Arya Lesmana Chaniago			
9.	Michael M.T. Simamora	SD Bona Pasogit Sejahtera	Toba Samosir	Harapan 2
10.	Gregorius M. Siboro			
11.	Dino Pratyoga	SD PT MAI Padang Lawas	Padang Lawas	Harapan 3
12.	Heru Gunawan			

- 3) Lomba Olahraga Siswa SD Tingkat Provinsi** yang bertujuan untuk;
- Mengembangkan bakat dan minat siswa dalam bidang olahraga;
 - Membina dan mempersiapkan olahragawan berprestasi pada tingkat nasional maupun internasional sejak usia sekolah;
 - Mengembangkan jiwa sportivitas, kompetitif, rasa percaya diri, dan rasa tanggung jawab;
 - Mengembangkan budaya hidup sehat dan gemar berolahraga;
 - Menumbuhkembangkan nasionalisme dan cinta tanah air.
- Sasaran yang dituju adalah Siswa –siswa SD dengan memperlombakan 6 cabang olah raga yaitu Atletik, Tennis Meja, Bulu Tangkis, Volli Mini Putri, Catur dan Karate.



Hasil yang dicapai dari kegiatan ini ditingkat Provinsi adalah menghasilkan peserta terbaik dalam tiap cabang olahraga yang dipertandingkan yaitu :

NO.	NAMA	SEKOLAH	KABUPATEN/KOTA	KETERANGAN
A. KARATE PUTRA				
1.	Dwi Thama P	SDN 025281 Binjai Utara	Binjai	Juara 1
2.	Pisano Pederopa Silaen	SDN 165719 Bajenis	Tebing Tinggi	Juara 2
3.	Juan Prima Saragih	SDN 091347 Tigarunggu	Simalungun	Juara 3
4.	Edria Gilang Raka S	SDN 112137 Rantau Utara	Labuhan Batu	Harapan 1
5.	Abdullah Afif Damanik	MIN Gelugur Darat II Medan	Medan	Harapan 2
6.	Reonaldo Goklas G	SDN 102082 Bandar Khalifah	Serdang Bedagai	Harapan 3
B. KARATE PUTRI				
1.	Lala Tantri Sagala	SDN 056660 Kec. Selesai	Langkat	Juara 1
2.	Alya Sabina Muntasya	SD Muhammadiyah 18 Sidorame	Medan	Juara 2
3.	Kristina Marta Nainggolan	SDN 091288 Subaganding	Simalungun	Juara 3
4.	Risya Ayulia Putri P	SDN 025973 Binjai Selatan	Binjai	Harapan 1
5.	Mutiara Octavia	SDN 163092 Tebing Tinggi Kota	Tebing Tinggi	Harapan 2
6.	Thesa Pebrina Purba	SDN 040449 Kabanjahe	Karo	Harapan 3
C. CATUR PUTRA				
1.	Rizki Andrian	SDN 116907 Pangkalan Lunang	Labuhan Batu Utara	Juara 1
2.	Abdul Aziz	SDN 108 Aek Mata	Mandailing Natal	Juara 2
3.	Aqil Munawar Rambe	SDN 112221 Sei Berombang	Labuhan Batu	Juara 3
4.	Muhammad Habibi Lubis	SDN 050726 Tanjung Pura	Langkat	Harapan 1
5.	M. Bryan Ananda P	SDN 10623 Simalas Sipispis	Serdang Bedagai	Harapan 2
6.	Wira Yudha Ramadhan	SDN 101110 Gunung Tua	Padang Lawas Utara	Harapan 3
D. CATUR PUTRI				
1.	Rizki Trisnani	SDN 105355 Pagar Merbau	Deli Serdang	Juara 1
2.	Indah Sari	SDN 115458 Pangkalan Lunang	Labuhan batu Utara	Juara 2



NO.	NAMA	SEKOLAH	KABUPATEN/KOTA	KETERANGAN
3.	Annisa Lestari	SDN 026560 Binjai Barat	Binjai	Juara 3
4.	Devi Fitri tarigan	SDN 020267 Binjai Kota	Binjai	Harapan 1
5.	Mirhamah Azmi	SDN 112153 Rantau Selatan	Labuhan Batu	Harapan 2
6.	Nabila Amelia Putri Nst	SDN 017973 Kisaran Barat	Asahan	Harapan 3
E.	BULUTANGKIS TUNGGAL PUTRA			
1.	Erwin Syahputra	SD Al ittihad Bilah Hulu	Labuhan Batu	Juara 1
2.	M. Reza Pahlevi	SDN 101896 Kiri Hulu I	Deli Serdang	Juara 2
3.	Rudiansyah	SD Muhammadiyah Sei Baman	Serdang Bedagai	Juara 3
4.	Willyan Chandra	SD R.A. Kartini Sei Rampah	Serdang Bedagai	Harapan 1
5.	Rifqi Alpha Raja	SDN 014688 Sidomukti	Asahan	Harapan 2
6.	Arya Ananda Kusuma	SDN 112166 Aek Nabara	Labuhan Batu	Harapan 3
F.	BULUTANGKIS TUNGGAL PUTRI			
1.	Rahmadani Rambe	SDN 200402 Sabungan Jae	Padang Sidempuan	Juara 1
2.	Cut Nada Syifa Fauzi	SD Diponegoro Kisaran	Asahan	Juara 2
3.	Fenni Nadia Simatupang	SD Ulil Albab Siantar Timur	Pematang Siantar	Juara 3
4.	Widya Wulandari	SDN 064011 Medan Deli	Medan	Harapan 1
5.	Natalia Natasha	SD YP. Sutan Hasanuddin K	Labuhan Batu Utara	Harapan 2
6.	Keysha Aulia	SDN 112169 Danau Bale B	Labuhan Batu	Harapan 3
G.	TENIS MEJA PUTRA			
1.	Abim Ananda	SDN 101801 Deli Tua	Deli Serdang	Juara 1
2.	Muhammad Fadli	SDN 010092 Kisaran	Asahan	Juara 2
3.	MHd. Fahrijal Tanjung	SDN 163081 Tebing Tinggi	Tebing Tinggi	Juara 3
4.	Muhammad Faisal	SDN 112204 Cinta Makmur	Labuhan Batu	Harapan 1
5.	Rifqi Ngkim Masyhadi	SDN 0015881 Gambus Laut	Batubara	Harapan 2
6.	Andri Biduman Rambe	SDN 200117 Sadabuan	Padang Sidempuan	Harapan 3



NO.	NAMA	SEKOLAH	KABUPATEN/KOTA	KETERANGAN
H. TENIS MEJA PUTRI				
1.	Sinta Kumala Dewi	SDN 101801 Deli Tua	Deli Serdang	Juara 1
2.	Liza Annisa	SDN010163 Suka Maju	Batubara	Juara 2
3.	Putri Syabila Hidayat	SDN 116262 Kp. Gerojokan	Labuhan Batu Utara	Juara 3
4.	Bunga Kinanti	SDN056646 Sesirah Hal	Langkat	Harapan 1
5.	Marisha Pratiwi	SDN 064011 Mabar	Medan	Harapan 2
6.	Putri Amalia	SDN 165717 Padang Hulu	Tebing Tinggi	Harapan 3
I. ATLETIK PUTRA				
1.	Kusdi Syahputra	SDN 118385 Pinggir Jati		Juara 1
2.	Khairul Azmi	SDN 050586 Tanjung Jati		Juara 2
3.	Chandra Pratama	SDN 064011 Medan Deli		Juara 3
4.	Ardiansyah	SDN 106196 Galang		Harapan 1
5.	Muhammad Hadengganan	SDN 200301 Batunadua		Harapan 2
6.	Rizki Maulana	SDN 064011 Medan Deli		Harapan 3
J. ATLETIK PUTRI				
1.	Suryana Putri Aruan	SDN 118385 Pinggir Jati		Juara 1
2.	Nur Afsah	SDN 118385 Pinggir		Juara 2
3.	Tasya Roliana Sari	SDN 104206 Sei Rotan		Juara 3
4.	Tania Roliana Dewi	SDN 104206 Sei Rotan		Harapan 1
5.	Isni Nadhila	SDN 064011 Medan Deli		Harapan 2
6.	Ananda Rahmawati	SDN 064011 Medan Deli		Harapan 3
K. VOLLI MINI BEREGU PUTRI				
1.	Putri Indah Lestari	SD 064011 Medan Deli		Juara 1
2.	Amanda Hartati			
3.	Ulfatun Khoirun Nisa			
4.	Dewi Fahra Diva			
5.	Triska Alfira			



NO.	NAMA	SEKOLAH	KABUPATEN/KOTA	KETERANGAN
1.	Nur Adidna	SDN 01973 Kisaran Kota	Asahan	Juara 2
2.	Uswatun Hasanah M	SDN 017961 Pulau Rakyat Tua		
3.	Fanny Aprilia	SDN 017137 Pulau Rakyat		
4.	Dinda Ulfa Safitry	SDN 017137 Pulau Rakyat		
5.	Tasyaufi Mayleni Hakim	SDN 010057 Bunut		
1.	Feby Yolanda	SDN 112146 Bilah Barat	Labuhan Batu	Juara 3
2.	Anis Sasena			
3.	Rika Putri Amanda			
4.	Mitra Dwi Lestar			
5.	Marisa Haristita			
1.	Noviyanti D. Ramdani	SDN 200508 Sihitang	Padang Sidempuan	Harapan 1
2.	Winda Juli Pertiwi Srg	SDN 200212 Sayur Matinggi		
3.	Lovely Oudi Zulkifli	SDN 200508 Sihitang		
4.	Tata Nurhaliza	SDN 200508 Sihitang		
5.	Tiara Indrayani	SDN 200508 Sihitang		
1.	Ernawati	SDN 116262 Kp. Gerojakan	Labuhan Batu Utara	Harapan 2
2.	Nora Angelina P	SDN 117864 Suka Bangsa		
3.	Wahyu Diana	SDN 117864 Suka Bangsa		
4.	Ferra Damayanti	SDN 118385 Pinggir Jati		
5.	Sri Fadhillah Ramdani	SDN 117864 Suka Bangsa		
1.	Dilla Dizil Fitri Siregar	SDN 132406 Tj. Balai Selatan	Tanjung Balai	Harapan 3
2.	Anggita Putri Panjaitan			
3.	Wina Febi D. Putri			
4.	Sarah Annisa Putri			
5.	Damara Kartikasari S			

Sedangkan hasil yang diperoleh pada Lomba Olimpiade Olahraga SD Tingkat Nasional adalah : 1) Cabang Senam mendapat perolehan 1 (satu) Medali Perunggu atas nama **Stevany Olivia Siregar dari SDN 0607091 Kota Medan**; 2) Cabang Karate mendapat perolehan 2 (dua) Medali Perunggu atas nama **Dwi Thama P dari SDN 025281 Binjai Utara dan Lala Tantri Sagala dari SDN 0566000 Padang Brahrang Langkat**:



3) Cabang Kid's Athletics mendapat perolehan 4 (empat) Medali Perunggu atas nama ***Kusdi Syah Putra SDN 118385 Pinggir Jati Labuhan Batu Utara, Khairul Azmi SDN 050586 Tanjung Jati Langkat dan Suryana Putri Aruan SDN 118385 Pinggir Jati Labuhan Batu Utara serta Nur Afsah SDN SDN 118385 Pinggir Jati Labuhan Batu Utara.***

4) ***Pembinaan dan Pembekalan Calon Peserta Olimpiade Olahraga Dan Seni (O2SN) Tingkat Nasional Jenjang SD*** yang bertujuan; a) Meningkatkan rasa percaya diri dan motivasi peserta SD untuk dapat berprestasi setinggi mungkin; b) Menjalin persaudaraan diantara siswa peserta SD yang berasal dari berbagai daerah di Provinsi Sumatera Utara sehingga terbina kebersamaan antara siswa peserta Menciptakan kerjasama tim yang solid pada lomba yang dilakukan secara beregu sehingga terjalin keterpaduan diantara peserta; c) Memperluas wawasan dan pengetahuan peserta mengenai teknik dan strategi terbaik dalam menghadapi O2SN SD Tingkat Nasional melalui materi yang akan disampaikan oleh para narasumber. Sasaran yang akan dicapai adalah Siswa-siswa SD yang terseleksi dari lomba O2SN.

- Capaian Indikator Kinerja “**APK SMP/MTs**”, Tingkat ketercapaian sasaran strategis ini dilihat melalui indikator kinerja “APK SMP/MTs”. Adapun tingkat pencapaiannya adalah sebagai berikut :

Tabel 27
Capaian Kinerja APK SMP/MTs Tahun 2012-2014

Indikator Kinerja	Tahun 2012			Tahun 2013			Tahun 2014		
	Target	Realisasi	(%)	Target	Realisasi	(%)	Target	Realisasi	(%)
APK SMP/Mts	95,71	88,55	92,52	105,01	88,55	81,47	90,05	101,22	112,40

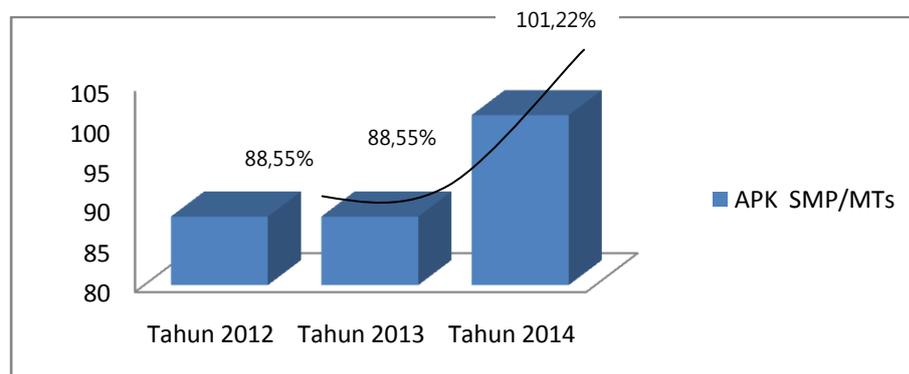
Sumber : Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara



Realisasi APK SMP/MTs Tahun 2014 mencapai 101.22% dengan target yang ditetapkan yaitu sebesar 90.05 % . Persentase pencapaian IKU ini adalah 112.40%, dimana perbandingan antara target dan realisasi terjadi kenaikan sebesar 1,17% . Sedangkan perbandingan antara realisasi kinerja tahun 2013 dan tahun 2014 kenaikannya mencapai 2,67% yaitu pada tahun 2013 realisasi kinerja sebesar 88,55 % menjadi 101,22 % pada tahun 2014.

Dimana jumlah penduduk usia 13-15 Tahun adalah 811.600 orang sedangkan jumlah siswa yang sekolah di SMP/MTs berjumlah 821.528 siswa. Berikut grafik Angka Partisipasi Kasar SMP/MTs dari Tahun 2012 sampai dengan Tahun 2014 :

Grafik 4
Capaian Kinerja APK SMP/MTs Tahun 2012-2014



- Capaian Indikator Kinerja “**APM SMP /MTs (%)**”,
Tingkat ketercapaian sasaran strategis ini dilihat melalui indikator kinerja “APK SMP/MTs”. Adapun tingkat pencapaiannya adalah sebagaimana tertera pada Tabel berikut :



Tabel 28
Capaian Kinerja APM SMP/MTs Tahun 2012-2014

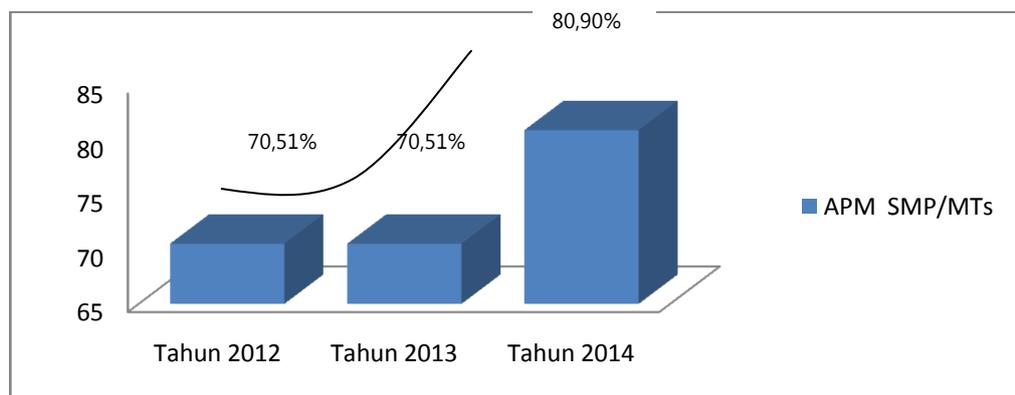
Indikator Kinerja	Tahun 2012			Tahun 2013			Tahun 2014		
	Target	Realisasi	(%)	Target	Realisasi	(%)	Target	Realisasi	(%)
APM SMP/MTs	74,29	70,51	94,91	97,52	70,51	72,30	72,23	80,90	112

Sumber : Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara

Realisasi APM SMP/MTs Tahun 2014 mencapai 80,90 % dengan target yang ditetapkan yaitu sebesar 72,23 % . Persentase pencapaian IKU ini adalah 112%, dimana perbandingan antara target dan realisasi terjadi kenaikan sebesar 9,67 %. Sedangkan perbandingan antara realisasi kinerja tahun 2013 dan tahun 2014 kenaikannya mencapai 10,39% yaitu pada tahun 2013 realisasi kinerja sebesar 70,51 % menjadi 80,90 % pada tahun 2014.

Dimana jumlah penduduk usia 13-15 Tahun adalah 811.600 orang sedangkan jumlah siswa usia 13-15 tahun yang sekolah di SMP/MTs berjumlah 656.573 siswa. Berikut grafik Angka Partisipasi Murni SMP/MTs dari Tahun 2012 sampai dengan Tahun 2014 :

Grafik 5
Capaian Kinerja APM SMP/MTs Tahun 2012-2014





Pencapaian realisasi kinerja dari APM SMP/MTs sebesar 80,90 9,67% melebihi dari dari target sebesar 72,23% dengan kenaikan sebesar 9,67% dan Target APK SMP/MTs sebesar 106,40 dengan realisasi kinerja sebesar 114,38% dengan kenaikan sebesar 1,17 % , hal ini karena didukung dengan adanya beberapa kegiatan yang dapat menunjang kenaikan APM dan APK SMP/MTs tersebut adalah :

- 1) ***1) Pembinaan dan Pembekalan Calon Peserta Olimpiade Olahraga Dan Seni (O2SN) Tingkat Nasional Jenjang SMP*** yang bertujuan untuk ; a) Memantapkan mental, meningkatkan kreatifitas dan strategi peserta; b) Meningkatkan rasa percaya diri dan memotivasi peserta O2SN Sekolah Menengah Pertama (SMP) untuk dapat berprestasi setinggi mungkin; c) Menjalin persaudaraan diantara siswa peserta O2SN SMP yang berasal dari berbagai daerah di Provinsi Sumatera Utara sehingga terbina kebersamaan antara siswa peserta; d) Menciptakan kerjasama tim yang solid pada lomba yang dilakukan secara beregu sehingga terjalin keterpaduan diantara peserta; e) Memperluas wawasan dan pengetahuan peserta mengenai tekni dan strategi dalam menghadapi O2SN SMP Tingkat Nasional melalui materi yang akan disampaikan oleh para narasumber. Sasaran kegiatan ini adalah siswa-siswa SMP yang terseleksi dari lomba O2SN. Hasil yang dicapai didalam kegiatan ini adalah menghasilkan peserta terbaik ditingkat nasional.

- 2) ***2) Seleksi Calon Peserta Olimpiade Sains Nasional (OSN) Jenjang SMP Tingkat Provinsi*** yang bertujuan untuk; a) Meningkatkan kemampuan SMP di bidang Mata Pelajaran Matematika, IPA (Biologi, Fisika) dan IPS, baik dalam bentuk pemahaman maupun analisis sebagai salah satu upaya peningkatan mutu pendidikan; b) Meningkatkan kemampuan daya saing siswa SMP dalam bidang akademik Matematika, IPA (Biologi, Fisika) dan IPS sekaligus merupakan even tingkat Provinsi dalam hal evaluasi prestasi



akademik yang diharapkan dapat memotivasi siswa dan sekolah dalam meningkatkan kualitasnya; c) Menjaring siswa-siswa terbaik dari jenjang SMP untuk menjadi peserta olimpiade sains tingkat nasional tahun 2014. Sasaran kegiatan ini adalah siswa-siswi jenjang SMP, SMP Terbuka, SD-SMP satu atap baik negeri maupun swasta. Adapun hasil yang dicapai dari kegiatan ini adalah; a) Meningkatnya kemampuan siswa SMP di Provinsi Sumatera Utara dalam Bidang Matematika, IPA (Biologi, Fisika) dan IPS; b) Meningkatnya motivasi siswa SMP dalam mengembangkan kapasitas intelektual dan kemampuan di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi.

3) Lomba Seni Siswa SMP Tingkat Provinsi yang bertujuan untuk; a) Menggali dan melestarikan seni dan budaya bangsa Indonesia yang tersebar di 34 provinsi; b) Membina dan mengingatkan kreativitas siswa dalam bidang seni dan sastra; c) Menanamkan dan membina apresiasi seni dan sastra, khususnya terhadap nilai-nilai tradisi yang berakar pada budaya bangsa; d) Mengembangkan sikap kompetitif dalam diri siswa yang berwawasan global. Sasaran kegiatan ini adalah siswa-siswi jenjang SMP baik negeri maupun swasta. Hasil yang dicapai dari Festival dan Lomba Seni Siswa Nasional jenjang Sekolah Menengah Pertama Tingkat Provinsi Sumatera Utara tahun 2014 adalah terseleksi siswa-siswa yang berprestasi dalam bidang seni.

4) Lomba Olahraga Siswa SMP Tingkat Provinsi yang bertujuan untuk ; a) Meningkatkan kecintaan dan apresiasi siswa SMP terhadap bidang olahraga; b) Meningkatkan kecakapan kolaboratif dan kooperatif para siswa SMP; c) Meningkatkan kesehatan jasmani siswa; d) Meningkatkan mutu akademis siswa; e) Menciptakan kondisi kompetitif secara sehat; f) Melatih sportivitas dan tanggungjawab; g) Mengembangkan bakat dan minat siswa dalam olahraga; h) Meningkatkan persatuan dan kesatuan antara siswa seluruh Indonesia. Hasil yang dicapai dari kegiatan ini adalah terseleksinya dan terpilihnya siswa SMP terbaik



dari Provinsi Sumatera Utara sebagai peserta Olimpiade Olah Raga Siswa di Tingkat Nasional dengan pemenang sebagai berikut :

NO.	NAMA	SEKOLAH	KABUPATEN/KOTA	KETERANGAN
A. KARATE PUTRA				
1.	Lutfi Ade Wirtansyah	SMPN 20 Medan Marelان	Medan	Juara 1
2.	Kaisar Anugerah Amin S.	SMPN 1 Kisaran	Asahan	Juara 2
3.	Rizky Lawyer Napitupulu	SMP Methodist Binjai Kota	Binjai	Juara 3
4.	Sabri Vendi Damanik	SMPN1 Purba	Simalungun	Harapan 1
5.	Agus Surya Hidayat	SMPN 1 Stabat	Langkat	Harapan 2
6.	Jhon Piter P. Butarbutar	SMPN2 Padang Sidempuan	Padang Sidempuan	Harapan 3
B. KARATE PUTRI				
1.	Lutfi Ade Wirtansyah	SMPN 20 Medan Marelان	Medan	Juara 1
2.	Kaisar Anugerah Amin S.	SMPN 1 Kisaran	Asahan	Juara 2
3.	Rizky Lawyer Napitupulu	SMP Methodist Binjai Kota	Binjai	Juara 3
4.	Sabri Vendi Damanik	SMPN1 Purba	Simalungun	Harapan 1
5.	Agus Surya Hidayat	SMPN 1 Stabat	Langkat	Harapan 2
6.	Jhon Piter P. Butarbutar	SMPN2 Padang Sidempuan	Padang Sidempuan	Harapan 3
C. CATUR PUTRA				
1.	Eikel Suranta Sembiring	SMP St. Maria Kabanjahe	Karo	Juara 1
2.	Devin Larson	SMP Methodist 2 Medan	Medan	Juara 2
3.	Wahyudin	SMPN 4 Tanjung Tiram	Batu Bara	Juara 3
4.	T. Mhd. Faqih Rahman	SMPN 2 Tanjung Balai	Tanjung Balai	Harapan 1
5.	Amsal Frans Harapenta S	SMP Cinta Rakyat 1 Siantar Selatan	Pematang Siantar	Harapan 2
6.	Tri Ramadhan Nasution	SMPN 3 Tebing Tinggi Kota	Tebing Tinggi	Harapan 3
D. CATUR PUTRI				
1.	Adinda Triana	SMPN1 Padang Bolak	Padang Lawas Utara	Juara 1
2.	Irene Johanna	SMP Methodist Charles Wesley	Medan	Juara 2
3.	Michara Ghida Mollie	SMPN 1 Kota Pinang	Labuhan Batu Selatan	Juara 3
4.	Laras Joefanny	SMPN 1 Delitua	Deli Serdang	Harapan 1
5.	Venny Putri Nadeak	SMPN 1 Pakkat	Humbang Hasundutan	Harapan 2
6.	Elsa Febrina Siahaan	SMPN 5 Datuk Bandar	Tanjung Balai	Harapan 3



NO.	NAMA	SEKOLAH	KABUPATEN/KOTA	KETERANGAN
E.	BULUTANGKIS TUNGGAL PUTRA			
1.	Bobby Alfiero R. Hardja	SMN 27 Medan	Medan	Juara 1
2.	Thiery Henry Phanestu	SMP Methodist Pematang Siantar	Pematang Siantar	Juara 2
3.	Aldy Prassetia	SMP Nur Azizi Tanjung Morawa	Deli Serdang	Juara 3
4.	Azida William V. Sitorus	SMPN 2 Kisaran	Asahan	Harapan 1
5.	Iwan efendi	SMPN 7 Padang Hilir	Tebing Tinggi	Harapan 2
6.	Jerniman David S. Laoli	SMPN Gido	Nias	Harapan 3
F.	BULUTANGKIS TUNGGAL PUTRI			
1.	Nova Sesarina Sembiring	SMPN 1 Pancurbatu	Deli Serdang	Juara 1
2.	Azinar Modi	SMPN 2 Medan	Medan	Juara 2
3.	Siti Fadhila Andrayani	SMPN 2 Tebing Tinggi Kota	Tebing Tinggi	Juara 3
4.	Chici Damayanti	SMPN 1 Torgamba	Labuhan Batu Selatan	Harapan 1
5.	Renita Handayani Br. S	SMPN 1 Tanjung Balai Selatan	Tanjung Balai	Harapan 2
6.	Raudhotul Falah Rambe	SMP Sultan Hasanuddin Aek kanopan	Labuhan Batu Utara	Harapan 3
G.	RENANG PUTRA			
1.	Jeico Muaro Sibarani	SMPN 1 Medan	Medan	Juara 1
2.	Erian Arief Pratama	SMPN 3 Tanjung Morawa	Deli Serdang	Juara 2
3.	Wahyu Adha	SMPN 2 Tanjung Balai	Tanjung Balai	Juara 3
4.	Kelvin LO	SMP F.Tandean Tebing Tinggi	Tebing Tinggi	Harapan 1
5.	Alberwyk Nusabel Nainggolan	SMPN 6 kisaran	Asahan	Harapan 2
6.	Aaron Felix Hasibuan	SMP Tunas Harapan Mandiri	Labuhan Batu	Harapan 3
H.	RENANG PUTRI			
1.	Annisa Putri	SMP 2 Hikmatul Fadhillah Medan	Medan	Juara 1
2.	Febry Tiarma Tambunan	SMPN 4 Binjai	Binjai	Juara 2
3.	Hanisya Irani Lubis	SMPN 3 Kisaran	Asahan	Juara 3
4.	Yosepha Yesika Panjaitan	SMPN 4 Balige	Toba Samosir	Harapan 1
5.	Annisa Dwi Adila	SMPN 1 Percut Sei Tuan	Deli Serdang	Harapan 2
6.	Syalla Tora	SMPN 3 Rantau Utara	Labuhan Batu	Harapan 3



NO.	NAMA	SEKOLAH	KABUPATEN/KOTA	KETERANGAN
I.	ATLETIK PUTRA			
1.	Yudi Pratama	SMP Islamiyah Hessa Air Genting	Asahan	Juara 1
2.	Mustofah Hafifi	SMPN 6 Padangbolak	Padang Lawas Utara	Juara 2
3.	Aldi Musadiq	SMPN 5 Tanjung Balai	Tanjung Balai	Juara 3
4.	Heri Chandra Hasugian	SMPN 1 Parlilitan	Humbang Hasundutan	Harapan 1
5.	Indra Andrian Syahputra	SMPN 9 Binjai	Binjai	Harapan 2
6.	M. Yusri Ramadhan	SMPN 2 Tanjung Tiram	Batu Bara	Harapan 3
J.	ATLETIK PUTRI			
1.	Epiariani Br Tarigan	SMP Masehi Sibirubiru	Deli Serdang	Juara 1
2.	Desi Dornauli Br Lubis	SMP RK Bintang Timur Rantau Prapat	Labuhan Batu	Juara 2
3.	Putri Hartaini	SMPN 6 Kisaran	Asahan	Juara 3
4.	Miranda Pradina	SMPN 2 Satap Batang Serangan	Langkat	Harapan 1
5.	Siska Aminah	SMP Nasional	Deli Serdang	Harapan 2
6.	Mawadara Rahman	SMPN 1 Tanjung Balai	Tanjung Balai	Harapan 3

▪ Capaian Indikator Kinerja “Angka kelulusan SD/ MI (%)”,

Peningkatan kelulusan SD/MI untuk mendukung tuntasnya Wajib Belajar Pendidikan Dasar 9 (sembilan) Tahun. Tingkat ketercapaian sasaran strategis ini dilihat melalui indikator kinerja “Angka kelulusan SD/MI. Adapun tingkat pencapaiannya adalah sebagai berikut :

Tabel 29
Capaian Kinerja Angka Kelulusan SD/MI Tahun 2012-2014

Indikator Kinerja	Tahun 2012			Tahun 2013			Tahun 2014		
	Target	Realisasi	(%)	Target	Realisasi	(%)	Target	Realisasi	(%)
Angka Kelulusan SD/MI	100	100	100	100	100	100	99,60	100	100,40

Sumber : Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara



Realisasi Angka kelulusan SD/MI Tahun 2014 mencapai 100 % dengan target yang ditetapkan yaitu sebesar 99,60% . Persentase pencapaian IKU ini adalah 100,40 %, dimana perbandingan antara target dan realisasi terjadi kenaikan sebesar 0,40 %. Sedangkan perbandingan antara realisasi kinerja tahun 2013 dan tahun 2014 sama yaitu pada tahun 2013 realisasi kinerja sebesar 100 % dan 100 % pada tahun 2014. Dimana jumlah siswa SD/MI yang mengikuti ujian akhir sekolah adalah berjumlah 288.626 siswa sedangkan jumlah siswa SD/MI yang lulus berjumlah 288.626 siswa

▪ Capaian Indikator Kinerja “**Angka kelulusan SMP/ MTs (%)**”,

Peningkatan kelulusan SMP/MTs untuk mendukung tuntasnya Wajib Belajar Pendidikan Dasar 9 (sembilan) Tahun. Tingkat ketercapaian indikator kinerja “Angka kelulusan SMP/MTs, pencapaiannya adalah sebagai berikut :

Tabel 30
Capaian Kinerja Angka Kelulusan SMP/MTs Tahun 2012-2014

Indikator Kinerja	Tahun 2012			Tahun 2013			Tahun 2014		
	Tar get	Real isasi	(%)	Tar get	Realisasi	(%)	Tar get	Realisasi	(%)
Angka Kelulusan SD/MI	100	99,87	99,87	100	99,68	99,68	100	99,92	99,92

Sumber : Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara

Realisasi Angka kelulusan SMP/MTs Tahun 2014 mencapai 99,92 % dengan target yang ditetapkan yaitu sebesar 100% . Persentase pencapaian IKU ini adalah 99,92 %, dimana perbandingan antara target dan realisasi tidak mencapai target yang diinginkan yaitu sebesar 0,08% . Sedangkan perbandingan antara realisasi kinerja tahun 2013 dan tahun 2014 kenaikannya mencapai 0,24% yaitu pada tahun 2013 realisasi kinerja sebesar 99,368 % menjadi 99, 92 % pada tahun 2014. Dimana jumlah siswa SMP/MTs yang mengikuti ujian akhir sekolah adalah berjumlah 249.290 siswa sedangkan jumlah siswa SMP/MTs yang lulus berjumlah 249.083. siswa



- Capaian Indikator Kinerja “Angka Partisipasi Kasar (APK) SMA/MA/SMK (%)”, Program pendidikan menengah dan Program Pendidikan Menengah Kejuruan diarahkan untuk meningkatkan akses ketersediaan dan keterjangkauan layanan pendidikan menengah dan terus meningkatkan kualitas lulusan yang dihasilkan, relevansi dan berkesetaraan. Dengan program ini diharapkan akan meningkatkan Angka Partisipasi Kasar pendidikan menengah dan menghasilkan lulusan yang berkualitas. Program ini dilaksanakan untuk mendukung tujuan strategis Tingkat ketercapaian sasaran strategis ini dilihat melalui indikator kinerja “APK SMA/MA/SMK”. Adapun tingkat pencapaiannya adalah sebagai berikut :

Tabel 31
Capaian Kinerja APK SMA/MA/SMK
Tahun 2014

Indikator Kinerja	Tahun 2012			Tahun 2013			Tahun 2014		
	Target	Realisasi	(%)	Target	Realisasi	(%)	Target	Realisasi	(%)
APK SMA/MA/SMK	86,29	80,58	93,38	89,99	80,58	89,55	82,92	86,74	106,41

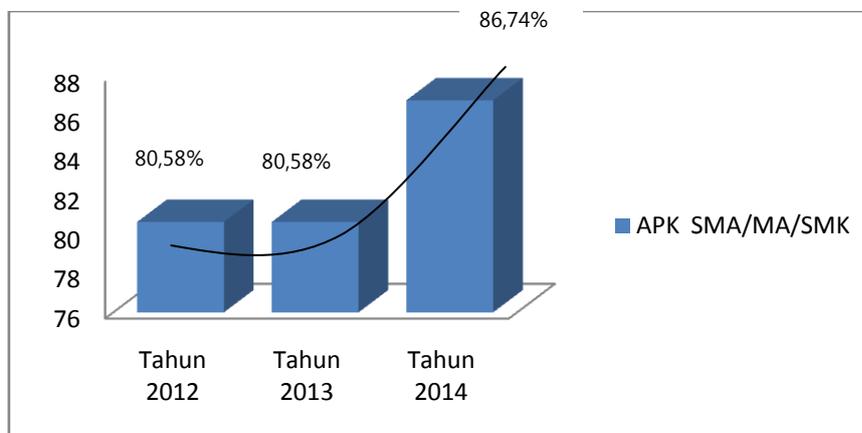
Sumber : Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara

Realisasi APK SMA/MA/SMK Tahun 2014 mencapai 86,74 % dengan target yang ditetapkan yaitu sebesar 82,92 %. Persentase pencapaian IKU ini adalah 106,41%, dimana perbandingan antara target dan realisasi terjadi kenaikan sebesar 3,82 % . Sedangkan perbandingan antara realisasi kinerja tahun 2013 dan tahun 2014 kenaikannya mencapai 6,16% yaitu pada tahun 2013 realisasi kinerja sebesar 80,58 % menjadi 86,74 % pada tahun 2014.

Dimana jumlah penduduk usia 16-18 Tahun adalah 788.600 orang sedangkan jumlah siswa yang sekolah di SMA/MA/SMK berjumlah 684.052 siswa. Berikut grafik Angka Partisipasi Kasar SMA/MA/SMK dari Tahun 2012 sampai dengan Tahun 2014 :



Grafik 6
Capaian Kinerja APK SMA/MA/SMK
Tahun 2012-2014



- Capaian Indikator Kinerja “**APM SMA/MA/SMK (%)**”, Tujuan utama yang diharapkan untuk pencapaian sasaran strategis meningkatnya APM SMA/MA/SMK adalah meningkatnya akses pendidikan menengah. Tingkat ketercapaian sasaran strategis ini, dilihat melalui IKU “APM SMA/MA/SMK”. Adapun tingkat pencapaian IKU tersebut adalah sebagai berikut.:

Tabel 32
Capaian Kinerja APM SMA/MA/SMK Tahun 2014

Indikator Kinerja	Tahun 2012			Tahun 2013			Tahun 2014		
	Target	Realisasi	(%)	Target	Realisasi	(%)	Target	Realisasi	(%)
APM SMA/MA/SMK	71,59	60,02	83,84	74,59	63,01	84,48	64	64,36	100,56

Sumber : Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara

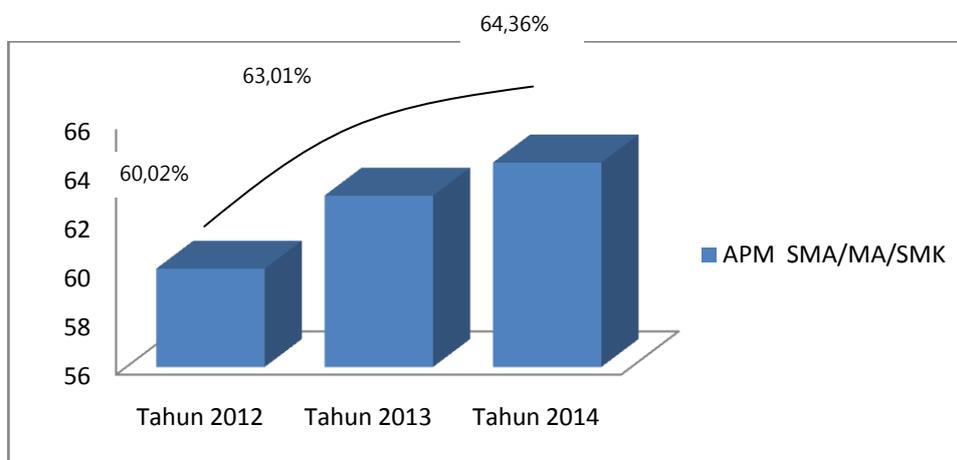
Realisasi APM SMA/MA/SMK Tahun 2014 mencapai 64,36 % dengan target yang ditetapkan yaitu sebesar 64 %. Persentase pencapaian IKU ini adalah 100,56%, dimana perbandingan antara target dan realisasi terjadi kenaikan sebesar 0,36 %. Sedangkan perbandingan antara realisasi kinerja tahun 2013 dan tahun 2014 kenaikannya mencapai 1,35 % yaitu pada tahun 2013 realisasi



kinerja sebesar 63,01 % menjadi 64,36 % pada tahun 2014. Dimana jumlah penduduk usia 16-18 Tahun adalah 788.600 orang sedangkan jumlah siswa usia 16-18 tahun yang sekolah di SMA/MA/SMK berjumlah 507.566 siswa,

Perbandingan APK Angka Partisipasi Murni SMA/MA/SMK dari Tahun 2012 sampai dengan Tahun 2014 dapat dilihat pada Grafik di bawah ini :

Grafik 7
Capaian Kinerja APM SMA/MA/SMK Tahun 2012-2014



- Capaian Indikator Kinerja “**Angka kelulusan SMA/MA/SMK (%)**”,

Tingkat ketercapaian sasaran strategis ini dilihat melalui indikator kinerja “Angka Kelulusan SMA/MA/SMK”. Adapun tingkat pencapaiannya adalah sebagai berikut :

Tabel 33
Capaian Kinerja Angka Kelulusan SMA/MA/SMK Tahun 2014

Indikator Kinerja	Tahun 2012			Tahun 2013			Tahun 2014		
	Target	Realisasi	(%)	Target	Realisasi	(%)	Target	Realisasi	(%)
Angka Kelulusan SMA/MA/SMK	90,60	99,87	110,23	90,60	99,88	110,24	90,60	99,72	110,07

Sumber : Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara



Realisasi indikator Angka Kelulusan SMA/MA/SMK Tahun 2014 mencapai 99,72% dengan target yang ditetapkan yaitu sebesar 90,60 % . Persentase pencapaian IKU ini adalah 110,07 %, dimana perbandingan antara target dan realisasi terjadi kenaikan sebesar 0,12% . Sedangkan perbandingan antara realisasi kinerja tahun 2013 dan tahun 2014 penurunan sebesar 0,16% yaitu pada tahun 2013 realisasi kinerja sebesar 99,88 % menjadi 99,72 % pada tahun 2014.

Dimana jumlah peserta Ujian Nasional Tahun 2014 adalah 203.309 siswa sedangkan jumlah siswa yang lulus di SMA/MA/SMK berjumlah 202.748 siswa, dengan ketentuan siswa SMA/MA yang terdaftar berjumlah 119.315 dengan kelulusan sebesar 118.802 siswa sedangkan siswa SMK yang terdaftar berjumlah 83.994 siswa dengan kelulusan sebesar 83.946 siswa.

Untuk mencapai kinerja dari peningkatan APM dan APK SMA/MA/SMK, dan Angka kelulusan SAMA/MA/SMK tahun 2014 ini didukung dari beberapa kegiatan yang dilaksanakan Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara melalui Bidang Pendidikan Menengah dan Pendidikan Tinggi yaitu :

- 1) ***Lomba Pidato dan Debat Bahasa Inggris Tingkat SMA Negeri/Swasta*** yang bertujuan untuk :
 - a) Meningkatkan kemampuan Bahasa Inggris lisan, dan menciptakan kompetisi yang sehat antar siswa;
 - b) Meningkatkan kemampuan siswa untuk berpikir kritis dan analitis, sehingga siswa mampu bersaing di tingkat nasional maupun internasional;
 - c) Mengembangkan kemampuan siswa dalam menyampaikan pendapat secara logis dan sistematis. Sasaran dari kegiatan ini adalah siswa-siswa SMA Negeri dan Swasta dari 33 Kabupaten Kota se-Provinsi Sumatera Utara sebanyak 3 (tiga) orang per kabupaten/kota ditambah 1 (satu)orang pendamping yang kesemuanya berjumlah 99 siswa dan 33 pendamping.



Hasil yang dicapai setelah melalui penilaian dari dewan juri yang ditunjuk maka didapat utusan yang akan menjadi Duta Provinsi Sumatera Utara di tingkat Nasional yaitu dari Kabupaten Karo atas nama **HANA SERBINA Br. SEMBIRING, RIVANTI Br. TARIGAN, HARIZKHA VALENTINE**, yang berasal dari SMA Negeri 1 Kabanjahe Kabupaten Karo;

- 2) **Lomba Pidato dan Debat Bahasa Indonesia Tingkat SMA Negeri/Swasta** yang bertujuan untuk; a) Meningkatkan kemampuan Bahasa Indonesia lisan, dan menciptakan kompetisi yang sehat antar siswa; b) Meningkatkan kemampuan siswa untuk berpikir kritis dan analitis, sehingga siswa mampu bersaing di tingkat nasional maupun internasional; c) Mengembangkan kemampuan siswa dalam menyampaikan pendapat secara logis dan sistematis. Sasaran kegiatan ini adalah siswa-siswa SMA Negeri dan Swasta dari 33 Kabupaten Kota se-Provinsi Sumatera Utara sebanyak 3 (tiga) orang per kabupaten/kota ditambah 1 (satu) orang pendamping yang kesemuanya berjumlah 99 siswa dan 33 pendamping. Hasil yang dicapai setelah melalui penilaian dari dewan juri yang ditunjuk maka didapat utusan yang akan menjadi Duta Provinsi Sumatera Utara di tingkat Nasional yaitu dari Kabupaten Karo atas nama **HANA SERBINA Br. SEMBIRING, RIVANTI Br. TARIGAN, HARIZKHA VALENTINE**, yang kesemuanya berasal dari SMA Negeri 1 Kabanjahe Kabupaten Karo. Untuk Data Juara selengkapnya adalah :

NO.	NAMA	ASAL SEKOLAH	KABUPATEN KOTA	JUARA
1	HANA SERBINA Br. SEMBIRING	SMA NEGERI 1 KABAN JAHE	KARO	1
2	RIVANTI Br. TARIGAN	SMA NEGERI 1 KABAN JAHE	KARO	1
3	HARIZKHA VALENTINE	SMA NEGERI 1 KABAN JAHE	KARO	1
4	FADIL WIJAYA	SMA NEGERI 1 STABAT	LANGKAT	2
5	SARAH MELISA	SMA NEGERI 1 STABAT	LANGKAT	2



NO.	NAMA	ASAL SEKOLAH	KABUPATEN KOTA	JUARA
6	INTAN ALVIANTY AGUSTINA	SMA NEGERI 1 STABAT	LANGKAT	2
7	NADIA SALSABILA	SMA SHAFIYYATUL AMALIYYAH	MEDAN	3
8	AWI TIFANI MAYANDISA HARAHAP	SMA SHAFIYYATUL AMALIYYAH	MEDAN	3
9	UMMI RAHIMAH POHAN	SMA SHAFIYYATUL AMALIYYAH	MEDAN	3
10	FERRY IRAWAN	SMA S TRIRATNA SIBOLGA	SIBOLGA	4
11	NANDA PUTRI MARDIANA SINAGA	SMA NEGERI 1 SIBOLGA	SIBOLGA	4
12	RIZKITHA MARTONO PUTRI	SMA NEGERI 3 SIBOLGA	SIBOLGA	4

3) Seleksi Olimpiade Sains SMA Tingkat Provinsi Sumatera Utara yang bertujuan untuk;

- a) Menumbuh kembangkan peserta dan siswa-siswi SMA pada umumnya untuk lebih berbudaya kompetitif, jujur, berpikir kritis, cinta iptek, dan mampu menerapkan “problem solving” dalam proses pembelajaran di sekolah;
- b) Untuk mendapatkan siswa-siswi pemenang/juara Olimpiade Sains SMA tingkat Provinsi Sumatera Utara tahun 2013 yang selanjutnya menjadi utusan Provinsi Sumatera Utara pada Olimpiade Sains Nasional Tahun 2014 di Mataram Nusa Tenggara Barat pada tanggal 1 s.d. 7 September 2014;
- c) Meningkatkan kecerdasan dan keterampilan siswa dalam rangka mewujudkan pendidikan yang berkualitas. Sasaran kegiatan ini adalah 27 (dua puluh tujuh) Siswa SMA Negeri dan Swasta terdiri dari 3 siswa dari masing masing 10 (sepuluh) mata lomba dari 33 Kabupaten Kota se-Provinsi Sumatera Utara ditambah 3 (tiga) pendamping/ kabupaten kota yaitu Bidang studi Matematika, Bidang studi Fisika, Bidang studi Kimia, Bidang studi Biologi, Bidang studi Komputer, Bidang studi Astronomi, Bidang studi Ekonomi, Bidang studi Kebumihan, Bidang studi Geografi.



4) Lomba Seni Siswa SMA Tingkat Provinsi yang bertujuan untuk;

- a) Memberikan pengalaman berkopetensi dengan menjunjung tinggi nilai kejujuran untuk mencapai prestasi tertinggi bidangnya;
 - b) Membina dan meningkatkan dan apresiasi siswa terhadap bidang seni yang berakar pada budaya bangsa;
 - c) Mempererat persahabatan, persatuan dan kesatuan bangsa sesama siswa Indonesia yang berasal dari berbagai karakter dengan tingkat keterampilan dan budaya yang berbeda;
- d) Turut berkontribusi terhadap pengembangan industri pariwisata dan ekonomi kreatif. Sasaran kegiatan ini adalah siswa-siswa SMA Negeri dan Swasta dari 33 Kabupaten Kota se-Provinsi Sumatera Utara sebanyak 14 (empat belas) orang per kabupaten/kota ditambah 2 (dua) orang pendamping yang kesemuanya berjumlah 528 (lima ratus delapan) orang. Hasil yang dicapai Setelah melalui penilaian dari dewan juri yang ditunjuk maka didapat pemenang yang akan menjadi Duta Provinsi Sumatera Utara untuk mengikuti Festival Lomba Seni Siswa Tingkat Nasional yaitu :

BIDANG LOMBA	NAMA	ASAL SEKOLAH	KABUPATEN KOTA
Seni Baca Ouisi	Bernike R.S Femene Zega	SMAN 1 Gunung Sitoli	Gunung Sitoli
Seni Cipta Puisi	Hanisah Putri	SMAN 1 Kota Pinang	Labuhan Batu Selatan
Seni Desain Poster Putra	Artha Providensia Gulo	SMAN 3 Gunung Sitoli	Gunung Sitoli
Seni Desain Poster Putri	Jessica Chandra	SMA Chandra Kusuma	Medan
Seni Drama/Teater	Nadya Shafira. K	SMAN 4 Medan	Medan
BIDANG LOMBA	NAMA	ASAL SEKOLAH	KABUPATEN KOTA
Seni Drama/Teater	Maria Meideline. S	SMAN 4 Medan	Medan
Seni Drama/Teater	Johanes Kreitiadi. T	SMAN 4 Medan	Medan



BIDANG LOMBA	NAMA	ASAL SEKOLAH	KABUPATEN KOTA
Seni Drama/Teater	Febri Muhayarani	SMAN 4 Medan	Medan
Seni Drama/Teater	Nurul Zahira. P	SMAN 4 Medan	Medan
Seni Drama/Teater	Muhammad harisan	SMAN 4 Medan	Medan
Seni Film Pendek	Richard Shanahan Simba	SMA Chandra Kusuma	Medan
Seni Film Pendek	Rizon Lazarus Sinaga	SMA Chandra Kusuma	Medan
Seni Kriya Putra	Dimas Leria	SMAN 1 Medan	Medan
Seni Kriya Putri	Stefani Miranda Duha	SMAN 1 Gunung Sitoli	Gunung Sitoli
Seni Tari Berpasangan	Riza Hermawan	SMAN 1 Rantau Utara	Labuhan Batu
Seni Tari Berpasangan	Raja Syahputra	SMAN 1 Rantau Utara	Labuhan Batu
Seni Vocal Solo Putra	Muhammad Abrar	SMAN 2 Tebing Tinggi	Tebing Tinggi
Seni Vocal Solo Putri	Adiani Puspaidah Bu'ulolo	SMA Pemda 1 Gunung Sitoli	Gunung Sitoli

Hasil yang diperoleh pada Lomba Olimpiade Sains Nasional (OSN) SMA Tingkat Nasional adalah :

- 1) Mendapat perolehan 1 (satu) Medali Emas atas nama ***Toby Rufeo SMAS Sutomo 1 Medan pada Bidang Study Astronomi;***
- 2) Mendapat perolehan 4 (empat) Medali Perak atas nama ***Prabowo SMAS 1 Sutomo Medan dan Ragil Al Badrun Pasaribu SMAN 1 Sibolga pada Bidang Studi Komputer serta Indra Megah Setiawan Harahap MAS Darul Mursyid dan Yovita tisarda Febriani pada Bidang Studi Ekonomi***
- 3) Mendapat perolehan 3 (tiga) Medali Perunggu atas nama ***Ryan Eka Cahaya SMAS Sutomo 1 Medan Bidang Studi Fisiks, Haris Munawar Lubis SMAS Unggulan CT Foundation pada Bidang Studi Kimia dan Brian Yaputra SMAS Sutomo 1 Medan pada Bidang Studi Astronomi.***

Lomba Olahraga Siswa SMA Tingkat Provinsi yang bertujuan untuk;



- a) Menumbuh kembangkan iklim kompetisi yang sehat di lingkungan peserta didik jenjang pendidikan menengah di tingkat Sekolah, Kabupaten/Kota, Provinsi, dan Nasional;
- b) Menjaring peserta didik unggul pada jenjang pendidikan menengah dalam bidang Olahraga untuk disiapkan menjadi Tim Provinsi Sumatera Utara dalam kompetisi di tingkat Nasional;
- c) Meningkatkan motivasi peserta didik menengah dalam penguasaan bidang olahraga; Memacu terjadinya peningkatan mutu pendidikan, khususnya bidang olahraga, pada jenjang pendidikan menengah;
- d) Meningkatkan rasa persaudaraan dan persatuan antar generasi muda se-Provinsi Sumatera Utara;
- e) Memberikan kesempatan kepada peserta didik jenjang SMA mengenali keragaman budaya dan kebiasaan dari berbagai Kabupaten/ Kota;
- f) Meningkatkan kreativitas peserta didik jenjang pendidikan menengah (SMA). Hasil yang dicapai setelah melalui penilaian dewan juri yang ditunjuk maka didapat pemenang yang akan menjadi Duta Provinsi Sumatera Utara untuk mengikuti Olimpiade Olahraga Siswa Nasional yaitu :

BIDANG LOMBA	NAMA PESERTA	ASAL SEKOLAH	Kab/Kota
Pencak Silat	Rizki Berkat Yakin	SMA Negeri 1 Tanjung Tiram	Kab. Batu Bara
Pencak Silat	Adinda Mawaddah	SMA Muhammadiyah 1 Medan	Kota Medan
Pencak Silat	Kisa Sael Gurusinga	SMA Galih Agung	Kab. Deli Serdang
Pencak Silat	Vivi Handryani	SMA Sinar Husni	Kab. Deli Serdang
Pencak Silat	Rahmat Solihin Manik	SMA Negeri 1 Lubuk Pakam	Kab. Deli Serdang
Pencak Silat	Ita Juliana Br Surbakti	SMA Negeri 3 Binjai	Kota Binjai
Tenis Meja	Teuku Nyak' an	SMA Negeri 2 Lubuk Pakam	Kab. Deli Serdang
Tenis Meja	Melza Afiati	SMA Negeri 3 Binjai	Kota Binjai



BIDANG LOMBA	NAMA PESERTA	ASAL SEKOLAH	Kab/Kota
Badminton	Ilham Hamid	SMA Negeri 2 Padang Sidempuan	Kota Padang Sidempuan
Badminton	Nia Anggraini Florensia Sinisuka	SMA Negeri 2 Medan	Kota Medan
Karate	Fernanda Edianto	SMA Negeri 2 Medan	Kota Medan
Karate	Ajeng Mutya	SMA Negeri 1 Stabat	Kab. Langkat
Karate	M. Fajar Al-Isfahri	SMA Negeri 16 Medan	Kota Medan
Karate	Rissha Laurens	SMA Negeri 4 Medan	Kota Medan
Karate	M. Fahmi Sanusi	SMA Negeri 4 Medan	Kota Medan
Karate	Mutia Putri	SMA Negeri 4 Medan	Kota Medan
Catur	M.Fahri Agung Nasution	SMA An Nadwa	Kota Binjai
Catur	Ayulasi Br. Ginting	SMA Negeri 1 Binjai	Kota Binjai

Sumber : Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara

Hasil yang diperoleh pada Lomba Olimpiade Olahraga Siswa Nasional (O2SN) SMA Tingkat Nasional adalah : 1) Mendapat perolehan 1 (satu) Medali Emas atas nama **M. Fahmi Sanusi oby Rufe, SMAN 4 Medan pada Cabang Karate**; 2) Mendapat perolehan 5 (lima) Medali Perunggu atas nama **Fernanda Edianto, SMAN 2 Medan Cabang Karate, Mutia Putri, SMAN 4 Medan Cabang Karate, Adinda Mawadah SMAS Muhammadiyah 1 Medan Cabang Pencak Silat, Kisa Sael Gurusinga, SMAS Galih Agung Cabang Pencak Silat dan Teuku Nyak'an SMAN 2 lubuk Pakam Canag Tennis Meja.** 6) **Seleksi dan Pengiriman O2SN Siswa Berprestasi Tingkat Provinsi Sumatera Utara** yang bertujuan untuk; a) Menumbuh kembangkan iklim kompetisi yang sehat di lingkungan peserta didik jenjang pendidikan menengah di tingkat Sekolah, Kabupaten/Kota, Provinsi, dan Nasional; b) Menjaring peserta didik unggul pada jenjang pendidikan menengah dalam bidang Olahraga untuk disiapkan menjadi Tim Provinsi Sumatera Utara dalam kompetisi di tingkat Nasional; c) Meningkatkan motivasi peserta didik menengah dalam penguasaan bidang olahraga; d) Memacu terjadinya peningkatan mutu pendidikan, khususnya bidang olahraga, pada jenjang pendidikan menengah; e) Meningkatkan rasa persaudaraan dan persatuan antar generasi muda se- Provinsi Sumatera Utara; f) Memberikan kesempatan kepada peserta didik jenjang SMK



mengenali keragaman budaya dan kebiasaan dari berbagai Kabupaten/ Kota; g) Meningkatkan kreativitas peserta didik jenjang pendidikan menengah (SMK). Hasil yang dicapai setelah melalui penilaian dewan juri yang ditunjuk maka didapat pemenang yang akan menjadi Duta Provinsi Sumatera Utara untuk mengikuti Olimpiade Olahraga Siswa Nasional yaitu :

NAMA	CABANG	ASAL SMK
MELI KRISNAWATI	VOLLY PUTRI	SMK NEGERI 1 RANTAU UTARA
LUSIANA	VOLLY PUTRI	SMK SWASTA AMIR HAMZAH INDRAPURA
RINA NURJANA	VOLLY PUTRI	SMK NEGERI 1 RANTAU UTARA
RIZKY KUSHARDI	VOLLY PUTRI	SMK SWASTA PERSIAPAN
FUJI ERNATI	VOLLY PUTRI	SMK SWASTA PUTRA ANDA BINJAI
WINDA	VOLLY PUTRI	SMK NEGERI 2 TEBING TINGGI
WULAN SARI	VOLLY PUTRI	SMK SWASTA AL-WASHLIYAH MARBAU
PUPUT WARDANI	VOLLY PUTRI	SMK SWASTA AL-WASHLIYAH MARBAU
ZUHRI	FUTSAL	SMK NEGERI 1 BERASTAGI
AGUNG	FUTSAL	SMK NEGERI 1 BERASTAGI
ARIF	FUTSAL	SMK NEGERI 1 BERASTAGI
SULIMA PRADANA	FUTSAL	UPTD SMK NEGERI BINAAN PROV.SUMUT
ARI RISWANDI	FUTSAL	UPTD SMK NEGERI BINAAN PROV. SUMUT
M. IQBAL	FUTSAL	SMK NEGERI 5 TANJUNGBALAI
ADI SYAHPUTRA	FUTSAL	SMK NEGERI 5 TANJUNGBALAI
DANDI AL-HAFIZ	VOLLY PUTRA	SMK NEGERI 2 RANTAU UTARA
NAMA	CABANG	ASAL SMK
FAUZUL KABIR	VOLLY PUTRA	SMK SWASTA TAMANSISWA SUKADAMAI
AKBAR	VOLLY PUTRA	SMK SWASTA PERSIAPAN
PERMADI ATMA	VOLLY PUTRA	SMK NEGERI 1 SETIA JANJI
MUHAMMAD HENDRA PRAYOGI	VOLLY PUTRA	SMK NEGERI 1 SETIA JANJI
RISKI UDRIANSYAH PANJAITAN	VOLLY PUTRA	SMK NEGERI 1 SETIA JANJI
YOGI KRISTANTO	VOLLY PUTRA	SMK SWASTA TELADAN RANTAUPRAPAT
ARIF PRANATA	VOLLY PUTRA	SMK NEGERI 1 SETIA JANJI
AHMAD TANGI S. TARIGAN	BASKET PUTRA	SMK SWASTA TELKOM SHANDY PUTRA
KENDRIK SEPTIAN	BASKET PUTRA	SMK SWASTA TELKOM SHANDY PUTRA
FADZIL NOOR HASIBUAN	BASKET PUTRA	SMK NEGERI 1 PERCUT SEI TUAN



NAMA	CABANG	ASAL SMK
RIZA MUHAMMAD HARAHAP	BASKET PUTRA	SMK NEGERI 3 PADANG SIDIMPUNAN
ILHAM RIZANUL YUSUF	BASKET PUTRA	SMK SWASTA TAMAN SISWA BINJAI
DIMAS	BASKET PUTRA	SMK SWASTA TAMAN SISWA BINJAI
ANGGA MULIA A.S	BASKET PUTRA	SMK NEGERI 1 MERDEKA
DANY ANDRIAN SIMATUPANG	BASKET PUTRA	SMK SWASTA TELKOM SHANDY PUTRA
WINDA	BASKET PUTRI	SMK NEGERI 7 MEDAN
EFRIDA YANTI	BASKET PUTRI	SMK NEGERI 7 MEDAN
JENNY	BASKET PUTRI	SMK NEGERI 7 MEDAN
SARAH	BASKET PUTRI	SMK NEGERI 7 MEDAN
FINKA INGGRIANI	BASKET PUTRI	SMK SWASTA PUTRA ANDA BINJAI
YUNIKE MEI	BASKET PUTRI	SMK SWASTA PUTRA ANDA BINJAI
DWI MAYANTI	BASKET PUTRI	SMK SWASTA PUTRA ANDA BINJAI
M. KHAIR RIZKY	BADMINTON PUTRA	SMK NEGERI 4 TEBING TINGGI
DINDA FAUZIA	BADMINTON PUTRI	SMK SWASTA TELADAN

Sumber : Dinas Pendidikan Prov. Sumatera Utara

Hasil yang diperoleh pada Olimpiade Olah Raga (O2SN) siswa SMK Tingkat Nasional adalah : 1) Mendapat perolehan 1 (satu) Medali Emas pada Cabang VOLLY PUTRA dari SMK Negeri 2 Rantau Utara; 2) Mendapat perolehan 1 (satu) Medali Perunggu atas nama **Muhammad Suwira Adrian SMK Negeri 10 Medan pada cabang Tenis Meja Putra.** 7) **Seleksi dan Pengiriman FL2SN Siswa Berprestasi Provinsi Sumatera Utara** yang bertujuan untuk; a) Memberikan pengalaman berkompetisi dengan menjunjung tinggi nilai kejujuran untuk mencapai prestasi tertinggi di bidangnya; b) Membina dan meningkatkan kreativitas dan apresiasi siswa terhadap bidang seni yang berakar pada budaya bangsa; c) Mempererat persahabatan, persatuan, dan kesatuan bangsa sesama siswa Indonesia yang berasal dari berbagai karakter dengan tingkat keterampilan dan budaya yang berbeda; d) Turut berkontribusi terhadap pengembangan industry pariwisata dan ekonomi kreatif. Sasaran dari kegiatan ini adalah siswa-siswa SMK Negeri dan Swasta dari 33



Kabupaten Kota se-Provinsi Sumatera Utara ditambah pendamping dengan perincian sebagai berikut :

NO	CABANG SENI	JUMLAH PESERTA / KAB/KOTA	PENDAMPING	JUMLAH
1.	Tari Tradisional	7 orang	2 orang/ Kabupaten/ Kota	231 Orang
2.	Teater	7 orang		231 Orang
3.	Music Band	7 orang		231 Orang
4.	Gitar Klasik	1 orang		33 Orang
Jumlah		22 orang	66 Orang	726 Orang

Setelah melalui penilaian dari dewan juri yang ditunjuk maka didapat Pemenang yang akan menjadi Duta Provinsi Sumatera Utara untuk mengikuti Festival Lomba Seni Siswa Tingkat Nasional yaitu :

Tari Tradisional

1	GITA ANJELINA BR TARIGAN	P	SMK SWASTA RAKSANA MEDAN
2	SURIPAH	P	SMK SWASTA RAKSANA MEDAN
3	DHEA SILWIRAI	P	SMK SWASTA RAKSANA MEDAN
4	SHASA YUVIONA	P	SMK SWASTA RAKSANA MEDAN
5	KRISMAN BAHDEAR SINAGA	L	SMK SWASTA RAKSANA MEDAN
6	M. ICHSAN AMIN	L	SMK SWASTA RAKSANA MEDAN
7	M.RIDWAN	L	SMK SWASTA RAKSANA MEDAN

Teater

1	NURHAMIDAH	P	SMK KESEHATAN SARTIKA
2	SITI HARDIANTI	P	SMK KESEHATAN SARTIKA
3	LAILI KHAIRANI	P	SMK KESEHATAN SARTIKA
4	FIKRI HERMANSYAH	L	SMK KESEHATAN SARTIKA
5	QASRUL MUNIF	L	SMK KESEHATAN SARTIKA
6	HUSMANSYAH SIREGAR	L	SMK KESEHATAN SARTIKA

Music Band

No.	NAMA PESERTA	JENIS KELAMIN	ASAL SEKOLAH
1	ELISABET TRI VIVIYANTI NAINGGOLAN	P	SMK NEGERI 11 MEDAN
2	CHAIRINA ZAHIRA	P	SMK NEGERI 11 MEDAN
3	ANUGERAH NAINGGOLAN	L	SMK NEGERI 11 MEDAN



No.	NAMA PESERTA	JENIS KELAMIN	ASAL SEKOLAH
4	RICKY JUANDA LUBIS	L	SMK NEGERI 11 MEDAN
5	ERIK ENOS FAMATI DAELI	L	SMK NEGERI 11 MEDAN
6	DONI ROFIANDA	L	SMK NEGERI 11 MEDAN
7	HEDI MUKHRI HINIFSA	L	SMK NEGERI 11 MEDAN

Gitar Klasik

No.	NAMA PESERTA	JENIS KELAMIN	ASAL SEKOLAH
1	I GUSTI AGUNG BAGUS ABRAHAM	L	SMK NEGERI 11 MEDAN

- Capaian Indikator Kinerja “**Persentase Guru SD/SDLB berkualifikasi akademik S1/D4 (%)**”, Tingkat ketercapaian sasaran strategis ini dilihat melalui indikator kinerja “Persentase Guru SD/SDLB Berkualifikasi Akademik S1/D4”. Adapun tingkat pencapaiannya adalah sebagai berikut :

Tabel 34
Capaian Kinerja Presentase Guru SD/SDLB
Berkualifikasi Akademik S1/D4 Tahun 2014

Indikator Kinerja	Tahun 2012			Tahun 2013			Tahun 2014		
	Target	Realisasi	(%)	Target	Realisasi	(%)	Target	Realisasi	(%)
Persentase guru SD/SDLB berkualifikasi akademik S1/D4	54,51	51,63	94,72	75,29	55,97	74,34	40,20	68,70	170,90

Sumber : Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara

Program yang dilaksanakan dalam mewujudkan sasaran diatas adalah Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Pendidikan . Indikator kinerja adalah Persentase Guru SD/SDLB Berkualifikasi Akademik S1/D4, target yang



direncanakan sebesar 40,20 %, dimana realisasi pelaksanaan sebesar 68,70% dengan capaian presentase kinerja yang baik yaitu mencapai sebesar 170,90%. dimana perbandingan antara target dan realisasi terjadi kenaikan sebesar 28,50%. Sedangkan perbandingan antara realisasi kinerja tahun 2013 dan tahun 2014 terjadi kenaikan sebesar 28,50% yaitu pada tahun 2013 realisasi kinerja sebesar 55,97 % menjadi 68,70 % pada tahun 2014.

Dimana jumlah guru SD yang berkualifikasi Tahun 2014 adalah 72.077 orang sedangkan jumlah guru SD yang belum berkualifikasi berjumlah 32.836 orang,

- Capaian Indikator Kinerja **“Persentase Guru SMP/SMPLB berkualifikasi S1/D4 (%)”**,Tingkat ketercapaian sasaran strategis ini dilihat melalui indikator kinerja **“Persentase Guru SMP/SMPLB Berkualifikasi Akademik S1/D4”**. Adapun tingkat pencapaiannya adalah sebagai berikut :

Tabel 35
Capaian Kinerja Presentase Guru SMP/SMPLB Berkualifikasi Akademik S1/D4 Tahun 2014

Indikator Kinerja	Tahun 2012			Tahun 2013			Tahun 2014		
	Target	Realisasi	(%)	Target	Realisasi	(%)	Target	Realisasi	(%)
Persentase guru SMP/SMPLB berkualifikasi akademik S1/D4	76,12	82,44	108,30	82,12	77,93	94,90	76,56	82,65	107,95

Sumber : Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara

Program yang dilaksanakan dalam mewujudkan sasaran diatas adalah Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Pendidikan . Indikator kinerja adalah Persentase Guru SMP/SMPLB Berkualifikasi Akademik S1/D4, target yang direncanakan sebesar 75,56 %, dimana realisasi pelaksanaan sebesar 82.65% dengan capaian presentase kinerja yang baik yaitu mencapai sebesar 107,95%. dimana perbandingan antara target dan realisasi terjadi kenaikan sebesar 6,09 %. Sedangkan perbandingan antara realisasi kinerja tahun 2013 dan tahun 2014 kenaikannya mencapai 4,72% yaitu pada tahun 2013 realisasi kinerja sebesar



77,93 % menjadi 82,65 % pada tahun 2014. Dimana jumlah guru SMP yang berkualifikasi Tahun 2014 adalah 33.880 orang sedangkan jumlah guru SMP yang belum berkualifikasi berjumlah 7.113 orang,

- Capaian Indikator Kinerja “**Persentase guru SMA berkualifikasi S1/D4 (%)**”, Tingkat ketercapaian sasaran strategis ini dilihat melalui indikator kinerja “Persentase Guru SMA Berkualifikasi Akademik S1/D4”. Adapun tingkat pencapaiannya adalah sebagai berikut :

Tabel 36
Capaian Kinerja Presentase Guru SMA
Berkualifikasi Akademik S1/D4 Tahun 2014

Indikator Kinerja	Tahun 2012			Tahun 2013			Tahun 2014		
	Target	Realisasi	(%)	Target	Realisasi	(%)	Target	Realisasi	(%)
Persentase guru SMA berkualifikasi akademik S1/D4	75,33	88,95	118,08	93,31	85,66	91,80	88,72	94,03	105,99

Sumber : Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara

Program yang dilaksanakan dalam mewujudkan sasaran diatas adalah Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Pendidikan . Indikator kinerja adalah Persentase Guru SMA Berkualifikasi Akademik S1/D4, target yang direncanakan sebesar 88,72 %, dimana realisasi pelaksanaan sebesar 94,03% dengan capaian presentase kinerja yang baik yaitu mencapai sebesar 105,99%. dimana perbandingan antara target dan realisasi terjadi kenaikan sebesar 5,31 % .

Sedangkan perbandingan antara realisasi kinerja tahun 2013 dan tahun 2014 kenaikannya mencapai 8,37% yaitu pada tahun 2013 realisasi kinerja sebesar 85,66 % menjadi 94,03 % pada tahun 2014. Dimana jumlah guru SMA yang berkualifikasi Tahun 2014 adalah 17.859 orang sedangkan jumlah guru SMA yang belum berkualifikasi berjumlah 7.113 orang,



- Capaian Indikator Kinerja “**Persentase guru SMK bersertifikat kompetensi (%)**”, Tingkat ketercapaian sasaran strategis ini dilihat melalui indikator kinerja “Persentase Guru SMK Berkualifikasi Akademik S1/D4”. Adapun tingkat pencapaiannya adalah sebagai berikut :

Tabel 37
Capaian Kinerja Presentase Guru SMK
Berkualifikasi Akademik S1/D4 Tahun 2014

Indikator Kinerja	Tahun 2012			Tahun 2013			Tahun 2014		
	Target	Realisasi	(%)	Target	Realisasi	(%)	Target	Realisasi	(%)
Persentase guru SMK berkualifikasi akademik S1/D4	-	-	-	87,56	87,24	99,64	84,74	89,92	106,11

Sumber : Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara

Program yang dilaksanakan dalam mewujudkan sasaran diatas adalah Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Pendidikan . Indikator kinerja adalah Persentase Guru SMK Berkualifikasi Akademik S1/D4, target yang direncanakan sebesar 84,74 %, dimana realisasi pelaksanaan sebesar 89,92 % dengan capaian presentase kinerja yang baik yaitu mencapai sebesar 106,12%. dimana perbandingan antara target dan realisasi terjadi kenaikan sebesar 5,18 %.

Sedangkan perbandingan antara realisasi kinerja tahun 2013 dan tahun 2014 kenaikannya mencapai 2,68 % yaitu pada tahun 2013 realisasi kinerja sebesar 87,24 % menjadi 89,92 % pada tahun 2014.

Dimana jumlah guru SMK yang berkualifikasi Tahun 2014 adalah 13.325 orang sedangkan jumlah guru SMK yang belum berkualifikasi berjumlah 1.493 orang, Untuk menunjang dan mempertahankan capaian kinerja dari peningkatan Presentase Guru yang Berkualifikasi Akademik S1/D4 Dijenjang SD/SDLB/SMP/



SMPLB/SMA/SMK tahun 2014 ini didukung dari 10 (sepuluh) kegiatan yang dilaksanakan Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara melalui Bidang Pengendalian Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan (PMPTK) yaitu :

1) Seleksi Tutor Paket C Berprestasi Tingkat Provinsi Sumatera Utara Tahun 2014 yang bertujuan untuk;

- a) Menilai prestasi yang dicapai oleh tutor paket c yang meliputi kompetensi pedagogik, kepribadian, sosial, wawasan kependidikan dan profesional maupun peran serta atau sumbangsih kepada masyarakat;
- b) Menetapkan tutor paket c berprestasi secara provinsi untuk diikutsertakan dalam pemilihan tutor paket c berprestasi tingkat nasional;
- c) Mendorong peningkatan mutu pendidikan dan pembelajaran secara lebih merata;
- d) Meningkatkan motivasi dan profesionalisme dalam pelaksanaan tugas.

Manfaat dari kegiatan ini adalah :

- a. Termotivasinya tutor paket C untuk meningkatkan kinerja, disiplin, dedikasi dan loyalitas untuk kepentingan masa depan bangsa dan negara;
- b. Meningkatkan harkat, martabat, citra dan profesionalisme tutor paket c;
- c. Menumbuhkan kreatifitas dan inovasi dalam meningkatkan kualitas pembelajaran;
- d. Terjalinnnya interaksi antar peserta untuk saling tukar pengalaman dalam mendidik siswa;
- e. Terpupuknya rasa persatuan dan kesatuan bangsa melalui jalur pendidikan. Hasil yang dicapai dalam pelaksanaan Pemilihan Tutor Paket C Berprestasi Tingkat Provinsi Sumatera Utara Tahun 2014 adalah terpilihnya tutor paket C berprestasi I, II dan III tingkat Provinsi Sumatera Utara Tahun 2014 sebagai berikut :

NO.	NAMA	UNIT KERJA	NILAI	PERINGKAT
1	TOYIB PRASETYO	PKBM Madya Insani Kota Medan	41,60	I
2	MARSID, S.Pd	PKBM Cendana Kab. Deli Serdang	41,47	II



NO.	NAMA	UNIT KERJA	NILAI	PERINGKAT
3	ADDAHRI HAFIDZ AWLAWI	PKBM Maju Bersama Kota Padangsidempuan	36,26	III

- 2) **Pemilihan Guru Berprestasi Kelompok TK/RA, SD/MI, SMP/MTs, SMA dan SMK serta Pemberian Penghargaan bagi Guru PLB Berdedikasi Tingkat Provinsi Sumatera Utara Tahun 2014** yang bertujuan untuk; a) Menilai prestasi yang dicapai oleh guru yang meliputi kompetensi pedagogik, kepribadian, sosial, wawasan kependidikan dan profesional maupun peran serta atau sumbangsih guru kepada masyarakat; b) menetapkan guru berprestasi secara provinsi untuk diikutsertakan dalam pemilihan guru berprestasi tingkat nasional; c) Mendorong peningkatan mutu pendidikan dan pembelajaran secara lebih merata; d) Meningkatkan motivasi dan profesionalisme dalam pelaksanaan tugas. Manfaat dari kegiatan ini adalah; a) Termotivasinya guru untuk meningkatkan kinerja, disiplin, dedikasi dan loyalitas untuk kepentingan masa depan bangsa dan Negara; b) Meningkatkan harkat, martabat, citra dan profesionalisme guru; c) Menumbuhkan kreatifitas dan inovasi guru dalam meningkatkan kualitas pembelajaran; d) Terjalannya interaksi antar peserta untuk saling tukar pengalaman dalam mendidik siswa; e) Terpupuknya rasa persatuan dan kesatuan bangsa melalui jalur pendidikan. Hasil yang dicapai dalam pelaksanaan Pemilihan Guru Berprestasi dan Pemberian Penghargaan Guru PLB Berdedikasi Tingkat Provinsi Sumatera Utara Tahun 2014 adalah terpilihnya guru berprestasi I, II dan III dari setiap kelompok sebagai berikut :

KELOMPOK GURU	NAMA	UNIT KERJA	PERINGKAT
TK/ RA	ISTIANAH, S.Pd.I NIP.	TK IT Baitussalam Bandar Hulan Kab. Simalungun	I
	TUTI SYAHYUNI, SP NIP.	TK Aminah Hamdi Marelan Kota Medan	II
	IRAYANTI TAMBUNAN, S.Pd. AUD NIP.	TK Negeri Pembina Padang Hilir Kota Tebingtinggi	III
SD/ MI	FARIDA HANIM, S.Pd.SD NIP. 19800531 200801 2 003	SD Negeri 164330 Padang Hilir Kota Tebingtinggi	I
	TIURMAIDA SITUMEANG, M.Pd NIP. 19710126 199305 2 001	SD Negeri 060808 Medan Kota Medan	II



KELOMPOK GURU	NAMA	UNIT KERJA	PERINGKAT
	HARMINI, M.Pd NIP. 19660814 200701 2 019	SD Negeri 105325 Tanjung Morawa Kab. Deli Serdang	III
SMP/ MTs	Dra. SALAMAH NIP. 19690721 199702 2 001	SMP Negeri 1 Tebingtinggi Kota Tebingtinggi	I
	MAHARANI, S.Pd NIP. 19630311 198501 2 004	SMP Negeri 3 Medan Kota Medan	II
	TRISNA VALENTINA SEMBIRING, S.Pd NIP. 19720603 199903 2 010	SMP Negeri 2 Lubuk Pakam Kab. Deli Serdang	III
SMA/MA	DARMAYANTO, S.Pd, M.Si NIP. 19701222 199503 1 001	SMA Negeri 1 Matauli Pandan Kab. Tapanuli Tengah	I
	CUT AINAL MARDHIAH, S.Si NIP. 19780301 200312 2 003	SMA Negeri 4 Tebingtinggi Kota Tebingtinggi	II
	SARIPUDDIN LUBIS, M.Pd NIP. 19680912 199512 1 002	SMA Negeri 1 Binjai Kota Binjai	III
SMK	EDRAL SAKTI HASIBUAN, S.Pd NIP. 19780418 200904 1 001	SMK Negeri 1 Batangtoru Kab. Tapanuli Selatan	I
	MERIATY SIMANULLANG, S.Pd NIP. 19730306 200502 2 002	SMK Negeri 1 Sibolga Kota Sibolga	II
	HORASMAN SIMANIHURUK, S.Pd NIP. 19770113 200502 1 001	SMK Negeri 1 Kabanjahe Kabupaten Karo	III
PLB	SUHARTOYO, M.Pd NIP. 19710513 200604 1 004	SLB Negeri Binjai Kota Binjai	I
	LINDA HUTAGALUNG, M.Pd NIP. ----	SLB - A Yapentra T. Morawa Kab. Deli Serdang	II
	SYAHRIL, S.Pd NIP. 19720812 199412 1 001	SLB C - YPAC Medan Kota Medan	III

- 3) ***Pelaksanaan Olimpiade Sains Nasional Guru (OSNG) Mata Pelajaran Matematika dan Fisika Jenjang Pendidikan Menengah Tingkat Provinsi Sumatera Utara*** tujuan pelaksanaan kegiatan Olimpiade Sains Nasional Guru (OSNG) mata pelajaran Matematika dan Fisika untuk jenjang SMA/SMK Tingkat Provinsi Sumatera Utara Tahun 2014 adalah; a) Menumbuhkembangkan budaya kompetitif yang sehat dikalangan Guru; b) Meningkatkan wawasan pengetahuan, motivasi, kompetensi, profesionalisme dan kerja keras untuk mengembangkan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi dikalangan Guru; c) Membina dan mengembangkan kesadaran ilmiah untuk mempersiapkan generasi muda dalam menghadapi masa kini dan yang akan datang; d) Mengangkat status Guru sebagai penyandang profesi yang terhormat, mulia bermartabat dan terlindungi; e) Membangun komitmen mutu Guru dan Peningkatan Mutu Pendidikan dan pembelajaran secara lebih merata. Manfaat dari kegiatan ini adalah a) Termotivasinya guru untuk meningkatkan kinerja, disiplin, dedikasi dan loyalitas



untuk kepentingan masa depan bangsa dan negara; b) Meningkatkan harkat, martabat, citra dan profesionalisme guru; c) Menumbuhkan kreatifitas dan inovasi guru dalam meningkatkan kualitas pembelajaran; d) Terjalinnnya interaksi antar peserta untuk saling tukar pengalaman dalam mendidik siswa; e) Terpupuknya rasa persatuan dan kesatuan bangsa melalui jalur pendidikan. Hasil yang dicapai pada pelaksanaan Olimpiade Sains Nasional Guru (OSNG) tahun ini, utusan dari Provinsi Sumatera Utara tidak memperoleh Medali, tetapi memperoleh penghargaan sebagai ***The Best Eksperimen*** atas nama **HALOMOAN, S.Si** (Guru Fisika SMA 2 SUTOMO MEDAN, KOTA MEDAN).

- 4) ***Pelaksanaan Olimpiade Sains Nasional Guru (OSNG) Mata Pelajaran Matematika dan Sains untuk Jenjang Pendidikan Dasar Tingkat Provinsi Sumatera Utara Tahun 2014*** Tujuan pelaksanaan kegiatan Olimpiade Sains Nasional Guru (OSNG) mata pelajaran Matematika dan IPA untuk jenjang SMP Tingkat Provinsi Sumatera Utara Tahun 2014 adalah; a) Menumbuhkembangkan budaya kompetitif yang sehat dikalangan Guru; b) Meningkatkan wawasan pengetahuan, motivasi, kompetensi, profesionalisme dan kerja keras untuk mengembangkan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi dikalangan Guru; c) Membina dan mengembangkan kesadaran ilmiah untuk mempersiapkan generasi muda dalam menghadapi masa kini dan yang akan datang; d) Mengangkat status Guru sebagai penyandang profesi yang terhormat, mulia bermartabat dan terlindungi; e) Membangun komitmen mutu Guru dan Peningkatan Mutu Pendidikan dan pembelajaran secara lebih merata. Manfaat dari kegiatan ini adalah; a) Termotivasinya guru untuk meningkatkan kinerja, disiplin, dedikasi dan loyalitas untuk kepentingan masa depan bangsa dan negara; b) Meningkatkan harkat, martabat, citra dan profesionalisme guru; c) Menumbuhkan kreatifitas dan inovasi guru dalam meningkatkan kualitas pembelajaran; d) Terjalinnnya interaksi antar peserta untuk saling tukar pengalaman dalam mendidik siswa; e) Terpupuknya rasa persatuan dan kesatuan bangsa melalui jalur pendidikan. Hasil yang dicapai pada pelaksanaan Olimpiade Sains Nasional Guru (OSNG) tahun ini, utusan dari Provinsi Sumatera Utara tidak memperoleh Medali, tetapi



memperoleh penghargaan sebagai ***The Best Teaching Performance atas nama MEIMANIUS WARUWU, S.Pd*** (SMP NEGERI 1 HILIDUHO, KABUPATEN NIAS) pada bidang studi IPA SMP.

- 5) Peningkatan Kompetensi Pengawas Sekolah untuk jenjang SMP dan SMA Tingkat Provinsi Sumatera Utara** Tujuan kegiatan Peningkatan Kompetensi Pengawas Sekolah untuk Jenjang SMP dan SMA Provinsi Sumatera Utara Tahun 2014 adalah :
- a) Meningkatkan pemahaman peserta tentang kebijakan dan program Implementasi Kurikulum 2013;
 - b) Meningkatkan pemahaman peserta tentang Implementasi Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Permendikbud) Nomor 68 Tahun 2014 tentang Peran Guru Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) dalam Kurikulum 2013;
 - c) Meningkatkan pemahaman peserta tentang Pengembangan dan Pemanfaatan TIK dalam Pembelajaran dan Manajemen di Sekolah;
 - d) Memahami secara luas model-model pembelajaran yang dapat diimplementasikan dalam proses pembelajaran di kelas. Hasil yang dicapai dari kegiatan Peningkatan Kompetensi Pengawas Sekolah untuk Jenjang SMP dan SMA Provinsi Sumatera Utara Tahun 2014 ini adalah:
- 1) Secara Umum;
 - a) Meningkatnya pemahaman peserta tentang kebijakan dan program Implementasi Kurikulum 2013;
 - b) Meningkatnya pemahaman peserta tentang Implementasi Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Permendikbud) Nomor 68 Tahun 2014 tentang Peran Guru Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) dalam Kurikulum 2013;
 - c) Meningkatnya pemahaman peserta tentang Pengembangan dan Pemanfaatan Tik dalam Pembelajaran dan Manajemen di Sekolah;
 - d) Meningkatnya pemahaman secara luas model-model pembelajaran yang dapat diimplementasikan dalam proses pembelajaran di kelas;
 - e) Meningkatnya wawasan yang luas tentang pemilihan, pembuatan, dan penggunaan media pembelajaran dalam melaksanakan proses kegiatan belajar mengajar di sekolah.
 - 2) Secara Khusus :
 - a)Meningkatnya pengetahuan dan keterampilan peserta dalam memanfaatkan TIK sebagai pendukung proses pembelajaran yang mencakup : Pemanfaatan sarana TIK di sekolah untuk meningkatkan mutu pembelajaran; Penyusunan bahan ajar berbasis TIK;



Penyusunan dan pemanfaatan website sekolah sebagai sumber belajar; a.4) Penyusunan kisi-kisi dan analisis butir soal ujian dengan menggunakan aplikasi tertentu; Penilaian Kinerja Guru (PKG) berbasis TIK (quick count); b) Meningkatnya pengetahuan dan keterampilan peserta dalam memanfaatkan TIK sebagai pendukung manajemen sekolah; c) Meningkatnya pengetahuan dan keterampilan peserta dalam pembelajaran elektronik (e-learning) berbasis e-moodle; d) Memiliki wawasan yang luas tentang pengoptimalan Teknologi Informasi dan Komunikasi dalam presentasi.

6) Pemilihan Kepala Sekolah Berprestasi Kelompok SD, SMP, SMA dan SMK Tingkat Provinsi Sumatera Utara yang bertujuan untuk; a) Menilai prestasi yang dicapai oleh kepala sekolah yang meliputi kompetensi manajerial dan supervisi, kepribadian, sosial, wawasan kependidikan, kewirausahaan dan profesional maupun peran serta dalam masyarakat; b) Menetapkan kepala sekolah berprestasi secara provinsi untuk diikutsertakan dalam pemilihan kepala sekolah berprestasi tingkat nasional; c) Mendorong peningkatan mutu pendidik dan tenaga kependidikan secara lebih merata; d) Meningkatkan motivasi dan profesionalisme dalam pelaksanaan tugas. Manfaat dari kegiatan ini adalah a) Termotivasinya kepala sekolah untuk meningkatkan kinerja, disiplin, dedikasi dan loyalitas untuk kepentingan masa depan bangsa dan negara; b) Meningkatkan harkat, martabat, citra dan profesionalisme kepala sekolah; c) Menumbuhkan kreatifitas dan inovasi kepala sekolah dalam meningkatkan kualitas sekolah; d) Terjalannya interaksi antar peserta untuk saling tukar pengalaman dalam pengelolaan manajemen sekolah; e) Terpupuknya rasa persatuan dan kesatuan bangsa melalui jalur pendidikan. Hasil yang dicapai dalam pelaksanaan Pemilihan Kepala Sekolah Berprestasi Provinsi Sumatera Utara Tahun 2014 adalah terpilihnya kepala sekolah berprestasi I, II dan III dari setiap kelompok sebagai berikut :

KELOMPOK KEPALA	NAMA	UNIT KERJA	NILAI	PERINGKAT
TK	DESNIWATI, S.Pd.AUD	TK Kartika I - 66 Kabanjaha Kabupaten Karo	51,12	I



KELOMPOK KEPALA	NAMA	UNIT KERJA	NILAI	PERINGKAT
	SERTALI BR SEMBIRING, S.Pd	TK Bakti Pancur Batu Kabupaten Deli Serdang	50,07	II
	Hj. MARIANI, S.Pd.AUD	TK Medina Medan Kota Medan	50,05	III
SD	PARLINDUNGAN LUBIS, M.Pd	SD Sw. Harapan I Medan Kota Medan	66,13	I
	HERLINA MANALU, S.Pd.SD	SD Negeri 5 Partung-konaginjang Kabupaten Samosir	62,17	II
	NURIMAH RITONGA, S.Pd	SD Negeri 112144 Siringo-ringo Kabupaten Labuhanbatu	60,33	III
SMP	JUMAKIR, S.Pd, M.Pd	SMP Negeri 3 T. Morawa Kabupaten Deli Serdang	85,79	I
	ANWAR SAID, S.Pd, MM	SMP Negeri 2 Pandan Nauli Kabupaten Tapanuli Tengah	85,69	II
	RAHMAD MARTUAH, S.Sn, M.Pd	SMP Sw. Siti Hajar Medan Kota Medan	84,97	III
SMA	MURDIANTO, S.Pd, MM	SMA Negeri 1 Matauli Pandan Kab. Tapanuli Tengah	88,37	I
	Drs. ILYAS, M.Pd	SMA Negeri 13 Medan	57,46	II
	ENDANG KESUMAWATI, S.Pd	SMA Negeri 7 Tanjungbalai Kota Tanjungbalai	50,97	III
SMK	DEDDI ANSHARI, S.Pd, M.Si	SMK Negeri 2 Tanjungbalai Kota Tanjungbalai	55,83	I
	RICARDO SILALAH, S.Pd	SMK Negeri 1 Muara Kabupaten Tapanuli Utara	51,04	II
	SUHAD, S.Pd	SMK Sw. Al - Ma'arif Sibolga Kota Sibolga	43,65	III

7) Pemilihan Pengawas Sekolah Berprestasi Kelompok SD, SMP, SMA dan SMK Tingkat Provinsi Sumatera Utara yang bertujuan untuk ; a) Meningkatkan prestasi, kinerja dan motivasi kerja pengawas sekolah; b) Meningkatkan harkat dan martabat pengawas sekolah sebagai tenaga kependidikan yang profesional; c) Meningkatkan rasa percaya diri pengawas sekolah dalam mengemban tanggungjawab sebagai tenaga kependidikan; d) Memberikan pengakuan dan penghargaan terhadap prestasi pengawas sekolah atas kemajuan sekolah di wilayah tugasnya; e) Memberikan kesempatan kepada pengawas sekolah untuk mengaktualisasikan dirinya sebagai pengawas profesional; f) Menetapkan pengawas sekolah berprestasi tingkat provinsi untuk diikutsertakan dalam pemilihan pengawas sekolah berprestasi tingkat nasional; g) Mendorong peningkatan mutu pendidikan dan pembelajaran secara lebih merata; h) Meningkatkan motivasi dan profesionalisme dalam pelaksanaan tugas.



Penyelenggaraan Pemilihan Pengawas Sekolah Berprestasi kelompok SD, SMP, SMA dan SMK tingkat Provinsi Sumatera Utara Tahun 2014 bermanfaat untuk : a) Meningkatkan kemampuan pengawas sekolah dalam melaksanakan tugas sesuai dengan prosedur kerja yang meliputi perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan; b) Meningkatkan profesionalisme pengawas sekolah. Hasil yang dicapai dalam pelaksanaan Pemilihan Pengawas Sekolah Berprestasi Kelompok SD, SMP, SMA dan SMK tingkat Provinsi Sumatera Utara Tahun 2014 adalah terpilihnya pengawas sekolah berprestasi I, II dan III dari setiap kelompok sebagai berikut :

KELOMPOK PENGAWAS	NAMA	UNIT KERJA	NILAI	PERINGKAT
SD	NURLIANA PURBA, S.Pd, MH	Dinas Pendidikan Kabupaten Simalungun	54,59	I
	AHMAD YANI, S.Pd	Dinas Pendidikan Kabupaten Labuhanbatu Selatan	50,76	II
	LAMINGOT PANGGABEAN, M.Pd	Dinas Pendidikan Kabupaten Deli Serdang	50,08	III
SMP	SUKARNI HANDAYANI, S.Pd, M.Pd	Dinas Pendidikan Kabupaten Serdang Bedagai	80,63	I
	MAHYUDIN HARAHAHAP, S.Pd	Dinas Pendidikan Kota Deli Serdang	77,14	II
	ROPIN SIGALINGGING, S.Pd, M.Pd	Dinas Pendidikan Kabupaten Batu Bara	68,06	III
SMA	MUHAMMAD ALI, S.Pd, MM	Dinas Pendidikan Kabupaten Tapanuli Tengah	63,94	I
	Drs. H. ABD. RAHMAN TUMANGGOR, M.Pd	Dinas Pendidikan Kota Medan	51,19	II
	Drs. AMIRSON HALOMOAN, MM	Dinas Pendidikan Kabupaten Asahan	47,25	III
SMK	Drs. HARTOYO, D	Dinas Pendidikan Kabupaten Deli Serdang	59,95	I
	Drs. PARISMAN SITUMORANG	Dinas Pendidikan Kabupaten Tapanuli Selatan	46,62	II
	Drs. BAZIHAOGO HONDRO	Dinas Pendidikan Kota Gunungsitoli	41,61	III

Sumber : Dinas Pendidikan Prov. Sumatera Utara

8) Training of Trainer (TOT) Calon Instruktur Pusat Sumber Belajar pendidik dan Tenaga Kependidikan (PSB-PTK) Provinsi Sumatera Utara tujuan kegiatan Training of Trainer (TOT) Pengembangan Bahan Ajar dan Bahan Ujian



Berbasis Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) Provinsi Sumatera Utara Tahun 2014 adalah : a) Meningkatkan pemahaman peserta tentang kebijakan dan program Implementasi Kurikulum 2013; b) Meningkatkan pemahaman peserta tentang Implementasi Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Permendikbud) Nomor 68 Tahun 2014 tentang Peran Guru Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) dalam Kurikulum 2013; c) Meningkatkan pemahaman peserta tentang Pengembangan dan Pemanfaatan TIK dalam Pembelajaran dan Manajemen di Sekolah; d) Memahami secara luas model-model pembelajaran yang dapat diimplementasikan dalam proses pembelajaran di kelas; e) Memiliki wawasan yang luas tentang pemilihan, pembuatan, dan penggunaan media pembelajaran dalam melaksanakan proses kegiatan belajar mengajar di sekolah. Hasil yang dicapai dari kegiatan Training of Trainer (TOT) Pengembangan Bahan Ajar dan Bahan Ujian Berbasis Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) ini adalah : 1) Secara Umum a) Meningkatnya pemahaman peserta tentang kebijakan dan program Implementasi Kurikulum 2013; b) Meningkatnya pemahaman peserta tentang Implementasi Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Permendikbud) Nomor 68 Tahun 2014 tentang Peran Guru Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) dalam Kurikulum 2013; c) Meningkatnya pemahaman peserta tentang Pengembangan dan Pemanfaatan Tik dalam Pembelajaran dan Manajemen di Sekolah; d) Meningkatnya pemahaman secara luas model-model pembelajaran yang dapat diimplementasikan dalam proses pembelajaran di kelas; e) Meningkatnya wawasan yang luas tentang pemilihan, pembuatan, dan penggunaan media pembelajaran dalam melaksanakan proses kegiatan belajar mengajar di sekolah. 2) Secara Khusus : a) Meningkatnya pengetahuan dan keterampilan peserta dalam memanfaatkan TIK sebagai pendukung proses pembelajaran yang mencakup pemanfaatan sarana TIK di sekolah untuk meningkatkan mutu pembelajaran; Penyusunan bahan ajar berbasis TIK; Penyusunan dan pemanfaatan website sekolah sebagai sumber belajar; Penyusunan kisi-kisi dan analisis butir soal ujian dengan menggunakan aplikasi tertentu; Penilaian Kinerja Guru (PKG) berbasis TIK (quick count) b) Meningkatnya pengetahuan dan



keterampilan peserta dalam memanfaatkan TIK sebagai pendukung manajemen sekolah; c) Meningkatnya pengetahuan dan keterampilan peserta dalam pembelajaran elektronil (e-learning) berbasis e-moodle.

9) *Training of Trainer (TOT) Pengembangan Bahan Ajar dan bahan Ujian Berbasis Teknologi Informasi dan komunikasi Provinsi Sumatera Utara*

Tujuan kegiatan Training Of Trainer (TOT) Calon Instruktur Pusat Sumber Belajar – Pendidik dan Tenaga Kependidikan (PSB – PTK) Provinsi Sumatera Utara Tahun 2014 adalah : a) Meningkatkan pemahaman peserta tentang kebijakan dan program Implementasi Kurikulum 2013; b) Meningkatkan pemahaman peserta tentang Implementasi Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Permendikbud) Nomor 68 Tahun 2014 tentang Peran Guru Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) dalam Kurikulum 2013; c) Meningkatkan pemahaman peserta tentang Pengembangan dan Pemanfaatan TIK dalam Pembelajaran dan Manajemen di Sekolah; d) Memahami secara luas model-model pembelajaran yang dapat diimplementasikan dalam proses pembelajaran di kelas; e) Memiliki wawasan yang luas tentang pemilihan, pembuatan, dan penggunaan media pembelajaran dalam melaksanakan proses kegiatan belajar mengajar di sekolah. Hasil yang dicapai dari kegiatan Training of Trainer (TOT) Calon Instruktur Pusat Sumber Belajar Pendidik dan Tenaga Kependidikan (PSB-PTK) Provinsi Sumatera Utara Tahun 2014 ini adalah : 1) Secara Umum; a) Meningkatkan pemahaman peserta tentang tentang kebijakan dan program Implementasi Kurikulum 2013; b) Meningkatkan pemahaman peserta tentang Implementasi Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Permendikbud) Nomor 68 Tahun 2014 tentang Peran Guru Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) dalam Kurikulum 2013; c) Meningkatkan pemahaman peserta tentang Pengembangan dan Pemanfaatan Tik dalam Pembelajaran dan Manajemen di Sekolah; d) Memahami secara luas model-model pembelajaran yang dapat diimplementasikan dalam proses pembelajaran di kelas; e) Memiliki wawasan yang luas tentang pemilihan, pembuatan, dan penggunaan media



pembelajaran dalam melaksanakan proses kegiatan belajar mengajar di sekolah;

2) Secara Khusus : a) Meningkatnya pengetahuan dan keterampilan peserta dalam memanfaatkan TIK sebagai pendukung proses pembelajaran yang mencakup : Pemanfaatan sarana TIK di sekolah untuk meningkatkan mutu pembelajaran; Penyusunan bahan ajar berbasis TIK; Penyusunan dan pemanfaatan website sekolah sebagai sumber belajar; Penyusunan kisi-kisi dan analisis butir soal ujian dengan menggunakan aplikasi tertentu; Penilaian Kinerja Guru (PKG) berbasis TIK (quick count); b) Meningkatnya pengetahuan dan keterampilan peserta dalam memanfaatkan TIK sebagai pendukung manajemen sekolah; c) Meningkatnya pengetahuan dan keterampilan peserta dalam pembelajaran elektronik (e-learning) berbasis e-moodle.

10) Workshop Pengembangan bahan Ajar dan Bahan Ujian Berbasis Teknologi

Informasi dan Komunikasi (TIK) Provinsi Sumatera Utara Tujuan kegiatan Workshop Pengembangan Bahan Ajar dan Bahan Ujian Berbasis Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) Provinsi Sumatera Utara Tahun 2014 adalah : a) Meningkatkan pemahaman peserta tentang kebijakan dan program Implementasi Kurikulum 2013; b) Meningkatkan pemahaman peserta tentang Implementasi Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Permendikbud) Nomor 68 Tahun 2014 tentang Peran Guru Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) dalam Kurikulum 2013; c) Meningkatkan pemahaman peserta tentang Pengembangan dan Pemanfaatan TIK dalam Pembelajaran dan Manajemen di Sekolah; d) Memahami secara luas model-model pembelajaran yang dapat diimplementasikan dalam proses pembelajaran di kelas; e) Memiliki wawasan yang luas tentang pemilihan, pembuatan, dan penggunaan media pembelajaran dalam melaksanakan proses kegiatan belajar mengajar di sekolah. Hasil yang dicapai dari kegiatan Workshop Pengembangan Bahan Ajar dan Bahan Ujian Berbasis Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) ini adalah: 1). Secara Umum; a) Meningkatnya pemahaman peserta tentang tentang kebijakan dan program Implementasi Kurikulum 2013; b) Meningkatnya pemahaman peserta



tentang Implementasi Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Permendikbud) Nomor 68 Tahun 2014 tentang Peran Guru Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) dalam Kurikulum 2013; c) Meningkatnya pemahaman peserta tentang Pengembangan dan Pemanfaatan Tik dalam Pembelajaran dan Manajemen di Sekolah; d) Meningkatnya pemahaman secara luas model-model pembelajaran yang dapat diimplementasikan dalam proses pembelajaran di kelas; e) Meningkatnya wawasan yang luas tentang pemilihan, pembuatan, dan penggunaan media pembelajaran dalam melaksanakan proses kegiatan belajar mengajar di sekolah; 2). Secara Khusus a)Meningkatnya pengetahuan dan keterampilan peserta dalam memanfaatkan TIK sebagai pendukung proses pembelajaran yang mencakup : Pemanfaatan sarana TIK di sekolah untuk meningkatkan mutu pembelajaran;Penyusunan bahan ajar berbasis TIK; Penyusunan dan pemanfaatan website sekolah sebagai sumber belajar;Penyusunan kisi-kisi dan analisis butir soal ujian dengan menggunakan aplikasi tertentu;Penilaian Kinerja Guru (PKG) berbasis TIK (quick count); Meningkatnya pengetahuan dan keterampilan peserta dalam memanfaatkan TIK sebagai pendukung manajemen sekolah;Meningkatnya pengetahuan dan keterampilan peserta dalam pembelajaran elektronil (e-learning) berbasis e-moodle

- Capaian Indikator Kinerja “**APK Perguruan Tinggi Usia 19- 23 (%)**”, berkenaan dengan capaian pada Indikator Kinerja **Angka Partisipasi Kasar (APK) Perguruan Tinggi Usia 19-23**, Tingkat ketercapaian sasaran strategis ini dilihat melalui indikator kinerja “Angka Partisipasi Kasar (APK) Perguruan Tinggi Usia 19-23”. Adapun tingkat pencapaiannya adalah sebagai berikut :

Tabel 38
Capaian Kinerja APK Perguruan Tinggi Usia 19-23
Tahun 2014

Indikator Kinerja	Tahun 2013			Tahun 2014		
	Target	Realisasi	(%)	Target	Realisasi	(%)
Angka Partisipasi	29,10	30,31	104,15	26,96	36,59	135,72



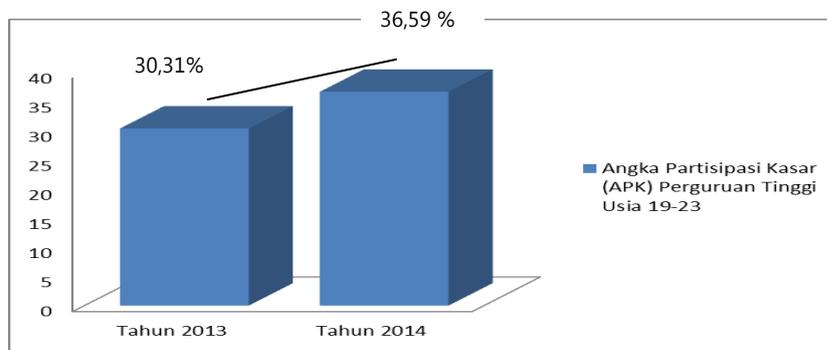
Kasar (APK)
Perguruan Tinggi
Usia 19-23

Sumber : Dinas Pendidikan Prov. Sumatera Utara

Pada tahun 2014 ditargetkan sebesar 26,96 % dengan pencapaian realisasinya sebesar 36,59 % sehingga persentase capaian kinerja untuk tahun 2014 sebesar 135,72 %, dimana perbandingan antara target dan realisasi terjadi kenaikan sebesar 9,63 %. Sedangkan perbandingan antara realisasi kinerja tahun 2013 dan tahun 2014 kenaikannya mencapai 6,28 % yaitu pada tahun 2013 realisasi kinerja sebesar 30,31 % menjadi 36,59 % pada tahun 2014.

Dimana jumlah penduduk usia 19-23 Tahun adalah 1.211.800 orang sedangkan jumlah Mahasiswa yang kuliah berjumlah 443.381 Mahasiswa Berikut grafik Angka Partisipasi Kasar (APK) Perguruan Tinggi Usia 19-23 dari Tahun 2013 sampai dengan Tahun 2014 :

Grafik 8
Angka Partisipasi Kasar (APK) Perguruan Tinggi
Usia 19-23 Tahun 2014



Untuk menunjang dan mempertahankan capaian kinerja dari peningkatan Presentase Angka Partisipasi Kasar (APK) Perguruan Tinggi Usia 19-23 tahun 2014 ini yang dilaksanakan Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara melalui Seksi Perguruan Tinggi Bidang yaitu :



-
- 1) ***Penerbitan Jurnal Ilmiah Perguruan Tinggi***, manfaat yang dihasilkan dari kegiatan ini adalah untuk pembangunan ilmu pengetahuan dan teknologi yang bermutu serta menyebarkanluaskan informasi hasil kajian/penelitian kepada akademis/mahasiswa, praktisi serta pihak lain yang membutuhkan. Hasil yang dicapai dari kegiatan ini adalah menjadi sumber informasi bagi pihak-pihak yang membutuhkan khususnya untuk para dosen dan mahasiswa, serta memicu para dosen untuk berminat melakukan penelitian.
 - 2) ***Workshop Metode Penelitian dan Penulisan Artikel Ilmiah Bagi Dosen Perguruan Tinggi***, kegiatan ini dimaksudkan untuk mendorong seluruh staf pengajar perguruan tinggi yang ada diwilayah Sumatera Utara untuk berperan serta dalam melaksanakan penelitian sesuai dengan disiplin ilmu yang digelutinya dan bertujuan untuk menghasilkan peneliti yang berkualitas ditiap perguruan tinggi yang ada diwilayan Sumatera Utara sekaligus terwujudnya inovasi dan pengembangan IPTEKS dilingkungan perguruan tinggi di Sumatera Utara. Hasil dari kegiatan ini adalah untuk dapat menginspirasi dosen untuk tertarik dan berminat melakukan penelitian.
 - 3) ***Workshop Kewirausahaan Mahasiswa PTN/PTS***, kegiatan ini dilakukan untuk mendorong seluruh mahasiswa yang ada diwilalayah Sumatera Utara untuk berperan serta dalam mengatasi pengangguran dan kemiskinan. Tujuan kegiatan ini adalah untuk menghasilkan lulusan perguruan tinggi yang memiliki jiwa dan keterampilan dalam kewirausahaan.
 - 4) ***Penyelenggaraan Lomba Mars Sumut Bangkit Tahun 2014 Jenjang Pendidikan Tinggi***, manfaat kegiatan lomba Mars Sumut bangkit yang diterbitkan oleh Gubernur Sumatera Utara untuk menumbuhkan sikap sportifitas dan kreatifitas dalam meningkatkan potensi diri, sekaligus untuk lebih meresapkan tugas dan peran masyarakat sebagai abdi



masyarakat. Dimana melalui Mars Sumut Bangkit ini memberi semangat kerja semua kalangan agar bersama-sama mendukung visi Sumatera Utara yaitu menjadi provinsi yang berdaya saing menuju Sumatera Utara sejahtera.

Dari capaian Indikator Kinerja yang telah diuraikan di atas, Pemerintah Provinsi Sumatera Utara juga memperhatikan aspek-aspek lain, antara lain :

- **Angka Buta Huruf**

Untuk Angka Buta Huruf di Provinsi Sumatera Utara mengalami penurunan dari tahun 2010 – 2012. Dimana pada tahun 2010 Angka Buta Huruf Sumatera Utara mencapai 2,40 persen, 2011 sebesar 2,85 persen dan tahun 2012 mencapai 2,36 persen. Hal ini mengindikasikan adanya keberhasilan Sumatera Utara dalam mengentaskan buta aksara di Provinsi Sumatera Utara.

Tabel 39
Capaian Indikator Pendidikan Provinsi Sumatera Utara
Tahun 2009-2012

Indikator Kinerja Utama Bidang Pendidikan	Tahun			
	2009	2010	2011	2012
Angka Buta Huruf				
Usia >15 tahun	2,85	2,68	3,17	2,65
Usia 15-44 tahun	0,61	0,51	1,66	1,11
Usia >45 tahun	7,80	7,65	6,85	6,41
Angka Partisipasi Sekolah (APS)				
Usia <7-12 Tahun)	98,7	98,9	98,33	98,59
Usia <13-15 Tahun)	91,43	92,26	89,1	90,85
Usia <16-18 Tahun)	66,34	66,94	67,54	69,73
Usia <19-24 Tahun)	14,68	15,65	16,42	17,36
Angka Partisipasi Kasar (APK)				
SD/MI/Paket A	112,89	114,20	104,56	106,26
SMP/Mts/Paket B	89,74	89,83	89,02	88,55
SMA/SMK/MA/Paket C	73,36	72,69	79,69	80,58
Angka Partisipasi Murni (APM)				
SD/MI/Paket A	94,46	95,33	91,46	93,26
SMP/Mts/Paket B	74,21	74,76	67,96	70,51



SMA/SMK/MA/Paket C	55,30	55,72	57,83	60,02
--------------------	-------	-------	-------	-------

Sumber : Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara (data diolah)

▪ Angka partisipasi sekolah (APS)

Pada tahun 2012 persentase partisipasi sekolah di Sumatera Utara secara umum mengalami penurunan. Dimana partisipasi sekolah untuk tingkat SD mencapai 98,65 persen, SMP (88,60 persen) dan SMA (67,97 persen) terus mengalami penurunan pada tingkat Perguruan Tinggi mencapai 16,28 persen. Hal ini mengindikasikan masih rendahnya keinginan masyarakat di Sumatera Utara untuk melanjutkan ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi.

Grafik. 9
Persentasi Partisipasi Sekolah Provinsi Sumatera Utara



Sumber : RKPD Pemprovsumu Tahun 2015

▪ Ratio Ketersediaan Sekolah dan Ruang Kelas pada berbagai jenjang pendidikan dasar

Tabel. 40
Ratio ketersediaan Sekolah dan Ruang Kelas
Pada berbagai jenjang pendidikan tahun 2009-2013

No	Jenjang Sekolah	Tahun				
		2009	2010	2011	2012	2013
A.	Jumlah Gedung Sekolah					
1	SD	8,968	8,050	10,292	8,172	9432
2	SMP	1,627	1,873	2,230	2,040	2357



3	SMA	935	861	950	869	868
4	SMK	692	681	834	678	678
B.	Jumlah Ruang Kelas					
1	SD	64,233	48.005	68,268	61,255	84481
2	SMP	14,781	26.997	17,010	17,807	19202
3	SMA	8,714	7.745	9,445	9,188	8325
4	SMK	6,067	5.777	6,639	6,467	7223

No	Jenjang Sekolah	Tahun				
C.	Ratio Kelas/Sekolah					
1	SD	7.16	5.96	6.63	7.49	8.95
2	SMP	9.08	14.40	7.62	8.72	8.15
3	SMA	9.32	8.99	9.94	10.57	9.6
4	SMK	8.77	8.48	7.96	9.53	8.72

Sumber : RKPD Pemprovsu Tahun 2015, Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara (data diolah)

Dari tabel diatas terlihat bahwa terjadi penambahan jumlah gedung sekolah, ditingkat SMP, SMA dan SMK selama tahun 2009-2013 Pada jenjang sekolah dasar pada tahun 2008 terjadi penggabungan beberapa sekolah dasar karena berkurangnya jumlah murid pada beberapa sekolah.

▪ Jumlah Guru dan murid dan Rasio Guru/Murid pada berbagai Jenjang Pendidikan Dasar

Tabel. 41
Jumlah Guru dan Murid Jenjang Pendidikan Dasar
Tahun 2009-2013 Provinsi Sumatera Utara

NO	Jenjang Pendidikan	2009	2010	2011	2012	2013
1	SD					
1.1.	Jumlah Guru	95.397	94.441	102.510	99.927	122.128
1.2.	Jumlah Murid	1.939.86	1.959.26	1.287.47	1.656.90	1.518.18
		5	5	2	9	4
1.3.	Rasio	22%	22%	24%	17%	12%
2	SMP					
2.1.	Jumlah Guru	55.966	34.334	59.002	45.951	57.563
2.2.	Jumlah Murid	936.039	962.689	428.575	569.581	552.761
2.3.	Rasio	12	12	12	12	10
3	SMA					
3.1.	Jumlah Guru	18.358	18.335	22.610	22.183	17.504
3.2.	Jumlah Murid	321.066	398.100	222.200	272.042	233.916
3.3.	Rasio	13	13	12	12	13
4	SMK					



4.1.	Jumlah Guru	17.100	11.726	16.019	18.374	14.178
4.2.	Jumlah Murid	300.500	300.092	220.074	234.983	228.809
4.3.	Rasio	12	20	30	13	16

Sumber : RKPD Pemprovsumsu Tahun 2015, Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara (data diolah)

Dari data pada Tabel 42 di atas terlihat bahwa terjadi perkembangan yang fluktuatif pada Ratio Siswa/Guru. Angka ratio sudah cukup ideal antara 11-22 orang siswa untuk setiap orang guru. Untuk Ratio Guru/Murid pada jenjang SLTP dan SMA cenderung semakin membaik. Hanya pada jenjang SMK yang mengalami penurunan. Diharapkan dengan ratio jumlah guru/murid yang semakin ideal akan lebih meningkatkan mutu pendidikan di Sumatera Utara, khususnya pada jenjang pendidikan dasar.

▪ Rasio Pendidikan

Dilihat dari perbandingan jumlah siswa terhadap sekolah, perbandingan siswa terhadap jumlah kelas, perbandingan siswa terhadap jumlah guru, perbandingan jumlah kelas terhadap jumlah sekolah, perbandingan jumlah kelas terhadap guru dan perbandingan jumlah guru terhadap sekolah pada berbagai jenjang pendidikan di Sumatera Utara dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel. 42
Ratio Jenjang Pendidikan/Rasio Pendidikan
Tahun 2009-2013

No	Jenjang Pendidikan/ Rasio Pendidikan	Tahun				
		2009	2010	2011	2012	2013
1	SD					
	Siswa / Sekolah	2.06	2.15	1.99	202	161
	Siswa / Kelas	29	30	32	27	18
	Siswa / Guru	20	18	17	17	12
	Kelas / Sekolah	7.16	7.15	6.19	7.49	9
	Kelas / Guru	0.69	0.61	0.53	0.61	0.69
2	Guru / Sekolah	10	12	12	12	13
	SMP					
	Siswa / Sekolah	3.49	3.09	2.48	279	235
	Siswa / Kelas	38	36	29	32	29



No	Jenjang Pendidikan/ Rasio Pendidikan	Tahun				
		2009	2010	2011	2012	2013
	Siswa / Guru	12	15	13	12	10
	Kelas / Sekolah	9.08	8.59	8.66	8.72	8.15
	Kelas / Guru	0.31	0.41	0.44	0.39	0.33
	Guru / Sekolah	29	21	19	22	24
3	SMA					
	Siswa / Sekolah	3.44	0.43	3.08	313	269
	Siswa / Kelas	37	35	34	30	35
	Siswa / Guru	12	12	11	12	13
	Kelas / Sekolah	9.32	9.69	9.12	10.57	1
	Kelas / Guru	0.33	0.34	0.33	0.41	0.38
	Guru / Sekolah	28	28	27	26	20
4	SMK					
	Siswa / Sekolah	3.56	0.57	3.41	346	276
	Siswa / Kelas	41	39	35	36	28
	Siswa / Guru	12	12	13	13	16
	Kelas / Sekolah	8.77	9.18	9.78	9.53	9.6
	Kelas / Guru	0.29	0.3	0.37	0.35	0.5
	Guru / Sekolah	30	30	26	27	17

Sumber : Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara

Dari data diatas terlihat bahwa Ratio Siswa/Guru sudah cukup ideal antara 11-20 orang siswa untuk setiap orang guru, namun belum terjadi pemerataan pada semua Kabupaten/Kota. Dengan tercapainya ratio ideal ini diharapkan dapat lebih meningkatkan mutu pendidikan di Sumatera Utara.

▪ Fasilitas pendidikan

Dari data jumlah sekolah yang ada di Sumatera Utara pada tahun 2011, tercatat jumlah ruang kelas dalam kondisi baik berjumlah 54.986 buah (63.50%), kondisi rusak ringan berjumlah 16.484 (19.04%) dan kondisi rusak berat berjumlah 15.121 (17.46%). Hal ini menuntut adanya penanganan segera agar target indikator pendidikan dapat tercapai.

▪ Angka Putus Sekolah

Perkembangan Angka Putus Sekolah pada berbagai jenjang pendidikan dapat dilihat pada tabel dibawah ini :



Tabel 43
Perkembangan Angka Putus Sekolah pada berbagai
jenjang pendidikan dasar 2009-2013

No	Jenjang Pendidikan	Tahun							
		2009		2010		2011		2012	
		Jlh	%	Jlh	%	Jlh	%	Jlh	%
1	SD	20,868	1.14	18.782	1.03	16.904	0.93	2,842	0.49
2	SMP	27,962	5.11	25.166	4.60	22.650	4.14	1,945	0.71
3	SMA	22,812	6.90	20.531	6.21	1.605	5.59	2,057	0.87
4	SMK	5,150	2.38%	4.635	2.15	725	1.94	4,233	0.25

Sumber : RKPDPemprovsu Tahun 2015, Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara (data diolah)

Dari tabel 44 di atas terlihat bahwa perkembangan angka persentase anak putus sekolah tahun 2009-2013 mengalami fluktuasi. Pada tahun 2009 mengalami peningkatan, tetapi terus mengalami penurunan sehingga pada tahun 2011 persentase anak putus sekolah sudah lebih rendah dibandingkan dengan tahun 2008. Grafik perkembangan angka putus sekolah tersebut dapat dilihat dibawah ini.

Grafik. 10
Persentase perkembangan putus sekolah pada berbagai
jenjang pendidikan tahun 2009-2013



Sumber : RKPDPemprovsu Tahun 2015, Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara (data diolah)



Tabel 44
Capaian Kinerja Sasaran Strategis ke-3

- APEK KESEHATAN

INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI KINERJA	CAPAIAN KINERJA (%)
(1)	(2)	(3)	(4)
1. Angka kematian bayi (AKB)/1000 KH	21,0 AKB/KH	20,22 AKI/KH	103,85
2. Angka kematian ibu (AKI)/100.000 KH	263 AKI/KH	268 AKI/KH	98,3
3. Prevalensi gizi buruk dan kurang (%)	22,0 %	21,5 %	102,32
4. Usia Harapan Hidup (UHH) (tahun)	71,7 Tahun	70,13 Tahun	97,81

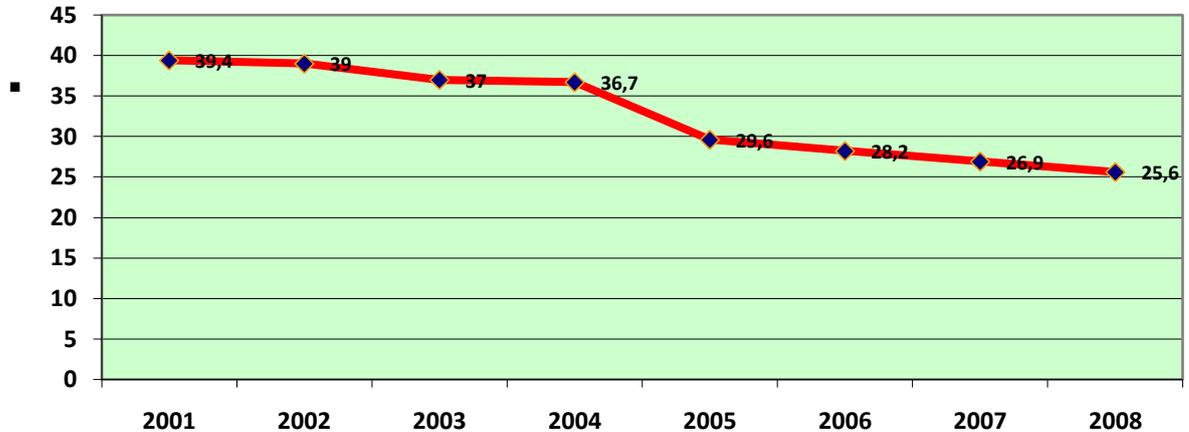
Dari Tabel 45 di atas menunjukkan bahwa Capaian Kinerja pada Sasaran Strategis ini dari 4 (empat) Indikator Kinerja yang digunakan dalam rangka mengukur keberhasilan/ kegagalan pada umumnya telah menunjukkan capaian kinerja yang SANGAT BAIK, sekalipun masih ada 2 (dua) Indikator Kinerja yang belum menunjukkan capaian kinerja yang semestinya, yaitu **“Pravalensi Gizi Buruk dan Kurang”** dan Indikator Kinerja **“Usia Harapan Hidup (UHH)”**, Selanjutnya akan diuraikan capaian kinerja dari masing-masing Indikator Kinerja yang digunakan, yaitu sebagai berikut :

- Capaian Indikator Kinerja **“Angka kematian bayi (AKB)/1000 KH”**,

Berdasarkan data BPS, AKB di Provinsi Sumatera Utara setiap tahunnya mengalami penurunan. Pada tahun 2001, AKB adalah sebesar 39,4 per 1.000 kelahiran hidup dan pada tahun 2008 mampu diturunkan menjadi 25,6 per 1.000 kelahiran hidup, seperti yang terlihat pada grafik di 11 berikut ini.



Grafik 11.
Angka Kematian Bayi (AKB)/Infant Mortality Rate (IMR)
Tahun 2001 – 2008 :



Sumber: SUDA, BPS Provinsi Sumatera Utara (2001 – 2010)

Berdasarkan angka hasil Sensus Penduduk 2010, diketahui bahwa AKB Sumatera Utara adalah 25,7 per 1.000 kelahiran hidup. Bila dilihat trend trend AKB kurun waktu 2001-2010, dimana diperhitungkan terjadi penurunan sekitar 1,37 per 1.000 kelahiran hidup; maka diperkirakan AKB Sumatera Utara pada tahun 2012 yaitu 22,96, tahun 2013 yaitu 21,59 per 1.000 kelahiran hidup dan tahun 2014 yaitu 20,22 per 1.000 kelahiran hidup. Dengan mempergunakan perhitungan ini maka kesimpulan sementara bahwa target sasaran utama AKB tahun 2014 yaitu menurunnya AKB menjadi 21 per 1.000 kelahiran hidup **telah mampu dicapai**.

Dari laporan rutin Pemantauan Wilayah Setempat (PWS) Kesehatan Ibu dan Anak (KIA) dilaporkan bahwa pada tahun 2014 jumlah bayi yang meninggal adalah sebanyak 1.078 bayi dari 228.947 kelahiran hidup.

▪ Capaian Indikator Kinerja “**Angka kematian Ibu (AKI)/100.000 KH**”,

Tinggi rendahnya AKI merefleksikan status kesehatan/gizi ibu selama hamil serta nifas, kualitas pelayanan kesehatan serta kondisi lingkungan sosial dan ekonomi di suatu negara. Oleh karena tidak adanya survey atau riset kesehatan yang mendukung tersedianya data AKB pada tahun 2014, maka masih



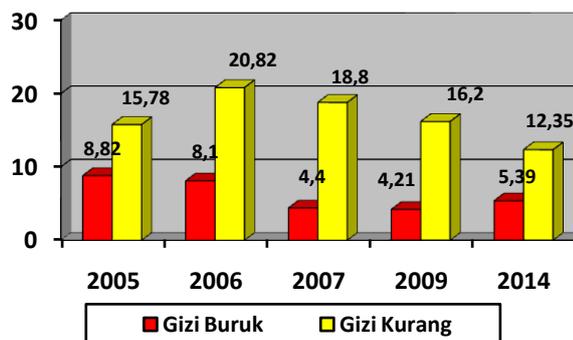
menggunakan angka pada Survei AKI dan AKB di Provinsi Sumatera tahun 2010 yaitu 268/100.000 kelahiran hidup. Dengan menggunakan angka tahun 2010, maka kesimpulan sementara bahwa sasaran utama AKI tahun 2014 yaitu menurunnya AKI menjadi 263 per 100.000 kelahiran hidup **belum mampu dicapai**.

Dari laporan rutin Pemantauan Wilayah Setempat (PWS) Kesehatan Ibu dan Anak (KIA) dilaporkan bahwa pada tahun 2014 jumlah ibu melahirkan yang meninggal adalah sebanyak 187 orang dari 228.947 kelahiran hidup.

▪ Capaian Indikator Kinerja “**Pravalensi Gizi Buruk dan Kurang**”,

Survey PSG dilaksanakan oleh Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Utara dengan mengambil sampel beberapa Kab/Kota. Bila dilihat hasil PSG sejak tahun 2005 terlihat ada penurunan prevalensi balita dengan gizi buruk dan kurang, namun hasil PSG belum representative untuk seluruh populasi. Pada tahun 2014 survey PSG hanya dilaksanakan di 11 Kab/Kota dengan hasil prevalensi balita dengan gizi kurang dan buruk yaitu 17,74%.

Grafik 12
Prevalensi Balita dengan Gizi Buruk dan Kurang
Tahun 2005-2014



Sumber : Survey PSG 2005-2014

Hasil PSG ini coba disandingkan dengan hasil Riset Kesehatan Dasar yang dilaksanakan oleh Kemenkes RI dimana prevalensi balita dengan gizi buruk dan kurang pada tahun 2013 yaitu 22%, 2010 yaitu 21,4%, dan tahun 2007 yaitu 22,7%.



Dengan membandingkan trend kecendrungan ke-2 sumber data tersebut maka diperhitungan range penurunan prevalensi balita dengan gizi kurang dan buruk antara 1,3% - 0,68% sehingga prevalensi balita dengan gizi kurang dan buruk yaitu antara 21,4% - 20,7%. Dengan demikian maka ditetapkan prevalensi gizi kurang dan buruk pada balita di Sumatera Utara yaitu 21,5% pada tahun 2014 dan **belum mampu** mencapai target sasaran utama yang ditetapkan yaitu 21% pada tahun 2014.

▪ Capaian Indikator Kinerja “Usia Harapan Hidup (UHH)”,

UHH penduduk di Provinsi Sumatera Utara mengalami peningkatan setiap tahunnya, seperti yang tercantum pada tabel berikut ini :

Tabel 45
Pencapaian UHH Tahun 2004-2012

TAHUN	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012
UHH	67,3 tahun	68,7 tahun	68,9 tahun	69,1 tahun	69,2 tahun	69,35 tahun	69,5 tahun	69,65 tahun	69,81 tahun

Sumber : SUDA; BPS-Survei Sosial Ekonomi Nasional 2010-2012/BPS-National Socio Economic Survey 2010-2012

Berdasarkan data BPS, UHH penduduk Sumatera Utara meningkat dari 67,3 tahun pada tahun 2004 menjadi 69,81 tahun pada tahun 2012. Dengan memperhitungkan trend kecendrungan peningkatan UHH kurun waktu 2004-2012, dimana terjadi peningkatan umur penduduk sebesar 0,16 tahun setiap tahunnya, maka diperkirakan UHH Sumatera Utara mencapai 69,97 tahun pada tahun 2013 dan 70,13 tahun pada tahun 2014. Dengan demikian target sasaran utama UHH pada tahun 2014 yaitu 71,7 tahun **belum mampu dicapai**.

Berkenaan dengan pencapaian kinerja dari Aspek Kesehatan, yang pada prinsipnya menjadi tugas yang dilimpahkan kepada Dinas Kesehatan maka pencapaian kinerja yang akan diuraikan di bawah ini juga dilihat dari aspek



Indikator Kinerja pada tingkat SKPD di Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Utara. Hal ini mengingat bahwa Indikator Kinerja Utama pada RPJMD secara makro, tentu disikapi dengan Indikator Kinerja pada tingkat SKPD di Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Utara.

Oleh sebab itu dengan tidak mengurangi hakekat penyajian informasi kinerja yang disajikan pada Laporan Kinerja Pemerintah Provinsi Sumatera Utara, maka dipandang perlu disajikan secara lebih detail sampai dengan program dan kegiatan yang dilaksanakan selama kurun waktu Tahun 2014, berkenaan dengan pencapaian Kinerja dari Aspek Kesehatan sesuai dengan Indikator Kinerja yang tertera pada Tabel 45 di atas disertai dengan Indikator Kinerja pada level SKPD Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Utara.

Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Utara selaku SKPD yang bertugas menyelenggarakan kewenangan Daerah dalam penyelenggaraan kesehatan di Provinsi Sumatera Utara, dimana bahwa berdasarkan pencapaian indikator kinerja masing-masing program terhadap target yang ditetapkan, disertai penjelasan analisa kecendrungan pencapaian indikator kinerja sejak tahun 2008, kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan untuk mendukung pencapaian kinerja tersebut serta penjelasan realisasi fisik dan keuangan dari masing-masing program secara keseluruhan dan maka pengkategorian pencapaian kinerja dibagi atas 4 (empat) kategori, yaitu sebagai berikut:

1. Kategori Sangat Kurang (warna merah), bila persen capaian kerja $\leq 60\%$
2. Kategori Cukup (warna kuning), bila persen capain kinerja 61%-79%
3. Kategori Baik (warna biru), bila persen capaian kinerja 80-99%.
4. Kategori Sangat Baik (warna hijau), bila persen capaian kinerja $\geq 100\%$.

➤ **PROGRAM OBAT DAN PERBEKALAN KESEHATAN**

Pencapaian Indikator Kinerja Tahun 2014.



Didalam Penetapan Kinerja terdapat 6 (enam) indikator kinerja Program Obat dan Perbekalan Kesehatan yang harus dicapai pada tahun 2014, dan pencapaiannya adalah sebagai berikut:

Tabel 46
Indikator Kinerja, Target, Capaian dan Persen Capaian
Program Obat dan Perbekalan Kesehatan
Tahun 2014

NO	INDIKATOR	TARGET TAHUN 2014	CAPAIAN TAHUN 2014	% CAPAIAN
1	Persentase ketersediaan obat dan vaksin	90%	72,07%	80,07%
2	Jumlah RSU dan Puskesmas yg melaksanakan pelayanan Kefarmasian sesuai standar.	12 RSU & 6 Pusk	12 RSU & 6 Pusk	100%
3	Persentase penggunaan obat rasional (POR) di sarana pelayanan kesehatan dasar.	36%	37%	102,78%
4	Persentase sarana sediaan farmasi yang memenuhi persyaratan GMP (Good Manufacturing Practise) dan GDP (Good Distribution Practise)	62%	83,5%	83,87%
5	Persentase IRTP (Industri Rumah Tangga Pangan) yang bersertifikat	15%	20,02%	133,45%
6	Persentase sarana produk alat kesehatan dan PKRT (Perbekalan Kes Rumah Tangga) yang memenuhi persyaratan GMP (Good Manufacturing Practise) dan GDP (Good Distribution Practice	62%	75%	121%

Dari persen capaian terlihat, bahwa dari 6 indikator kinerja Program Obat dan Perbekalan Kesehatan, terdapat 2 (dua) indikator yang berkategori BAIK



(33,33%) yaitu indikator 1-4 berkategori BAIK dan 4 (empat) indikator (66,67%) yaitu indikator 2,3,5 dan 6 berkategori SANGAT BAIK. Penjelasan tentang pencapaian masing-masing indikator serta analisa kecenderungan pencapaian sejak tahun 2009 sampai tahun 2014 , adalah sebagai berikut:

1. Persentase ketersediaan obat dan vaksin

Persentase ketersediaan obat dan vaksin dari tahun 2009-2014 dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 47
Persentase ketersediaan obat dan vaksin Tahun 2009-2014

TAHUN	2009	2010	2011	2012	2013	2014
% ketersediaan obat dan vaksin	81	85	84	87	52	72,07

Sumber: Laporan Bidang Sarana dan Jaminan Kesehatan 2010-2014.

Dari tabel terlihat bahwa persentase ketersediaan obat dan vaksin menunjukkan trend peningkatan selama kurun waktu 2009-2012, namun pada tahun 2013 mengalami penurunan drastis sebesar 35% dari tahun 2012 sehingga menyebabkan persentase ketersediaan obat dan vaksin hanya mencapai 52% pada tahun 2013.

Pada tahun 2014, persentase mengalami peningkatan mencapai 72,07% namun masih dibawah target yang ditetapkan yaitu 90%. Belum tercapainya target yang ditetapkan disebabkan oleh ditolaknya pengadaan beberapa item obat melalui e-katalog oleh penyedia akibat permintaan yang melebihi kapasitas.

1. Jumlah RSU dan Puskesmas yg melaksanakan pelayanan Kefarmasian sesuai standar.



Penerapan Standard Kefarmasian di rumah sakit di Provinsi Sumatera Utara terlihat lambat. Diperkirakan 98% rumah sakit (Pemerintah dan Swasta) belum menerapkan Standard Pelayanan Kefarmasian. Rendahnya pencapaian ini karena parameter “pelayanan kefarmasian memenuhi standard” diukur dari sarana dan prasarana juga terlaksananya prosedur/sistem kefarmasian, yang meliputi :

- Struktur Organisasi Farmasi di Rumah Sakit
- Panitia/Sub Komite Farmasi dan Terapi
- Formularium Rumah Sakit yang diperbaharui secara berkala.

Agar RSUD mampu menyelenggarakan pelayanan kefarmasian sesuai standard, maka sejak tahun 2008 telah dilaksanakan pilot project pelayanan kefarmasian. Pada tahun 2013, sudah terdapat 6 RSUD yang telah menyelenggarakan pelayanan kefarmasian sesuai standard yaitu RSUD Dr. Pirngadi Medan dan RSUD Lubuk Pakam Deli Serdang (tahun 2008) dan RSUD Dr. Djoelham Binjai dan RSUP H. Adam Malik Medan (tahun 2009). Pada tahun 2011-2012 tidak ada RSUD yang dijadikan pilot project pelayanan kefarmasian, akibat tidak tertampungnya kegiatan ini didalam DPA TA 2011-2012; dan pada tahun 2013 bertambah 2 RSUD yang menyelenggarakan pelayanan kefarmasian sesuai standard yaitu RSUD. Dr. Kumpulan Pane Tebing Tinggi dan RSUD Dr. F/L Tobing Sibolga.

Pada tahun 2014, dari 16 RSUD yang dijadikan pilot project hanya 6 RSUD yang menyelenggarakan pelayanan kefarmasian sesuai standard (yang mendapatkan skor $\geq 60\%$) yaitu RSUD Haji Medan, RSUD H. Abdul Manan Simatupang, RSUD Dr. Djasamen saragih, RSUD Porsea, RSUD Salak dan RSUD Salak. Untuk Puskesmas, terdapat 6 Puskesmas yang telah menyelenggarakan pelayanan kefarmasian sesuai standard yaitu Puskesmas Gunung Tua (Kabupaten Padang Lawas Utara), Puskesmas Teluk Dalam dan



Lahusa (Kabupaten Nias Selatan), Puskesmas Rambung (Kota Tebing Tinggi), Puskesmas Lima Puluh (Kabupaten Batubara), dan Puskesmas Prapat Janji (Kabupaten Asahan). Dengan demikian sampai akhir tahun 2014, telah terdapat 12 RSUD dan 6 puskesmas yang telah menyelenggarakan kefarmasian sesuai standard, sehingga target indikator ini telah mampu tercapai.

2. Tercapainya persentase Penggunaan obat rasional di sarana pelayanan kesehatan dasar.

Seperti halnya pada tahun 2013, hasil monitoring ke puskesmas di 33 Kabupaten/Kota diketahui bahwa dari 3 indikator persepsan untuk menghitung penggunaan obat rasional, terdapat 2 indikator yaitu % persepsan generik yang memenuhi standard mengalami peningkatan yaitu 99% pada tahun 2014; cukupkan jumlah item obat yang diresepkan masih sama yaitu disekitar 3 resep dan persentase penggunaan antibiotik pada ISPA Non Pneumonia yaitu 44% pada tahun 2014; angka ini masih sangat jauh dari standard $\leq 20\%$. Dengan pencapaian ke-3 indikator tersebut, maka persentase penggunaan obat rasional di sarana pelayanan kesehatan dasar mencapai 37% pada tahun 2014, mengalami peningkatan dibandingkan tahun 2013 yaitu 35,61%. Dengan demikian target kinerja tahun 2014 yaitu 36% telah mampu tercapai. Pencapaian indikator persepsan pada penggunaan obat rasional tahun 2014, lebih jelas terinci pada tabel berikut ini.

Tabel 48
Pencapaian Indikator Persepsan Penggunaan Obat Rasional
Di Provinsi Sumatera Utara Tahun 2012-2014



NO	INDIKATOR PERESEPAN	CAPAIAN			STANDARD
		2012	2013	2014	
1.	% Penggunaan antibiotik pada ISPA Non Pneumonia	48%	44%	44%	≤ 20%
2.	Jumlah Item Obat per resep	3,2	3,02	3,02	3 s/d 4
3.	% Peresepan Generik	98%	98%	99%	≥ 90%

Sumber : Laporan Bidang Sarana dan Jaminan Kesehatan 2013-2014

3. **Persentase sarana sediaan farmasi yang memenuhi persyaratan GMP (Good Manufacturing Practise) dan GDP (Good Distribution Practise)**

Indikator persentase sediaan farmasi yang memenuhi persyaratan GMP dan GDP merupakan indikator baru yang sebelumnya tidak tercantum pada Renstra Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Utara Tahun 2009-2013.

Pada tahun 2014, jumlah sarana sediaan farmasi di Sumatera Utara terdapat sebanyak 79 unit, dengan perincian jenis serta yang memenuhi syarat GMP dan GDP dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 49
Persentase sediaan farmasi yang memenuhi syarat GMP dan GDP Sumatera Utara tahun 2014



JENIS SARANA	JUMLAH	Memenuhi Persyaratan GMP	Memenuhi Persyaratan GDP	%
Industri Farmasi	4 Unit	4 Unit	-	100%
Industri Obat Tradisional	2 Unit	2 Unit	-	100%
UKOT	2 Unit	2 Unit	-	100%
Kosmetika	15 Unit	10 Unit	-	67%
PBF	56 Unit	-	42 Unit	75%
TOTAL	79 Unit	28 Unit	42 Unit	88,61%

Sumber: Laporan Bidang Sarana dan Jaminan Kesehatan 2012-2014

Dengan pencapaian 88,61% maka target indikator yaitu 62% pada tahun 2014 telah mampu dicapai.

4. **Persentase PIRT (Perusahaan Industri Rumah Tangga) yang bersertifikat**

Indikator persentase yang bersertifikat juga merupakan indikator baru yang sebelumnya tidak tercantum pada Renstra Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Utara Tahun 2009-2013.

Di Sumatera Utara terdapat 2.389 unit PIRT dan yang bersertifikat baru mencapai 480 unit atau 20,02% pada tahun 2014. Dengan demikian target 15% pada tahun 2014 telah mampu dicapai.



5. ***Tercapainya persentase sarana produk alat kesehatan dan PKRT yang memenuhi yang memenuhi persyaratan GMP (Good Manufacturing Practise) dan GDP (Good Distribution Practice).***

Pada tahun 2014, di Sumatera Utara terdapat 40 unit sarana distribusi, 15 unit sarana produksi alat kesehatan (Alkes) dan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga (PKRT) serta 25 unit sarana penyalur alat kesehatan. Dari 40 unit sarana alkes dan PKRT, yang memenuhi persyaratan GMP dan GDP adalah sebanyak 30 unit yaitu 14 unit sarana produksi alkes dan PKRT dan 16 unit sarana penyalur alat kesehatan. atau 64%. Dengan demikian persentase sarana produk alat kesehatan dan PKRT yang memenuhi persyaratan GMP dan GDP adalah sebesar 75%. Dengan demikian target yang ditetapkan yaitu 62% pada tahun 2014 telah mampu dicapai.

A. Kegiatan-kegiatan Tahun 2014

Jumlah anggaran yang dialokasikan untuk Program Obat dan Perbekalan Kesehatan pada tahun 2014 yaitu sebesar Rp. 14.070.554.300,- dengan kegiatan-kegiatan adalah sebagai berikut :

1. Pengadaan Obat Buffer Stok Provinsi dan VAR (Vaksin Anti Rabies)
2. Pertemuan Pengelolaan Obat, Vaksin dan Perbekalan Kesehatan
3. Sosialisasi Software Penggunaan Obat Rasional di Sarana Pelayanan Kesehatan
4. Pertemuan Evaluasi Pelaksanaan Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Sediaan Farmasi
5. Pertemuan dalam rangka CPOTB
6. Biaya Operasional Pusat Pengelolaan Pasca Panen Tanaman Obat (P4TO)
7. Pertemuan Koordinasi Lintas Sektor dan Lintas Program dalam rangka Penggunaan P4TO
8. Pembinaan Makanan Jajanan Anak Sekolah
9. Pelatihan Tenaga Penyuluh Keamanan Pangan (PKP) MJAS di Kota Medan.



10. Pertemuan tentang CPAKB (Cara Produksi Alat Kesehatan yang Baik) dan CPPKRTB (Cara Produksi Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga yang baik)
11. Sosialisasi Cara Distribusi Alat Kesehatan yang Baik
12. Operasional Pengelolaan Program Obat dan Perbekalan Kesehatan.
13. Pilot Project Pelayanan Kefarmasian di RSUD.
14. Peningkatan Sarana Instalansi Farmasi Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Utara TA 2014
15. Sosialisasi Penggunaan Obat Generik di Sarana Pelayanan Kesehatan
16. Peningkatan Sarana dan Prasarana Pusat Pasca panen Tanaman Obat
17. Review Penerapan Sistem Pelaporan Narkotika Psikotropika
18. Pertemuan Lintas Sektor dalam rangka Peningkatan Produksi Alat Kesehatan Dalam Negeri

Kegiatan yang tidak terlaksana adalah Biaya Operasional Pusat Pengelolaan Pasca Panen Tanaman Obat (P4TO), sehingga sampai akhir tahun anggaran, realisasi fisik Program Obat dan Perbekalan Kesehatan adalah 79,94% dengan jumlah realisasi keuangan sebesar Rp. 8.001.054.620,- atau 56,86%.

1.1.1 PROGRAM UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT (UKM)

A. Pencapaian Indikator Kinerja Tahun 2014

Didalam Penetapan Kinerja terdapat 15 (lima belas) indikator kinerja Program Upaya Kesehatan Masyarakat yang harus dicapai pada tahun 2014, dan pencapaiannya adalah sebagai berikut:



Tabel 50
Indikator Kinerja, Target, Capaian dan Persen Capaian
Program Upaya Kesehatan Masyarakat Tahun 2014

NO	INDIKATOR KINERJA	TARGET TAHUN 2014	CAPAIAN TAHUN 2014	% CAPAIAN
1	Cakupan persalinan yang ditolong oleh tenaga kesehatan.	86%	86%	100%
2	Cakupan pelayanan antenatal (K4)	90%	84,1%	90,55%
3	Jumlah Puskesmas Rawat Inap yg mampu PONED.	140 Pusk	147 Pusk	105%
4	Cakupan pelayanan anak balita	85%	63,3%	70,82%
5	Jumlah puskesmas yang menyelenggarakan pely kes reproduksi terhadap wanita dan remaja.	161 Pusk	74 Pusk	45,96%
6	Jumlah puskesmas santun usila yang terbentuk di Kab/Kota	70 pusk	70 pusk	100%
7	Cakupan pelayanan kesehatan usia lanjut.	62%	62%	100%
8	Jumlah puskesmas yang melaksanakan pelayanan gawat darurat sesuai standard	347 Pusk	370 Pusk	106,62%
9	Jumlah puskesmas yang menerapkan pelayanan kesehatan dasar sesuai standard	40 Pusk	38 Pusk	95%
10	Persentase Kab/Kota yang memiliki minimal 4 puskesmas yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan tradisional	30%	15%	50%
11	Jumlah Kab/Kota yang memiliki minimal 4 puskesmas yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan kerja.	17 KK	6 KK	35,30%



NO	INDIKATOR KINERJA	TARGET TAHUN 2014	CAPAIAN TAHUN 2014	% CAPAIAN
12	Jumlah pesantren yang memiliki poskestren	55 pesantren	78 Pesantren	141,8%
13	Jumlah Kab/Kota yang memiliki minimal 3 puskesmas yang pelayanan kesehatan olah raga	4 KK	8 KK	200%
14	Jumlah Kab/Kota yang memiliki minimal 3 puskesmas yang menyelenggarakan program pengembangan (jiwa, indera, dan gigi mulut)	20 KK	16 KK	80%

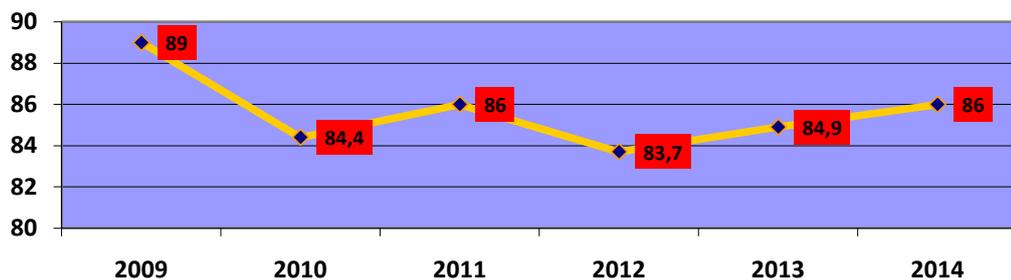
Dari persen capaian terlihat, bahwa dari 15 indikator kinerja Program Upaya Kesehatan Masyarakat, terdapat 7 (tujuh) indikator (46,7%) berkategori SANGAT BAIK yaitu indikator ke-1,3,6,7,8,13 dan 14; sebanyak 3 (indikator) indikator (20%) yaitu indikator ke- 2,9 dan 15 berkategori BAIK, 1 (satu) indikator (6,7%) yaitu indikator ke-4 berkategori CUKUP, dan 3 (tiga) indikator (20%) berkategori KURANG yaitu indikator 5,10 dan 11 berkategori KURANG. Penjelasan tentang pencapaian masing-masing indikator serta analisa kecenderungan pencapaian sejak tahun 2009, adalah sebagai berikut:



1. Tercapainya Cakupan Persalinan yang Ditolong oleh Tenaga Kesehatan

Pada tahun 2014, cakupan persalinan ditolong oleh tenaga kesehatan mengalami peningkatan dibandingkan tahun 2013 yaitu dari 84,9% meningkat menjadi 86%. Namun bila dilihat selama kurun waktu 2009-2014 menunjukkan trend fluktuatif. Pada tahun 2009 cakupan mencapai 89%, dan turun pada tahun 2010 menjadi 84,4% dan selanjutnya mencoba meningkat namun sampai tahun 2014 belum mampu mencapai persentase pada tahun 2009. Walaupun demikian pencapaian ini telah mampu mencapai target indikator yang ditetapkan yaitu 86% pada tahun 2014.

Grafik 13
Persentase persalinan yang ditangani oleh tenaga kesehatan tahun 2009-2014



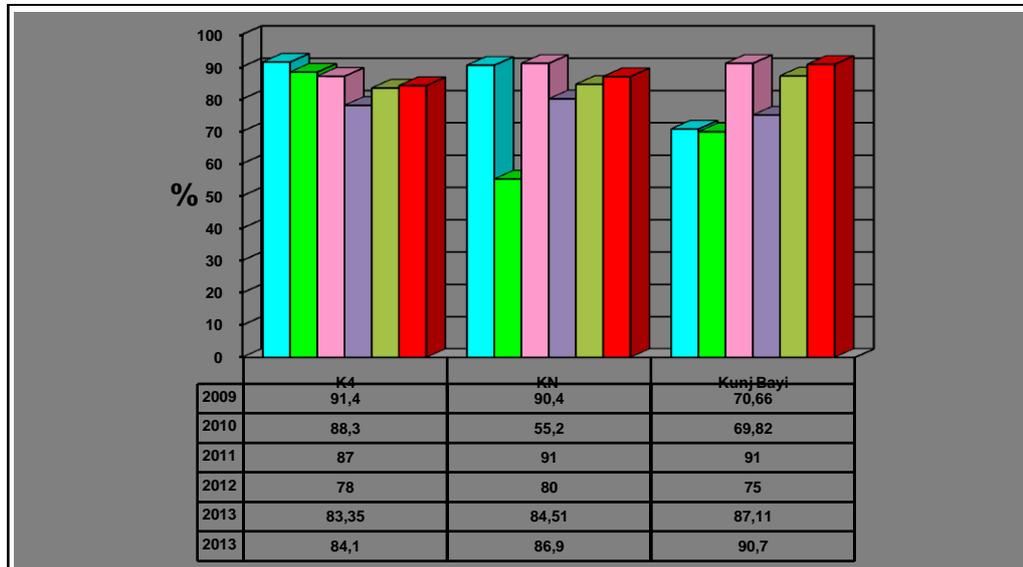
Sumber : Laporan Bidang Yankes Dinas Kesehatan Provsu Tahun 2010-2014

2. Cakupan Pelayanan Antenatal Care (K4), Cakupan Kunjungan Neonatus (KN Lengkap) dan Cakupan Kunjungan Bayi.

Dibandingkan tahun 2013, pencapaian cakupan antenatal care 4 kali ibu (K4), KN lengkap dan kunjungan bayi mengalami peningkatan pada tahun 2014, dan ke-3 indikator mencapai angka di atas angka 80%. Perkembangan persentase antenatal care (K4), KN lengkap dan Kunjungan bayi seperti yang tergambar pada grafik berikut ini.



Grafik 14
Persentase Antenatal Care (K4), Kunjungan Neonatus (KN Lengkap) dan Kunjungan Bayi Tahun 2009 – 2014



Sumber : Laporan Bidang Yankes Dinas Kesehatan Provsu Tahun 2010-2014

Selama kurun waktu 2009-2014, cakupan K4 ibu hamil tertinggi terjadi pada tahun 2009 yaitu berada diatas angka 90%. Sejak tahun 2010 terus mengalami penurunan hingga mencapai titik terendahnya pada tahun 2012 yaitu 78% dan kembali meningkat pada tahun 2013 dan 2014 hingga mencapai 84,1%, namun belum mampu mencapai angka tahun 2009 dan juga belum mampu mencapai target indikator kinerja yang ditetapkan yaitu 90% pada tahun 2014. Pada tahun 2014, dari 320.318 sasaran ibu hamil, yang mendapatkan pelayanan antenatal care (K4) adalah sebanyak 269.353 ibu hamil (84,1%).



3. Persentase Puskesmas yang melaksanakan PONED (Pelayanan Obstetri Neonatal Emergensi Dasar)

Pada tahun 2014, dari 570 puskesmas yang tersebar di seluruh kabupaten/kota, terdapat 147 puskesmas yang menyelenggarakan PONED atau 25,80%. Jumlah ini mengalami peningkatan dibandingkan tahun 2013 yaitu 137 puskesmas, tahun 2012 yaitu 94 puskesmas dan tahun 2011 yaitu 98 puskesmas PONED. Penurunan jumlah puskesmas PONED yang terjadi di tahun 2012 akibat pindahnya tenaga dokter dan perawat yang telah dilatih, hal ini terjadi di Kabupaten Mandailing Natal, Samosir, Deli Serdang, Serdang Bedagai dan Kota Binjai, masing-masing berkurang 1 unit Puskesmas PONED.

Pada tahun 2014, dari 33 kab/kot terdapat 4 daerah yang tidak memiliki puskesmas PONED yaitu Kota Sibolga, Tebing Tinggi, Tanjung Balai dan Kabupaten Labuhan Batu Selatan. Penyebaran puskesmas PONED per Kabupaten/Kota dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 51
Jumlah Puskesmas PONED berdasarkan Kabupaten/Kota
Di Provinsi Sumatera Utara Tahun 2014

NO	KAB/KOTA	JML PUSKESMAS RAWAT INAP	JML PUSKESMAS PONED
1	NIAS	10	3
2	MANDAILING NATAL	26	6
3	TAPANULI SELATAN	16	4
4	TAPANULI TENGAH	23	5
5	TAPANULI UTARA	19	6
6	TOBA SAMOSIR	19	1
7	LABUHAN BATU	13	6
8	ASAHAN	22	8
9	SIMALUNGUN	34	10
10	DAIRI	18	5
11	KARO	19	5
12	DELI SERDANG	34	12
13	LANGKAT	30	8



NO	KAB/KOTA	JML PUSKESMAS RAWAT INAP	JML PUSKESMAS PONED
14	NIAS SELATAN	36	8
15	HUMBANG HASUNDUTAN	12	3
16	PAKPAK BHARAT	8	4
17	SAMOSIR	12	5
18	SERDANG BEDAGAI	20	6
19	BATUBARA	14	6
20	PADANG LAWAS	14	4
21	PADANG LAWAS UTARA	17	3
22	LABUHAN BATU SELATAN	17	0
23	LABUHAN BATU UTARA	17	4
24	NIAS UTARA	11	4
25	NIAS BARAT	8	2
26	SIBOLGA	4	0
27	TANJUNGBALAI	8	0
28	PEMATANG SIANTAR	19	2
29	TEBING TINGGI	9	0
30	MEDAN	39	13
31	BINJAI	8	1
32	PADANGSIDIMPUAN	9	1
33	GUNUNG SITOLI	6	2
JUMLAH		570	147

Sumber : Laporan Bidang Yankes Dinas Kesehatan Provsu Tahun 2014.

Dengan bertambahnya jumlah puskesmas PONED menjadi 147 unit (25,80%) maka target indikator kinerja yang ditetapkan yaitu 140 puskesmas tahun 2014 telah tercapai.



4. Tercapainya persentase fasilitas kesehatan dasar milik pemerintah yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan reproduksi terhadap wanita dan remaja (PKPR)

Seperti pada tahun 2013, maka pada tahun 2014 tidak ada peningkatan jumlah puskesmas PKPR. Angka yang digunakan yaitu pencapaian tahun 2012, dari 570 puskesmas di Sumatera Utara terdapat 156 puskesmas PKPR (27,4%) yang tersebar di 23 Kab/Kota. Angka ini mengalami peningkatan dibandingkan tahun 2011, yaitu 129 puskesmas dari 545 puskesmas yang ada (23,7%).

Kabupaten/Kota yang belum memiliki puskesmas PKPR yaitu : Kabupaten Nias, Nias Selatan, Humbang Hasundutan, Samosir, Pakpak Bharat, Padang Lawas, Nias Utara, Nias Barat, Labuhan Batu Utara dan Gunung Sitoli. Penyebaran Puskesmas PKPR per kabupaten/kota dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 52
Jumlah Puskesmas PKPR berdasarkan Kabupaten/Kota
Di Provinsi Sumatera Utara Tahun 2014

NO	KAB/KOTA	JML PUSKESMAS	JML PUSKESMAS PKPR
1	NIAS	10	-
2	MANDAILING NATAL	26	1
3	TAPANULI SELATAN	16	4/5
4	TAPANULI TENGAH	23	4
5	TAPANULI UTARA	19	4
6	TOBA SAMOSIR	19	12
7	LABUHAN BATU	13	4/7
8	ASAHAN	22	18
9	SIMALUNGUN	34	4/5
10	DAIRI	18	4/1
11	KARO	19	4



NO	KAB/KOTA	JML PUSKESMAS	JML PUSKESMAS PKPR
12	DELI SERDANG	34	14
13	LANGKAT	30	4
14	NIAS SELATAN	36	-
15	HUMBANG HASUNDUTAN	12	-
16	PAKPAK BHARAT	8	-
17	SAMOSIR	12	-/2
18	SERDANG BEDAGAI	20	4/0
19	BATUBARA	14	4/0
20	PADANG LAWAS	14	-/5
21	PADANG LAWAS UTARA	17	4
22	LABUHAN BATU SELATAN	17	4/1
23	LABUHAN BATU UTARA	17	-
24	NIAS UTARA	11	-
25	NIAS BARAT	8	-
26	SIBOLGA	4	4
27	TANJUNGBALAI	8	4/2
28	PEMATANG SIANTAR	19	4
29	TEBING TINGGI	9	4/0
30	MEDAN	39	39
31	BINJAI	8	4
32	PADANGSIDIMPUAN	9	4/3
33	GUNUNG SITOLI	6	-
JUMLAH		570	156

Sumber: Laporan Bidang Yankes 2014

5. Jumlah Puskesmas Santun Usila yang terbentuk di Kab/Kota

Sampai tahun 2014, sudah terbentuk 75 puskesmas usila di 32 kabupaten/kota. Pencapaian ini sudah mampu mencapai target kinerja tahun 2014 yaitu 70 puskesmas. Perkembangan jumlah puskesmas usila di Sumatera Utara dapat dilihat pada tabel berikut ini:



Tabel 53
Jumlah Puskesmas Usila berdasarkan Kabupaten/Kota
Di Provinsi Sumatera Utara Tahun 2010- 2014

NO	KAB/KOTA	JUMLAH PUSKESMAS LANSIA				
		2010	2011	2012	2013	2014
1	MANDAILING NATAL	-	2	-	1	-
2	TAPANULI SELATAN	-	2	-	-	-
3	TAPANULI TENGAH	-	2	1	-	-
4	TAPANULI UTARA	-	2	-	-	-
5	TOBA SAMOSIR	-	2	-	1	-
6	LABUHAN BATU	-	2	-	-	-
7	SIMALUNGUN	-	2	-	-	-
8	DELI SERDANG	2	-	-	1	-
9	HUMBANG HASUNDUTAN	-	2	-	-	-
10	PAKPAK BHARAT	-	2	-	-	-
11	SAMOSIR	-	2	-	-	-
12	SERDANG BEDAGAI	-	1	-	1	-
13	BATUBARA	-	1	-	1	-
14	PADANG LAWAS UTARA	-	2	-	-	-
15	LABUHAN BATU UTARA	-	2	-	-	-
16	NIAS UTARA	-	2	-	-	-
17	NIAS BARAT	-	2	-	-	-
18	SIBOLGA	-	2	1	-	-
19	TANJUNGBALAI	-	2	1	-	-
20	PEMATANG SIANTAR	-	2	-	1	-
21	TEBING TINGGI	-	2	-	-	1
22	MEDAN	2	-	-	-	-
23	BINJAI	-	1	1	-	-
24	PADANGSIDIMPUAN	-	2	-	1	-
25	GUNUNG SITOLI	-	2	-	-	-
26	NIAS SELATAN	-	-	5	-	-
27	PADANG LAWAS	-	-	1	-	-
28	KARO	-	-	2	-	-
29	NIAS	-	-	-	2	-
30	ASAHAN	-	-	-	1	-
31	LANGKAT	-	-	-	-	2
32	LABUHAN BATU SELATAN	-	-	-	-	1
33	DAIRI	-	-	-	-	2
JUMLAH		4	43	12	10	6

Sumber: Laporan Bidang Yankes 2010-2014

6. Tercapainya Cakupan Pelayanan Kesehatan Usia Lanjut

Cakupan pelayanan kesehatan usia lanjut dihitung berdasarkan jumlah penduduk usia lanjut yang mendapatkan pelayanan di puskesmas dibagi dengan sasaran (total) penduduk usia lanjut di wilayah tersebut.



Pada tahun 2014, jumlah penduduk usila di Sumatera Utara tercatat sebanyak 850.248 jiwa. Dari total penduduk lansia tersebut sebanyak 527.810 orang atau 62,08% mendapatkan pelayanan kesehatan lansia setiap bulannya. Angka ini mengalami peningkatan bila dibandingkan tahun 2013 yaitu 53%, tahun 2012 yaitu 55, dan tahun 2011 yaitu 49%. Dengan pencapaian 62,08% pada tahun 2014 maka target kinerja yaitu 60% telah tercapai.

7. Terselenggaranya pelayanan gawat terpadu darurat di puskesmas

Sampai akhir tahun 2014, puskesmas yang menyelenggarakan pelayanan gawat darurat terpadu (SPGDT) sebanyak 370 puskesmas yang tersebar di 33 kabupaten/kota. Dari jumlah tersebut, sebanyak 56 puskesmas terbentuk pada tahun 2009, 58 puskesmas tahun 2010, 66 puskesmas pada tahun 2011, 56 puskesmas pada tahun 2012, tahun 2013 terbentuk 78 puskesmas dan pada tahun 2014 sebanyak 56 puskesmas. Adapun penyebaran puskesmas SPGDT di kabupaten/kota adalah sebagai berikut:

Tabel 54
Jumlah Puskesmas SPGDT berdasarkan Kabupaten/Kota
Di Provinsi Sumatera Utara Tahun 2009 - 2014

NO	KAB/KOTA	JUMLAH PUSKESMAS SPGDT					
		2009	2010	2011	2012	2013	2014
1	NIAS	2	2	2	2	-	-
2	MANDAILING NATAL	2	2	2	5	2	2
3	TAPANULI SELATAN	2	2	2	-	2	2
4	TAPANULI TENGAH	2	2	2	8	2	2
5	TAPANULI UTARA	2	2	2	-	3	2
6	TOBA SAMOSIR	2	2	2	-	2	2
7	LABUHAN BATU	2	2	2	-	2	2
8	ASAHAN	2	2	2	-	3	2
9	SIMALUNGUN	2	2	2	-	3	2
10	DAIRI	2	2	2	5	3	2
11	KARO	2	2	2	-	2	2
12	DELI SERDANG	2	2	2	-	3	2
13	LANGKAT	2	2	2	-	3	-



NO	KAB/KOTA	JUMLAH PUSKESMAS SPGDT					
		2009	2010	2011	2012	2013	2014
14	NIAS SELATAN	2	2	2	2	3	-
15	HUMBANG HASUNDUTAN	2	2	2	-	3	2
16	PAKPAK BHARAT	2	2	2	4	3	2
17	SAMOSIR	2	2	2	5	2	2
18	SERDANG BEDAGAI	2	2	2	3	2	2
19	BATUBARA	2	2	2	-	2	2
20	PADANG LAWAS	2	2	2	-	3	2
21	PADANG LAWAS UTARA	2	2	2	-	2	2
22	LABUHAN BATU SELATAN	-	2	2	-	2	2
23	LABUHAN BATU UTARA	-	2	2	-	3	2
24	NIAS UTARA	-	2	2	5	3	1
25	NIAS BARAT	-	2	2	3	2	1
26	SIBOLGA	2	2	2	3	2	2
27	TANJUNGBALAI	2	-	2	3	3	2
28	PEMATANG SIANTAR	2	2	2	-	3	2
29	TEBING TINGGI	2	-	2	2	3	2
30	MEDAN	2	2	2	-	2	2
31	BINJAI	2	-	2	-	2	2
32	PADANGSIDIMPUAN	2	2	2	3	1	2
33	GUNUNG SITOLI	-	-	2	3	2	-
JUMLAH		56	58	66	56	78	56

Sumber: Laporan Bidang Yankes 2009 - 2014.

Dengan penambahan 56 puskesmas SPGDT pada tahun 2014, maka target indikator kinerja yaitu terbentuknya 347 puskesmas SPGDT pada tahun 2014 tercapai bahkan diatas target yang ditetapkan.

8. Terselenggaranya Puskesmas yang menerapkan standard Pelayanan Medik Dasar (SPMD)

Sampai dengan tahun 2014, jumlah puskesmas yang menerapkan standar pelayanan medik sebanyak 38 puskesmas, dengan perincian 2 puskesmas terbentuk pada tahun 2009, 2 puskesmas pada tahun 2010, 5 puskesmas terbentuk pada tahun 2011, 6 puskesmas pada tahun 2012, 10 puskesmas pada tahun 2013 dan 13 puskesmas pada tahun 2014, seperti yang terlihat pada tabel berikut ini:



Tabel 55
Jumlah Puskesmas yang menyelenggarakan SPMD
di Provinsi Sumatera Utara Tahun 2009-2014

TAHUN	PUSKESMAS	JENIS PELAYANAN
2009	1. Pusk. Glugur Darat Kota Medan 2. Pusk. Perbaungan Kab. Sergei	Pelayanan Akupuntur Pelayanan Plus
2010	1. Pusk. Padang Bulan Kota Medan 2. Pusk. Padang Matinggi Kota Padang Sidempuan	Klinik VCT Pelayanan PKPR
2011	1. Pusk. Tanjung Morawa Kab. Deli Serdang (Klinik Metadon) 2. Pusk. Rantau-prapat Kota Kab. Lab Batu (Pusk. Usila) 3. Pusk. Medan Deli Kota Medan 4. Pusk. Tanjung Morawa Kab. Deli Serdang. 5. Pusk. Pantai Cermin Kab. Serdang Bedagai	Pelayanan Perkotaan Pelayanan Perkotaan Pelayanan Kes. Kerja Pelayanan Prima Pelayanan Prima
2012	1. Pusk. Sadabuan Kota Padang Sidempuan 2. Pusk. Gunung Tua Kab. Paluta 3. Pusk. Sidodadi Kab. Asahan 4. Pusk. Simarpinggan Kab. Tapanuli Selatan 5. Pusk. Tanjung Morawa Kab. Deli Serdang 6. Pusk. Panyabungan Jae Kab. Madina	Pelayanan Perkesmas Pelayanan Perkesmas Pelayanan Perkesmas Pelayanan Perkesmas Pelayanan Perkesmas
2013	1. Pusk. Pokenjilor P. Sidempuan 2. Pusk. Pijorkoling P. Sidempuan 3. Pusk. Pandan Kab. Tap Tengah 4. Pusk. Siabu Kab. Madina 5. Pusk. Pintu Padang Kab. T. Selatan	Pelayanan Perkesmas Pelayanan Perkesmas Pelayanan Perkesmas Pelayanan Perkesmas Pelayanan Perkesmas
	6. Pusk. Sitio-tio Kab. Samosir 7. Pusk. Sei Rempah Kab. Sergei 8. Pusk. Teladan Kota Medan 9. Pusk. Kartini Kota P. Siantar 10. Pusk. Binjai Kota Binjai	Pelayanan Perkesmas Pelayanan Perkesmas Dokter Teladan Dokter Teladan Dokter Teladan
2014	1. Pusk. Pijorkoling Kota P. Sidempuan 2. Pusk. Sei Rempah Kab. Sergei 3. Pusk. Hutabalang Kab. Tap. Tengah 4. Pusk. Silalahi Kab. Dairi 5. Pusk. Sogaeadu Kab. Nias 6. Pusk. Lagundri Kab. Nias Selatan 7. Pusk. Sirambu Kab. Nias Barat 8. Pusk. Sukaramai Kab. P. Bharat 9. Pusk. Onan Rungu Kab. Samosir 10. Pusk. G. Sitoli Selatan 11. Pusk. Pintu Angin Kota Sibolga 12. Pusk. Semula Batu Kota T. Balai 13. Pusk. Pabatu Kota T. Tinggi	Pelayanan Perkesmas Pelayanan Perkesmas

Sumber: Laporan Bidang Yankes 2010-2014.



Dari tabel terlihat bahwa sampai tahun 2014, bila diperinci menurut kab/kota maka jumlah yang telah menerapkan SPMD yaitu di Kota Medan sebanyak 4 puskesmas, Kabupaten Deli Serdang 4 puskesmas, Kota Padang Sidempuan sebanyak 3 puskesmas, Kabupaten Serdang Bedagai yaitu 3 puskesmas, Tapanuli Selatan, Mandailing Natal, Tapanuli Tengah dan Samosir masing-masing sebanyak 2 puskesmas.

Sedangkan Kabupaten Labuhan Batu, Padang Lawas Utara (Paluta), Asahan, Samosir, Binjai, Dairi, Nias, Nias Selatan, Nias Barat, Nias Selatan, Pakpak Bharat, Kota Sibolga, Tanjung Balai, tebing Tinggi dan Gunung Sitoli masing-masing 1 puskesmas.

9. Persentase Kab/Kota yang memiliki minimal 4 puskesmas yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan tradisional

Pada tahun 2014, sudah terdapat 80 puskesmas yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan tradisional di 26 Kabupaten/Kota namun yang memiliki minimal 4 puskesmas yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan tradisional baru 8 Kab/Kota, sehingga pencapaian target indikator kinerja hanya 24,25% dari 30% target yang ditetapkan pada tahun 2014. Penyebaran puskesmas dengan pengobatan tradisional di 26 Kabupaten/Kota dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 56
Jumlah Puskesmas yang melaksanakan Pelayanan Kesehatan Tradisional Per Kab/Kota Provinsi Sumatera Utara Tahun 2014

NO	KAB/KOTA	PUSK DGN YANKESTRAD	NAMA PUSKESMAS
1	NIAS	2	Pusk. Hiliweto Gido Pusk. Batombawo
2	MANDAILING NATAL	1	Pusk.Siabu
3	TAPANULI TENGAH	3	Pusk.Pandan Pusk.Sarudik Pusk. Pinangsori



NO	KAB/KOTA	PUSK DGN YANKESTRAD	NAMA PUSKESMAS
4	TAPANULI UTARA	2	Pusk. Pangaribuan Pusk. Situmeang Habinsaran
5	TOBA SAMOSIR	3	Pusk. Narumonda Pusk. Ajobata Pusk. Porsea
6	LABUHAN BATU	2	Pusk. Negeri Lama Pusk. Kota Rantau Prapat
7	ASAHAN	5	Pusk. Sei Dadap Pusk. Aek Songsongan Pusk. Sei Kepayang Barat Pusk. Sidodadi Pusk. Mutiara
8	SIMALUNGUN	3	Pusk. Saran Padang Pusk. Pematang Raya Pusk. Hatonduhan
9	DAIRI	5	Pusk. G. Sitember. Pusk. Tj. Lingga Pusk. Sopo Butar Pusk. Parongil Pusk. Tiga Lingga
10	KARO	4	Pusk. Kopperi, Pusk. Kabanjahe Pusk. Tiga Panah Pusk. Berastagi
NO	KAB/KOTA	PUSK DGN YANKESTRAD	NAMA PUSKESMAS
11	DELI SERDANG	5	Pusk. Pancur Batu, Pusk. Tj. Morawa Pusk. Galang, Pusk. Batang Beruh Pusk. Batang Kuis
12	LANGKAT	7	Pusk. Stabat, Pusk. Karang Rejo Pusk. Beras Basah Pusk. Marike Pusk. Tj. Langkat Pusk. Binanga Pusk. Pantai Cermin
13	LABUHAN BATU UTARA	2	Pusk. Aek Kota Batu Pusk. Aek Kanopan
14	HUMBANG HASUNDUTAN	2	Pusk. Matiti Pusk. Parlilitan
15	SAMOSIR	2	Pusk. Harian Pusk. Simarmata Pusk. Tuktuk Siadong



NO	KAB/KOTA	PUSK DGN YANKESTRAD	NAMA PUSKESMAS
16	SERDANG BEDAGAI	2	Pusk. Desa Pon, Pusk. Sialang Buah Pusk. Sei Rampah Pusk. Kuala Bali
17	BATUBARA	2	Pusk. Lab Ruku Pusk. Kedai Sianam Pusk. Indra Pura Pusk. Sei Suka
18	PADANG LAWAS	2	Pusk. Binanga Pusk. Pasar Ujung Batu
19	SIBOLGA	2	Pusk. Pintu Angin Pusk. Aek Habil
20	TANJUNGBALAI	4	Pusk. M.U Damanik Pusk. Datuk Bandar Pusk. Kamp. Persatuan Pusk. Teluk Nibung
21	PEMATANG SIANTAR	4	Pusk. Martoba, Pusk. Kesatria Pusk. Gurilla Pusk. Pondok Sayur
22	TEBING TINGGI	5	Pusk. Pasar Gambir, Pusk. Satria Pusk. Pabatu Pusk. Brohol Pusk. Sri Padang
23	MEDAN	5	Pusk. Padang Bulan, Pusk. Petisah Pusk. Terjun Pusk. Sering Pusk. Glugur
24	BINJAI	2	Pusk. Tanah Tinggi, Pusk. Binjai Estate
25	PADANGSIDIMPUAN	2	Pusk. Sadabuan Pusk. Batu Nadua
26	GUNUNG SITOLI	2	Pusk. G. Sitoli Utara Pusk. G. Sitoli Selatan
JUMLAH		80	-

Sumber: Laporan Bidang Yankes 2014.



10. Jumlah Kab/Kota yang memiliki minimal 4 puskesmas yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan kerja

Pelayanan Kesehatan Kerja sasaranannya adalah kepada kabupaten/kota yang memiliki industri besar, kecil maupun menengah. Sampai dengan akhir tahun 2014, kabupaten/kota yang menyelenggarakan pelayanan kerja berjumlah 17 kabupaten/kota, mengalami peningkatan dibandingkan dengan tahun 2013 yaitu 13 kabupaten/kota.

Tabel 57
Jumlah Puskesmas yang menyelenggarakan Pelayanan Kesehatan Kerja
Per Kab/Kota Provinsi Sumatera Utara Tahun 2014

NO	KAB/KOTA	PUSK DGN YANKESKER	NAMA PUSKESMAS
1	NIAS	2	Pusk. Hiliweto Gido Pusk. Batombawo
2	MANDAILING NATAL	1	Pusk. Siabu
3	TAPANULI TENGAH	3	Pusk. Pandan Pusk. Sarudik Pusk. Pinangsori
4	TAPANULI UTARA	2	Pusk. Pangaribuan Pusk. Situmeang Habinsaran
5	TOBA SAMOSIR	3	Pusk. Narumonda Pusk. Ajibata Pusk. Porsea
6	LABUHAN BATU	2	Pusk. Negeri Lama Pusk. Kota Rantau Prapat
7	ASAHAN	5	Pusk. Sei Dadap Pusk. Aek Songsongan Pusk. Sei Kpyang Barat Pusk. Sidodadi Pusk. Mutiara



NO	KAB/KOTA	PUSK DGN YANKESKER	NAMA PUSKESMAS
8	SIMALUNGUN	3	Pusk. Saran Padang Pusk. Pematang Raya Pusk.Hatonduhan
9	DAIRI	5	Pusk. G. Sitember. Pusk. Tj. Lingga Pusk. Sopo Butar Pusk.Parongil Pusk.Tiga Lingga

Pada tahun 2010, terdapat 4 Kabupaten/Kota yang telah menyelenggarakan pelayanan kesehatan kerja, yaitu Kabupaten Serdang Bedagai, Deli Serdang, Kota Pematang Siantar dan Medan. Pada tahun 2011, kab/kota yang menyelenggarakan pelayanan kerja bertambah sebanyak 4 kab/kota, yaitu Kabupaten Batubara, Tapanuli Tengah, Kota Padang Sidempuan dan Sibolga. Pada tahun 2012, bertambah 5 Kabupaten/Kota yang telah menyelenggarakan pelayanan kesehatan kerja, yaitu Kota Tebing Tinggi, Kabupaten Labuhan Batu, Kabupaten Labuhan Batu Selatan, Labuhan Batu Utara dan Kabupaten Asahan. Pada tahun 2013 tidak ada penambahan kabupaten/kota dan pada tahun 2014 bertambah 4 kab/kota yaitu Kabupaten Karo, Langkat, Kota Binjai dan Tanjung Balai. Dengan pencapaian ini maka target akhir tahun Renstra belum mampu yaitu 20 Kab/Kota tahun 2013.

11. Jumlah Kab/Kota memiliki minimal 3 puskesmas yang melaksanakan pelayanan kesehatan olah raga

Sampai dengan akhir tahun 2014, sudah terdapat 8 Kabupaten/Kota yang memiliki puskesmas dengan pelayanan kesehatan olahraga, namun yang memiliki minimal 3 puskesmas dengan pelayanan kesehatan olahraga hanya 7 (tujuh) kabupaten/kota.



Kabupaten Asahan belum memenuhi indikator kinerja karena baru memiliki 2 puskesmas; seperti yang terdapat pada tabel berikut ini:

Tabel 58
Puskesmas Olahraga di Provinsi Sumatera Utara Tahun 2014

KAB/KOTA	PUSKESMAS
1. MEDAN	- Pusk. Belawan - Pusk. Kampung Baru - Pusk. Medan Area - Pusk. Kedai Durian - Pusk. Medan Deli - Pusk. Medan Amplas
2. SERDANG BEDAGAI	- Pusk. Pegajahan - Pusk. Dolok Masihul - Pusk. Sei Rampah - Pusk. Parbaungan
3. DELI SERDANG	- Pusk. Bandar Khalipah - Pusk. Tanjung Morawa - Pusk. Lubuk Pakam - Pusk. Mulioarjo - Pusk. Tanjung Kenas
4. LABUHAN BATU UTARA	- Pusk. Aek Kanopan - Pusk. Aek Korsik - Pusk. Kota Baru
5. PEMATANG SIANTAR	- Pusk. Parsoburan - Pusk. Raya - Pusk. Ksatria - Pusk. Rami
6. LANGKAT	- Pusk. Stabat - Pusk. Pantai Cermin - Pusk. Kuala
7. BINJAI	- Pusk. Jati Makmur - Pusk. Tanah Tinggi - Pusk. Kebun Jahe
8. BATUBARA	- Pusk. Sei Suka - Pusk. Lima Puluh - Pusk. Labuhan Ruku
9. ASAHAN	- Pusk. Simpang Empat - Pusk. Bdr Pasir Mandoge

Sumber: Laporan Bidang Yankes 2014.



Dengan pencapaian ini, maka target akhir Renstra yaitu 33 Kab/kota yang memiliki 3 puskesmas yang melaksanakan pelayanan kesehatan olah raga tidak tercapai.

12. Jumlah pesantren yang memiliki poskestren

Pada tahun 2014, pesantren yang memiliki poskestren sebanyak 78 pesantren, mengalami peningkatan jumlah dari tahun 2013 yaitu 53 pesantren. Di Sumatera Utara terdapat 176 pesantren yang tersebar di 24 kab/kota. Dengan demikian target indikator kinerja yang ditetapkan yaitu 55 pesantren tahun 2014 telah mampu dicapai. Distribusi pesantren dan yang memiliki poskestren dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 59
Jumlah Pesantren memiliki Poskestren berdasarkan Kabupaten/Kota
Di Provinsi Sumatera Utara Tahun 2014

NO	KAB/KOTA	JML PESANTREN	MEMILIKI POSKESTREN
1	NIAS	0	0
2	MANDAILING NATAL	22	0
3	TAPANULI SELATAN	15	14
4	TAPANULI TENGAH	6	0
5	TAPANULI UTARA	0	0
6	TOBA SAMOSIR	0	0
7	LABUHAN BATU	9	9
8	ASAHAN	6	3
9	SIMALUNGUN	5	0
10	DAIRI	1	1
11	KARO	3	3
12	DELI SERDANG	13	3
13	LANGKAT	19	11
14	NIAS SELATAN	0	0
15	HUMBANG HASUNDUTAN	1	1
16	PAKPAK BHARAT	0	0
17	SAMOSIR	0	0
18	SERDANG BEDAGAI	4	3
19	BATUBARA	4	3
20	PADANG LAWAS	15	6



NO	KAB/KOTA	JML PESANTREN	MEMILIKI POSKESTREN
21	PADANG LAWAS UTARA	6	0
22	LABUHAN BATU SELATAN	18	10
23	LABUHAN BATU UTARA	3	0
24	NIAS UTARA	0	0
25	NIAS BARAT	0	0
26	SIBOLGA	0	0
27	TANJUNGBALAI	1	0
28	PEMATANG SIANTAR	1	1
29	TEBING TINGGI	1	1
30	MEDAN	11	8
31	BINJAI	2	1
32	PADANGSIDIMPUAN	8	0
33	GUNUNG SITOLI	2	0
JUMLAH		176	78

Sumber: Laporan Bidang Yankes 2014.

▪ **Kegiatan-kegiatan Tahun 2014**

Jumlah anggaran yang dialokasikan untuk Program UKM pada tahun 2014 yaitu sebesar Rp. 3.666.411.040,- dengan kegiatan-kegiatan adalah sebagai berikut :

1. Supervisi Fasilitatif bagi Bidan Koordinator Puskesmas
2. Implementasi Buku KIA, P4K, Kantong Persalinan
3. Pelatihan Pelayanan Obstetri Neonatal Emergensi dasar (PONED)
4. Evaluasi Data Cakupan Indikator Kesehatan Ibu dan Anak
5. Perlombaan Penilaian Kesatuan Gerak PP-KB Kesehatan
6. Pendampingan Kelas Ibu Hamil di Kab/Kota
7. Orientasi PKRT (Pelayanan Kesehatan Reproduksi Terpadu) bagi Petugas Puskesmas
8. Workshop Petugas Kab/Kota dalam Pengarustamaan Gender Bidang Kesehatan dan Anggaran Responsif Gender (ARG)
9. Pertemuan Pengembangan Integrasi Posyandu-PAUD
10. Pertemuan Penerapan Puskesmas di Daerah Tertinggal, Perbatasan dan Kepulauan (DTPK) dan Daerah Bermasalah Kesehatan (DBK).



11. Pembinaan Pelayanan Konseling Usila di Puskesmas Santun Usila di 10 Kab/Kota Percontohan.
12. Bimtek Pelayanan Usila di Kab/Kota dan Puskesmas
13. Orinetasi Petugas dalam Pemeliharaan Kesehatan Usila Lanjut di Rumah (Home Care)
14. Pemantapan Program Santun Usila di Puskesmas
15. Pertemuan Koordinasi Kesehatan Olahraga Tingkat Provinsi
16. Pendampingan Pusat ke Kab/Kota dan Penampungan TKI Wanita
17. Pertemuan Peningkatan Kapasitas Tenaga Kesehatan Kerja bagi Tenaga Kesehatan di Kab/Kota
18. Review Akhir Program Kesehatan di Kab/Kota Binaan
19. Sosialisas Yankestradkom bagi Pengobatan Tradisional se Kota Medan.
20. Pertemuan Koordinasi Poskestren Tingkat Provinsi
21. Sosialisasi Tim Pembina Pengarah Pelaksana Kesehatan Jiwa Masyarakat
22. Pertemuan Teknis Penanggulangan Gangguan Penglihatan bagi Dokter dan Perawat Puskesmas Kab/Kota
23. Pertemuan Pelayanan Gigi dan Mulut Anak Sekolah
24. Peningkatan Pelayanan Kesehatan UPT Kim di Luar Gedung (Pemeriksaan Mata Operasi Katarak)
25. Screening Gangguan Penglihatan di Kab/Kota
26. Pertemuan Percepatan MDGs dengan Lintas Sektor
27. Pemantapan PONEC di Daerah Fokus MDGs
28. Pemantapan PPGD (Pelatihan Pemantapan Gawat Darurat bagi Dokter Fasilitas Kesehatan Primer)
29. Peningkatan Kapasitas Petugas Kesehatan dalam Pemnanganan Penderita Psikotik yang Mengalami Pemasungan dan Penelantaran



Dari 29 kegiatan tercantum di dalam Renja, yang *tidak dapat* dilaksanakan adalah kegiatan Pendampingan Pusat ke Kab/Kota dan Penampungan TKI Wanita yang disebabkan belum adanya penunjang dari Pusat petugas yang akan melakukan pendampingan ke Kab/Kota. Sampai akhir tahun anggaran, realisasi fisik Program Upaya Kesehatan Masyarakat adalah 94,73% dengan jumlah realisasi keuangan sebesar Rp. 3.280.968.540,- atau 89,49%.

➤ PROGRAM PROMOSI KESEHATAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT

Pencapaian Indikator Kinerja Tahun 2014

Didalam Penetapan Kinerja terdapat 5 (lima) indikator kinerja Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat yang harus dicapai pada tahun 2014, dan pencapaiannya adalah sebagai berikut:

Tabel 60
Indikator Kinerja, Sasaran, Capaian dan Persen Capaian
Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat
Tahun 2014

NO	INDIKATOR KINERJA	SASARAN TAHUN 2014	CAPAIAN TAHUN 2014	CAPAIAN %
1	Persentase rumah tangga ber-perilaku hidup bersih dan sehat.	55%	60,03%	109,14%
2	Persentase SD yang mempro-mosikan kes	25%	29,6%	118,4%
3	Persentasi Posyandu Purnama & Mandiri.	35%	40,07%	114,48%
4	Persentase desa siaga aktif.	22%	26%	118,18%
5	Jumlah Kab/Kota yang memiliki minimal 2 desa yang mengembangkan Program Toga	20 K/K	22 K/K	110%

Dari persen capaian terlihat, bahwa dari 5 indikator kinerja Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat, seluruhnya (100%) berkategori SANGAT BAIK. Penjelasan tentang pencapaian masing-masing indikator serta



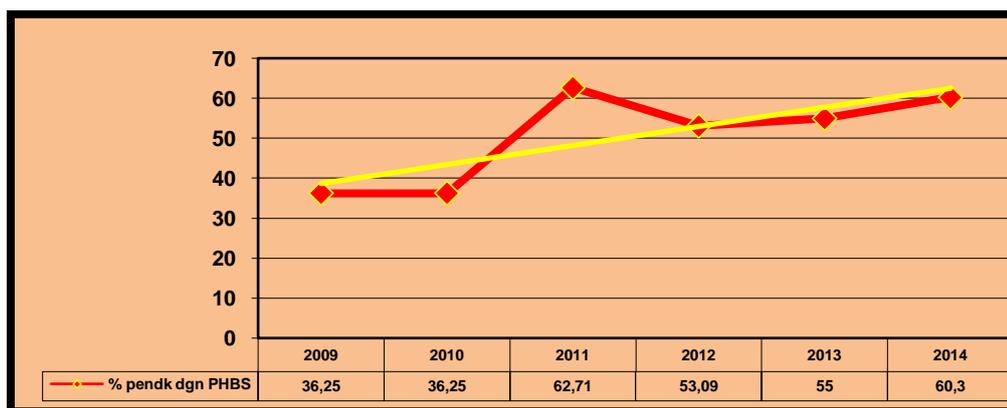
analisa kecendrungan pencapaian sejak tahun 2009 - 2014, adalah sebagai berikut:

1. **Persentase penduduk berperilaku hidup bersih dan sehat (PHBS)**

Rumah Tangga ber-PHBS adalah rumah tangga yang seluruh anggotanya berperilaku hidup bersih dan sehat, yang meliputi 10 indikator yaitu persalinan yang ditolong oleh tenaga kesehatan, memberikan ASI eksklusif, menimbang bayi setiap bulan, menggunakan air bersih, mencuci tangan dengan air bersih dan sabun, menggunakan jamban sehat, memberantas jentik nyamuk di rumah seminggu sekali, makan sayur dan buah setiap hari, melakukan aktifitas fisik setiap hari dan tidak merokok di dalam rumah.

Pada tahun 2014, dilaporkan bahwa dari 1.277.713 rumah tangga yang dipantau ditemukan 767.103 RT (60.3%) yang ber-PHBS. Angka ini mengalami peningkatan dibandingkan tahun 2013 yaitu 55% dan tahun 2012 yaitu 53,09%; namun masih lebih rendah dari pencapaian tahun 2011 yaitu 62,71%.

Grafik 15
Persentase Penduduk Melaksanakan PHBS
Tahun 2009 – 2014



Sumber: Laporan Bagian Kesekretariatan Tahun 2010-2014



Dengan pencapaian 60,3% pada tahun 2014, maka target indikator kinerja telah mampu dicapai. Distribusi RT ber-PHBS per kab/kota diperinci lebih jelas pada tabel berikut:

Tabel 61
Jumlah Rumah Tangga ber-PHBS berdasarkan Kabupaten/Kota
Di Provinsi Sumatera Utara Tahun 2014

NO	KAB/KOTA	JML RT DIPANTAU	JML RT BER-PHBS	%
1	NIAS	9.759	3.332	34,14
2	MANDAILING NATAL	3.165	845	26,7
3	TAPANULI SELATAN	39.275	37.760	96,1
4	TAPANULI TENGAH	48.273	10.172	83,2
5	TAPANULI UTARA	20.438	8.014	78,3
6	TOBA SAMOSIR	12.912	11.148	86,3
7	LABUHAN BATU	57.354	32.468	56,6
8	ASAHAN	14.552	13.311	91,4
9	SIMALUNGUN	126.119	11.490	9,1
10	DAIRI	22.520	9.770	56,7
11	KARO	24.435	8.249	33,7
12	DELI SERDANG	53.708	35.085	65,3
13	LANGKAT	167.199	151.820	90,8
14	NIAS SELATAN	12.721	3.053	22,24
15	HUMBANG HASUNDUTAN	35.479	13.023	70,5
16	PAKPAK BHARAT	1.688	583	34,5
17	SAMOSIR	15.133	15.131	100
18	SERDANG BEDAGAI	10.355	10.355	100
19	BATUBARA	63.500	25.174	39,6
20	PADANG LAWAS	33.233	10.318	52,1
21	PADANG LAWAS UTARA	12.166	3.074	25,3
22	LABUHAN BATU SELATAN	39.452	32.600	82,6
23	LABUHAN BATU UTARA	45.862	25.862	56,4
24	NIAS UTARA	19.405	10.170	67,87
25	NIAS BARAT	9.064	3.771	41,6
26	SIBOLGA	11.549	9.383	81,2
27	TANJUNGBALAI	16.677	5.411	32,4
28	PEMATANG SIANTAR	210	51	24,3



KAB/KOTA		JML RT DIPANTAU	JML RT BER-PHBS	%
29	TEBING TINGGI	19.770	16.699	84,5
30	MEDAN	299.286	235.537	98,1
31	BINJAI	26.849	7.839	29,2
32	PADANGSIDIMPUAN	226	226	100
33	GUNUNG SITOLI	5.379	5.379	100
JUMLAH		1.277.713	767.103	60,03

Sumber: Laporan Bagian Kesekretariatan Tahun 2014

2. Persentase sekolah dasar yang mempromosikan kesehatan

Pada tahun 2014, di Sumatera Utara terdapat 9.674 unit SD/MI, dari jumlah tersebut yang melaksanakan Promosi Kesehatan melalui Unit Kesehatan Sekolah (UKS) sebanyak 2/864 SD/MI atau 29,6%. Jumlah ini mengalami peningkatan dibandingkan tahun sebelumnya yaitu 2.167 SD/MI atau 22,50%. Dan tahun 2012, yaitu 1.908 SD/MI atau 20%. Distribusi SD/MI yang mempromosikan kesehatan di Sumatera Utara dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 62
Jumlah SD/MI dan yang mempromosikan Kesehatan
berdasarkan Kabupaten/Kota
Di Provinsi Sumatera Utara Tahun 2014

NO	KAB/KOTA	JML SD/MI	MEMPROMOSIKAN KES
1	NIAS	143	29
2	MANDAILING NATAL	403	81
3	TAPANULI SELATAN	282	66
4	TAPANULI TENGAH	332	66
5	TAPANULI UTARA	352	70
6	TOBA SAMOSIR	225	54
7	LABUHAN BATU	303	71
8	ASAHAN	481	384



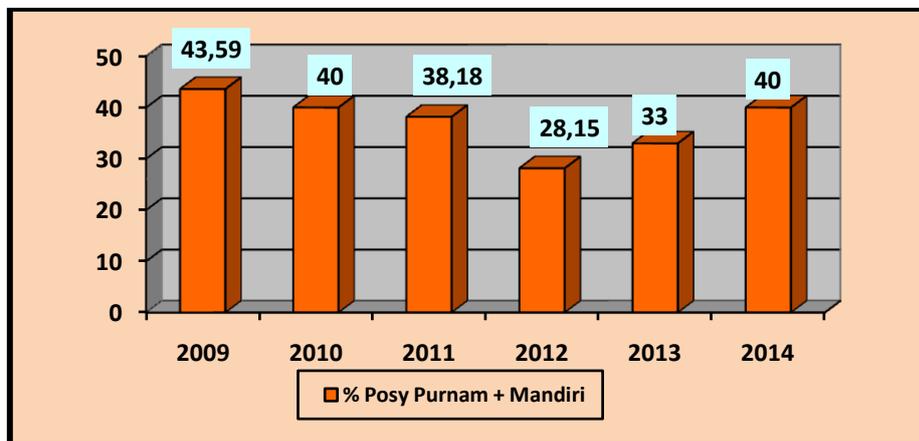
NO	KAB/KOTA	JML SD/MI	MEMPROMOSIKAN KES
9	SIMALUNGUN	924	185
10	DAIRI	267	53
11	KARO	293	75
12	DELI SERDANG	803	182
13	LANGKAT	694	213
14	NIAS SELATAN	312	63
15	HUMBANG HASUNDUTAN	222	44
16	PAKPAK BHARAT	71	14
17	SAMOSIR	204	41
18	SERDANG BEDAGAI	457	40
19	BATUBARA	301	170
20	PADANG LAWAS	182	109
21	PADANG LAWAS UTARA	221	99
22	LABUHAN BATU SELATAN	202	104
23	LABUHAN BATU UTARA	31	9
24	NIAS UTARA	157	31
25	NIAS BARAT	105	21
26	SIBOLGA	61	12
27	TANJUNGBALAI	100	26
28	PEMATANG SIANTAR	172	157
29	TEBING TINGGI	104	33
30	MEDAN	856	215
31	BINJAI	168	47
32	PADANGSIDIMPUAN	107	30
33	GUNUNG SITOLI	113	70
JUMLAH		9.674	2.864

Sumber: Laporan Bagian Kesekretariatan Tahun 2014

3. Persentase Posyandu Purnama dan Mandiri

Pemberdayaan masyarakat dalam bidang kesehatan dilihat dari persentase posyandu Purnama dan Mandiri. Persentase posyandu purnama dan mandiri menunjukkan kecenderungan penurunan kurun waktu 2009-2014 menunjukkan kecenderungan penurunan.

Grafik 16
Persentase Posyandu Purnama dan Mandiri
Di Provinsi Sumatera Utara
Tahun 2009 – 2014



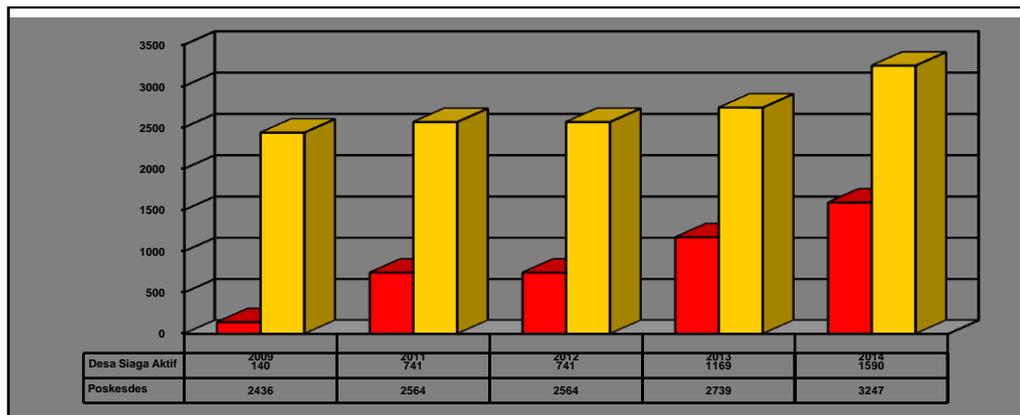
Sumber: Laporan Bagian Kesekretariatan Tahun 2010-2014

Persentase posyandu purnama dan mandiri tertinggi dicapai pada tahun 2009 mencapai hampir 54%, dan mengalami penurunan setiap tahun sampai tahun 2012 mencapai 28%. Pada tahun 2013, mengalami peningkatan menjadi 33% dan tahun 2014 menjadi 40,7%. Dari 15.587 posyandu yang ada, terdapat 6.235 unit posyandu purnama dan mandiri, sehingga pencapaian persentase posyandu purnama dan mandiri yaitu 40%. Dengan pencapaian ini maka target indikator kinerja yaitu 35% tahun 2014 telah mampu dicapai.

4. Persentase Desa Siaga Aktif

Pada tahun 2014, jumlah Desa Siaga Aktif sebanyak 1.590 desa/kelurahan (26%) dari 6.113 desa/kelurahan yang ada di Sumatera Utara. Jumlah ini mengalami peningkatan dibandingkan tahun 2013 yaitu 1.169 desa/kelurahan. Dengan terjadinya peningkatan jumlah Desa Siaga Aktif maka target kinerja tahun 2014 yaitu 22% telah tercapai. Perkembangan jumlah Desa Siaga Aktif dan Poskesdes di Sumatera Utara lebih jelas tergambar pada grafik berikut ini.

Grafik 17
Jumlah Desa Siaga Aktif dan Poskesdes
Di Provinsi Sumatera Utara Tahun 2009-2014



Sumber: Laporan Bagian Kesekretariatan Tahun 2010-2014

5. Jumlah Kab/Kota yang memiliki minimal 2 desa yang mengembangkan Program Toga

Tanaman Obat Keluarga (TOGA) adalah tanaman hasil budidaya rumahan yang berkhasiat sebagai obat. TOGA pada prinsipnya adalah sebidang tanah, baik di halaman rumah, kebun atau ladang yang digunakan untuk membudidayakan tanaman yang berkhasiat sebagai obat dalam rangka memenuhi keperluan keluarga akan obat-obatan; sehingga akan terwujud prinsip kemandirian dalam pengobatan keluarga.



Pada tahun 2014, sudah terdapat 22 Kab/kota yang memiliki 2 desa yang mengembangkan Program TOGA, yaitu Kabupaten Deli Serdang, Nias Utara, Humbang Hasundutan, Tapanuli Utara, Toba Samosir, Tapanuli Tengah, Simalungun, Mandailing Natal, Asahan, Batubara, Nias Barat, Nias, Serdang

Bedagai, Labuhan Batu, Labuhan Batu Selatan, Padang Lawas Utara, Kota Padang Sidempuan, Binjai, Medan, Pematang Siantar, Tebing Tinggi dan Sibolga.

▪ ***Kegiatan-kegiatan Tahun 2014***

Jumlah anggaran yang dialokasikan untuk Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat pada tahun 2014 yaitu sebesar Rp. 3.082.248.000,- dengan kegiatan-kegiatan adalah sebagai berikut :

1. Peningkatan Pendidikan Kesehatan kepada Masyarakat melalui Peringatan Hari-hari Besar Kesehatan.
2. Penyebarluasan Informasi Kesehatan melalui Media cetak dan Elektronik
3. Pekan Raya Sumatera Utara (PRSU)
4. Reportase Bidang Kesehatan
5. Pembinaan Program UKS ke Kab/Kota
6. Jambore Posyandu Tingkat Provinsi Sumatera Utara
7. Sosialisasi Program TOGA
8. Lomba TOGA
9. Karnaval Mobil Hias
10. Perlombaan dan Penilaian PHBS
11. Lomba Posyansu Tingkat Provinsi
12. Penyebarluasan Informasi Kesehatan melalui Media Promosi di Kawasan Tanpa Rokok (KTR).



Sampai akhir tahun anggaran, realisasi fisik Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat adalah 93,34% dengan jumlah realisasi keuangan sebesar dengan jumlah yang terealisasi sebesar Rp. 2.743.005.100,- atau 88,99%.

➤ PROGRAM PERBAIKAN GIZI MASYARAKAT

Pencapaian Indikator Kinerja Tahun 2014

Didalam Penetapan Kinerja terdapat 3 (tiga) indikator kinerja Program Perbaikan Gizi Masyarakat yang harus dicapai pada tahun 2014, dan pencapaiannya adalah sebagai berikut :

Tabel 63
Indikator Kinerja, Target, Capaian dan Persen Capaian
Program Perbaikan Gizi Masyarakat Tahun 2014

NO	INDIKATOR	TARGET TAHUN 2014	CAPAIAN TAHUN 2014	% CAPAIAN
1	Persentase gizi buruk yang ditangani.	100%	100%	100%
2	Persentase penyediaan bufferstock MP-ASI untuk bencana	100%	100%	100%
3	Persentase ibu hamil KEK dan anemia mendapatkan PMT	40%	38%	95%

Dari persen capaian terlihat, bahwa dari 3 indikator kinerja Program Perbaikan Gizi Masyarakat 2 indikator (66%) berkategori SANGAT BAIK dan 1 indikator (34%) berkategori BAIK. Penjelasan tentang pencapaian masing-masing indikator serta analisa kecenderungan pencapaian sejak tahun 2014, adalah sebagai berikut:



1. *Persentase gizi buruk yang ditangani*

Pada tahun 2014, jumlah balita gizi buruk yang ditemukan sebanyak 1.196 balita dan keseluruhan balita yang mengalami gizi buruk tersebut mendapatkan penanganan (100%). Jumlah kasus gizi buruk yang ditemukan dan mendapatkan penanganan ini mengalami peningkatan dibandingkan tahun 2013 yaitu 1.133 kasus, tahun 2012 yaitu 746 kasus dan tahun 2011 yaitu 375 kasus. Distribusi kasus balita gizi buruk yang ditemukan dan ditangani per kab/kota seperti tergambar pada tabel berikut ini :

Tabel 64
Jumlah Balita Gizi Buruk yang Ditemukan dan Ditangani
Per Kabupaten/Kota Provinsi Sumatera Utara
Tahun 2011-2014

NO	KAB/KOTA	BALITA GIZI BURUK			
		2011	2012	2013	2014
1	NIAS	-	8	18	25
2	MANDAILING NATAL	15	62	9	110
3	TAPANULI SELATAN	15	41	3	17
4	TAPANULI TENGAH	12	13	14	20
5	TAPANULI UTARA	7	13	37	21
6	TOBA SAMOSIR	12	12	5	9
7	LABUHAN BATU	10	3	8	15
8	ASAHAN	20	45	127	98
9	SIMALUNGUN	25	23	27	26
10	DAIRI	20	110	60	83
11	KARO	15	35	11	8
12	DELI SERDANG	4	5	7	9
13	LANGKAT	27	19	149	136
14	NIAS SELATAN	10	2	0	38
15	HUMBANG HASUNDUTAN	8	13	9	9
16	PAKPAK BHARAT	4	3	18	7
17	SAMOSIR	7	3	10	14
18	SERDANG BEDAGAI	12	12	45	48
19	BATUBARA	18	14	79	73
20	PADANG LAWAS	11	38	2	34
21	PADANG LAWAS UTARA	6	9	21	36
22	LABUHAN BATU SELATAN	10	21	24	17
23	LABUHAN BATU UTARA	13	10	13	18
24	NIAS UTARA	6	14	12	2



NO	KAB/KOTA	BALITA GIZI BURUK			
		2011	2012	2013	2014
25	NIAS BARAT	5	20	6	79
26	SIBOLGA	12	21	6	15
27	TANJUNGBALAI	13	1	27	26
28	PEMATANG SIANTAR	5	7	14	13
29	TEBING TINGGI	4	6	14	9
30	MEDAN	25	143	265	84
31	BINJAI	12	12	37	35
32	PADANGSIDIMPUAN	5	3	8	17
33	GUNUNG SITOLI	9	5	48	45
JUMLAH		375	746	1.133	1.196

Sumber: Laporan Bidang Pelayanan Kesehatan, 2012-2014

2. **Persentase penyediaan buffer stock MP-ASI (Makanan Pendamping – Air Susu Ibu) untuk bencana**

Penyediaan buffer stock MP-ASI adalah ditujukan untuk mengantisipasi situasi darurat akibat bencana, KLB gizi dan situasi sulit lainnya. Pada tahun 2014, capaian dari indikator ini adalah 100% dengan target program 100% pada tahun yang sama.

3. **Persentase ibu hamil KEK (Kurang Energi Kronis) dan anemia yang mendapatkan PMT (Pemberian Makanan Tambahan)**

Kasus KEK (Kekurangan Energi Kronis) disebabkan karena adanya ketidakseimbangan asupan gizi, sehingga zat gizi yang dibutuhkan tubuh tidak tercukupi. Jika sudah terlalu lama maka akan terjadi Kekurangan Energi Kronik (KEK), dan kejadian KEK pada ibu hamil merupakan kondisi yang sangat tidak diinginkan, karena sangat mempengaruhi kehidupan janin dalam bayi kandungan dan juga sang ibu.

Pada tahun 2014 diperkirakan 64.211 bumil mengalami KEK dan yang mendapatkan PMT dengan masa pemberian 60 hari adalah sebanyak 23.449 bumil (38%).



Angka ini mengalami peningkatan dibandingkan tahun 2012 yaitu 20,2%, tahun 2011 yaitu 9,5% dan tahun 2010 yaitu 8,1%. Walaupun mengalami peningkatan, pencapaian tahun 2014 belum mampu mencapai kinerja yang ditetapkan yaitu 40% pada tahun 2014.

▪ ***Kegiatan-kegiatan Tahun 2014***

Jumlah anggaran yang dialokasikan untuk Program Perbaikan Gizi Masyarakat pada tahun 2014 yaitu sebesar Rp. 931.605.000,- dengan kegiatan-kegiatan adalah sebagai berikut :

1. Pendampingan Kasus Gizi Buruk dan Gizi Kurang
2. Penyediaan MP-ASI bagi Balita 1 (satu) tahun
3. Pengadaan PMT Ibu Hamil.

Sampai akhir tahun anggaran, realisasi fisik Program Perbaikan Gizi Masyarakat adalah 100% dengan jumlah yang terealisasi sebesar Rp. 867.355.000,- atau 93,10%.



➤ PROGRAM LINGKUNGAN SEHAT

Pencapaian Indikator Kinerja Tahun 2014

Didalam Penetapan Kinerja terdapat 3 (tiga) indikator kinerja Program Lingkungan Sehat yang harus dicapai pada tahun 2014, dan pencapaiannya adalah sebagai berikut:

Tabel 65
Indikator Kinerja, Target, Capaian dan Persen Capaian
Program Lingkungan Sehat Tahun 2014

NO	INDIKATOR	TARGET TAHUN 2014	CAPAIAN TAHUN 2014	% CAPAIAN
1	Persentase keluarga menghuni rumah yang memenuhi syarat kesehatan	72%	62,42%	86,11%
2	Persentase keluarga menggunakan jamban memenuhi syarat kesehatan.	66%	65,11%	98,48%
3	Jumlah Kab/Kota Sehat	7 K/K	4 K/K	57%

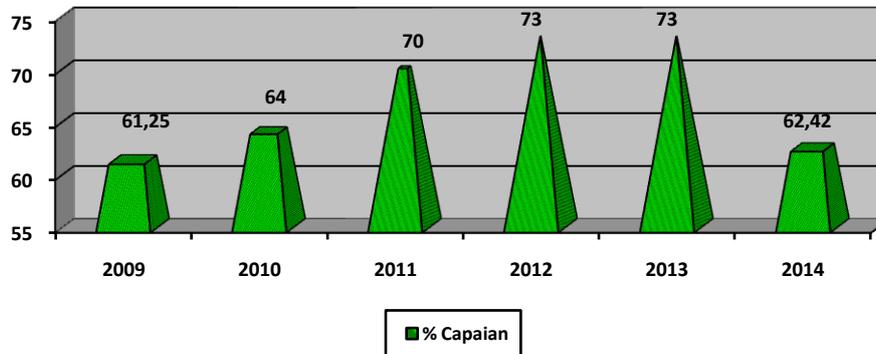
Dari persen capaian terlihat, bahwa dari ke-3 indikator kinerja Program Lingkungan Sehat, terdapat 2 (67%) indikator yaitu indikator 1 dan 2 berkategori BAIK dan satu indikator (33%) yaitu indikator ke-3 berkategori SANGAT BAIK. Penjelasan tentang pencapaian masing-masing indikator serta analisa kecenderungan pencapaian sejak tahun 2009, adalah sebagai berikut:

1. Persentase keluarga menghuni rumah yang memenuhi syarat kesehatan

Persentase keluarga yang menghuni rumah sehat cenderung mengalami peningkatan sejak tahun 2009, seperti yang terlihat pada grafik berikut ini.



Grafik 18
Persen Target dan Capaian Keluarga menghuni Rumah yang Memenuhi Syarat Kesehatan Provinsi Sumatera Utara Tahun 2009-2014



Sumber : Laporan Bidang Penanggulangan Masalah Kesehatan, 2009-2014

Dari grafik terlihat bahwa kurun waktu 2009-2013 persentase keluarga yang menghuni rumah memenuhi syarat kesehatan mengalami peningkatan setiap tahunnya, peningkatan tertinggi terjadi pada tahun 2011 yaitu dari 64% tahun 2010 menjadi 70% pada tahun 2011; namun pada tahun 2014 mengalami penurunan drastis dari 73% pada tahun 2013 menjadi 62,42%.

Pada tahun 2014, dari 3.333.413 unit rumah yang ada di Sumatera Utara sebanyak 2.080.653 unit (62,42%) memenuhi syarat kesehatan. Rumah memenuhi syarat kesehatan tertinggi ada di Kota Tebing Tinggi (91,44%) dan terendah di Kabupaten Nias Utara (12,61%). Dengan pencapaian 62,42% maka target indikator kinerja yang ditetapkan yaitu 72% tidak tercapai pada tahun 2014.



2. Persentase keluarga menggunakan jamban memenuhi syarat kesehatan.

Begitu juga halnya dengan indikator pencapaian persentase keluarga menggunakan jamban yang memenuhi syarat kesehatan belum mampu mencapai target yang ditetapkan.

Pada tahun 2014, dari 2.996.860 rumah tangga terdapat 1.951.413 rumah tangga yang memiliki jamban memenuhi syarat kesehatan (65,11%). Persentase ini mengalami peningkatan dibandingkan tahun 2013 yaitu 59,13% namun mengalami penurunan dibandingkan pencapaian 2012 yaitu 66%.

3. Persentase Kab/Kota Sehat

Terbentuknya kabupateb/kota sehat berdasarkan keluarnya SK Bupati/Walikota tentang Forum Kabupaten/Kota Sehat. Dari kurun waktu 2010-2013 sudah 10 Kab/Kota yang dibina untuk menjadi Kabupaten/Kota Sehat, namun sampai tahun 2014 hanya 4 Kab/Kota yang SK pembentukan forumnya telah diterbitkan yaitu Kabupaten Tapanuli Selatan, Kota Pematang Siantar, Kota Binjai dan Kota Tebing Tinggi. Dengan dmikian target kinerja yang ditetapkan yaitu 7 Kab/Kota belum mampu tercapai.

▪ Kegiatan-kegiatan Tahun 2014

Jumlah anggaran yang dialokasikan untuk Program Lingkungan Sehat pada tahun 2014 yaitu sebesar Rp. 1.661.825.000,- dengan kegiatan-kegiatan adalah sebagai berikut :

1. Stimulan Pembangunan Percontohan Rumah Sehat dan Sederhana
2. Pengadaan Stimulan Sarana Jamban Keluarga



3. Pelaksanaan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM)
4. Gerakan Aksi Penyehatan kawasan Danau Toba
5. Pilot Project Pembentukan Kota Sehat
6. Perlombaan Lingkungan Bersih dan Sehat
7. Pertemuan Hygiene Sanitasi Depot Air Minum, dan ke-7 kegiatan ini dapat dilaksanakan.

Sampai akhir tahun anggaran, realisasi fisik Program Lingkungan Sehat adalah 81,52% dengan realisasi keuangan sebesar Rp. 1.201.635.000,- atau 74,32%.

➤ PROGRAM PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN PENYAKIT

Pencapaian Indikator Kinerja Tahun 2014

Didalam Penetapan Kinerja terdapat 22 (dua puluh dua) indikator kinerja Program Pencegahan dan Pemberantasan Penyakit yang harus dicapai pada tahun 2014, dan pencapaiannya adalah sebagai berikut:

Tabel 66
Indikator Kinerja, Target, Capaian dan Persen Capaian
Program Pencegahan dan Pemberantasan Penyakit Tahun 2014

NO	INDIKATOR	TARGET TAHUN 2014	CAPAIAN TAHUN 2014	% CAPAIAN
1	Angka Case Detection Rate penyakit TB.	83%	78,3%	94,34%
2	Angka keberhasilan pengobatan TB.	≥ 95%	94%	98,95%
3	Angka CNR (Case Notification Rate) program TB per 100.000 penduduk	165/100.000 pendk	166/100.000 pendk	100,61%
4	Cakupan Penemuan dan tata laksana kasus Pneumonia pada balita	20%	24%	120%
5	CFR Diare pada saat KLB	< 1,2%	1,86%	65%
6	Prevalensi Kecacangan pada anak sekolah	<20%	29%	68,97%
7	Angka Kecatatan Tingkat 2 Kusta	<10%	12%	83,33



NO	INDIKATOR	TARGET TAHUN 2014	CAPAIAN TAHUN 2014	% CAPAIAN
8	Jumlah penduduk kelompok usia > 15 tahun yang mengikuti test HIV	12.000 org	36.330	302,75%
9	Persentase ibu hamil HIV positif mendapatkan ARV	50%	72%	140,4%
10	Persentase kasus IMS yang diperiksa dan diobati.	40%	90%	220%
11	Angka Kematian Jemaah Haji kurang dari 2 per 1.000 jemaah haji	<2/1.000 jemaah haji	2,1/1.000 jemaah haji	99%
12	Angka penemuan kasus baru Frambusia /100.000 penddk	<0,6/ 100.000 pddk	0,008/100.000 pddk	100%
13	Angka Kesakitan DBD per 100.000 pddk	< 49/100.000 pendk	21,2/100.000 pddk	100%
14	Angka zoonosis lainnya (flu burung, rabies, anthrax, leptospirosis) yang ditangani sesuai standard	90%	74,58%	82,8%
15	Cakupan penduduk di daerah endemis mdptkan pengobatan massal filariasis	65%	73,2%	112,6%
16	Angka penemuan kasus malaria per 1.000 penduduk (API)	1/1.000 pddk	1/1.000pddk	100%
17	Persentase desa yang mencapai <i>Universal Child Immunization</i> (UCI).	80%	74,7%	93,34%
18	Persentase anak 0-11 bulan yang mendapatkan imunisasi dasar lengkap	85%	61,20%	72%
19	Persentase Penyelidikan Epidemiologi dan penanggulangan KLB < 24 jam pada desa/kel yang terjadi KLB	100%	100%	100%
20	Persentase kab/kota yang melakukan penanganan dan penanggulangan wabah dan bencana	100%	100%	100%
21	Jumlah kab/kota yg melak sanakan Surveilans Deteksi Dini & KIE Peny Tdk Menular	33 K/K	30 K/K	100%
22	Persentase kab/kota yang melaksanakan surveilans dan KIE kesehatan matra.	100%	100%	100%



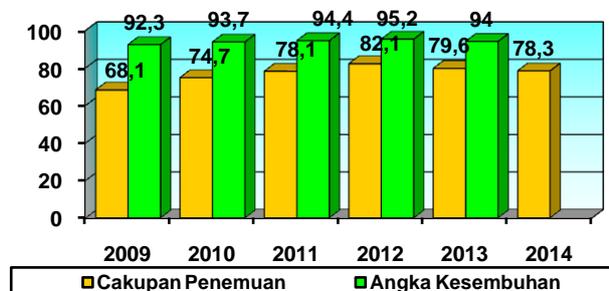
Dari persen capaian terlihat, bahwa dari 22 indikator kinerja Program Pencegahan dan Pemberantasan Penyakit, terdapat 3 (tiga) indikator atau 13,64% berkategori CUKUP, 6 (enam) indikator (27,27%) berkategori CUKUP, dan 13 (tiga belas) indikator (59,1%) berkategori SANGAT BAIK. Penjelasan tentang pencapaian masing-masing indikator serta analisa kecenderungan pencapaian sejak tahun 2009, adalah sebagai berikut:

1. Angka Case Detection Rate (CDR) dan Keberhasilan Pengobatan TB

Angka CDR Penyakit TB atau Cakupan penemuan penderita TB Paru dilihat dari penemuan penderita TB Paru BTA (+) yang berpotensi untuk terjadinya penularan di masyarakat. Pada tahun 2014, jumlah kasus BTA (+) yang ditemukan yaitu 16.659 kasus atau 78,3% dari estimasi kasus BTA (+) yaitu 21.277 kasus; dan mampu mencapai target nasional yaitu 75%. Pencapaian tahun 2014 lebih rendah dibandingkan tahun 2013 yaitu 79,6% hal ini disebabkan ada 3 kabupaten yaitu Kota Gunung Sitoli, Kabupaten Nias Utara dan Nias dimana selama tahun 2014 tidak rutin mengirimkan laporan.

Cakupan penemuan penderita penyakit TB Paru BTA (+) kurun waktu 2009-2014 dapat dilihat pada grafik berikut ini.

Grafik 19
Angka CDR (Cakupan Penemuan Penderita TB Paru BTA+) dan
Angka Keberhasilan Pengobatan TB di Provinsi Sumatera Utara
Tahun 2009–2014



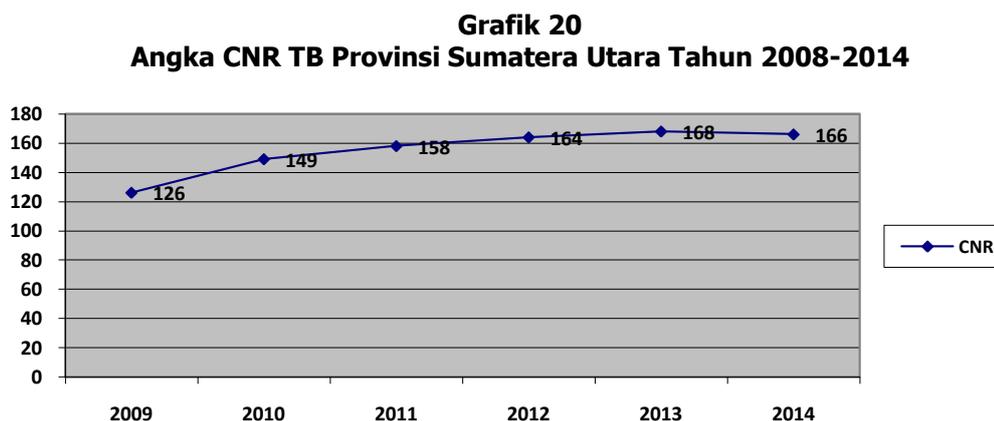
Sumber : Laporan Bidang Penanggulangan Masalah Kesehatan, 2014



Dari grafik terlihat bahwa cakupan penemuan penderita TB Paru BTA (+) mengalami naik turun selama kurun waktu 2009-2014. Dan sejak tahun 2010, pencapaian CDR telah mampu mencapai target nasional yaitu 70%. Hal ini sejalan juga dengan pencapaian angka keberhasilan pengobatan TB sejak tahun 2008 terus meningkat dan mampu mencapai angka di atas 90%, diatas target nasional yakni >85%.

1. Angka CNR (Case Notifikasi Rate) program TB per 100.1000 penduduk

CNR (Case Notifikasi Rate) adalah angka yang menunjukkan penemuan semua kasus TB yang tercatat diantara 100.000 penduduk di suatu wilayah tertentu. Angka ini berguna untuk menunjukkan kecenderungan (*trend*) peningkatan atau penurunan penemuan kasus TB pada suatu wilayah . Angka CNR dalam kurun waktu 2009-2014 dapat dilihat pada grafik berikut ini:



Dari grafik terlihat bahwa trend CNR mengalami kecenderungan peningkatan selama kurun waktu 2009-2014. Diharapkan kenaikan angka CNR mangalami kenaikan minimal 5% setiap tahun. Dengan persentase



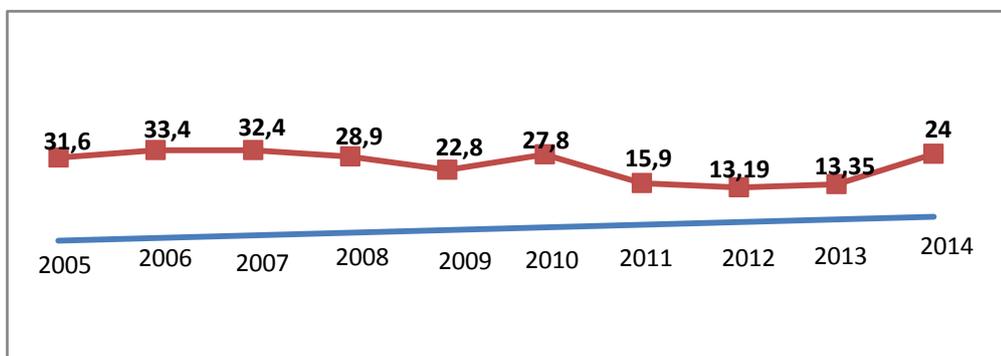
CNR yaitu 166/100.000 penduduk maka target kinerja tahun 2014 yaitu 165/100.000 penduduk telah mampu dicapai.

2. **Cakupan Penemuan dan Tata Laksana Kasus Pneumonia pada Balita**

Infeksi saluran Pernapasan Akut (ISPA) merupakan penyakit yang sering terjadi pada anak, Insidens menurut kelompok umur balita diperkirakan 0,29 episode per anak/tahun dinegara berkembangd an 0,05 episode per anak/tahun di Negara maju .

Di Propinsi Sumatera Utara Tahun 2014, jumlah kasus pneumonia Balita adalah sebesar 16.301 kasus (24 %) dari total penduduk usia balita 1.359.137 jiwa. Angka ini mengalami peningkatan dibandingkan tahun 2013 dan sudah mencapai target kinerja yang ditetapkan tahun 2014 yakni 20%.

Grafik 21
Persentase Cakupan Penemuan kasus Pneumonia Balita di Provinsi Sumatera Utara Tahun 2014



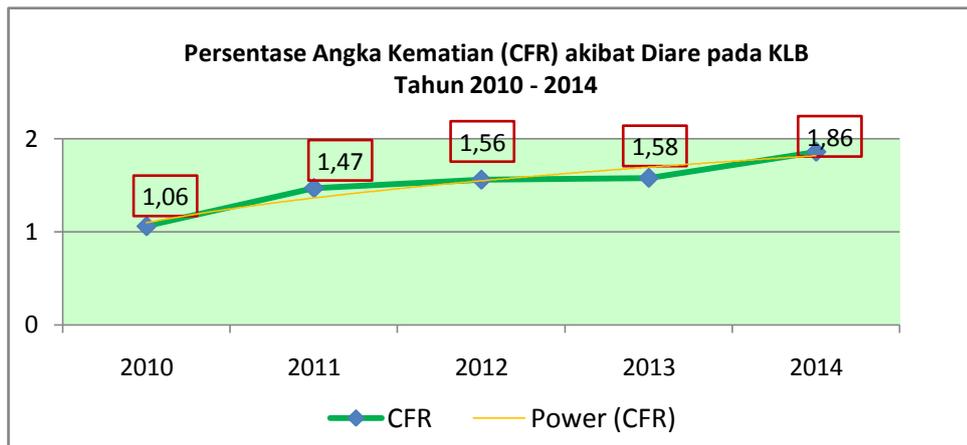
3. **Case Fatality Rate (CFR) Diare pada saat KLB (Kejadian Luar Biasa)**

KLB diare merupakan salah satu KLB yang setiap tahun terjadi di Provinsi Sumatera Utara dan tahun 2014 telah terjadi KLB diare di 5 Kab/Kota, yaitu di Kab. Padang Lawaa Utara (2 kali) dengan jumlah penderita 390



orang, meninggal 4 orang, Kab. Tapanuli Selatan dengan jumlah penderita 79 orang, meninggal 2 orang, Kota Padang Sidempuan (2 kali) dengan jumlah penderita 105 orang, meninggal 2 orang, Kab, Mandailing Natal jumlah penderita 48 orang, meninggal 2 orang dan Kab. Labuhan Batu jumlah penderita 23 orang, meninggal 2 orang.

Grafik 22



Angka kematian (CFR) akibat diare pada saat KLB menunjukkan kecenderungan peningkatan, dan tahun 2013 relative menunjukkan sedikit peningkatan yaitu dari 1,58% meningkat menjadi 1,86% pada tahun 2014. Dengan adanya peningkatan ini, maka CFR diare pada saat KLB masih diatas target nasional yaitu $\leq 1,2\%$. Hanya pada tahun 2010 capaian indikator ini mampu melampaui target nasional yaitu 1,06%. Ini menunjukkan bahwa tata laksana penderita diare pada saat KLB harus lebih ditingkatkan.



Tabel 67
Kejadian KLB Diare di Sumut tahun 2014

N O	KABUPATEN	PENDERITA	MENINGGAL	CFR
1	Padang Lawas Utara	244	2	0,82 %
2	(I)	79	2	2,53 %
3	Tapanuli Selatan	35	2	5,71 %
4	Padang Sidempuan	48	2	4,17 %
5	Mandailing Natal	146	2	1,37 %
6	Padang Lawas Utara	23	2	8,69 %
7	(II)	70	2	2,87%
	Labuhan Batu			
	Padang Sidempuan			
	TOTAL	645	12	1,86 %

4. Prevalensi Kecacingan pada Anak Sekolah

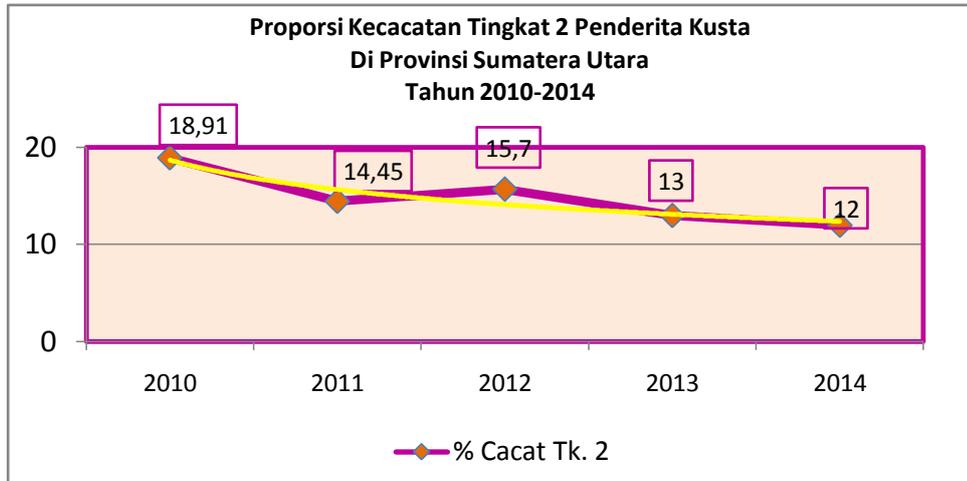
Prevalensi kecacingan pada anak sekolah diharapkan kurang dari 20 % pada akhir 2014. Hasil kegiatan survey kecacingan dan pengobatan dilaksanakan di 10 Kab/Kota di Provinsi Sumatera Utara menunjukkan bahwa prevalensi kecacingan pada anak sekolah adalah sebesar 29%; dengan perincian persentase Cacing Gelang 25%, Cacing Cambuk 13%, Mix (Campuran Cacing Gelang dan Cacing Cambuk) 9% dan Cacing Tambang 1 %. Dengan demikian target kinerja yang ditetapkan yaitu ≤ 20 % belum mampu dicapai.

5. Angka Kecacatan Tingkat 2 kusta

Proporsi kecacatan tingkat 2 menunjukkan kecenderungan menurun sejak tahun 2010. Pada tahun 2010 mencapai angka 18,91% dan pada tahun 2014 menurun menjadi 12% atau 20 kasus. Namun, adanya kejadian kecacatan tingkat 2 ini mengindikasikan masih adanya keterlambatan penemuan kasus dan keterlambatan dalam mendapatkan pengobatan.



Grafik 23



Sumber : Laporan Bidang Penanggulangan Masalah Kesehatan, 2014

Walaupun mengalami penurunan yang cukup signifikan selama kurun waktu 5 (lima) tahun, namun pencapaian 2014 tersebut belum mampu mencapai target yang ditetapkan yaitu <10%.

6. Jumlah Penduduk Kelompok Usia >15 tahun Yang mengikuti Test HIV

Target kelompok usia > 15 tahun yang mendapat konseling dan tes HIV pada tahun 2014 sebanyak 12.000 orang dan yang tercapai sebanyak 36.330 (300 %), hal ini dikarenakan adanya penambahan jumlah layanan konseling dan testing HIV di kab/kota baik di puskesmas maupun rumah sakit serta adanya mobile klinik dimana layanan melakukan penjangkauan dan pemeriksaan

langsung ke lapangan yang bekerja sama dengan LSM. Didukung dengan adanya Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 21 Tahun 2013 yang mewajibkan menawarkan tes HIV kepada kelompok TB, Ibu Hamil, Hepatitis, IMS dan kelompok resiko tinggi. Pada tahun 2014, terdapat 45 layananVCT di 18 kab./kota di Sumatera Utara.



7. Persentase Ibu Hamil positif HIV yang mendapat ARV

Di Sumatera Utara terdapat 2 unit layanan PPIA (Pencegahan Penularan dari Ibu ke Anak). Pada tahun 2014, dari 130 orang ibu hamil HIV (+) yang masuk ke layanan PDP (Perawatan, Dukungan, dan Pengobatan) sebanyak 93 orang mendapatkan ARV (72 %). Dengan demikian target indikator kinerja yaitu 50 % pada tahun 2014 sudah tercapai.

8. Persentase Kasus IMS yang diperiksa dan diobati

Kasus IMS yang diperiksa/ditemukan pada tahun 2014 sebesar 6.162 kasus dan diobati 5.549 kasus (90%). Angka ini sudah mampu mencapai target kinerja yang ditetapkan yaitu 40 % tahun 2014. Dalam upaya menurunkan kasus IMS seharusnya semua kasus yang ditemukan diobati, tetapi karena stok obat yang kurang dan terkadang klien yang diperiksa di lokasi tidak datang ke layanan untuk mengambil obat. Layanan IMS (Infeksi Menular Seksual) di Provinsi Sumatera Utara pada Tahun 2014 sebanyak 30 layanan di 12 kab/kota.

9. Angka Penemuan Kasus Baru Frambusia/100.000 Penduduk

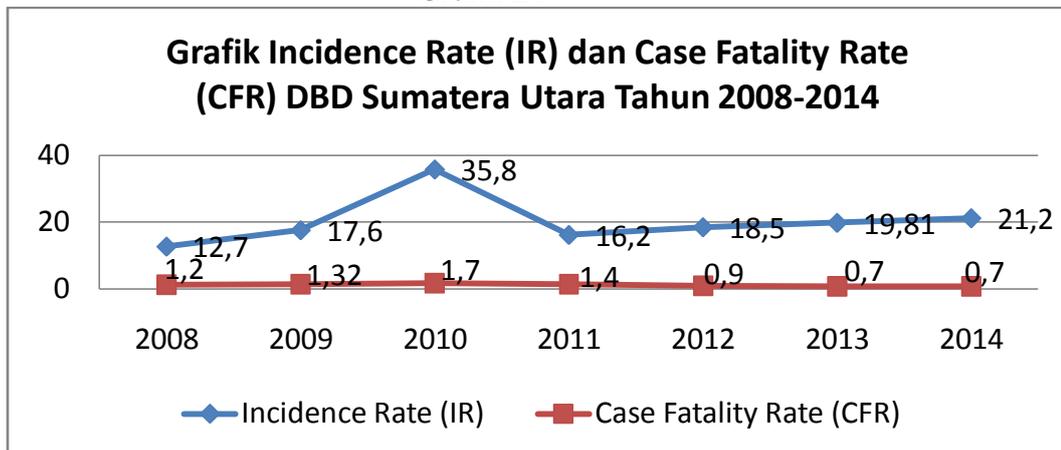
Pada tahun 2014, jumlah kasus baru Frambusia yang ditemukan sebanyak 1 kasus, yaitu Kabupaten Padanglawas Utara. Dengan demikian angka penemuan kasus baru Frambusia per 100.000 penduduk tahun 2014 yaitu 0,008. Angka ini mengalami penurunan dibandingkan tahun 2013 yaitu 0,09/100.000 penduduk. Bila dibandingkan dengan target yaitu < 0,6/100.000 penduduk maka kasus baru Frambusia dapat ditekan untuk tetap dibawah angka < 0,6/100.000 penduduk.



10. Angka Kesakitan Demam Berdarah Dengue (DBD) per 100.000 Penduduk

Program P2 DBD di Sumatera Utara terdiri dari 2 (dua) indikator yaitu angka kesakitan (Incidence Rate/IR) dan angka kematian (Case Fatality Rate/CFR). Indikator IR DBD Provinsi Sumatera Utara tahun 2014 yaitu <49 per 100.000 penduduk, cukupkan CFR <1%.

Grafik 24



Angka kesakitan (IR) DBD selama 6 tahun terakhir (2009-2014) terlihat fluktuatif. Angka kesakitan DBD tahun sebesar 2014 sebesar 21,2 per 100.000 penduduk. Angka ini mengalami peningkatan bila dibandingkan dengan tahun 2013 yaitu 20 per 100.000 penduduk dan tahun 2012 sebesar 18,2 per 100.000 penduduk, namun bila dibandingkan dengan target renstra Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Utara tahun 2014 telah dapat dicapai yaitu kurang dari 49 per 100.000 penduduk.

Di lain pihak, angka kesakitan DBD (CFR) menunjukkan trend penurunan sejak tahun 2010. Dengan pencapaian ini maka angka kesakitan DBD Sumatera Utara telah mampu mencapai target nasional yaitu <1%.



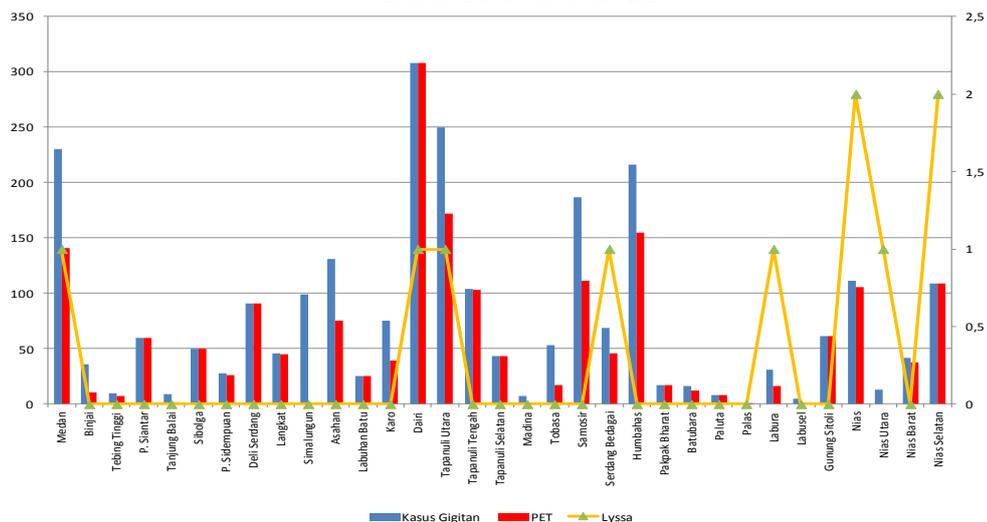
Hal ini menunjukkan kecepatan dan penanganan kasus DBD di masyarakat dan fasilitas kesehatan sudah menunjukkan lebih baik.

11. Persentase kasus zoonosis lainnya (rabies, antraks, leptospirosis) yang ditangani sesuai standard

Pada tahun 2014 kasus gigitan hewan penular rabies (GHPR) dan kasus lyssa mengalami peningkatan dibandingkan tahun 2013. Kasus lyssa pada tahun 2013 sebanyak 5 kasus meningkat menjadi 10 kasus pada tahun 2014. Post Exposure Treatment (PET) terhadap kasus GHPR berindikasi turun menjadi 74.58% di tahun 2014 dibandingkan tahun 2013 mencapai 78.70%. Situasi ini merupakan dampak dari rendahnya anggaran untuk pengadaan logistik di kabupaten/kota dan terlambatnya pengadaan buffer stok VAR di provinsi yang baru diterima pada bulan Desember 2014. Di tahun 2014 ada penambahan Rabies Center di Kabupaten Nias dan Kota Gunung Sitoli yang merupakan pusat penanganan kasus gigitan hewan penular rabies.

Grafik 25

JUMLAH KASUS GIGITAN, POST EXPOSURE TREATMENT (PET) & LYSSA DI SUMATERA UTARA TAHUN 2014





Jumlah kasus gigitan hewan penular rabies tahun 2014 sebanyak 2.941 kasus yang tersebar hampir disemua kab/kota dan yang diberi Vaksin Anti Rabies (VAR) sebesar 2.243 kasus dengan jumlah kasus gigitan tertinggi di Kab Dairi. Dari 10 kasus lyssa yang ditemukan tahun 2014 penyebarannya yaitu di Kota Medan (1 kasus), Kab. Dairi (1 kasus), Kab Taput (1 kasus), Kab Serdang Bedagei (1 kasus), Kab. Labuhan Batu Utara (1 kasus), Kab. Nias (2 kasus), Kab. Nias Selatan (2 Kasus) dan Kab Nias Utara (1 kasus).

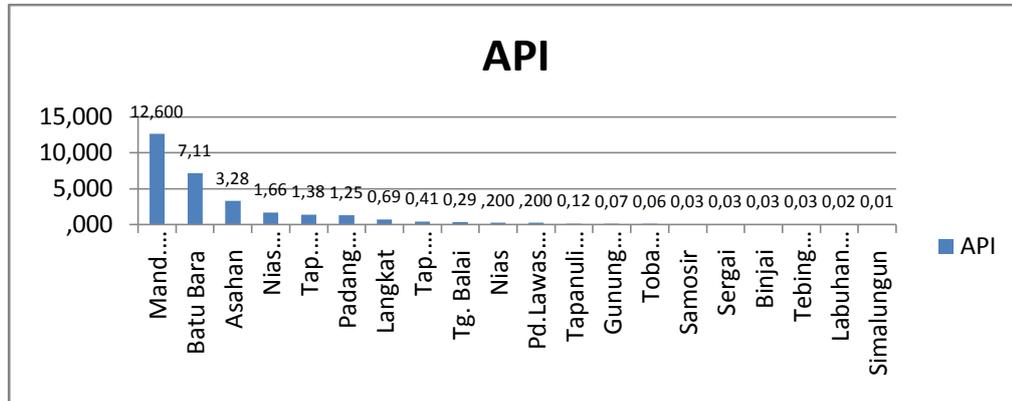
12. Persentase Pengobatan Massal Filariasis

Pada tahun 2014, telah dilakukan pengobatan massal 5 Kab./Kota yaitu Kab. Nias, Kota Gunung Sitoli, Kab.Labuhan Batu Selatan, Kab. Serdang Bedagai, dan kab. Nias Barat. Hasil yang sudah dilaporkan yaitu dari 2 Kabupaten yaitu Kab. Nias dengan jumlah sasaran 129.403 jiwa dan yang minum obat 97.056 (75%) dan Kota Gunung Sitoli dengan jumlah sasaran 56.205 jiwa dan yang minum obat 38.857 (69%); cukupkan 3 Kabupaten lainnya belum melaporkan hasil kegiatan. Dengan demikian hasil cakupan pengobatan rata-rata sebesar 73,2%. Dengan demikian target indikator kinerja tahun 2014 yaitu 65% telah mampu dicapai.

13. Angka Penemuan Kasus Malaria per 1.000 Penduduk (API)

Di Sumatera Utara terdapat 17 Kabupaten/Kota daerah endemis malaria, 184 kecamatan dan 1.847 desa endemis malaria. Angka Kasus Positif Malaria per seribu penduduk atau *Annual Parasite Incidence (API)* tahun 2014 mengalami penurunan dari tahun 2013. Pada tahun 2013 dilaporkan 102.726 kasus klinis malaria dengan sampel slide diperiksa sebanyak 82.302 dan yang positif sebanyak 17.265 kasus dan API mencapai 1,33/1.000 penduduk. Pada tahun 2014 dilaporkan 111.784 kasus klinis malaria dengan sample slide diperiksa sebanyak 102.724 dan kasus positif sebanyak 13.405 sehingga API mencapai 1 / 1.000 Penduduk pada tahun 2014.

Grafik 26
ANNUAL PARACITE INCIDENCE (API)
PROVINSI SUMATERA UTARA
TAHUN 2014



Berdasarkan diagram di atas terlihat bahwa 4 Kabupaten dengan kasus malaria positif tertinggi adalah kabupaten Mandailing Natal dengan API (*Annual Parasite Incidence*) yaitu sebesar 12,60‰ disusul Kabupaten Batu Bara 7,11‰, Kabupaten Asahan 3,38‰, Nias Selatan 1,66‰ dan Padang Lawas 1,25‰. Cukupan Kabupaten terendah adalah Kabupaten Simalungun API sebesar 0,01‰. Cukupan 13 Kabupaten/ Kota lainnya tidak ditemukan adanya kasus.

14. Angka Kematian Jemaah Haji per 1.000 Jemaah Haji

Program Kesehatan Haji secara umum bertujuan meningkatkan kondisi kesehatan calon/jemaah haji Indonesia, menekan dan mengurangi angka kematian jemaah haji serta terbebasnya masyarakat Indonesia/Internasional dari transmisi penyakit menular yang mungkin terbawa keluar/masuk oleh calon/jemaah haji Indonesia.

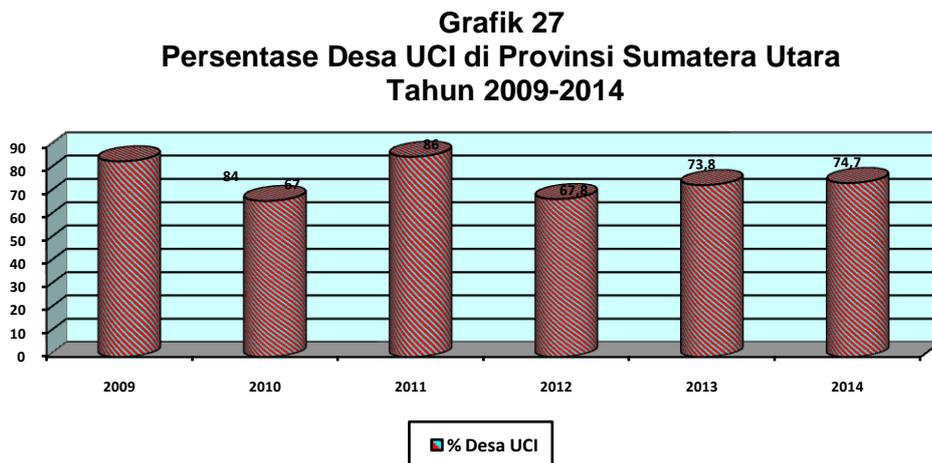


Pada tahun 2014, dari 6.575 jemaah haji berasal dari Sumatera Utara, sebanyak 14 jemaah haji meninggal dunia. Dengan jumlah tersebut angka kematian jemaah haji Sumatera Utara pada tahun 2014 sebesar 2,1/1.000 jemaah haji.

Angka ini lebih tinggi bila dibandingkan tahun 2013 yaitu 1,84/1.000 jemaah haji, namun lebih rendah bila dibandingkan tahun 2012, yaitu sebesar 2,92/1.000 jemaah haji, tahun 2011 yaitu 2,12/1.000 jemaah haji dan tahun 2010 yaitu 2,7/1.000 jemaah haji. Dengan pencapaian ini target akhir Renstra yang ditetapkan yaitu <2/1.000 jemaah haji telah mampu dicapai.

15. Persentase Desa yang Mencapai Universal Child Immunization (UCI)

Persentase desa yang mencapai UCI di Sumatera Utara mengalami fluktuatif dalam kurun waktu 5 tahun 2009-2014, seperti terlihat pada grafik berikut:



Sumber : Laporan Bidang Penanggulangan Masalah Kesehatan, 2014



Pada 2009, persentase desa UCI diatas angka 80% sehingga mampu mencapai target nasional yaitu 80%. Namun, pada tahun 2010, mengalami penurunan yang sangat tajam lebih dari 15% sehingga menjadi 67%. Tahun 2011, persentase desa UCI dapat ditingkatkan mencapai hampir 20% menjadi 86%, namun kembali mengalami penurunan hampir 20% sehingga hanya mencapai 67,8% pada tahun 2012. Pada tahun 2013, mengalami mengalami peningkatan sekitar 6% pada tahun 2013 dan pada tahun 2014 hanya mampu ditingkatkan sekitar 1%; sehingga pencapaian tahun 2014 belum mampu mencapai target yang ditetapkan yaitu 80%.

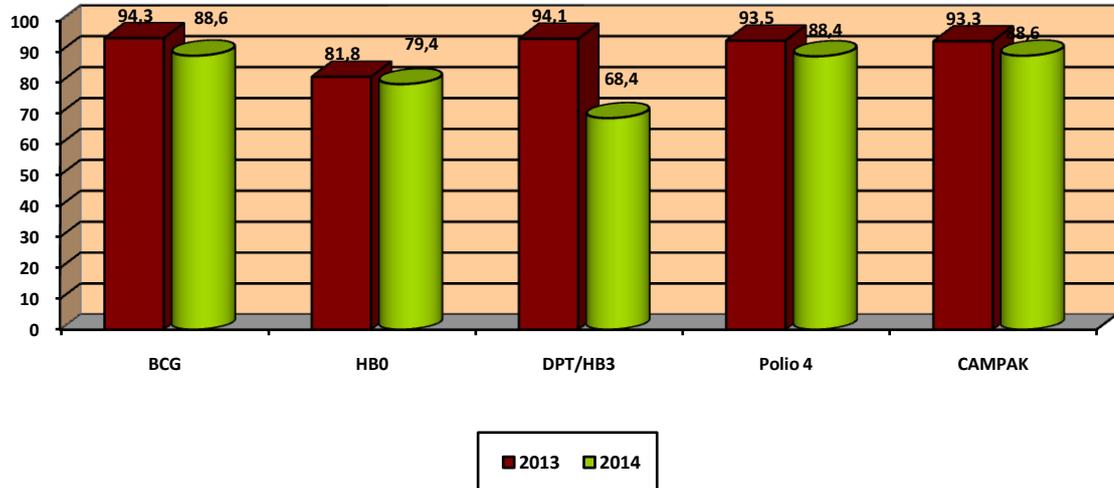
16. Persentase Anak 0 – 11 Bulan yang Mendapatkan Imunisasi Dasar Lengkap

Pencapaian persentase anak 0 – 11 bulan yang mendapatkan imunisasi dasar lengkap tahun 2014 hanya mencapai 61,20%, mengalami penurunan bila dibandingkan tahun 2013 yang mencapai 81,11%. Penurunan ini memperlebar jarak dari target yang ditetapkan yaitu 85%.

Dan pencapaian tahun 2014 juga sangat rendah bila dibandingkan tahun pada tahun 2012 yaitu 76,8%, tahun 2011 yaitu 88,6% dan tahun 2010 yaitu 93%. Pencapaian 5 (lima) dasar pada bayi di Sumatera Utara tahun 2013-2014, dapat dilihat pada grafik berikut ini:



Grafik 28
Persentase Lima Imunisasi Dasar pada Bayi
Di Sumatera Utara Tahun 2013-2014



Dari grafik terlihat bahwa pencapaian persentase bayi di imunisasi per jenis imunisasi (5 jenis) mengalami penurunan keseluruhannya. Penurunan terbesar dialami imunisasi DPT?HB3 yang menurun dari 94,1% menjadi 68,4%; menurun lebih dari 25%.

17. Persentase Penyelidikan Epidemiologi <24 Jam pada Desa/Kelurahan dengan KLB

Pada tahun 2014 jumlah kasus KLB yaitu 33 kejadian dan seluruh kasus (100%) dilakukan penyelidikan epidemiologi <24 jam. Frekuensi KLB tahun 2014 ini mengalami penurunan dibandingkan tahun 2013 yaitu 44 kejadian, tahun 2012 yaitu 57 kejadian dan tahun 2011 yaitu 36 kejadian. Semua kasus KLB (100) telah mampu dilakukan penyelidikan epidemiologi <24 jam sesuai standard pada tahun 2014. Dengan demikian target indikator kinerja yaitu seluruh desa/kelurahan dengan KLB dilakukan penyelidikan epidemiologi <24 jam telah mampu dicapai.



18. Persentase Kab/Kota yang Melaksanakan Surveilans Deteksi Dini dan KIE Penyakit Tidak Menular

Pembangunan bidang kesehatan di Provinsi Sumatera Utara saat ini cukup menghadapi “*triple burden of diseases*” dimana penyakit infeksi dan menular masih merupakan masalah kesehatan masyarakat yang sangat menonjol, ditambah dengan mulai meningkatnya kasus-kasus penyakit tidak menular serta munculnya penyakit-penyakit baru dengan tingkat kematian tinggi, seperti Avian Flu (Flu Burung).

Untuk mengantisipasi dan mengatasi peningkatan kejadian kasus-kasus penyakit tidak menular maka sangat diperlukan surveilans deteksi dini dan komunikasi, informasi dan edukasi tentang penyakit tidak menular. Kelengkapan dan ketepatan waktu lapor merupakan hal yang sangat dibutuhkan dalam pelaksanaan surveilans deteksi dini. Pada tahun 2014, seluruh kabupaten/kota atau 33 kab/kota di Sumatera Utara telah menyelenggarakan surveilans deteksi dini dan KIE penyakit tidak menular. Jumlah ini mengalami peningkatan dibandingkan tahun 2013 yaitu sebanyak 30 kabupaten/kota (90,90%).

19. Persentase Kab/Kota Melaksanakan Surveilans Kesehatan Matra

Sesuai dengan Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor : 1215/Menkes/SK/XI/2001 tentang Pedoman Kesehatan Matra, Kesehatan Matra merupakan upaya kesehatan khusus yang diselenggarakan untuk mewujudkan derajat kesehatan yang optimal dalam lingkungan matra yang serba berubah secara bermakna. Kesehatan matra meliputi kesehatan lapangan, kesehatan kelautan dan bawah air serta kesehatan kedirgantaraan.



Persentase Kab/Kota Melaksanakan Surveilans Kesehatan Matra mengalami peningkatan, pada tahun 2011 hanya 8 kab/kota (27,3%) yaitu Kota Pematang Siantar, Sibolga, Kabupaten Simalungun, Serdang Bedagai, Deli Serdang, Nias, Nias Selatan dan Samosir. Sejak tahun 2012 - 2014, seluruh Kab/Kota telah melaksanakan Surveilans Kesehatan Matra.

20. Persentase Kab/Kota yang Menyelenggarakan Penanggulangan dan Penanganan Wabah dan Bencana

Pelaksanaan penanganan penanggulangan wabah dan bencana sebagai tindaklanjut pelaksanaan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 Tentang Penanggulangan Bencana, dan Undang-Undang Wabah Nomor 4 Tahun 1984 Tentang Wabah Penyakit Menular. Selama tahun 2012, telah terjadi bencana sebanyak 41 kejadian, yang tersebar di 55 kecamatan dan 180 desa/kelurahan, jumlah penduduk terisiko bencana sebanyak 743.474 jiwa, dengan jumlah pengungsi sebanyak 12.394 jiwa, dan jumlah meninggal sebanyak 59 jiwa. Pada periode tahun 2013, jumlah kejadian bencana mengalami penurunan menjadi 22 kejadian, yang tersebar di 24 kecamatan dan 46 desa/kelurahan, jumlah terisiko sebanyak 425.263 jiwa, dengan jumlah pengungsi sebanyak 18.796 jiwa, dan jumlah meninggal sebanyak 12 jiwa. Sampai tahun 2013, seluruh Kab/Kota yang telah menyelenggarakan penanggulangan dan penanganan wabah dan bencana atau 100%. Bila dibandingkan dengan target indikator kinerja yang ditetapkan yaitu 100%, maka hasil capaian ini sudah mencapai target.

A. Kegiatan-kegiatan Tahun 2014

Jumlah anggaran yang dialokasikan untuk Program Pencegahan dan Pemberantasan Penyakit pada tahun 2014 yaitu sebesar Rp. 7.913.462.275, dengan kegiatan-kegiatan adalah sebagai berikut :

1. Imunisasi Dasar Lengkap



2. Pengendalian Penyakit Filariasis
3. Pengendalian Penyakit Thypoid
4. Pengendalian Penyakit Diare
5. Pengendalian Penyakit Kecacingan
6. Pengendalian Penyakit Demam Berdarah Dengue
7. Pemberantasan dan Pencegahan Penyakit Pengendalian Malaria
8. Ekspansi TB dengan Strategi Directly Observer Treatment Short (DOTS) di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes)
9. Pembinaan Program TB dengan Strategi DOTS untuk meningkatkan CDR
10. Sosialisasi TB-MDR (TB-Multi Drug Resistance)
11. Pembinaan Program TB dengan Strategi DOTS untuk meningkatkan Success Rate (SR)
12. Pertemuan Monitoring dan Evaluasi Program TB
13. Pengendalian Penyakit Infeksi Menular Seksual (IMS)
14. Pencegahan Penularan dari Ibu ke Anak (PPIA)
15. Konseling dan Testing HIV-AIDS
16. Peningkatan Pemeriksaan Kesehatan oleh UPT Laboratorium Kesehatan di Luar Gedung
17. Pengendalian Penyakit Rabies
18. Pengadaan Bufferstock Rapid Diagnosis Test (RDT) Demam Berdarah Dengue
19. Pertemuan Surveilans Kesehatan Haji
20. Gerakan Akselerasi Imunisasi (UCI)
21. Peningkatan Kelengkapan dan Ketepatan Laporan Mingguan Wabah (W2)
22. Pemberantasan dan Pencegahan Penyakit/Pengendalian ISPA
23. Pertemuan PTM dalam rangka Monev IVA dan CBE
24. Pertemuan, Monitoring dan Evaluasi Program PTM.
25. Pengumpulan Data, Analisa dan Desiminai Infromasi Kasus dan Faktor Resiko Zoonosis (Flu Burung, Rabise dan Leptospirosis)



26. Pertemuan Evaluasi Program PTM
27. Pengendalian Penyakit Frambusia
28. Pengendalian Penyakit Kusta
29. Peningkatan Penanggulangan KLB dan Bencana
30. Investigasi dan pelaporan kasus-Kasus Zoonosis (Flu Buung, Rabies dan Leptospirosis)
31. Pertemuan Evaluasi Program Kesehatan Haji.
32. Penyediaan Sarana dan Prasarana Penanganan Bencana
33. Pembinaan Manajemen Bencana kab/Kota
34. Sosialisasi Surveilans Kesehatan Matra
35. Pemantapan Petugas Analis Laboratorium PRM/PPM/RS Kab/Kota

Sampai akhir tahun anggaran, realisasi fisik Program Pencegahan dan Pemberantasan Penyakit adalah 89,85% dengan jumlah realisasi keuangan sebesar Rp. 6.494.393.553,- atau 82,07%.



➤ PROGRAM UPAYA KESEHATAN PERORANGAN (UKP)

Pencapaian Indikator Kinerja Tahun 2014

Di dalam Penetapan Kinerja terdapat 5 (lima) indikator kinerja Program Upaya Kesehatan Perorangan yang harus dicapai pada tahun 2014, dan pencapaiannya adalah sebagai berikut:

Tabel 68
Indikator Kinerja, Target, Capaian dan Persen Capaian
Program Upaya Kesehatan Perorangan
Tahun 2014

NO	INDIKATOR	TARGET TAHUN 2014	CAPAIAN TAHUN 2013	% CAPAIAN
1	Jumlah RSUD yang menyelenggarakan (PONEK).	21 RSUD	20 RSUD	95,24%
2	Jumlah RSUD yang menerapkan PPK- BLUD	8 RSUD	9 RSUD	112,5%
3	Jumlah RSUD yang menerapkan SPM RS	21 RSUD	20 RSUD	95,24%
4	Jumlah RSUD yang melaksanakan pelayanan gawat darurat sesuai standard	21 RSUD	19 RSUD	90,48%
5	Jumlah rumah sakit yang terakreditasi	78 RS	74 RS	94,87%
6	Jumlah rumah sakit yang mendapatkan penetapan kelas rumah sakit	135 RS	99 RS	73,33%
7	Jumlah RS yg menerapkan standard sarana dan prasarana	92 RS	89 RS	96,74%

Dari persen capaian terlihat, bahwa dari 7 (tujuh) indikator kinerja Upaya Kesehatan Perorangan, terdapat lima indikator (71,43%) yaitu indikator ke-1, 3,4,5 dan 7 berkategori BAIK, satu indikator (14,28%) yaitu indikator ke-2 berkategori SANGAT BAIK dan satu indikator (14,29%) yaitu indikator ke-6 berkategori KURANG. Penjelasan tentang pencapaian masing-masing indikator serta analisa kecenderungan pencapaian sejak tahun 2009, adalah sebagai berikut:



1. Jumlah RSUD yang melaksanakan Pelayanan Obstetri dan Neonatal Emergensi Komprehensif (PONEK)

Dalam upaya menurunkan angka kematian ibu dan bayi, penyediaan sarana rumah sakit yang mampu PONEK sangat dibutuhkan, terutama pada kasus-

kasus kegawatdaruratan. Terbentuknya RSUD mampu PONEK sangat tergantung kepada tersedianya tenaga dokter spesialis khususnya spesialis kandungan dan anak; sarana penunjang medik, kompetensi tim PONEK serta dukungan manajemen yang dilihat dari adanya SK Tim PONEK. Sampai tahun 2014, terdapat 20 RSUD yang telah memiliki SK Tim PONEK dan menyelenggarakan PONEK, dan jumlah ini mengalami peningkatan dibandingkan tahun 2013 yaitu 18 RSUD, tahun 2012 yaitu 13 RSUD. Walaupun mengalami peningkatan, namun jumlah RSUD mampu PONEK sampai akhir tahun 2014 belum mampu mencapai target indikator kinerja yang ditetapkan yaitu 21 RSUD. Perkembangan RSUD mampu PONEK dalam dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 69
RSUD Mampu PONEK di Provinsi Sumatera Utara
Tahun 2010 - 2014

TAHUN	RSUD Mampu PONEK
2010	1. TANJUNG PURA – LANGKAT
	2. DR. FL. TOBING – SIBOLGA
	3. DR. TENGGU MANSYUR - TJ. BALAI
	4. TARUTUNG – TAPANULI UTARA
	5. GUNUNG SITOLI – NIAS*
	6. LUBUK PAKAM DELI – SERDANG
2011	7. DR. RM DJOELHAM – BINJAI
	8. DR. PIRNGADI – MEDAN
	9. DR. KUMPULAN PANE – TEBING TINGGI
	10. RANTAUPRAPAT – LABUHAN BATU
	11. KABANJAHE – KARO



TAHUN	RSUD Mampu PONEK
2012	12. HADRIANUS SINAGA - SAMOSIR
	13. KOTA PADANG SIDEMPUAN
	14. SIDIKALANG
2013	15. DR. DJASAMEN SARAGIH-P. SIANTAR
	16. DR. ABDUL MANAN SIMATUPANG-KISARAN
	17. GUNUNG SITOLI-NIAS
	18. PANYABUNGAN-MANDAILING NATAL
2014	19. HAJI PROVINSI SUMATERA UTARA
	20. PANDAN TAPANULI TENGAH
	21. SULTAN SULAIMAN SERDANG BEDAGAI

Sumber: Laporan Bidang Pelayanan Kesehatan, 2011-2014

Pada tahun 2010, RSUD Gunung Sitoli adalah RS PONEK, namun akibat kekosongan dokter spesialis kandungan pada tahun 2011, RSUD Gunung Sitoli sempat tidak termasuk di dalam RSUD Mampu PONEK, dan pada tahun 2013 oleh karena telah tersedianya dokter spesialis kandungan, RSUD ini kembali dapat meneyelenggarakan PONEK.

2. Jumlah RSUD menjadi Badan Layanan Umum Daerah (BLUD)

Sesuai dengan amanat UU No. 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit maka RSUD diwajibkan melaksanakan pola tata keuangan BLUD pada tahun 2011.

Sampai tahun 2013, dari 11 RSUD ditargetkan menjadi BLUD hanya 5 RSUD yang telah menjadi BLUD, yaitu: RSUD Kumpulan Pane Tebing-Tinggi pada tahun 2010 dan RSUD Dr. Pirngadi Medan menjadi BLUD pada tahun 2011; pada tahun 2013 yaitu RSUD Dr. Djasamen Saragih-Pematang Siantar, RSUD Rantauprapat Labuhan Batu dan RSUD Dr. Abdul Manan Simatupang Kisaran.



Pada tahun 2014, RSUD yang menerapkan PPK-BLUD bertambah 4 yaitu RSUD Haji Medan Provinsi Sumatera Utara, RSUD Kabanjahe Karo, RSUD Gunung Sitoli dan RSUD Pandan Tapanuli Tengah.

Dengan jumlah ini maka sampai akhir tahun 2014 jumlah RSUD yang menerapkan PPK-BLUD di Sumatera Utara yaitu 9 RSUD, dengan demikian target indikator kinerja tahun 2014 yaitu 8 RSUD telah tercapai.

3. Jumlah RSUD yang melaksanakan pelayanan gawat darurat sesuai standard

Pada tahun 2014 terdapat peningkatan jumlah RSUD yang menyelenggarakan pelayanan gawat darurat sesuai standard sebanyak 3 RSUD, sehingga dari 33 RSUD yang ada di Sumatera Utara terdapat 19 RSUD yang melaksanakan pelayanan gawat darurat sesuai standard. Namun walaupun mengalami peningkatan jumlah, namun pencapaian ini belum mampu mencapai target indikator kinerja yang ditetapkan yaitu 21 RSUD pada tahun 2014. RSUD yang melaksanakan pelayanan gawat darurat sesuai standard terlihat pada tabel sebagai berikut:

Tabel 70
RSUD yang Melaksanakan Pelayanan Gawat Darurat sesuai Standard
Provinsi Sumatera Utara s/d Tahun 2014

NO	RSUD Melaksanakan Pelayanan Gawat Darurat sesuai Standard
1	RSUD Dr. RM Djoelham Kota Binjai
2	RSUD Dr. Pirngadi Kota Medan
3	RSUD Pakam Kabupaten Deli Serdang
4	RSUD Kumpulan Pane Kota Tebing Tinggi
5	RSUD Dr. F.L Tobing Kota Sibolga
6	RSUD Rantauprapat Kabupaten Labuhan Batu
7	RSUD Tarutung Kabupaten Tapanuli Utara
8	RSUD Kota Padang Sidempuan
9	RSUD Dr. Djasamen Saragih Kota Pematang Siantar



NO	RSUD Melaksanakan Pelayanan Gawat Darurat sesuai Standard
10	RSUD Kabanjahe Kabupaten Karo
11	RSUD Dr. Tengku Mansyur Kota Tanjung Balai
12	RSUD Sultan Sulaiman Kabupaten Serdang Bedagai
13	RSUD Gunung Sitoli Kabupaten Nias
14	RSUD Dr. Hardianus Sinaga Kabupaten Samosir
15	RSUD Kabupaten Mandailing Natal.
16	RSUD Kabupaten Sidikalang.
17	RSUD Tanjung Pura Langkat
18	RSUD H. A Manan Simatupang Kisaran
19	RSU Haji Provinsi Sumatera Utara

4. Jumlah RSUD yang menyelenggarakan pelayanan berdasarkan Standard Pelayanan Minimal Rumah Sakit (SPM RS)

Rumah sakit yang mampu menyelenggarakan pelayanan sesuai dengan SPM RS adalah rumah sakit yang telah terakreditasi. RS yang terakreditasi adalah rumah sakit yang telah memenuhi standard sarana, pelayanan, dan standard jumlah dan kompetensi tenaga kesehatan. Pada tahun 2014, jumlah RSUD yang menyelenggarakan pelayanan berdasarkan Standard Pelayanan Minimal Rumah Sakit (SPM RS) sebanyak 20 RSUD dari 33 RSUD yang ada di Sumatera Utara. Jumlah ini mengalami peningkatan dibandingkan tahun tahun 2013 yaitu 19 RSUD, tahun 2012 yaitu 17 RSUD dan tahun 2011 sebanyak 10 RSUD.

Walaupun mengalami peningkatan, namun pencapaian ini belum mampu mencapai target indikator kinerja yang ditetapkan yaitu 21 RSUD pada tahun 2014.



Tabel 71
RSUD menyelenggarakan SPM RS di Provinsi Sumatera Utara
Tahun 2010 - 2014

NO	RSUD Menyelenggarakan SPM RS	Kelas
1	Dr. RM Djoelham - Binjai	B
2	Dr. Pirngadi – Medan	B
3	Lubuk Pakam – Deli Serdang	B
4	Dr. Kumpulan Pane – Tebing Tinggi	B
5	Dr. F.L Tobing – Sibolga	B
6	Rantau Prapat – Labuhan Batu	B
7	Tarutung – Tapanuli Utara	B
8	Padang Sidempuan	B
9	Dr. Djasamen Saragih – P. Siantar	B
10	Dr. Tengku Mansyur – Tanjung Balai	C
11	Sultan Sulaiman – Serdang Bedagai	C
12	Gunung Sitoli – Nias	C
13	Panyabungan – Mandailing Natal	C
14	Pandan – Tapanuli Tengah	C
15	Sidikalang – Dairi	C
16	Dr. Abdul Manan Simatupang – Kisaran	C
17	Sipirok – Tapanuli Selatan	C
18	Tanjung Pura – Langkat	C
19	Haji – Medan	B
20	Kabanjahe – Karo	C

5. *Persentase rumah sakit yang terakreditasi*

Pencapaian tahun 2014 masih sama dengan pencapaian tahun 2013 dan 2012, yaitu jumlah RS terakreditasi adalah sebanyak 74 RS (35,57%). Bila berdasarkan persentase, angka pencapaian tahun 2014 mengalami penurunan dibandingkan tahun 2013 yaitu 36,81%. Hal ini disebabkan karena adanya penambahan jumlah RS di tahun 2014 menjadi 208 unit, di tahun 2013 berjumlah 201 unit.

Dengan tidak bertambahnya jumlah RS terakreditasi cukupkan RS baru muncul, maka target kinerja tahun 2014 yaitu 78 RS terakreditasi belum mampu dicapai.



Tabel 72
Rumah Sakit Terakreditasi Sampai Tahun 2014

RUMAH SAKIT	TERAKREDITASI	
	TAHUN	JENIS PELAYANAN
RSU PEMERINTAH		
1. RSUD Kota Padang Sidempuan	2012	5 pelayanan
2. RSUD Sultan Sulaiman - Sergei	2012	5 pelayanan
3. RSUD Panyabungan - Natal	2012	5 pelayanan
4. RS Jiwa Daerah Prov Sumut	2012	5 pelayanan
5. RSUD Pandan Tapanuli Tengah	2012	5 pelayanan
6. RSUD Tapanuli Selatan	2012	5 pelayanan
7. RSUD Gunung Sitoli	2012	5 pelayanan
8. RSUD Dr. F.L Tobing – Sibolga	2011	12 Pelayanan
9. RSUD Rantau Prapat	2011	16 Pelayanan
10. RSUD Deli Serdang Lubuk Pakam	2011	16 Pelayanan
11. RSUDDjasamen Saragih Pematang Siantar	2011	12 Pelayanan
12. RSUD Abdul Manan Kisaran	2011	5 Pelayanan
13. RSUD Kumpulan Pane Tebing Tinggi	2010	12 Pelayanan
14. RSUD Dr. Mansyur Tj. Balai	2010	5 Pelayanan
15. RSUD Sidikalang	2009	5 Pelayanan
16. RSUD Dr. Djamaloedin – Binjai	2009	5 Pelayanan
17. RSUP H. Adam Malik	2009	16 Pelayanan
18. RSUD Dr. Pirngadi Medan	2007	16 Pelayanan
19. RSUD Tarutung	2001	5 Pelayanan
RSU SWASTA		
1. RS Grand Meditra Lubuk Pakam	2012	5 pelayanan
2. RSU Sembiring Delitua	2012	5 pelayanan
3. RS Estomihi Medan	2012	5 pelayanan
4. RSU Mitra Sejati Medan	2012	5 pelayanan
5. RSU Sarah Medan	2012	5 pelayanan
6. RSU Bidadari Binjai	2012	5 pelayanan
7. RSU Sari Mutiara Medan	2012	5 pelayanan
8. RSU Deli Medan	2012	5 pelayanan



RUMAH SAKIT	TERAKREDITASI	
	TAHUN	JENIS PELAYANAN
9. RSU Bunda Thamrin Medan	2012	5 pelayanan
10. RSU Sri Torgamba Labusel	2012	5 pelayanan
11. RS Columbia Asia Medan	2012	5 pelayanan
12. RS Methodist Medan	2012	5 pelayanan
13. RSU Nur'aini Labuhanbatu Selatan	2012	5 pelayanan
14. RS Permata Bunda Medan	2012	5 pelayanan
15. RS Sri Pamela Tebing Tinggi	2012	5 pelayanan
16. RSU Materna Medan	2012	5 pelayanan
17. RSU Sari Mutiara Lubuk Pakam	2012	5 pelayanan
18. RSU Bhakti Medan	2012	5 pelayanan
19. RS Tanjung Selamat Langkat	2012	5 pelayanan
20. RS dr. Gerhard Lumban Tobing	2012	5 pelayanan
21. RS Indrya Husada Labura	2012	5 pelayanan
22. RS Bangkatan Binjai	2012	5 pelayanan
23. RSU Sundari Medan	2012	5 pelayanan
24. RS Laras Simalungun	2012	5 pelayanan
25. Rumkital Dr. Komang Makes Mdn	2012	5 pelayanan
26. RS Horas Insani P. Siantar	2012	5 pelayanan
27. RS Methodist Susanna Wesley	2012	5 pelayanan
28. RSU Melati Perbaungan	2012	5 pelayanan
29. RSU Trianda Serdang Bedagai	2012	5 pelayanan
30. RSU Prof. Dr. Boloni	2012	5 pelayanan
31. RSU Vina Estetica Medan	2012	5 pelayanan
32. RSU Artha Medica Binjai	2012	5 pelayanan
33. Rumkit Abdul Manik Lanud	2012	5 pelayanan
34. RSU Sinar Husni Medan	2012	5 pelayanan
35. RSU Sumatera Eye Center	2012	5 pelayanan
36. RSU Delima Medan	2012	5 pelayanan
37. RSU Bina Kasih Medan	2012	5 pelayanan
38. RSIA Sri Ratu	2012	5 pelayanan
39. Martha Priska-Medan	2011	16 Pelayanan
40. HKBP Balige	2011	5 Pelayanan
41. Vita Insani – P. Siantar	2011	5 Pelayanan
42. Islam Malahayati	2011	5 Pelayanan



RUMAH SAKIT	TERAKREDITASI	
	TAHUN	JENIS PELAYANAN
43. Harapan – Siantar	2011	5 Pelayanan
44. Rumkit Tk. II Putri Hijau	2011	5 Pelayanan
45. Rumkit Tk. IV – P. Siantar	2011	5 Pelayanan
46. Rumkit Binjai	2011	5 Pelayanan
47. RS Bhayangkara T. IV Tebing Tinggi	2011	5 Pelayanan
48. Permata madina	2010	5 Pelayanan
49. Advent - Medan	2009	5 Pelayanan
50. Bhayangkara Medan	2009	5 Pelayanan
51. Imelda – Medan	2008	5 Pelayanan
52. Elisabeth-Medan	2006	12 Pelayanan
53. PTPN II Temb. Deli	2005	5 Pelayanan
54. Herna – Medan	2002	5 Pelayanan
55. Haji Medan	2002	5 Pelayanan

Sumber: Laporan Bidang Jaminan dan Sarana Kesehatan, 2014

6. Persentase rumah sakit yang melaksanakan penetapan kelas dan yang menerapkan standard sarana dan prasarana

Sampai dengan akhir tahun 2014, dari 208 RS yang terdapat di Provinsi Sumatera Utara, terdapat 99 RS yang telah melakukan penetapan kelas. Persentase ini mengalami peningkatan sebanyak 37 RS dibandingkan tahun 2013 yaitu 62 RS, tahun dan 2012 yaitu 53 RSU. Walaupun mengalami peningkatan, namun pencapaian tahun 2014 belum mampu mencapai target indikator kinerja yang ditetapkan yaitu 135 RS.



Tabel 73
Penetapan Kelas Rumah Sakit Sampai Tahun 2014

NO	RUMAH SAKIT	KELAS	TAHUN PENETAPAN KELAS
	RSU PEMERINTAH		
1	RSUD Sipirok	C	1999
2	RSUD Tarutung	B	2000
3	RSUD Rantau Prapat	B	2009
4	RSUD Parapat	D	1994
5	RSUD Pakam Deli Serdang	B	2008
6	RSUD Dolok Sanggul	C	1999
7	RSUD Dr. Hardianus Sinaga Samosir	C	2008
8	RSUD Sultan Sulaiman Sergej	C	2008
9	RSUD Dr. F.L Tobing Sibolga	B	2009
10	RSUD Dr. Tengku Mansyur Tj. Balai	C	1987
11	RSUD Dr. Djasamen Saragih Pematang Siantara	B	1992
12	RSUD Dr. Kumpulan Pane Tebing Tinggi	B	2009
13	RSUD Dr. Pirngadi Medan	B Pend	2007
14	RSUD Dr. Djoelham Binjai	B	2008
15	RSUD Padang Sidempuan	B	1999
16	RSU TNI-AL Tk. III Komang Makes	D	2012
17.	RSU AU Abdul Malik Lanud Medan	D	2013
18.	RSUD Tanjung Pura Langkat	C	2014
19.	RSUD H. Abdul Manan Simatupang	C	2014
20	RSU Bhayangkara	B	2014
21.	RSU USU	C	2014
22.	RSUD Pandan Tapanuli Tengah	C	2014
	RSU SWASTA		
23	RSU Mitra Sejati Medan	C	2009
24	RSU Martha Friska Medan	B	2009
25	RSU Sembiring Delitua	C	2009
26	RSU Imelda Pekerja Indonesia Medan	B	2009
27	RSU Permata Bunda Medan	B	2010
28	RSU Badrul Aini Medan	C	2010
30	RSU Sarah Medan	D	2010
31	RSU Sari Mutiara Medan	B	2010
32	RSU Nur'aini Kota Pinang	D	2010
33	RSU Herna Tebing Tinggi	D	2010
34	RSIA Eva	C	2010
35	RSU Advent Medan	C	2011
36	RSU Estomihi	C	2011
37	RSU Colombia Asia	B	2011



NO	RUMAH SAKIT	KELAS	TAHUN PENETAPAN KELAS
38	RSU Deli	C	2011
39	RSU Sembiring Deli Tua	B	2011
40	RSU Grand Medistra	B	2011
41.	RSU Sinar Husni Deli Serdang	D	2011
42.	RSU Melati Perbungan	D	2011
43.	RSU Rumkit Tk. II Putri Hijau	B	2011
44.	RSU Artha Medika Binjai	C	2011
45.	RSU Latersia Binjai	C	2011
46.	RSU Bina Kasih Medan	B	2012
47.	RSU Bidadari Binjai	C	2012
48.	RSU Sari Mutiara Lubuk Pakam	C	2012
49.	RSU Ameta Sejahtera	D	2012
50.	RSU Delima Medan	D	2012
51.	RSU Sundari Medan	C	2012
52.	RSU Methodist Medan	C	2012
53.	RSU Sufina Aziz Medan	D	2012
54.	RSU Bunda Thamrin Medan	C	2012
55.	RSU Susana Wesley Medan	C	2012
56.	RSU Sinar Husni Medan	C	2012
57.	RSK Accuplast Medan	C	2012
58.	RSK Mata Medan Baru	C	2012
59	RSIA Stella Maris Medan	C	2012
60.	RSU Islam Malahayati Medan	C	2013
61.	RSU Horas Insani P. Siantar	C	2013
62.	RSU Bandung Medan	C	2013
63.	RSU Mitra Sehat Deli Serdang	D	2013
64.	RSU Mitra Sejati Medan	B	2013
65.	RSU Patar Asih Medan	C	2013
66.	RSU Murni Teguh Memorial Hospital	B	2013
67.	RSU Stella Maris Nias Selatan	C	2013
68.	RSIA Sri Ratu	C	2014
69.	RSU Siti Hajar	C	2014
70.	RSU Rahmad Hidayah	C	2014
71.	RSU Madani	C	2014
72.	RSU Materna	C	2014
73.	RSU Prof Boloni	C	2014
74.	RSU Setio Husodo	C	2014
75.	RSU Keliat Langkat	D	2014
76.	RSU Bersama Langkat	D	2014
77.	RSU Sapta Husada Langkat	D	2014
78.	RSU Tere Margareth Langkat	D	2014
79.	RSU Santa Elisabeth	B	2014
80.	Rumkit Tk. IV 01.07.03 P. Sidempuan	D	2014
81.	RSU HKBP Balige	C	2014



NO	RUMAH SAKIT	KELAS	TAHUN PENETAPAN KELAS
82.	RSU Universitas Prima Indonesia	C	2014
83.	RSU Lasmi Kartika Batubara	D	2014
84.	RSU Citra Medika Deli Serdang	D	2014
85.	RSU Al Fuady Binjai	C	2014
86.	RSU Joko Deli Serdang	D	2014
87.	RSU Tiara Pematang Siantar	D	2014
88.	RSU Glori Hotrona Medistra Tobasa	D	2014
89.	RSU Delia Langkat	D	2014
90.	RSU Herna	C	2014
91.	Rumkit Tk. IV 01.07.01 P. Siantar	C	2014
92.	RSU Mitra Medika	C	2014
93.	RSU Helvetia Deli Serdang	C	2014
94.	RSU Pertamina Langkat	C	2014
95.	RSU Vita Insani Pematang Siantar	B	2014
96.	RSU Royal Prima Medan	B	2014
97.	RSU Theotokos Deli Serdang	D	2014
98.	RSU Yoshua Deli Serdang	C	2014
99.	RSU Tuan Rondahaim Simalungun	C	2014

Sumber: Laporan Bidang Jaminan dan Sarana Kesehatan, 2014

Masih rendahnya persentase RS yang ditetapkan kelasnya merupakan salah satu penyebab masih banyaknya RS yang belum terakreditasi.

7. Persentase rumah sakit yang menerapkan standard sarana dan prasarana



Pada tahun 2010, RS yang menerapkan standard sarana dan prasarana sebanyak 15 RS (7,14%), tahun 2011 meningkat jumlahnya menjadi 24 RS (12,7%), tahun 2012 meningkat menjadi 74 RS (39,15%), tahun 2013 meningkat menjadi 81 RS (40,3%) dan tahun 2014 meningkat menjadi 91 RS (43,75%). Sembilan RS yang menerapkan standard sarana dan prasarana pada tahun 2014 yaitu RSU Helvetia, RSU Full Bethesda, RSIA Sylvani, RSU Martha Friska, RSU Royal Prima, RSU Sulfina Aziz, RSU USU, RSIA Badrul Aini dan RSK Bedah Accuplast. Walaupun mengalami peningkatan dalam jumlah, namun belum mampu mencapai target indikator yang ditetapkan yaitu 92 RS pada tahun 2014.

B. Kegiatan-kegiatan Tahun 2014

Jumlah anggaran yang dialokasikan untuk Program Upaya Kesehatan Perorangan pada tahun 2014 yaitu sebesar Rp. 11.743.433.412,- dengan kegiatan-kegiatan adalah sebagai berikut :

1. Peningkatan Pelayanan Ambulans/tay lapmer
2. Workshop Penatalaksanaan Kontrasepsi Darurat bagi RSUD Kab/Kota
3. Pertemuan Peningkatan Pelayanan Rumah Sakit Sayang Ibu dan Anak
4. Workshop Persiapan RS BLUD bagi RSUD Kab/Kota
5. Orientasi Indikator Kinerja dan Mutu Pelayanan RSUD Kab/Kota
6. Evaluasi Indikator Kinerja dan Mutu Pelayanan RSUD Kab/Kota
7. Peningkatan Kemampuan bagi Petugas Kru Pelayanan Ambulans gawat Darurat
8. Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Ambulans Gawat Darurat Terpasu
9. Pengadaan Mobil Ambulans dan Alat Pendukung Pelayanan Ambulans Gawat Darurat Terpadu
10. Sosialisasi Pelayanan Pengaduan Masyarakat ke Kab/Kota
11. Sosialisasi Pelayanan Ambulans Gawat Darurat Terpadu ke Kab/Kota



-
12. Workshop Akreditasi Rumah Sakit Versi Tahun 2012 untuk RSUD dan RS Swasta.
 13. Pertemuan Advokasi Stakeholder Akreditasi RSUD
 14. Pertemuan dalam rangka Akselerasi Penetapan Kelas RSUD
 15. Orientasi Penetapan Kelas RS
 16. Pertemuan Meningkatkan Mutu Penerapan Standard Bidang Sarana dan Peralatan Medik pada RSUD dan RS Swata Kab/Kota
 17. Orinetasi Standard Sarana dan Prasarana RS
 18. Pertemuan Meningkatkan Mutu dalam rangka Penerapan Proteksi Radiasi pada Alat Kesehatan di RSUD dan RSU Swasta.
 19. Monitoring dan Evaluasi dalam rangka Pendataan Peralatan Kesehatan RS yang Sudah/Belum Terkalibrasi.
 20. Penyediaan Makanan dan Minuman Pasien
 21. Pengadaan Perbekalan Kesehatan UPT
 22. Workshop Persiapan RS BLUD bagi 6 RSUD Kab/Kota.
 23. Penyusunan Critical Pathway di RSUD dalam rangka Kendali Mutu dan Biaya pada Pelaksanaan JKN.
 24. Penyediaan Fasilitas Perawatan Pasien Dampak Rokok DBHCHT.
- Sampai akhir tahun anggaran, realisasi fisik Program Upaya Kesehatan Perorangan adalah 97,50% dengan jumlah realisasi keuangan adalah sebesar Rp.9.732.159.870,- atau 82,87%.

➤ PROGRAM SUMBER DAYA KESEHATAN

Pencapaian Indikator Kinerja Tahun 2014

Didalam Penetapan Kinerja terdapat 4 (empat) indikator kinerja Program Sumber Daya Kesehatan yang harus dicapai pada tahun 2014, dan pencapaiannya adalah sebagai berikut:



Tabel 74
Indikator Kinerja, Target, Capaian dan Persen Capaian
Program Sumber Daya Kesehatan
Tahun 2014

NO	INDIKATOR	TARGET TAHUN 2014	CAPAIAN TAHUN 2014	% CAPAIAN
1	Persentase tenaga kesehatan yang teregistrasi	90%	64,9%	72,11%
2	Persentase penetapan angka kredit jabatan fungsional	20%	20%	100%
3	Jumlah pelatihan kesehatan aparatur dan non aparatur yang diakreditasi	20 pelatihan	20 pelatihan	100%
4	Ratio tenaga medis per puskesmas	Minimal 1	0,92	92%

Dari persen capaian terlihat, bahwa persen pencapaian indikator Program Sumber Daya Kesehatan terdapat satu indikator (25%) berkategori CUKUP yaitu indikator ke-1 dan satu indikator (25%) berkategori BAIK yaitu indikator ke-4 serta dua indikator (50%) yaitu indikator ke-2 dan 3 berkategori SANGAT BAIK. Penjelasan tentang pencapaian masing-masing indikator serta analisa kecenderungan pencapaian sampai tahun 2014, adalah sebagai berikut:

1. Persentase tenaga kesehatan yang teregistrasi

Pada tahun 2014, Surat Tanda Registrasi (STR) yang sudah selesai diproses sejumlah 18.250 orang dari 28.088 (64,9%) berkas usulan yang dikirim ke Majelis Tenaga Kesehatan Indonesia (MTKI) di Jakarta. Pada berkas usulan yang dikirim ke Majelis Tenaga Kesehatan Indonesia (MTKI) di Jakarta. Angka ini mengalami peningkatan dibandingkan tahun 2013, dimana STR yang selesai diproses sejumlah 13.527 orang dari 24.861 (54,41%) usulan dan tahun 2012 yaitu 2.978 STR dari 21.672 usulan (13,74%).

Walaupun mengalami peningkatan namun pencapaian ini belum mampu mencapai target indikator yang ditetapkan yaitu 90% pada tahun 2014.



2. Persentase penetapan angka kredit jabatan fungsional

Di Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Utara terdapat 500 pegawai dengan jabatan fungsional. Pada tahun 2014 dilaporkan sebanyak 100 orang (20%) telah mengusulkan Daftar Usulan Penetapan Angka Kredit (DUPAK) dan telah ditetapkan. Mereka yang mengusulkan itu terdiri dari dokter (20 orang), Analis Kesehatan (10 orang), Bidan (10 orang), Perawat (30 orang) Sanitarian (14 orang) dan Gizi (6 orang). Dengan demikian target indikator kinerja yang ditetapkan yaitu 20% pada tahun 2014 sudah tercapai.

3. Jumlah pelatihan aparatur dan non aparatur yang terakreditasi

Pada tahun 2014 terdapat 20 pelatihan yang terakreditasi, jumlah ini tidak mengalami peningkatan dibandingkan tahun 2013 yaitu 20 pelatihan, tahun 2012 yaitu 3 pelatihan dan tahun 2011 sebanyak 11 pelatihan. Adapun pelatihan yang dilaksanakan pada tahun 2014 yaitu:

- a. Pelatihan Item Devt
- b. Pelatihan Item Review
- c. Pelatihan Kepemimpinan Puskesmas Angkatan I
- d. Pelatihan Kepemimpinan Puskesmas Angkatan II
- e. Pelatihan TOC
- f. Pelatihan Acupressure bagi petugas puskesmas
- g. Pelatihan Tenaga Penyuluh Keamanan Pangan
- h. Pelatihan Jabatan Fungsional Penyuluh Kesehatan Masyarakat
- i. Pelatihan Jaminan Kesehatan bagi Tenaga Puskesmas Angkatan I
- j. Pelatihan Jaminan Kesehatan bagi Tenaga Puskesmas Angkatan II
- k. Pelatihan Jaminan Kesehatan bagi Tenaga Puskesmas Angkatan III
- l. Pelatihan Jaminan Kesehatan bagi Tenaga Puskesmas Angkatan IV
- m. Pelatihan Promosi Kesehatan bagi Tenaga Puskesmas Angkatan I
- n. Pelatihan Promosi Kesehatan bagi Tenaga Puskesmas Angkatan I
- o. Pelatihan Manajemen Imunisasi Rumah Sakit Angkatan I
- p. Pelatihan Manajemen Imunisasi Rumah Sakit Angkatan I



- q. Pelatihan EVM Kab/Kota
- r. Pelatihan Manajemen Imunisasi Kab/Kota
- s. Pelatihan TOT Sanitasi Total Berbasis Masyarakat
- t. Pelatihan Pengawas Kualitas Air

4. *Ratio tenaga medis per puskesmas*

Pada tahun 2014, dari 570 puskesmas yang ada di Sumatera Utara terdapat 526 puskesmas yang telah memiliki tenaga medis setidaknya 1 orang.

Puskesmas yang belum memiliki tenaga medis sebanyak 44 puskesmas, sehingga ratio tenaga medis per puskesmas mencapai 0,92; angka ini sedikit lebih tinggi dari pencapaian di tahun 2013 yaitu 0,91 namun lebih rendah dari tahun 2012 yaitu 0,97. Penambahan jumlah puskesmas tidak diiringi dengan ketersediaan tenaga medis di puskesmas, hal ini terlihat bahwa pada tahun 2013 terdapat 569 puskesmas terdapat 52 puskesmas yang tidak memiliki tenaga medis, dan pada tahun 2012 dari 546 puskesmas di Sumatera Utara terdapat 18 puskesmas yang tidak memiliki tenaga medis.

Tabel 75
Puskesmas yang tidak memiliki tenaga medis
di Provinsi Sumatera Utara Tahun 2014

NO	PUSKESMAS	KAB/KOTA
1	Kedai Sianam	Batubara
2	Aek Loba	Asahan
3	Andam Dewi	Tapanuli Tengah
4	Sorkam	Tapanuli Tengah
5	Batang Bulu	Padang Lawas
6	Simundol	Padang Lawas Utara
7	Sipiongot	Padang Lawas Utara
8	Sibio-bio	Padang Lawas Utara
9	Simolono	Nias
10	Ulugawo	Nias
11	Ma'u	Nias



NO	PUSKESMAS	KAB/KOTA
12	Oloro	Gunung Sitoli
13	Alo'oa	Gunung Sitoli
14	Lahewa Timur	Nias Utara
15	Tugala Oyo	Nias Utara
16	Hilimegai	Nias Selatan
17	Hibala	Nias Selatan
18	Idanotae	Nias Selatan
19	Mazo	Nias Selatan
20	Ulu Idanotae	Nias Selatan
21	Siduaori	Nias Selatan
22	Umbunasi	Nias Selatan
25	Susua	Nias Selatan
24	Onohasumba	Nias Selatan
25	O'ou	Nias Selatan
26	Hilisalawa Ahai	Nias Selatan
27	Ulususua	Nias Selatan
28	Somambawa	Nias Selatan
29	Hilionombasela	Nias Selatan
30	Uluoyo	Nias Selatan
31	Simuk	Nias Selatan
32	Pulau Batu Barat	Nias Selatan
33	Pulau Batu Timur	Nias Selatan
34	Pulau Batu Utara	Nias Selatan
35	Tanah Masa	Nias Selatan
36	Hilisimaetano	Nias Selatan
37	Boronadu	Nias Selatan
38	Aramo	Nias Selatan
39	Moro'o	Nias Barat
40	Ulu Moro'o	Nias Barat
41	Baringin	Mandailing Natal
42	Sibanggorjae	Mandailing Natal
43	Patilumbanmudik	Mandailing Natal
44	Singkuang	Mandailing Natal



Dari tabel terlihat bahwa dari 44 puskesmas yang tidak memiliki tenaga medis, sebanyak 32 puskesmas (72,72%) berada di kepulauan Nias; begitu juga halnya pada tahun 2013 dari 52 puskesmas yang tidak memiliki tenaga medis sebanyak 65% (34 puskesmas) berada di Kepulauan Nias. Ini menunjukkan perkembangan ketersediaan tenaga medis di puskesmas di kepulauan Nias berlangsung sangat lambat, yang berdampak pada kualitas pelayanan kesehatan.

B. Kegiatan-kegiatan Tahun 2014

Jumlah anggaran yang dialokasikan untuk Program Sumber Daya Kesehatan pada tahun 2014 yaitu sebesar Rp. 1.937.052.000,- dengan kegiatan-kegiatan adalah sebagai berikut :

1. Pertemuan Item Review dan Item Dept dalam rangka Uji Kompetensi Tenaga Kesehatan
2. Pertemuan Koordinasi Kompetensi Tenaga Kesehatan
3. Supervisi dan Pengumpulan Data Peserta Uji Kompetensi Kab/Kota
4. Penilaian Tenaga Kesehatan Teladan
5. Pelatihan Kepemimpinan Puskesmas
6. Pelatihan bagi Penyelenggara Pelatihan/Training Officer Course (TOC)
7. Pertemuan Penilaian Penetapan Angka Kredit (PAK) Fungsional Apoteker
8. Pertemuan Penilaian Penetapan Angka Kredit (PAK) Fungsional Nutritionist
9. Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Perencanaan dan Pendayagunaan SDK
10. Supervisi dan Bimbingan Teknis Institusi Pendidikan Tenaga Kesehatan
11. Operasional Pengelolaan Sumber Daya Kesehatan (SDK)
12. Pertemuan Penilaian Penetapan Angka Kredit (PAK) Fungsional Fisioterapi
13. Pertemuan Penilaian Penetapan Angka Kredit (PAK) Fungsional Sanitarian, dan keseluruhan kegiatan dapat dilaksanakan.



Sampai akhir tahun anggaran, realisasi fisik Program Sumber Daya Kesehatan adalah 97,50% dengan jumlah realisasi keuangan adalah sebesar Rp. 1.835.926,- atau 94,78%.

1.1.2 PROGRAM KEBIJAKAN DAN MANAJEMEN PEMBANGUNAN KESEHATAN

A. Pencapaian Indikator Kinerja Tahun 2014

Didalam Penetapan Kinerja terdapat 5 (lima) indikator kinerja Program Kebijakan dan Manajemen Pembangunan Kesehatan yang harus dicapai pada tahun 2014, dan pencapaiannya adalah sebagai berikut:

Tabel 76
Indikator Kinerja, Target, Capaian dan Persen Capaian
Program Kebijakan Manajemen dan Pembangunan Kesehatan
Tahun 2014

NO	INDIKATOR	TARGET TAHUN 2014	CAPAIAN TAHUN 2014	% CAPAIAN
1	Persentase penduduk miskin yang menjadi peserta jaminan kesehatan	75%	100%	133,33%
2	Persentase penduduk yang telah terjamin pemeliharaan kesehatan	60%	49,61%	82,68%
3	Jumlah dokumen perencanaan dan penganggaran dan kesehatan yang dihasilkan per tahun	5 dok/thn	5 dok/thn	100%
4	Jumlah dokumen monitoring, pengendalian dan evaluasi yang dihasilkan per tahun	7 dok/thn	7 dok/thn	100%
5	Persentase Kab/Kota memiliki Profil Kesehatan	100%	100%	100%

Dari persen capaian terlihat, bahwa dari 5 indikator kinerja Program Kebijakan dan Manajemen Pembangunan Kesehatan, hanya 1 indikator (20%) yaitu indikator ke-2 yang berkategori BAIK, cukupkan empat indikator lainnya



(80%) berkategori SANGAT BAIK. Penjelasan tentang pencapaian masing-masing indikator serta analisa kecenderungan pencapaian sejak tahun 2009, adalah sebagai berikut:

1. Persentase penduduk miskin yang menjadi peserta jaminan kesehatan

Berdasarkan data BPS jumlah penduduk miskin di Sumatera Utara adalah sebanyak 1.416.400 orang atau sekitar 10,39% dari total penduduk. Namun berdasarkan laporan BPJS, jumlah masyarakat yang menjadi Penerima Bantuan Iuran (PBI) adalah sebanyak 4.191.454 jiwa atau sekitar 30%. Dengan demikian seluruh masyarakat miskin (100%) di Sumatera Utara telah memperoleh jaminan pemeliharaan kesehatan.

2. Persentase penduduk yang telah terjamin pemeliharaan kesehatan

Sejak 1 Januari 2014 telah dilaksanakan Jaminan Sosial Nasional (JKN) bidang Kesehatan dengan Askes sebagai badan penyelenggaranya. Bila pada tahun 2013, jumlah penduduk yang telah memiliki jaminan kesehatan yaitu 7.243.891 jiwa, maka oleh karena adanya penerapan JKN ini maka jumlah penduduk yang telah tercover di dalam JKN adalah sebanyak 6.611.083 jiwa atau 49,61%, mengalami penurunan dibandingkan tahun 2013 yaitu 54,8%. Adapun jumlah peserta Program Jaminan Kesehatan Nasional dirinci menurut jenis kepesertaan adalah sebagai berikut:



Tabel 77
Jumlah Peserta Jaminan Pemeliharaan Kesehatan diperinci
Menurut Jenisnya di Provinsi Sumatera Utara
Tahun 2014

NO	JENIS JAMINAN PEMELIHARAAN KESEHATAN	JUMLAH
1	PENERIMA BANTUAN IURAN (PBI)	4.191.454
2	PEKERJA PENERIMA UPAH	1.236.608
3	PEKERJA BUKAN PENERIMA UPAH	407.691
4	BUKAN PEKERJA	240.911
5	JAMKESDA	534.419
JUMLAH		6.611.083

Sumber : Laporan Bidang Jaminan dan Sarana Kesehatan, 2014

Oleh karena penerapan sistem JKN, maka pada tahun 2014 target kinerja yang ditetapkan yaitu 60% belum mampu dicapai.

1. Jumlah dokumen perencanaan, pembiayaan, monitoring dan evaluasi yang dihasilkan

Dokumen-dokumen perencanaan dan pembiayaan yang dihasilkan sebanyak 7 dokumen pada tahun 2014, yaitu: Rencana Kerja (Renja), RKA, DPA, Penetapan Kinerja, Neraca Keuangan, Catatan Atas Laporan Keuangan (CALK) dan Inventaris Barang dan Jasa.

Dokumen monitoring dan evaluasi yang dihasilkan sebanyak 7 dokumen yaitu: Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP), Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Gubernur (LKPj), Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD), Laporan Rencana Kerja (Renja)/Triwulan, Laporan Realisasi Keuangan (Bulanan), Laporan Tahunan Kegiatan/Program, dan Laporan Semester.



2. Persentase Kab/Kota yang memiliki Profil Kesehatan dan penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan(SIK)

Dalam pembuatan Profil Kesehatan, seluruh Kabupaten/Kota telah membuat Profil Kesehatan Tahun 2013. Melalui dana APBN telah terbangun SIKNAS online (Sistem Informasi Kesehatan Nasional), yang menghubungkan Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota, Provinsi dan Kemenkes, sehingga informasi kesehatan yang dibutuhkan dapat dilihat secara langsung per kabupaten/kota.

Kegiatan-kegiatan Tahun 2014

Jumlah anggaran yang dialokasikan untuk Program KMPK pada tahun 2014 yaitu sebesar Rp. 123.548.458.335,- dengan kegiatan-kegiatan adalah sebagai berikut:

1. Sustainability PHP-II (Operasional BP-JHC dan Rapat-rapat Lintas Program dan Lintas Sektoral Tingkat Provinsi)
2. Operasional Pengelolaan Program Kebijakan dan Manajemen Pembangunan Kesehatan.
3. Pengobatan Gratis bagi Penduduk Sumatera Utara (Jamkesda)
4. Koordinasi Pembangunan Kesehatan Provinsi Sumatera Utara
5. Musyaawarah Rencana Pembangunan (Musrenbang) Forum SKPD Bidang Kesehatan Tahun 2014
6. Pembinaan Tenaga Perencana Kesehatan Kab/Kota
7. Sinkronisasi Perencanaan dan Penganggaran serta Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Anggaran SKPD
8. Penyusunan dan Pembuatan Laporan Tahunan
9. Evaluasi Pelaksanaan Program/Kegiatan Kesehatan.



10. Penyusunan dan Pembuatan Buku Semeste dan Hasil-hasil Pembangunan Kesehatan di Kab/Kota se-Sumatera Utara
11. Penyusunan Profil Kesehatan Tahun 2014-11-21
12. Pertemuan Pengelolaan SIK dan Bank data Kesehatan
13. Pembinaan dan Peningkatan Manajemen Data Kesehatan ke Kab/Kota
14. Sistem Informasi Manajemen Puskesmas (SIMPUS) dan Pengolahan Data SP2TP
15. Penyusunan Laporan Keuangan Semester I dan Semester II Tahun 2014
16. Tindak Lanjut Penyelesaian Laporan Hasil pemeriksaan (LHP)
17. Pemanjapan Pesiapan Pelaksanaan BPJS
18. Rapat Koordinasi Percepatan Pelaksanaan Kepesertaan Semesta
19. Penyusunan dan Penyelarasan Renstra Dinkes 2013-2014 Pasca Penetapan Perda RPJMD 2013-2014.
20. Penyusunan Standard Pelayanan dan Standard Operasional Prosedur
21. Peningkatan Kapasitas Pengelola Jaminan Kesehatan Nasional (JKN)
22. Kemitraan Pemberdayaan Masyarakat dalam Penurunan Ibu dan Anak.

Sampai akhir tahun anggaran, realisasi fisik Program Kebijakan dan Manajemen Pembangunan Kesehatan adalah 80,46% dengan jumlah realisasi keuangan adalah sebesar Rp. 98.968.236.654,- atau 80,10%.



Sasaran Strategis-4 : Terwujudnya Infrastruktur Sosial Ekonomi dan Pengembangan Wilayah

Tabel 78
Capaian Kinerja Sasaran Strategis ke-4

INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI KINERJA	CAPAIAN KINERJA (%)
(1)	(2)	(3)	(4)
1. Proporsi panjang jaringan jalan dalam kondisi mantap	73,69 %	74,42 %	101
2. Optimalisasi Jaringan Irigasi	66,00 %	61,31 %	92,89
3. Tersedianya sumber air baku (waduk/embung/ situ)	30 (waduk/em bung/ situ)	21 (waduk/em bung/ situ)	70
4. Jumlah Kab/Kota yang mendapatkan pembinaan Kelembagaan Pengelola Irigasi (SKPD,KOMIR, P3A, GP3A, IP3A)	4 Kab/Kota	-	-
5. Guardrail terbangun (m)	1.800 m	1.800 m	100
6. Angkutan BRT Mebidang (koridor)	2 koridor	2 Koridor	100
7. FS dan DED Pelabuhan Sungai, Danau dan Penyeberangan (Dokumen)	6 Dokumen	6 Dokumen	100
8. FS dan DED Pelabuhan Laut (<i>Pengumpan Regional</i>) (Dokumen)	-	-	-
9. Jumlah Delinator (buah)	3000 Buah	3000	100
10. Jumlah Paku Jalan (buah)	-	-	-
11. Dokumen dan Regulasi Perencanaan KSP (<i>Kawasan Stategis Provinsi</i>)	2 Kawasan	2	100
12. Regulasi Daerah terhadap Pengendalian Ruang (Regulasi)	1 Regulasi	1	100
13. Luas RTH (<i>Ruang Terbuka Hijau</i>) Perkotaan (%)	11 %	1	74,50



Sebagaimana Tabel di atas dapat dijelaskan bahwa Sasaran Strategis ke-4 yaitu **“TERWUJUDNYA INFRASTRUKTUR SOSIAL EKONOMI DAN PENGEMBANGAN WILAYAH”**, untuk keberhasilan maupun kegagalan pada Sasaran Strategis ini diukur dengan menggunakan sebanyak 13 (tiga belas) Indikator Kinerja dan secara umum menunjukkan capaian kinerja yang SANGAT BAIK.

Sementara itu terdapat 1 (satu) indikator kinerja yang belum mencapai target yang diperjanjikan yaitu Indikator Kinerja **“Jumlah Kab/Kota yang mendapatkan pembinaan Kelembagaan Pengelola Irigasi (SKPD,KOMIR, P3A, GP3A, IP3A)”**. Sedangkan 2 (dua) Indikator Kinerja yang lain, untuk Tahun 2014 belum ada target yang ditetapkan untuk dicapai sebagaimana Dokumen Penetapan Kinerja Tahun 2014, yaitu : Indikator Kinerja **“FS dan DED Pelabuhan Sungai, Danau”** dan **“Penyeberangan (Dokumen) dan Jumlah Paku Jalan”**, yang merupakan kinerja pada sektor perhubungan

Capaian Kinerja dari masing-masing Indikator Kinerja yang digunakan dapat diuraikan sebagai berikut :

- Capaian Indikator Kinerja **“Proporsi panjang jaringan jalan dalam kondisi mantap (%)”**, menunjukkan bahwa relisasi kinerja telah tercapai sebagaimana yang diperjanjikan di awal tahun anggaran 2014 yang kemudian ditetapkan pada Dokumen Penetapan Kinerja Tahun 2014. Infrastruktur Jaringan Jalan di Provinsi Sumatera Utara sepanjang 38.715,29 Km yang terdiri dari Jalan Nasional sepanjang 2.249,66 Km, Jalan Provinsi sepanjang 3.048,50 Km dan Jalan Kabupaten/Kota sepanjang 33.367, 13 Km.

Pada Tahun 2013 proporsi panjang jaringan Jalan Nasional dalam kondisi mantap adalah sebesar 81,51 %, Jalan Provinsi dalam kondisi mantap sebesar 69,60 % dan Jalan Kabupaten/Kota dalam kondisi mantap sebesar 57,95 %.



Pada Tahun 2014 proporsi Jaringan Jalan Provinsi dalam kondisi mantap sebesar 74,42 %, di sini dapat kita bandingkan dengan kondisi Jalan Provinsi dalam kondisi mantap Tahun 2013 sebesar 69,60 %. Kondisi Jalan Provinsi dalam kondisi mantap pada Tahun 2014 mengalami peningkatan sebesar 4,82 %.

Di bawah ini dapat kita lihat tabel kondisi Jalan Provinsi akhir Tahun 2013 dan kondisi Jalan Provinsi akhir Tahun 2014.

Tabel 79. Kondisi Jalan Provinsi Tahun 2013

TAHUN	BAIK (KM)	SEDANG (KM)	R.RINGAN (KM)	R.BERAT (KM)
2013	1,325.23	796.50	412.08	514.68

Tabel 80. Kondisi Jalan Provinsi Tahun 2014

TAHUN	BAIK (KM)	SEDANG (KM)	RUSAK RINGAN (KM)	RUSAK BERAT (KM)
2014	1,190.19	1,078.56	259.00	520.75

Sumber : Dinas Bina Marga Prov. Sumut, Tahun 2014.

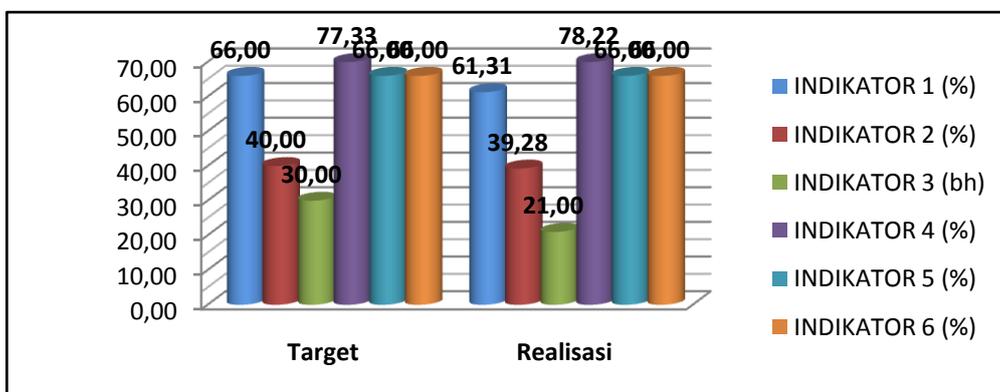
Dari tabel di atas dapat diuraikan kondisi Jalan Provinsi dalam Kondisi Mantap yang terdiri dari Kondisi Baik dan Sedang, mengalami peningkatan di Tahun 2014.

Kondisi Jalan Provinsi dalam Kondisi Mantap di Tahun 2014 sepanjang 2.268,75 Km dibandingkan dengan Tahun 2013 Kondisi Jalan Provinsi dalam Kondisi Mantap 2.121,73 Km. Kondisi Jalan Provinsi dalam Kondisi Mantap dari Tahun 2013 sampai dengan Tahun 2014 mengalami Peningkatan sepanjang 147,02 Km.



- Capaian Indikator Kinerja “**Optimalisasi Jaringan Irigasi**”, sebagaimana telah ditetapkan target kinerja sebesar 66,00 %. Pada akhir tahun anggaran realisasi kinerja sebesar 61,31 %. Persentase capaian indikator kinerja optimalisasi jaringan irigasi untuk Tahun Anggaran 2014 sebesar 92,90 % atau dengan kategori **SANGAT BAIK**.
- Capaian Indikator Kinerja “**Tersedianya sumber air baku (waduk/embung/situ)**”, bahwa sebagaimana telah ditetapkan target kinerja sebesar 30 bh. Pada akhir tahun anggaran realisasi kinerja sebesar 21 bh. Persentase capaian indikator tersedianya sumber air baku pada daerah kekurangan air di musim hujan dalam bentuk waduk / Embung / Situ-situ untuk Tahun Anggaran 2014 sebesar 70,00 % atau dengan Kategori **BAIK**.
- Capaian Indikator Kinerja “**Jumlah Kab/Kota yang mendapatkan pembinaan Kelembagaan Pengelola Irigasi (SKPD,KOMIR, P3A, GP3A, IP3A)**”, Pada Indikator Kinerja Utama ini adalah merupakan program/kegiatan muatan kelembagaan pengelolaan irigasi partisipatif yang dilaksanakan Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air Provinsi Sumatera Utara, dan ternyata pada tahun 2014 belum ada kegiatan yang dilaksanakan Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air Provinsi Sumatera Utara karena program ini merupakan program baru.

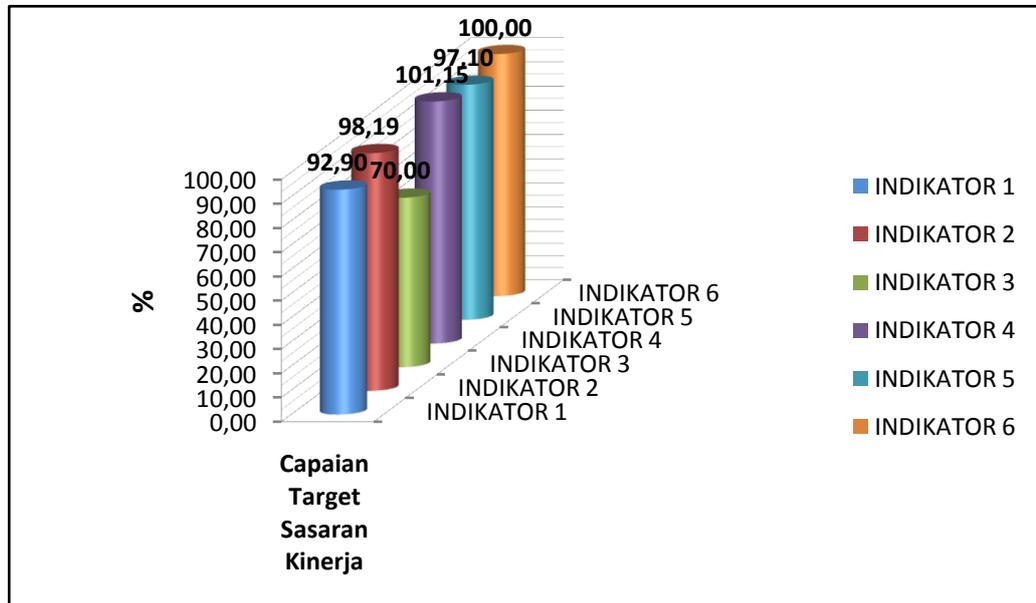
Grafik 29
Perbandingan antara target dan realisasi kinerja Tahun Anggaran 2014



Sumber : Dinas PSDA Prov. Sumut, Tahun 2014



Grafik 30.
Persentase capaian kinerja masing-masing indikator.



Sumber : Dinas PSDA Prov. Sumut, Tahun 2014

Pencapaian kinerja menunjukkan dari 1 (satu) sasaran dengan 7 (tujuh Indikator) yang telah ditetapkan dalam Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air Provinsi Sumatera Utara sesuai dengan Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran pada RPJMD Provinsi Sumatera Utara Tahun 2013-2018 adalah 6 indikator berhasil mencapai **kinerja sangat baik (100% - 80%)** dan **1 indikator mencapai kinerja baik (79,99% - 60,00%)**.

Perbandingan realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun 2014 dengan tahun 2013 per indikator dapat dilihat pada tabel di bawah ini :



Tabel 81.
Perbandingan realisasi kinerja serta capaian kinerja Tahun Anggaran 2014
dengan Tahun Anggaran 2013.

No.	INDIKATOR/PROGRAM/KEGIATAN	KONDISI KINERJA PADA TAHUN 2013		REALISASI SAMPAI TAHUN 2014	
1.	Optimalisasi Jaringan Irigasi (%)	60,00	%	61,31	%
	Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan Lainnya				
	O&P jaringan irigasi (1.000 ha – 3.000 ha) dan lintas Kab/Kota pada UPT PSDA	73.318	Ha	75.201	Ha
	Rehabilitasi dan Peningkatan Infrastruktur Irigasi pada DI.				
	- <i>Bangunan Irigasi</i>	28	bh	18	bh
	- <i>Peningkatan saluran, pasangan/tembok penahan</i>	9.700	m'	12.122	m'
	- <i>Normalisasi</i>	7.900	m'	1.200	m'
	Keg. Program WISMP - II	1	Kegiatan	-	-
	Perencanaan, Pengendalian, Pengawasan dan Pembinaan O&P Jaringan Irigasi dan Rawa	1	Tahun	1	Tahun
	Konsultasi O&P Pengelolaan SDA	1	Laporan Kegiatan	1	Laporan Kegiatan
	Koordinasi Pembina P3A untuk Pemberdayaan P3A/GP3A/IP3A	1	Tahun	-	-
2.	Optimalisasi Jaringan Rawa (%)	35			
	Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan Lainnya				
	O&P jaringan rawa (1.000 ha – 3.000 ha) dan lintas Kab/Kota pada UPT PSDA	55.232	Ha	52.832	Ha
	Rehabilitasi dan Peningkatan Infrastruktur Rawa pada DR.				
	- <i>Bangunan Rawa</i>	3	bh	9	bh
	- <i>Normalisasi</i>	39.860	m'	7.000	m'
3.	Tersedianya sumber air baku pada daerah kekurangan air di musim hujan dalam bentuk Waduk / Embung / Situ-situ (bh)				
	Program Penyediaan dan Pengelolaan Air Baku				
	Rehabilitasi dan pembangunan sarana dan prasarana air baku	7	Unit	1	Unit
4.	Meningkatnya kestabilan tebing atau pantai dan kelancaran aliran air sungai serta semakin stabilnya alur sungai terhadap daya rusak air dan berkurangnya luasan genangan banjir (%)				
	Program Pembangunan dan Pengelolaan Pengendalian Banjir dan Pengamanan Pantai				
	Perencanaan, pengendalian, pengawasan dan pembinaan E & P sungai pada Provinsi Sumatera Utara	1	Tahun	1	Tahun
	E & P sungai dan bangunan sungai dan pantai pada 10 UPT PSDA	10	UPT/Tahun	10	UPT/Tahun
	Monitoring dan evaluasi kerusakan infrastuktur sumber daya air akibat bencana alam	1	Tahun	1	Tahun
	Rehabilitasi dan pembangunan infrastruktur pengendalian banjir dan pengamanan pantai				
	<i>Perkuatan Tebing</i>	3.810	m'	3.089	m'
	<i>Normalisasi / Tanggul Banjir</i>	106.200	m'	36.300	m'
	<i>Bangunan Air</i>	0	bh	1	Bh



5.	Terlaksananya Kordinasi Pengelolaan SDA Provinsi Sumatera Utara dan Kordinasi Pengelola SDA pada wilayah sungai melalui kegiatan Dewan Sumber Daya Air dan Komisi Irigasi dan wadahnya lainnya (%/Dok/Keg)			
	Program Pengembangan, Pengelolaan, dan Konservasi Sungai, danau dan Sumber Daya Air Lainnya			
	Kegiatan wadah koordinasi/Dewan SDA Sumber Daya Air Provinsi Sumatera Utara	3	Kegiatan	5 Kegiatan
	Kegiatan Peringatan Hari Air Sedunia Provinsi Sumatera Utara	1	Kegiatan	1 Kegiatan
	Operasional Kegiatan Komisi Irigasi Provinsi Sumatera Utara	2	Kegiatan	- -
	Pengawasan dan penelitian pemberian rekomendasi teknis perijinan atas penyediaan, pengambilan, peruntukan, penggunaan sumber air permukaan umum (APU)	1	Dokumen	3 Dokumen
	Pengelolaan Hidrologi/Hidrometri dan data/informasi sumber daya air	1	Dokumen	5 Dokumen
	Keg. Program WISMP - II	1	Dokumen	2 Dokumen
6.	Tercapainya peningkatan ketrampilan SDM dalam melaksanakan pengelolaan SDA pada Dinas Pengelolaan SDA Provinsi Sumut (%/Dokumen,Laporan UPT per Tahun)			
	Program Pembinaan, Pengaturan dan Perencanaan Pengembangan Sumber Daya Air			
	Pembinaan perencanaan program dan kegiatan pembangunan pada SKPD bidang sumber daya air	3	Dokumen	1 Dokumen
	Pembinaan dan perencanaan teknis pengembangan dan pembangunan sumber daya air	1	Dokumen	1 Dokumen
	Monitoring pengawasan dan evaluasi pelaksanaan infrastruktur pengelolaan sumber daya air	1	Dokumen	1 Dokumen
	Penyusunan Detail Engineering Design (DED)	-	-	1 Dokumen
	Studi	-	-	2 Dokumen
	Survey Investigasi Design	-	-	1 Dokumen
	Penyusunan Pola Pengelolaan Sumber Daya Air Wilayah Sungai	2	Kegiatan	- -
	Operasional untuk survey dan perencanaan kegiatan perbaikan kerusakan sarana dan prasarana SDA dan menunjang kegiatan Wadah SDA pada 10 UPT PSDA	10	Laporan UPT/ Tahun	10 Laporan UPT/ Tahun
	Penataan ketatalaksanaan dan pemberdayaan pengelola sumber daya air	1	Kali	- -

Sumber : Dinas PSDA Prov. Sumut, Tahun 2014

Pada Tahun Anggaran 2014 ini, beberapa masalah yang dihadapi dalam pelaksanaan program/kegiatan adalah sebagai berikut :

1. Keterlambatan pengesahan DPA, sehingga pelaksanaan proses pelelangan baru dapat dimulai pada Bulan Juli 2014 dan terkontrak pada Bulan September 2014.
2. Adanya kesalahan dalam penginputan data ke dalam aplikasi SIMDA yang berakibat dari jumlah alokasi dana APBD Tahun Anggaran 2014 untuk program pendukung dan program pembangunan (urusan wajib / prioritas) sebesar Rp.



79.330.400.000,- yang dapat dilaksanakan hanya sebesar Rp 859.000.000,-. Selebihnya harus dilakukan revisi pada P.APBD Tahun Anggaran 2014, yang menyebabkan kegiatan baru dapat dilaksanakan setelah P.APBD dilakukan.

3. Penyedia jasa cidera janji sehingga beberapa pekerjaan mengalami pemutusan kontrak.

Dari hasil kegiatan yang dilaksanakan pada Tahun Anggaran 2014, secara umum dapat meningkatkan kemanfaatan infrastruktur Sumber Daya Air (SDA) dalam rangka mendukung pelayanan kebutuhan air dan mengendalikan daya rusak air pada Provinsi Sumatera Utara, namun masih banyak lagi yang perlu ditangani mengingat kondisi infrastruktur SDA yang ada belum dapat menangani permasalahan – permasalahan yang ada.

KESIMPULAN

Beberapa kegiatan pada Tahun Anggaran 2014 tidak dapat terlaksana diakibatkan oleh beberapa hal, diantaranya waktu pelaksanaan yang tidak mencukupi, waktu pelaksanaan pekerjaan bersamaan dengan masa tanam dan penyedia jasa cidera janji. Kegiatan-kegiatan yang tidak terlaksana tersebut adalah :

- a. Kegiatan Program WISMP-II /Loan 8027-ID/10837101-World Bank, dalam pengelolaan SDA : Komponen 2 Peningkatan Pengelolaan Sistem Irigasi Partisipatif (PPSIP) dan Komponen 4 Manajemen Proyek dan Dukungan Implementasi - PPIU Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air Provinsi Sumatera Utara.
- b. Rehabilitasi/Perbaikan dan Peningkatan Infrastruktur Irigasi DI. Panombean Pane/Panei Tongah/Bah Kata (1.724 Ha) Saluran Sekunder Sipinggan B (DAK + Pendamping DAK). Peningkatan saluran 90 m.
- c. Rehabilitasi dan pembangunan infrastruktur pengendalian banjir dan pengamanan sungai pada Sungai Barumon. Perkuatan tebing sungai dengan konstruksi bronjong 100 m.
- d. Operasional Kegiatan Komisi Irigasi Provinsi Sumatera Utara.



Pencapaian kinerja di sektor Sumber Daya Air yang merupakan tugas dan kewenangan yang telah dilimpahkan kepada Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air Provinsi Sumatera Utara Tahun 2014 pada umumnya menunjukkan capaian kinerja yang sangat baik. Dari 1 (satu) sasaran strategis tahun 2014 yang terdiri 7 (tujuh) indikator menunjukkan 6 indikator mencapai kinerja yang sangat baik (100,00% - 80,00%) dan 1 indikator mencapai kinerja baik (79,99% - 60,00%). Hasil yang dicapai sasaran di atas, tentunya memberikan kontribusi terhadap keberhasilan tujuan, misi dan visi yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air Provinsi Sumatera Utara Tahun 2014- 2018.

Namun demikian tidak dapat dipungkiri dengan kompleksnya dimensi, ruang lingkup, fungsi dan aspek pengelolaan pemerintahan serta pembangunan, Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air Provinsi Sumatera Utara tetap dihadapkan pada berbagai masalah dan tantangan pembangunan yang harus diupayakan pemecahannya.

- Capaian Indikator Kinerja “**Guardrail terbangun**”, menunjukkan bahwa relisasi kinerja. **Guardrail terbangun (m)**, Guardrail (pagar pengaman pengguna jalan) merupakan fasilitas keselamatan jalan yang berguna untuk mengendalikan pengguna jalan ketika mengalami *lost control* (hilang atau lepas kontrol), biasanya dipasang / dibangun di wilayah yang berjurang. Adapaun lokasi ruas jalan yang dilakukan pemasangan guardrail pada TA.2014, meliputi :
 - a. Ruas Jalan Guard Rail Tele - Pangururan Kab. Somo Sir
 - b. Ruas Jalan Jembatan Merah - Muara Soma Kab. Mandailing Natal
 - c. Ruas jalan Muara Soma - Sp. Gambir Kab. Mandailing Natal
 - d. Ruas Jalan Dolok Sanggul - Pakkat Kab. Humbang Hasundutan
 - e. Ruas Jalan Parsoburan - Bts. Labura Kab. TobasaSehingga mengacu pada target yang telah ditetapkan dalam RPJMD sebanyak 1.800m, dapat direalisasikan seluruhnya (100%).

Untuk mewujudkan sasaran strategis sebagaimana telah dijelaskan di atas, maka program / kegiatan yang dilaksanakan Tahun Anggaran 2014, yakni :

1) Program Pengendalian dan Pengamanan Lalu Lintas

Program Pengendalian dan Pengamanan Lalu Lintas, merupakan salah satu program yang dilaksanakan dalam upaya mewujudkan keamanan, keselamatan, ketertiban dan kelancaran lalu lintas jalan. Program ini lebih focus kepada pembangunan/pengadaan fasilitas perlengkapan / keselamatan jalan pada ruas jalan provinsi, diantaranya guardrail atau pagar pengaman pengguna jalan dan delineator atau patok pengarah pengguna jalan. Adapun Kegiatan yang dilaksanakan Tahun Anggaran 2014, yaitu :

- a. Pengadaan dan pemasangan Guardrail, lokasi pemasangan yakni :
 - a) Kabupaten Samosir,
 - b) Kabupaten Mandailing Natal,
 - c) Kabupaten Humbang Hasundutan dan
 - d) Kabupaten Toba Samosir.

Gambar 3.

Gauardrail (Pagar pengaman pengguna jalan)





- Capaian Indikator Kinerja “**Angkutan BRT Mebidang**”, menunjukkan bahwa realisasi kinerja. **Angkutan BRT Mebidang (koridor/trayek)** Bus Rapit Transyt (BRT) angkutan umum massal berbasis jalan merupakan salah satu program Pemerintah Pusat dalam hal ini Kementerian Perhubungan, sebagai salah satu upaya dalam rangka menekan kemacetan lalu lintas di wilayah aglomerasi di beberapa Provinsi di Indonesia salah satunya wilayah aglomerasi Mebidang (Medan-Binjai-Deli Serdang), melalui penyediaan angkutan umum yang berkualitas dan ramah lingkungan.

Melalui penyediaan angkutan umum massal ini diharapkan akan lebih meningkatkan peran angkutan umum, dan mengurangi tingkat penggunaan kendaraan pribadi khususnya sepeda motor. Kementerian Perhubungan telah mengalokasikan bantuan berupa 30 unit bus untuk yang direncanakan dioperasikan oleh Perum DAMRI. Pemerintah Provinsi telah memfasilitasi/mengkoordinasikan dengan Pemerintah kabupaten/kota terkait untuk mendukung pengoperasian BRT dimaksud, melalui pembangunan halte khusus BRT, dan sudah dapat dibangun pada tahun anggaran 2014.

Dalam upaya memenuhi target 2(dua) koridor/trayek BRT, Dinas Perhubungan telah melakukan rapat-rapat koordinasi dengan stake holder terkait, dan pada tahun 2014 telah ditetapkan melalui SK Gubernur Sumatera Utara, sebanyak 2(dua) lintasan/koridor, yakni :

- a. Medan – Binjai
- b. Medan – Lubuk Pakam.

Sehingga mengacu pada target yang telah ditetapkan pada Tahun 2014 sebanyak 2(dua) koridor telah dapat direalisasikan 100%. dalam rangka pencapaian kinerja pada Indikator Kinerja ini, tentu disikapi dengan program/kegiatan yang dilaksanakan, yaitu :



Program Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan

Program Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan, adalah salah satu program dalam upaya pembangunan / peningkatan kinerja sektor perhubungan melalui pembangunan infrastruktur perhubungan, kegiatan yang dilaksanakan adalah :

1) Sosialisasi Penerapan BRT Mebidang Tahap I

Dalam upaya menyerap berbagai aspirasi para pemangku kepentingan dalam pengoperasian Trans Mebidang, pada tanggal 25 Juni 2014, bertempat di Hotel Danau Toba International. telah dilaksanakan Konsultasi Publik Pengoperasian Angkutan Umum Massal Berbasis Jalan di wilayah Mebidang.

Hadir sebagai narasumber, moderator dan peserta pada acara tersebut, yakni :

- Ir. Rasman Ginting (Direktorat Bina Sistem Transportasi Perkotaan Ditjen Perhubungan Darat) ;
- Ir. Zulkarnaen Abdul Muis, M.Eng.Sc, (Dep. Teknik Sipil USU) ;
- Hendra (MTI Sumut) ;
- Ballen Sianturi (DPD Organda Sumut) ;
- Farid Wadji, SH, M.Hum (Lembaga Advokasi dan Perlindungan Konsumen Sumatera Utara) ;
- M. Yefizal & Ken Morito (Dishub Pekan Baru) ;
- Yudi Indra Sani, MT (Dishub Padang) ;
- M. Yul Akhyari Sastro, SH, MH (Organda Padang) ;
- Ir. Burhan Batubara (HPJI Sumut) selaku Moderator
- Peserta dari unsur Pemerintah. Akademisi, praktisi termasuk media cetak dan elektronik, dengan jumlah 125 orang.



Gambar 4. Kegiatan Sosialisasi (Konsultasi Publik BRT Mebidang)

Rumusan hasil dari kegiatan Konsultasi Publik tersebut, adalah sebagai berikut :

1. Program angkutan umum massal baik berbasis jalan maupun Rel sudah saatnya diterapkan di wilayah Mebidang, karena tingkat kemacetan jalan sudah semakin tinggi dan berdampak terhadap aktifitas ekonomi dan kesehatan masyarakat;
2. Rencana Pengoperasian BRT Trans Mebidang yang akan di *launching* pada tanggal 17 september 2014, bersama dengan 6(enam) Kota aglomerasi lainnya di Indonesia harus terus disosialisasikan, dan disarankan agar Dishub Sumut bersama dengan Organda Mebidang melakukan kunjungan bersama ke daerah yang telah mengoperasikan BRT;
3. Pemerintah Daerah harus memberi perhatian khusus terhadap fasilitas pejalan kaki yang layak sesuai standar teknis yang ditetapkan;
4. Dalam pengembangan BRT kedepan, Gubernur bersama Walikota Medan, Binjai dan Bupati Deli Serdang melalui SKPD teknis, agar menyusun Studi makro angkutan di wilayah Mebidang, sehingga tercipta sinergi dalam penataan trayek angkutan kota sebagai *feeder* dengan angkutan BRT di jalur utama.



Gambar 5. Profile Bus Angkutan Massal (Bus Rapid Transit/BRT) Trans Mebidang

Untuk koridor / lintasan angkutan BRT yang telah ditetapkan pada tahap awal untuk tahun 2014, yakni :

▪ Koridor / Lintasan 1

NAMA KORIDOR	RUTE / RUAS JALAN YANG DILALUI
Terminal Binjai - Pusat Pasar Medan	Terminal Binjai - Jl. Soekarno Hatta - Jl. Gatoto Subroto - Jl. Iskandar Muda - Jl. Gajah Mada - Jl. S.Parman - Jl. Raden Saleh - Jl. Balai Kota - Jl. Stasiun - Jl. MT. Haryono - Jl. Sutomo - Pusat Pasar

▪ Koridor / Lintasan 2

NAMA KORIDOR	RUTE / RUAS JALAN YANG DILALUI
Pusat Pasar Medan - Terminal Lubuk Pakam	Pusat Pasar - Jl. Sutomo - Jl. Perintis Kemerdekaan - Jl. M. Yamin - Jl. Stasiun - Jl. MT. Haryono - Jl. Cirebon - Jl. Sisimhamangaraja - Jl. Medan -Pakam

- **Capaian Indikator Kinerja Feasibility Study (FS) dan Detail Engineering Design (DED) Pelabuhan Sungai, Danau dan Penyeberangan (Dokumen).** Feasibility Study (FS) atau Studi Kelayakan dan Detail Engineering Design (DED) atau Rencana Teknik Terinci merupakan salah satu kelengkapan dokumen yang dipersyaratkan dalam rencana pembangunan prasarana



perhubungan, sesuai dengan Keputusan Menteri Perhubungan Nomor 31 Tahun 2006. Selanjutnya usulan tersebut menjadi dasar pengusulan pembangunan (fisik) melalui sumber pembiayaan APBN Kementerian Perhubungan.

Berdasarkan 6 rencana dokumen FS dan DED pembangunan/peningkatan dermaga pelabuhan sungai, danau dan penyeberangan yang ditargetkan pada tahun 2014, dapat terlaksana seluruhnya (100%), yakni dengan lokasi :

- a. DED Peningkatan Dermaga Danau Tigaras
- b. DED Peningkatan Dermaga Danau Simanindo
- c. DED Peningkatan Dermaga Danau Meat
- d. DED Peningkatan Dermaga Danau Sibandang
- e. DED Peningkatan Dermaga Danau Sijawi-Jawi
- f. DED Peningkatan Dermaga Desa Harapan

▪ **Capaian Indikator Kinerja Feasibility Study (FS) dan Detail Engineering Design (DED) Pelabuhan Laut (Pengumpan Regional).**

Khusus terhadap kegiatan FS dan DED pada tahun 2014 belum dapat dilaksanakan mengingat pengelolaan pelabuhan pengumpan regional secara operasional masih dilaksanakan oleh Kementerian Perhubungan RI melalui UPT Ditjen Perhubungan laut. Sehingga status asset dan personil masih milik Kementerian Perhubungan, walaupun secara kewenangan berdasarkan PP Nomor 38 Tahun 2007 seyogyanya khusus pengelolaan pelabuhan pengumpan regional dilaksanakan oleh Pemerintah Provinsi. Untuk itu Dishub Provsu belum melakukan penanganan pada pelabuhan laut pengumpan regional.

▪ **Capaian Indikator Kinerja Jumlah Deliniator (buah)**

Deliniator (patok pengarah pengguna jalan) merupakan salah satu fasilitas keselamatan jalan berupa patok besi yang dilengkapi stiker pemantul cahaya, yang berfungsi untuk mengarahkan/memandu pengguna jalan khususnya pada malam hari dan ruas jalan yang menikung (alinyemen horizontal tinggi).



Berdasarkan target sebanyak 3.000 buah pada tahun 2014, dapat terrealisasi sepenuhnya (100%), dengan lokasi pemasangan sbb :

- a. Pengadaan Delineator Binjai - Kuala Kota Binjai
- b. Pengadaan Delineator Binjai - Timbang Lawang Kota Binjai
- c. Pengadaan Delineator Lbk Pakam - Dlk Masihol - Bts. Tebing Tinggi Kab. Deli Serdang
- d. Pengadaan Delineator Tanah Abang - Sei Buaya - Bts. Simalungun Kab. Simalungun
- e. Pengadaan Delineator Seribu Dolok - Sarang Padang - Bts. Sergai
- f. Pengadaan Delineator Sumbul Pegagan - Tiba Baru - Sumbul Jahe Kab. Dairi
- g. Pengadaan Delineator Sidikalang - Penjaratan (Bts. Pak-Pak Barat) Kab. Dairi
- h. Pengadaan Delineator Simp. Sukaramai - Salak Kab. Dairi
- i. Pengadaan Delineator Aek Nabara - Negeri Lama Kab. Lab. Batu
- j. Pengadaan Delineator Negeri Lama - Tj. Sarang Elang Kab. Lab. Batu
- k. Pengadaan Delineator Siborong Borong - Sipahutar Kab. Tapanuli Utara
- l. Pengadaan Delineator Sipahutar - Aek Humbang Kab. Tapanuli Utara
- m. Pengadaan Delineator Aek Humbang - Bts. Tapsel Kab. Tapanuli Utara
- n. Pengadaan Delineator Silimbat - Parsoburan Kab. Tobasa
- o. Pengadaan Delineator Parsoburan - Bts. Labura Kab. Tobasa
- p. Pengadaan Delineator Porsea - Bts. Asahan Kab. Tobasa

▪ **Capaian Indikator Kinerja Jumlah Paku Jalan (buah)**

Paku jalan merupakan salah satu fasilitas keselamatan jalan, yang dipasang tepat ditengah jalan yang berfungsi sebagai median jalan (pemisah lajur jalan), yang dilengkapi dengan pemantul cahaya (mata kucing) untuk membantu mengarahkan pengguna jalan. Sebenarnya kegiatan tersebut, sudah masuk dalam Rencana Kerja dan KUA-PPAS pada Dinas Perhubungan Tahun 2014, namun karena adanya kebijakan efisiensi anggaran dalam APBD Provinsi Sumut TA.2014 kegiatan ini ditunda pelaksanaannya. Sehingga belum dapat dilaksanakan pada tahun 2014.



▪ Capaian Indikator Kinerja Dokumen dan Regulasi Perencanaan KSP,

Capaian Indikator kinerja Regulasi Daerah Terhadap Pengendalian Ruang dengan target kinerja 1 regulasi dicapai dengan dengan melakukan penyusunan Regulasi mekanisme persetujuan substansi dan evaluasi Rencana Tata Ruang Kabupaten/kota di Provinsi Sumatera Utara. Capaian Indikator kinerja Dokumen dan Regulasi Perencanaan Kawasan Strategis Provinsi dicapai dengan dengan melakukan Bantuan Teknis penyusunan RDTR, peraturan zonasi dan Penyusunan kajian alokasi kebutuhan ruang dalam pemanfaatan ruang di Provinsi Sumatera Utara. 2 Kawasan Strategis Provinsi yang disusun regulasinya adalah PKW Dairi dan Padang Sidempuan.

Dalam rangka pencapaian atas indikator kinerja ini, disikapi dengan program/ kegiatan pada Tahun 2014, yaitu :

NO	Program / Kegiatan	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	Persentase (%)
Program Penyelenggaraan Penataan Ruang Daerah				
1	Kegiatan sosialisasi NSPM (Norma Standar Pedoman Manual) bidang penataan ruang dan Bimtek pemanfaatan dan pengendali pemanfaatan ruang di provsu.	1 Regulasi	1 Regulasi	100 %
2	Bantek penyusunan RDTR dan peraturan zonasi dan Penyusunan kajian alokasi kebutuhan ruang dalam pemanfaatan ruang di provsu	2 Kawasan	2 Kawasan	100 %

▪ Capaian Indikator Kinerja Regulasi Daerah terhadap Pengendalian Ruang,

Capaian Indikator kinerja Rencana Tata Ruang kawasan strategis provsu dicapai dengan dengan melakukan Penyusunan Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis Budaya di Barus Kabupaten Tapanuli Tengah. Dalam rangka pencapaian atas indikator kinerja ini, disikapi dengan program/ kegiatan pada Tahun 2014, yaitu :



NO	Program / Kegiatan	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	Persentase (%)
1	Program Pengembangan Wilayah Strategis Dan Cepat Tumbuh, dengan kegiatan : <ul style="list-style-type: none"> ▪ Penyusunan RTR Kawasan Strategis Budaya di Kabupaten Tapanuli Tengah 	1 Dokumen	1 Dokumen	100 %

- **Capaian Indikator Kinerja Luas RTH (*Ruang Terbuka Hijau*) Perkotaan, Berkenaan dengan pencapaian pada Indikator Kinerja ini** disikapi dengan melaksanakan kajian ketersediaan Ruang Terbuka Hijau Kawasan Perkotaan dilaksanakan di 4 (empat) Kota yaitu Medan, Binjai, Pematang Siantar dan Tanjung Balai. Pada 4 kawasan tersebut luas Ruang Terbuka Hijau adalah 8,2 %, sehingga persentase kinerja adalah $8,2 / 11 \times 100 \% = 74,5 \%$ atau pada **Kategori BAIK.**



Sasaran Strategis- 5 : Terwujudnya Peningkatan Kesejahteraan Sosial Ekonomi Masyarakat yang berkeadilan

Tabel 82
Capaian Kinerja Sasaran Strategis ke-5

INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI KINERJA	CAPAIAN KINERJA (%)
(1)	(2)	(3)	(4)
1. Tercapainya Kondisi Makro Sosial :			
▪ Kemiskinan (%)	10,08	9,85	97,71
▪ Pengangguran (%)	5,86	7,07	11,09
▪ Elastisitas Kesempatan Kerja	3,5	1,5	42,85
▪ Penciptaan Wirausahawan Baru (Orang)	12.000	2.000	16,66



INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI KINERJA	CAPAIAN KINERJA (%)
(1)	(2)	(3)	(4)
2. Perumahan dan Permukiman :			
▪ Luas Kawasan Kumuh (Ha)	1.592 Ha	1.625 Ha	83
▪ Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni (Unit)	600	600	100
3. Bangunan Gedung :			
▪ NSPM (<i>Norma Standar Pedoman Manual</i>) Bangunan Gedung	7	5	71,43
▪ Bangunan Gedung Pemerintah	1	-	-
4. Infrastruktur Air Minum dan Sanitasi Lingkungan :			
▪ Peningkatan Akses Air Minum Perpipaan (%)	3,5	1,79	51,23
▪ Persentase Penanganan Sampah (<i>Sampah terangkut ke TPA</i>)	35	Tidak Dilaksanakan	-
▪ Cakupan pelayanan Air Limbah Perpipaan (KK)	21.150	18.682	82,42
▪ Jaringan Drainase Dengan Kondisi Baik (m)	256.182	211.146	
5. Infrastruktur Penataan Lingkungan Permukiman :			256,90
▪ Panjang Jalan Lingkungan yang Ditangani (km)	15	38,53	102,69
▪ Panjang Jalan Poros Pendukung Ekonomi Pedesaan (km)	15	15,4	83,33

Sebagaimana Tabel 82 di atas dapat dijelaskan bahwa Sasaran Strategis ke-5 yaitu **“TERWUJUDNYA PENINGKATAN KESEJAHTERAAN SOSIAL EKONOMI MASYARAKAT YANG BERKEADILAN”**, untuk keberhasilan maupun kegagalan pada Sasaran Strategis ini diukur dengan menggunakan sebanyak Indikator Kinerja yang ada.

- **Capaian Indikator “Kemiskinan”**, Adapun untuk angka penduduk Sumatera Utara yang berada diatas garis kemiskinan setiap tahun terus mengalami perbaikan, dimana tahun tahun 2008 sebesar 87,45%, tahun 2009 sebesar 88,47%, tahun 2010 sebesar 86,69%, tahun 2011 sebesar 89,17% dan tahun 2012 menjadi 89,59%.

Secara umum penurunan tingkat kemiskinan di Provinsi Sumatera Utara dapat



dilihat pada grafik dibawah ini :

Grafik. 31
Persentase penduduk miskin Sumatera Utara dan Nasional Tahun * 2008-2013



Sumber : BPS Provinsi Sumatera Utara, 2012

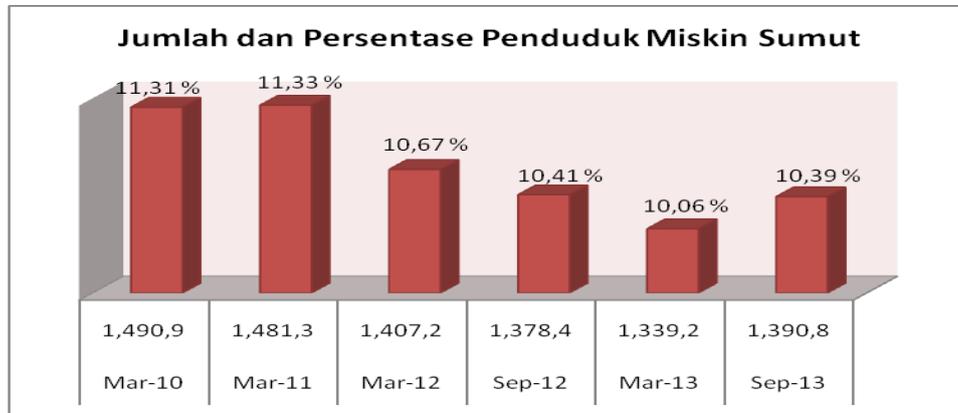
Jumlah penduduk miskin di Sumatera Utara pada Maret 2013 sebanyak 1.339.200 orang (10,06 persen), angka ini berkurang sebanyak 39.200 orang bila dibandingkan dengan jumlah penduduk miskin September 2012 yang berjumlah 1.378.400 orang (10,41 persen). Untuk melihat perkembangan jumlah penduduk miskin dan tingkat kemiskinan di Provinsi Sumatera Utara sejak tahun 2006 sampai dengan tahun 2013 dapat dilihat pada grafik berikut ini :

Grafik. 32
Perkembangan Jumlah Penduduk Miskin Provinsi Sumatera Utara Tahun 2010-2013



Sumber : Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenans)

Grafik. 33
Jumlah dan Persentase Penduduk Miskin Provinsi Sumatera Utara
Tahun 2010-2013



Sumber : Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas)

Berdasarkan gambar di atas dapat dilihat bahwa jumlah penduduk miskin Sumatera Utara cenderung positif (mengalami penurunan) dari tahun 2010 hingga tahun 2012, yaitu dari 1.490.900 jiwa (11,31 persen) pada tahun 2010 menjadi 1.390.800 jiwa (10,39 persen) pada tahun 2013. Hal ini menunjukkan adanya trend negatif yang terjadi dari pada tahun 2013 hal ini dikarenakan terjadinya inflasi tinggi hingga 5,02 persen sebagai akibat dari kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) pada Bulan Juni 2013 yang juga diiringi dengan kenaikan harga bahan makanan pokok secara nasional.

Hasil Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) yang dilaksanakan September 2014 menunjukkan bahwa jumlah penduduk miskin di Provinsi Sumatera Utara sebanyak 1.360.600 orang atau sebesar 9,85 persen terhadap jumlah total penduduk. Sementara itu dari data Badan Pusat Statistik (BPS) Sumatera Utara bahwa kondisi ini lebih buruk jika dibandingkan dengan kondisi Maret 2014. Pada Maret 2014 jumlah penduduk miskin sebanyak 1.286.700 orang atau sebesar 9,38 persen. Berarti pada September 2014 ada peningkatan jumlah penduduk miskin sebanyak 73.900 orang serta peningkatan persentase penduduk miskin sebesar 0,47 point atau 9,87 %.



Jumlah penduduk miskin Sumatera Utara yang berada di daerah perkotaan pada September 2014 sebanyak 667.500 orang (9,81 persen) dan di daerah pedesaan sebanyak 693.100 orang atau 9,89 %.

Peningkatan jumlah dan persentase penduduk miskin selama periode Maret 2014 sampai dengan September 2014 diduga berkaitan dengan beberapa faktor antara lain :

- 1) Inflasi selama periode Maret 2014–September 2014 meningkat jadi 2,83 persen, dari 1,48 persen pada periode sama tahun 2013. Kemudian faktor Nilai Tukar Petani (NTP) mengalami penurunan yaitu dari 101,31 pada Maret 2014 menjadi 99,79 pada September 2014.
- 2) Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) mengalami peningkatan yaitu dari 5,95 persen pada Pebruari 2014 menjadi 6,23 persen pada Agustus 2014. Pertumbuhan ekonomi melambat yaitu dari 5,64 persen pada Triwulan I 2014 menjadi 5,20 persen pada Triwulan III 2014. Ia menyebut garis kemiskinan dipergunakan sebagai suatu batas untuk menentukan miskin atau tidaknya seseorang. Penduduk miskin adalah mereka yang memiliki rata-rata pengeluaran per kapita per bulan di bawah garis kemiskinan.

Pada September 2014 garis kemiskinan Sumatera Utara sebesar Rp330.663 per kapita per bulan. Untuk daerah perkotaan, garis kemiskinannya sebesar Rp349.372 per kapita per bulan, dan untuk daerah pedesaan sebesar Rp312.493 per kapita per bulan. Dibanding Maret 2014, garis kemiskinan Sumatera Utara pada September 2014 naik 3,85 persen. Garis kemiskinan di perkotaan naik 3,29 persen dan garis kemiskinan di pedesaan naik 4,46 persen.

Persoalan kemiskinan bukan hanya sekadar berapa jumlah dan persentase penduduk miskin. Dimensi lain yang perlu diperhatikan adalah tingkat kedalaman dan keparahan dari kemiskinan.



Selain harus mampu memperkecil jumlah penduduk miskin, kebijakan yang menyangkut kemiskinan juga sekaligus harus bisa mengurangi tingkat kedalaman dan keparahan dari kemiskinan pada periode Maret 2014 sampai dengan September 2014.

Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) dan Indeks Keparahannya Kemiskinan (P2) menunjukkan kecenderungan meningkat. Indeks Kedalaman Kemiskinan naik dari 1,467 pada Maret 2014 menjadi 1,710 pada bulan September 2014. Demikian pula Indeks Keparahannya Kemiskinan naik dari 0,373 menjadi 0,450 pada periode yang sama, dimana kenaikan nilai kedua indeks ini mengindikasikan bahwa rata-rata pengeluaran penduduk miskin cenderung semakin menjauhi garis kemiskinan dan tingkat ketimpangan pengeluaran penduduk miskin juga semakin melebar. Tingkat keparahan kemiskinan di pedesaan lebih besar dibanding perkotaan. Ternyata rata-rata pengeluaran penduduk miskin di pedesaan lebih jauh dari garis kemiskinan dibanding perkotaan, begitu juga tingkat ketimpangan pengeluaran penduduk miskin di pedesaan lebih lebar dibanding perkotaan.

Untuk mengukur kemiskinan, dari metode yang lazim digunakan oleh BPS menggunakan konsep kemampuan seseorang untuk memenuhi kebutuhan dasar (basic needs approach). Dengan pendekatan ini, kemiskinan dipandang sebagai ketidakmampuan dari sisi ekonomi untuk memenuhi kebutuhan dasar makanan dan bukan makanan yang diukur dari sisi pengeluaran. Dengan pendekatan ini, dapat dihitung Headcount Index, yaitu persentase penduduk miskin terhadap total penduduk. Metode yang digunakan adalah menghitung Garis Kemiskinan (GK), yang terdiri dari dua komponen yaitu :

- 1) Garis Kemiskinan Makanan (GKM) dan
- 2) Garis Kemiskinan Bukan-Makanan (GKBM).



Grafik 34



Sumber : Laporan Kinerja Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Provinsi Sumatera Utara 2013

▪ **Capaian Indikator “Elastisitas Kesempatan Kerja”,**

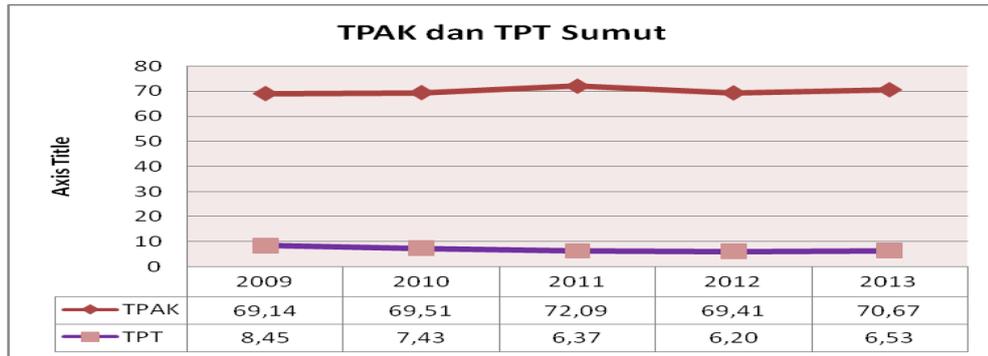
Kesempatan kerja (Rasio penduduk yang bekerja) Jumlah Angkatan Kerja di Sumatera Utara pada Agustus 2012 sebanyak 6,13 juta orang, terdiri dari 5,75 juta orang bekerja, dan 0,38 juta orang penganggur. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) di Sumatera Utara pada Agustus 2012 mencapai 6,20 persen, mengalami penurunan sebesar 0,17 persen dibanding TPT Agustus 2011, yaitu sebesar 6,37 persen.

Pada Agustus 2012, jumlah penduduk yang bekerja sebagai buruh/karyawan sebesar 2,1 juta orang (36,49%), pekerja keluarga 1,09 juta orang (19,02%), berusaha dibantu buruh tidak tetap/tidak dibayar sebesar 955 ribu orang (16,61%), dan berusaha sendiri sejumlah 922 ribu orang (16,03%). Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) pada Agustus 2012 sebesar 69,41 persen atau mengalami penurunan sebesar 2,68 persen bila dibandingkan dengan kondisi Agustus 2011 sebesar 72,09 persen. Persentase pekerja formal di Sumatera Utara meningkat dari 38,51 persen pada Agustus 2011 menjadi 40,09 persen pada Agustus 2012.



Grafik 35

Perkembangan Kondisi Ketenaga Kerjaan Sumut 2009-2013



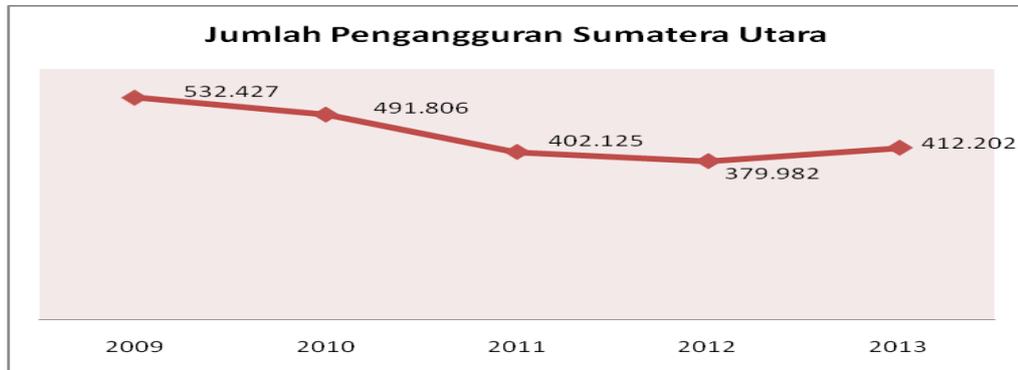
Sumber : BPS Provinsi Sumatera Utara

Perkembangan ketenagakerjaan Provinsi Sumatera Utara kembali menunjukkan perbaikan. Seperti tergambar dari Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) yang menunjukkan kenaikan dari 69,41% pada tahun 2012 menjadi 70,67% pada tahun 2013. Namun berbanding terbalik dengan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) di Provinsi Sumatera Utara yang mengalami kenaikan dari 6,20% pada tahun 2012 menjadi 6,53% pada tahun 2013.

Trend positif dari naiknya Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) ternyata tidak dibarengi dengan trend positif dari penurunan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) di Provinsi Sumatera Utara. Karena sebagaimana diketahui bahwa pada tahun 2013 Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) di Provinsi Sumatera Utara mengalami kenaikan dari 6,20 persen pada tahun 2012 menjadi 6,53 persen pada tahun 2013, dengan besaran jumlah pengangguran mencapai 412.202 jiwa sebagaimana grafik berikut :

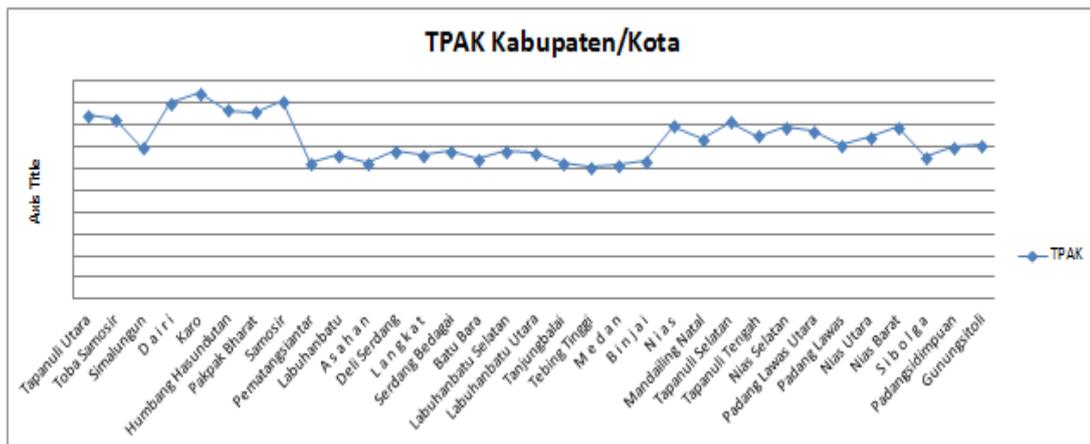


Grafik 36
Perkembangan Jumlah Pengangguran di Sumatera Utara
Tahun 2009-2013



Sumber : Data Statistic Nasional, BPS

Grafik. 37
Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) kabupaten/kota di Provinsi Sumatera Utara



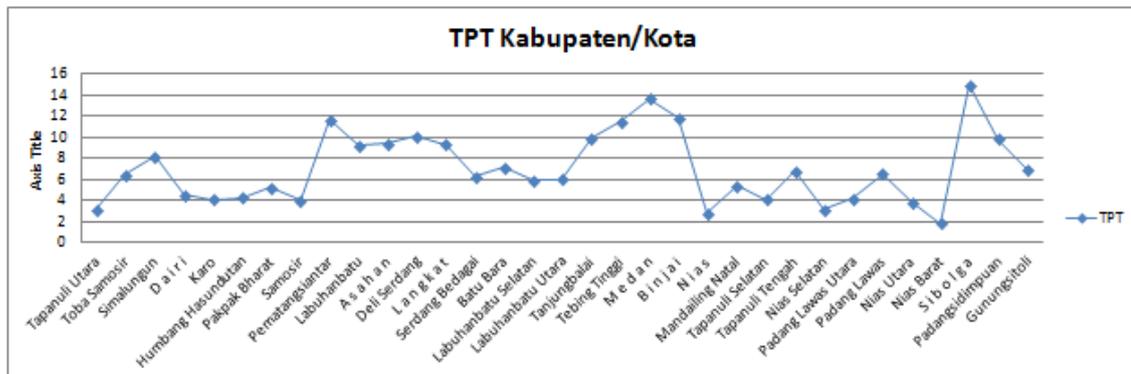
Sumber : BPS

- **Capaian Indikator “Pengangguran”,**

Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) dicapai oleh kabupaten Nias Barat sebesar 1,87%. Kota Medan sebagai ibukota provinsi memiliki nilai TPT sebesar 13,68%, atau lebih tinggi dibanding nilai TPT Provinsi Sumatera Utara sebesar 7,07%. Hal ini diperkirakan erat kaitannya dengan pembangunan Provinsi Sumatera Utara yang tentunya cukup didominasi oleh kota besar seperti Medan, termasuk dari sisi investasi dimana Kota Medan sebagai pusat investasi terbesar sebagai ibukota provinsi dengan berbagai jenis kegiatan usaha.



Grafik 38
Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) kabupaten/kota di Provinsi Sumatera Utara

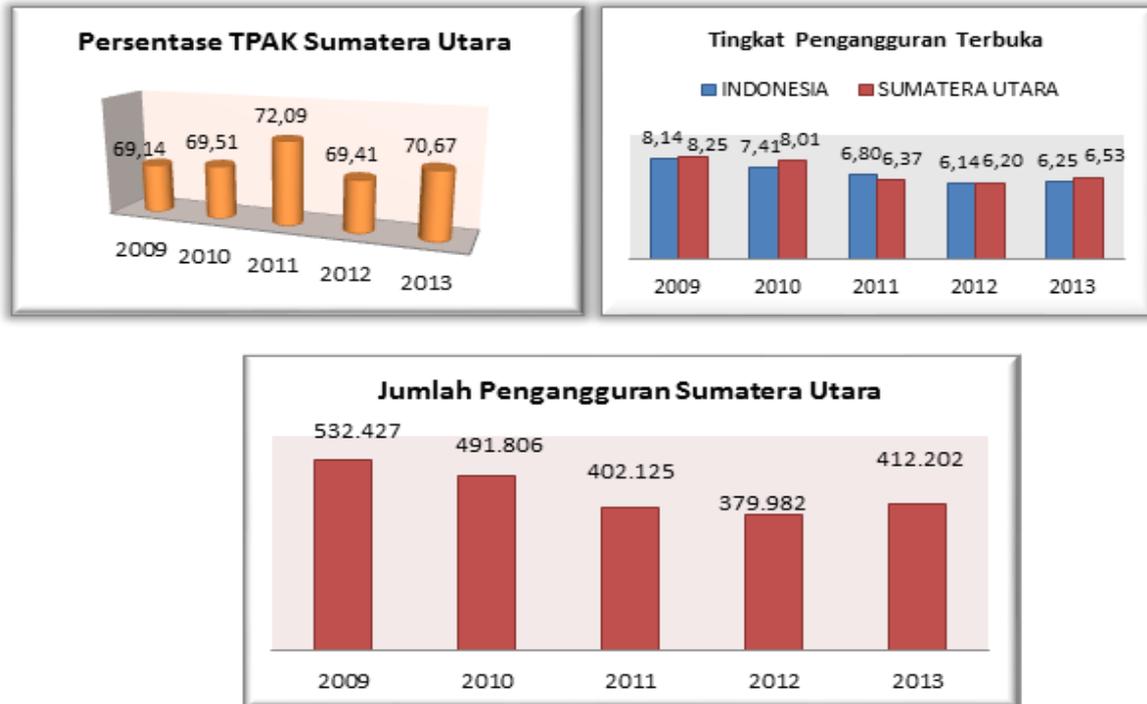


Sumber : Sumut dlm Angka, BPS

Kondisi ketenagakerjaan di Provinsi Sumatera Utara, telah berjalan sesuai dengan target yang diharapkan, dengan Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) tahun 2013 yang mncapai 70,67 persen, sebesar 6,53 persen adalah pengangguran terbuka. Kondisi capaian ini berada di bawah capaian nasional pada tahun yang sama sebesar 6,25 persen, Sehingga hal ini juga menggambarkan bertambahnya jumlah pengangguran diProvinsiSumateraUtara.Dimana pada tahun 2012 jumlah pengangguran di Provinsi Sumatera Utara sebesar 379.982 jiwa mengalami peningkatan menjadi 412.202 jiwa pada tahun 2013, sebagaimana grafik berikut :

Grafik 39

Tingkat Penangguran Terbuka Provinsi Sumatera Utara dan Nasional Tahun 2009-2013



- **Capaian Indikator “Luas kawasan kumuh”** adalah pengurangan kawasan kumuh menjadi 1.592 ha atau berkurang sejumlah 200 Ha. Untuk mencapai ini telah dilaksanakan program Pembinaan dan Pengembangan Perumahan dan Permukiman, program ini belum memberikan outcome langsung terhadap pengurangan luas kawasan kumuh. Pengurangan luas kawasan kumuh merupakan kontribusi dari Program Pembinaan dan Pengembangan Infrastruktur Penataan Lingkungan Permukiman sejumlah 166 Ha atau sama dengan 83 % dari target kinerja pengurangan luas kawasan kumuh.
- **Capaian Indikator “Kinerja NSPM bangunan gedung”** terdapat satu regulasi yang tidak terlaksana yaitu Finalisasi/Regulasi Ranperda Bangunan Gedung Provsu, Kegiatan ini tidak Efektif Dilaksanakan Dengan Berakhirnya Periode Tugas DPRD



Sumut tahun 2009-2014, karena Menyangkut Proses Legislasi Daerah (Prolegda) yang Melibatkan secara langsung DPRD Sumut.

- **Capaian Indikator “Kinerja Bangunan Gedung Pemerintah”** yang diukur adalah kegiatan pembangunan gedung Islamic Center, pembangunan konstruksi tidak terlaksana karena belum tersedianya lahan pembangunan. Kegiatan ini telah dianggarkan sejak tahun 2012 S/d 2015 pada Dinas Tarukim, untuk perencanaan fisik, studi AMDAL dan pematangan lahan. Namun tidak dapat terlaksana karena lahan lokasi pembangunan Islamic Center masih berstatus HGU PTPN-II. Upaya untuk pengalihan aset PTPN-II menjadi lahan pembangunan Islamic Center telah dilaksanakan melalui rapat koordinasi, proses surat menyurat, peninjauan lapangan serta penyampaian koordinat lahan pertapakan.
- **Capaian Indikator kinerja “Peningkatan akses air minum perpipaan”** sebesar 3,5 % adalah target kinerja pembangunan bidang Air minum di Sumatera Utara sesuai RPJMD Provinsi Sumatera Utara yang memperhitungkan semua sumber dana pembangunan yaitu APBD Provinsi, APBN, APBD Kabupaten/Kota dan Pihak Swasta. Target kinerja 3,5 % itu setara dengan penambahan akses air minum perpipaan untuk 109.000 KK. Pada tahun 2014 di Sumatera Utara telah dibangun akses air minum dengan potensi 4.930 KK Melalui sumber dana APBD Provinsi Sumatera Utara, 4.819 KK melalui kegiatan Pamsimas, 46.400 KK dengan sumber sumber dana APBN. Untuk pembangunan yang dilakukan melalui APBD Kabupaten/Kota dan Pihak Swasta sampai dengan saat penyusunan Laporan Kinerja ini belum dapat dikompilasi. Realisasi kinerja Peningkatan akses air minum perpipaan adalah 56.149 KK atau 51,23 %.



- **Capaian Indikator kinerja Persentase penanganan sampah (sampah terangkut ke TPA)** belum dapat diukur, karena tidak dilaksanakan.

- **Capaian Indikator kinerja Cakupan layanan air limbah perpipaan.**

Capaian realisasi pada indikator kinerja ini adalah sebesar 18.682 KK atau 88,33 %. Direncanakan sampai dengan berakhirnya kegiatan MSMHP target kinerja dapat dicapai 100 %. Dalam hal capaian kinerja pada indikator kinerja ini Pemerintah Provinsi Sumatera Utara pada Tahun 2014 melakukan Pendampingan kegiatan Pembangunan Sektor Air Limbah dari Kegiatan Metropolitan Sanitation Management and Health Project (MSMHP) dilaksanakan di Kota Medan, Kegiatan ini dilaksanakan melalui kontrak tahun jamak dari tahun 2012 s/d 2015 dan Sosialisasi dan pilot proyek bantuan PS air limbah dan air bersih dilaksanakan di 6 UPT Dinas Tarukim yaitu di Langkat, Samosir, Labuhan Batu, Tapanuli Tengah, Padang Sidempuan dan Gunung Sitoli.

- **Capaian Indikator kinerja Jaringan Drainase Dengan Kondisi Baik** telah dilakukan Penyusunan masterplan drainase, DED drainase dan Pembangunan saluran drainase sepanjang 24.955 Meter. Hasil pembangunan ini menambah jumlah drainase dengan kondisi baik menjadi 211.146 Meter atau 82,42 % dari target kinerja.



Sasaran Strategis- 6 : Terwujudnya Peningkatan Daya Saing Provinsi Sumatera Utara Baik di Bidang Ekonomi, Sosial, Budaya dan Lingkungan Hidup

Tabel 83
Capaian Kinerja Sasaran Strategis ke-6

INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI KINERJA	CAPAIAN KINERJA (%)
(1)	(2)	(3)	(4)
1. Tercapainya kondisi makro ekonomi :			
▪ Laju Pertumbuhan Ekonomi (%)	6,16	5,23	84,49
▪ Inflasi (%)	6,25	8,17	76,49
▪ PDRB ADHB (Triliun Rupiah)	454,03	523,77	115,36
▪ PDRB ADHK (Triliun Rupiah)	151,37	419,65	277,23
▪ PDRB/Kapita (ADHB) (Rp. Juta)	33,32	38,05	114,20
▪ Neraca Perdagangan (US\$.000)	4.950	4.312	87,11
▪ Nilai Investasi (PMTB)	95,99	124,07	129,25
▪ APBD Provinsi (Triliun Rupiah)	8,58	8,60	100,23
▪ ICOR (<i>Incremental Capital Output Ratio</i>)	3,50	3,50	100
2. Daya Saing			
▪ IPM (Indeks Pembangunan Manusia)	76,35	75,57	98,87
▪ Laju Pertumbuhan Ekspor (%)	2,83	2,47	87,27
▪ Laju Pertumbuhan Impor (%)	1,08	1,21	112,03
▪ % Investasi (PMTB) (Triliun Rupiah)	95,99	31,57	32,88
▪ Dana Pihak Ketiga pada Perbankan (milyar/ US\$)	170,8	178,65	104,59



INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN KINERJA (%)
(1)	(2)	(3)	(4)
3. Ketahanan Pangan			
1) Swasembada Pangan :			
▪ Beras (ton GKG)	3.771.545	3.628.968	96,22
▪ Jagung (ton)	1.529.636	1.159.698	75,82
2) Angka Kecukupan Energi (Kalori/Protein) :			
▪ Energi (Kalori/Kap/Hari)	3.872	3.887	100,38
▪ Protein (gram/kap/hari)	76,58	76,18	99,47
3) Jumlah Desa Rawan Pangan	75	27	35,06
4) Pola Pangan Harapan	84,50	84,8	100,36
5) Nilai Tukar Petani (NTP) :			
▪ Peternakan	107,32 %	106,95 %	99,66
▪ Pangan	100,74 %	99,54 %	98,81
▪ Hortikultura	109,19 %	98,14 %	89,88
▪ Perikanan	110,2 %	101,72 %	92,30
4. Ketahanan Energi			
▪ Daya Listrik Terpasang	2.500 MW	2.855,3 MW	114,21
▪ Rasio Elektrifikasi	89,44 %	88,53 %	98,98
5. Lingkungan Hidup			
▪ Pelayanan Informasi Status Mutu Air Sungai dan Danau di Reseptor Yang Sensitif (Unit lokasi)	6	6	100
▪ Pelayanan Informasi Status Mutu Udara Ambient (Unit Lokasi)	5	5	100
▪ Cakupan Pelayanan AMDAL (%)	100	77,78	77,78
▪ Cakupan Pelayanan Kasus-Kasus Lingkungan Hidup (%)	100	59,38	59,37

Sebagaimana Tabel di atas dapat dijelaskan bahwa Sasaran Strategis ke-2 yaitu **“TERWUJUDNYA PENINGKATAN DAYA SAING PROVINSI SUMATERA UTARA BAIK DI BIDANG EKONOMI, SOSIAL, BUDAYA DAN LINGKUNGAN HIDUP”**, untuk keberhasilan maupun kegagalan pada Sasaran Strategis ini diukur dengan menggunakan Indikator Kinerja pada Tabel 83 menunjukkan bahwa pada umumnya capaian kinerja



dari masing-masing indikator mencapai angka yang menggembirakan atau pada kategori SANGAT BAIK.

PENCAPAIAN KONDISI MAKRO EKONOMI PROVINSI SUMATERA UTARA TAHUN 2014



Terkait dengan capaian Kondisi Makro Ekonomi pada Tahun 2014 di Provinsi Sumatera Utara, juga ditentukan oleh faktor-faktor di bawah ini yang selanjutnya dapat dikatakan sebagai Sub Indikator Kinerja atau Indikator Pendukung dalam rangka keberhasilan Sasaran Strategis **“TERWUJUDNYA PENINGKATAN DAYA SAING PROVINSI SUMATERA UTARA BAIK DI BIDANG EKONOMI, SOSIAL, BUDAYA DAN LINGKUNGAN HIDUP”** .

▪ Capaian Indikator kinerja **“Laju Pertumbuhan Ekonomi”**,

Pertumbuhan Ekonomi pada tahun 2014 ditargetkan sebesar 6,19 % sampai akhir tahun 2014 hanya tercapai sebesar 5,23 %. Salah satu penyebabnya adalah adanya kenaikan harga bahan bakar minyak. Hal ini dikarenakan permasalahan Inflasi pada tahun 2014 ditargetkan sebesar 6,25%.

Perekonomian Sumatera Utara tahun 2014 tumbuh sebesar 5,23 persen. Pertumbuhan terjadi pada seluruh lapangan usaha. Informasi dan komunikasi merupakan lapangan usaha yang mengalami pertumbuhan tertinggi sebesar 7,23 persen, diikuti oleh jasa lainnya sebesar 7,04 persen dan jasa kesehatan sebesar 7,00 persen. Struktur perekonomian Sumatera Utara menurut lapangan usaha tahun 2014 didominasi oleh tiga lapangan usaha utama yaitu: pertanian, kehutanan dan perikanan (23,18%); industri pengolahan (19,90%); serta perdagangan besar-eceran dan reparasi mobil-sepeda motor (17,11%).



▪ Capaian Indikator kinerja Laju Inflasi

Pada tahun 2014, laju inflasi di Provinsi Sumatera Utara sebesar 8,17%. Tidak terjaganya target inflasi sebesar 6,25% juga dikarenakan adanya kenaikan harga BBM. Tingkat inflasi di Sumatera Utara secara umum juga kondisinya lebih baik dari nasional, akan tetapi pada tahun 2013 kondisi inflasi Sumatera Utara tidak sebaik capaian nasional, dimana inflasi di Sumatera Utara mencapai 2 digit pada posisi 10,18%, hal ini disebabkan terjadinya kenaikan pada kelompok bahan makanan (13,18 %); perumahan, air, listrik, gas dan bahan bakar (8,27 %); pendidikan, rekreasi dan olahraga (7,93 %); makanan jadi, minuman, rokok dan tembakau (6,24 %); sandang (2,47 %) dan kesehatan (2,11 %). Secara Makro Rata-Rata Inflasi Sumatera Utara selama periode 2009-2013 sebesar 5,66% berada diatas rata-rata Inflasi Nasional pada periode yang sama sebesar 5,25% (nasional lbih baik).

Perkembangan nilai inflasi Sumatera Utara dibandingkan dengan tingkat nasional disajikan pada Tabel 84 berikut :

Tabel. 84
Nilai inflasi rata-rata Provinsi Sumatera Utara
Tahun 2009-2013

INFLASI	Tahun				
	2009	2010	2011	2012	2013
INDONESIA	2,78	6,96	3,79	4,36	8,38
SUMATERA UTARA	2,61	8,00	3,67	3,86	10,18

Sumber : BPS Provinsi Sumatera Utara (data diolah)

▪ Capaian Indikator kinerja “PDRB ADHB”,

PDRB ADHB pada tahun 2014 tercapai sebesar Rp. 523,77 triliun dari target sebesar Rp. 454,03 triliun, sehingga terdapat Rp. 69,74 triliun pencapaian diatas target. Pada tahun 2014 tercapai sebesar Rp. 523,77 triliun dari target sebesar Rp. 454,03 triliun, sehingga terdapat Rp. 69,74 triliun pencapaian diatas target. Perbandingan Capaian Kinerja PDRB ADHK di Sumatera Utara, dapat dilihat pada Tabel di bawah ini.



Tabel. 85
Perbandingan PDRB Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB)
Menurut Kabupaten/Kota Tahun 2009-2013 (Milyar Rupiah)

Kabupaten/Kota	Tahun				
	2009	2010	2011	2012	2013
01. Nias	982,94	1 140,43	1 299,65	1 439,73	1 638,83
02. Mandailing Natal	3 385,34	3 717,81	4 276,71	4 808,31	5 573,13
03. Tapanuli Selatan	2 761,51	3 145,18	3 573,33	4 006,03	4 485,93
04. Tapanuli Tengah	2 000,27	2 296,07	2 572,05	2 880,68	3 304,28
05. Tapanuli Utara	3 392,63	3 807,80	4 157,53	4 564,75	5 121,10
06 Tobasamosir	3 056,88	3 429,77	3 857,58	4 395,20	5 010,99
07 Labuhanbatu	6 658,79	7 610,59	8 550,34	9 526,34	10 894,86
08 Asahan	10 435,94	11 931,68	13 650,24	15 376,29	17 525,62
09 Simalungun	9 272,02	10 360,95	11 627,58	13 055,30	14 694,53
10 Dairi	3 393,00	3 777,74	4 226,28	4 731,42	5 345,42
11 Karo	5 646,54	6 676,02	7 634,39	8 512,71	9 550,52
12 Deli Serdang	34 172,48	39 804,28	45 125,83	50 667,52	59 862,75
13 Langkat	14 789,83	17 037,98	19 565,25	22 166,50	25 189,51
14 Nias Selatan	2 014,35	2 244,82	2 442,56	2 678,83	2 947,37
15 Humbang Hasundutan	2 189,65	2 468,65	2 791,89	3 179,57	3 612,23
16 Pakpak Bharat	290,30	331,84	373,19	420,52	479,46
17 Samosir	1 519,32	1 669,60	1 835,40	2 019,69	2 240,76
18 Serdang Bedagai	8 490,36	9 697,60	10 905,56	12 313,15	14 041,79
19 Batubara	14 517,23	16 590,57	18 994,98	21 006,93	22 418,91
20 Padang Lawas Utara	1 424,47	1 725,25	1 957,90	2 189,62	2 487,98
21 Padang Lawas	1 349,42	1 597,82	1 850,14	2 067,67	2 333,84
22 Labuhanbatu Selatan	6 284,98	7 161,09	8 094,36	9 032,13	9 189,50
23 Labuhanbatu Utara	5 472,19	6 288,95	7 101,85	7 984,44	10 501,60
24 Nias Utara	998,84	1 136,17	1 293,29	1 428,39	1 618,49
25 Nias Barat	507,06	589,40	673,15	747,01	844,57
26 Sibolga	1 361,12	1 543,78	1 698,29	1 884,81	2 125,85
27 Tanjungbalai	2 765,28	3 088,52	3 373,86	3 692,18	4 025,36
28 Pematangsiantar	3 746,22	4 163,38	4 531,59	4 897,69	5 281,37
29 Tebing Tinggi	2 033,00	2 302,74	2 608,91	2 964,04	3 453,99
30 Medan	72 630,21	83 315,02	93 610,76	105 400,44	119 715,48
31 Binjai	4 308,94	4 945,36	5 701,43	6 593,39	7 428,96
32 Padangsidimpuan	1 900,04	2 099,89	2 304,04	2 561,84	2 866,37
33 Gunungsitoli	1 781,86	2 009,06	2 305,74	2 543,99	2 927,31
Sumatera Utara	236 353,62	275 056,51	314 372,44	351 118,16	403 933,05

Sumber : Badan Pusat Statistik Provsu



- **Capaian Indikator kinerja “PDRB ADHK”**, PDRB ADHK pada tahun 2014 tercapai sebesar Rp. 419,65 triliun dari target sebesar Rp. 151,37 triliun, sehingga terdapat Rp. 268,28 triliun pencapaian diatas target. pada tahun 2014 tercapai sebesar Rp. 419,65 triliun dari target sebesar Rp. 151,37 triliun, sehingga terdapat Rp. 268,28 triliun pencapaian diatas target. PDRB/Kapita (ADHB) pada tahun 2014 tercapai sebesar Rp. 38,05juta dari target sebesar Rp. 33,32 juta, sehingga terdapat Rp. 4,73 jutapencapaian diatas target yang telah ditetapkan pada tahun 2014. Perbandingan Capaian Kinerja PDRB ADHK di Sumatera Utara, dapat dilihat pada Tabel di bawah ini.

Tabel 86
Perbandingan Pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto Sumatera Utara
Atas Dasar Harga Konstan 2000 Menurut Kabupaten/Kota Tahun 2009-2013 (Persen)

Kabupaten/Kota	Tahun				
	2009	2010	2011	2012	2013
01. Nias	6,62	6,75	6,81	6,24	6,43
02. Mandailing Natal	6,40	6,41	6,40	6,41	6,41
03. Tapanuli Selatan	4,05	5,06	5,30	5,22	5,21
04. Tapanuli Tengah	5,76	6,17	6,28	6,35	6,85
05. Tapanuli Utara	4,98	5,56	5,54	5,95	6,05
06. Tobasamosir	5,30	5,50	5,26	5,52	5,14
07. Labuhanbatu	4,88	5,15	5,72	6,11	6,00
08. Asahan	4,67	4,97	5,37	5,57	5,83
09. Simalungun	4,92	5,12	5,81	6,06	4,48
10. Dairi	4,72	5,02	5,28	5,44	5,46
11. Karo	5,17	6,03	6,59	6,34	4,72
12. Deli Serdang	5,55	5,98	6,01	6,06	12,79
13. Langkat	5,04	5,74	5,78	5,66	5,97
14. Nias Selatan	4,08	4,12	4,46	5,78	5,16
15. Humbang Hasundutan	5,32	5,45	5,94	5,99	6,03
16. Pakpak Bharat	5,83	6,77	5,98	6,02	5,86
17. Samosir	5,10	5,59	5,96	6,07	6,46
18. Serdang Bedagai	5,92	6,14	5,98	6,00	5,97
19. Batubara	4,30	4,65	5,11	4,37	3,35
20. Padang Lawas Utara	5,70	6,74	6,81	6,38	6,13
21. Padang Lawas	5,14	5,56	6,39	6,31	6,12
22. Labuhanbatu Selatan	4,94	5,68	6,21	6,38	6,05
23. Labuhanbatu Utara	5,29	5,61	6,13	6,33	6,33
24. Nias Utara	6,59	6,73	6,68	5,88	6,25
25. Nias Barat	5,66	6,30	6,76	4,93	5,81
26. Sibolga	5,70	6,04	5,09	5,34	5,80
27. Tanjungbalai	4,17	4,75	4,86	4,99	4,52
28. Pematangsiantar	5,36	5,85	6,02	5,71	5,16
29. Tebing Tinggi	5,95	6,04	6,67	6,75	6,91
30. Medan	6,55	7,16	7,69	7,63	4,30
31. Binjai	5,87	6,07	6,28	6,34	6,48
32. Padangsidimpuan	5,83	5,81	5,88	6,23	6,20



Kabupaten/Kota	Tahun				
	2009	2010	2011	2012	2013
33. Gunungsitoli	7,45	6,24	6,46	6,28	6,35
Sumatera Utara	5,07	6,42	6,63	6,22	6,01

Sumber : Badan Pusat Statistik Provsu

Pada tahun 2013, Kota Medan, Kabupaten Deli Serdang, Kabupaten Langkat dan Kabupaten Batu Bara merupakan kabupaten/kota yang memberikan kontribusi terbesar terhadap pembentukan nilai PDRB atas dasar harga berlaku Sumatera Utara masing-masing sebesar 29,64%, 14,82 %, 6,24 %, dan 5,55 %, sedangkan kabupaten/kota lainnya juga memberikan kontribusi tetapi dalam jumlah persentase yang relatif kecil. Kabupaten Asahan sebesar 4,34%, Kabupaten Simalungun sebesar 3,64%, Kabupaten Serdang Bedagai 3,48 %, Kabupaten Labuhanbatu 2,70 %, Kabupaten Labuhanbatu Utara 2,60 %, Kabupaten Karo 2,36 %, Kabupaten Labuhanbatu Selatan 2,28%, Kota Binjai 1,84 %, Kabupaten Mandailing Natal 1,38%, Kabupaten Dairi 1,32%, Kota Pematangsiantar 1,31%, Kabupaten Tapanuli Utara 1,27%, Kabupaten Tobasamosir 1,24%, Kabupaten Tapanuli Selatan 1,11%, dan Kota Tanjungbalai 1,00%. Kontribusi di bawah 1 % yaitu Kabupaten Humbang Hasundutan 0,89%, Kota Tebing Tinggi 0,86%, Kabupaten Tapanuli Tengah 0,82%, Kabupaten Nias Selatan 0,73%, Kota Gunungsitoli 0,72%, Kota Padangsidempuan 0,71%, Kabupaten Padang Lawas Utara 0,62 %, Kabupaten Padang Lawas 0,58%, Kabupaten Samosir 0,55 %, Kota Sibolga 0,53 %, Kabupaten Nias 0,41%, Kabupaten Nias Utara 0,41%, Kabupaten Nias Barat 0,21%, dan Kabupaten Pakpak Bharat 0,12 %.

Aspek kesejahteraan masyarakat berdasarkan fokus kesejahteraan antara lain dapat dilihat dari angka nilai PDRB, kontribusi PDRB, pertumbuhan PDRB, Inflasi, PDRB perkapita, disparitas pendapatan masyarakat dan persentase penduduk yang berada diatas garis kemiskinan. Secara umum dapat diungkapkan sebagai berikut :



a. Pertumbuhan PDRB

Perkembangan laju pertumbuhan ekonomi Sumatera Utara sejak tahun 2009 sampai dengan tahun 2013 terlihat sangat baik, bahkan pertumbuhan ekonomi Sumatera Utara selalu berada diatas capaian nasional, dengan pertumbuhan rata-rata selama 2009-2013 sebesar 6,07%, sementara capaian nasional hanya sebesar 5,87%. Untuk melihat perkembangan laju pertumbuhan ekonomi Sumatera Utara dibandingkan dengan capaian nasional dapat terlihat pada tabel di bawah ini :

Tabel. 87
Perbandingan Pertumbuhan Ekonomi Sumatera Utara dan Nasional
Tahun 2009-2013

wilayah	Pertumbuhan Ekonomi					rata-rata
	2009	2010	2011	2012	2013	
Sumatera Utara	5.07	6.42	6.63	6.22	6.01	6.07
Nasional	4.63	6.22	6.49	6.23	5.78	5.87

Sumber : BPS Provinsi Sumatera Utara (Data Diolah)

Grafik. 40
Pertumbuhan Ekonomi Provinsi Sumatera Utara Tahun 2009-2013
Dibandingkan Dengan Pertumbuhan Ekonomi Nasional



Sumber : BPS Sumatera Utara (Data Diolah)



Jika melihat pertumbuhan ekonomi Sumatera Utara lima tahun terakhir berdasarkan ADHK Tahun 2009-2013 dari sisi produksi, terlihat kondisi sebagai berikut :

Tabel 88
Laju Pertumbuhan Ekonomi Sumatera Utara per sektoral ADHK dari Sisi produksi Tahun 2009-2013

Lapangan Usaha/Sektor	2009	2010	2011*	2012	2013
Pertanian	4.85	5.7	4.82	4.72	4.00
Pertambangan dan Penggalian	1.43	5.87	6.73	2.04	5.48
Industri Pengolahan	2.76	4.16	2.05	3.63	4.01
Listrik, Gas, dan Air Bersih	5.57	6.88	8.21	3.43	3.95
Konstruksi	6.54	6.77	8.54	6.78	7.17
Perdagangan, Hotel, dan Restoran	5.43	6.53	8.09	7.23	7.78
Pengangkutan dan Komunikasi	7.56	9.44	10.02	8.26	7.60
Keuangan, Persewaan, dan Jasa Perusahaan	6.14	10.78	13.61	11.2	8.31
Jasa-jasa	6.62	6.77	8.3	7.54	7.13
Total	5.07	6.42	6.83	6.22	6.01

Sumber : BPS Provinsi Sumatera Utara (Data Diolah)
*) angka revisi

Dari tabel di atas terlihat bahwa pada tahun 2013 sebagian besar sektor PDRB mengalami kenaikan, akan tetapi terdapat 4 sektor yang laju pertumbuhannya lebih kecil dari tahun 2012 diantaranya sektor pertanian, sektor pengangkutan dan komunikasi, dan sektor jasa jasa.

b. Struktur PDRB

Secara garis besar sektor-sektor pembentuk PDRB dapat diklasifikasikan menjadi 3 jenis yakni sektor primer (pertanian dan penggalian serta pertambangan); sektor sekunder (industri pengolahan, listrik, gas dan air bersih serta bangunan/konstruksi); dan sektor tersier (perdagangan, hotel dan restoran, pengangkutan dan komunikasi, keuangan, real estate dan jasa perusahaan serta jasa-jasa).



Jika dilihat dari struktur sektor pembentuk PDRB atas dasar harga berlaku dari tahun 2009-2013 terlihat bahwa sektor sekunder telah mulai meninggalkan sektor primer sebagai penyumbang terbesar bagi PDRB, seperti terlihat dari tabel berikut :

Tabel. 89
Struktur PDRB Sumatera Utara Atas Dasar Harga Berlaku Tahun 2009-2013

SEKTOR	T A H U N				
	2009	2010	2011	2012*)	2013
Primer	24,40	24,29	23,86	23,20	22,62
Sekunder	30,57	30,26	29,84	29,70	29,35
Tersier	45,01	45,45	46,30	47,10	48,03

Sumber : BPS Provinsi Sumatera Utara (data diolah)

Dari data tabel 89 di atas menunjukkan bahwa struktur ekonomi Provinsi Sumatera Utara ternyata lebih didominasi oleh sektor jasa/tersier yang ditunjukkan dari perkembangan kontribusi sektor tersier yakni dari tahun 2009 sebesar 45,01% meningkat terus menjadi 47,10% pada tahun 2012 dan pada tahun 2013 menjadi 48,03%.

Grafik. 41
Struktur Sektor Pembentuk PDRB Sumatera Utara Tahun 2009-2013



Sumber : BPS Sumatera Utara (diolah)



c. Nilai dan Kontribusi PDRB

Kondisi perekonomian Provinsi Sumatera Utara pada periode 2009-2013 secara umum menunjukkan keadaan yang terus membaik/meningkat, hal ini dapat dilihat pada tabel perkembangan nilai dan kontribusi berbagai sektor terhadap PDRB Provinsi Sumatera Utara Atas Dasar Harga Konstan Tahun 2000 ditunjukkan pada tabel dibawah ini.

Tabel 90
 Nilai dan Kontribusi Sektor dalam PDRB Tahun 2009-2013
 Atas Dasar Harga Konstan Tahun 2000
 (Rp. miliar)

NO	Sektor	2009		2010		2011		2012		2013*)	
		(Rp.)	%								
1	Pertanian	26,526.93	23.78	28,040.20	23.60	29,390.58	23.22	30,778.67	22.89	32,010.15	22.46
2	Pertambangan & Penggalian	1,322.98	1.19	1,400.65	1.18	1,494.85	1.18	1,525.32	1.13	1,608.89	1.13
3	Industri Pengolahan	24,977.11	22.39	26,105.21	21.97	26,548.66	20.97	27,513.10	20.46	28,615.62	20.08
4	Listrik, Gas dan Air Bersih	816.01	0.73	872.15	0.73	943.75	0.75	976.09	0.73	1,010.40	0.71
5	Bangunan	7,554.37	6.77	8,066.15	6.79	8,754.63	6.92	9,348.16	6.95	10,018.50	7.03
6	Perdagangan, Hotel dan Restoran	20,575.43	18.44	21,919.34	18.45	23,693.43	18.72	25,406.77	18.89	27,384.48	19.21
7	Pengangkutan & Komunikasi	10,630.44	9.53	11,633.90	9.79	12,799.43	10.11	13,856.60	10.31	14,911.54	10.46
8	Keuangan, Sewa & Js perusahaan	7,939.21	7.12	8,795.15	7.40	9,992.46	7.89	11,111.51	8.26	12,034.81	8.44
9	Jasa-Jasa	11,216.75	10.05	11,976.16	10.08	12,969.81	10.25	13,947.74	10.37	14,942.74	10.48
	PDRB	111,559.22	100.00	118,808.90	100.00	126,587.59	100.00	134,463.95	100.00	142,537.13	100.00

Sumber : BPS Provinsi Sumatera Utara

Ket : *) Angka Sementara

Dari tabel di atas diperoleh gambaran bahwa secara umum struktur ekonomi pembentuk PDRB Provinsi Sumatera Utara atas dasar harga konstan didominasi oleh pertanian disusul oleh sektor Industri Pengolahan, dan berturut-turut oleh sektor perdagangan, Hotel dan Restoran; jasa-jasa, pengangkutan dan komunikasi.



Tabel. 91
 Nilai dan Kontribusi Sektor dalam PDRB Tahun 2009-2013
 Atas Dasar Harga Berlaku
 (Rp. miliar)

NO	Sektor	2009		2010		2011		2012		2013*)	
		(Rp.)	%								
1	Pertanian	54,431.19	23.03	62,984.34	22.90	70,655.87	22.48	76,838.11	21.88	86,118.60	21.32
2	Pertambangan & Penggalian	3,229.57	1.37	3,759.75	1.37	4,341.19	1.38	4,653.32	1.33	5,252.87	1.30
3	Industri Pengolahan	55,050.58	23.29	63,013.46	22.91	70,672.28	22.48	77,484.96	22.07	87,170.66	21.58
4	Listrik, Gas dan Air Bersih	2,324.65	0.98	2,602.70	0.95	2,966.49	0.94	3,178.78	0.91	3,430.43	0.85
5	Bangunan	14,901.55	6.30	17,519.79	6.37	20,172.80	6.42	23,595.94	6.72	27,934.64	6.92
6	Perdagangan, Hotel dan Restoran	44,941.66	19.01	52,395.32	19.05	60,387.52	19.21	67,027.28	19.09	77,918.68	19.29
7	Pengangkutan & Komunikasi	21,040.75	8.90	24,907.45	9.06	28,964.29	9.21	32,854.36	9.36	38,574.73	9.55
8	Keuangan, Sewa & Js perusahaan	15,728.68	6.65	18,163.64	6.60	21,887.63	6.96	26,442.22	7.53	31,030.23	7.68
9	Jasa-Jasa	24,704.99	10.45	29,709.88	10.80	34,324.37	10.92	39,061.19	11.12	46,502.22	11.51
	PDRB	236,353.62	100.00	275,056.31	100.00	314,372.44	100.00	351,136.16	100.00	403,933.06	100.00

Sumber : BPS Provinsi Sumatera Utara
 Ket : *) Angka Sementara

Sedangkan struktur PDRB atas dasar harga berlaku didominasi oleh sektor industri pengolahan kemudian disusul oleh sektor pertanian dan berturut-turut oleh sektor perdagangan, hotel dan restoran; jasa-jasa; pengangkutan dan komunikasi; keuangan, sewa dan jasa perusahaan; pertambangan dan penggalian; dan listrik, gas dan air bersih.

- **Capaian Indikator kinerja “Neraca perdagangan (US\$.000)”**, pada tahun 2014 hanya tercapai sebesar 4,312 US\$ dari target sebesar 4,950 US\$ (terdapat kekurangan 638 US\$ dari target yang telah ditetapkan pada tahun 2014).
- **Capaian Indikator kinerja “Nilai Investasi (PTMB)”**, tercapai sebesar Rp. 124,07 triliun dari target yang ingin dicapai pada tahun 2014 yaitu sebesar Rp. 95,99 triliun, sehingga terdapat Rp. 28,08 triliun diatas target.



- **Capaian Indikator kinerja “Realisasi kinerja APBD Provinsi”**, pada tahun 2014 sebesar Rp. 8,6 triliun lebih besar dari jumlah APBD Provinsi Sumatera Utara ditargetkan pada tahun 2014 sebesar Rp. 8,58 triliun, karena adanya tambahan anggaran pada P.APD tahun 2014.
- **Capaian Indikator kinerja “ ICOR (*Incremental Capital Output Ratio*)”**, pada tahun 2014 sebesar 3,50%, dan angka sementara adalah dikisaran 3,50%.

PENCAPAIAN DAYA SAING SUMATERA UTARA TAHUN 2014



Terkait dengan capaian Daya Saing Provinsi Sumatera Utara pada Tahun 2014 juga dipengaruhi oleh aspek 5 (lima) yang dapat dikatakan sebagai Sub Indikator Kinerja atau Indikator Pendukung dalam rangka keberhasilan Sasaran Strategis **“TERWUJUDNYA PENINGKATAN DAYA SAING PROVINSI SUMATERA UTARA BAIK DI BIDANG EKONOMI, SOSIAL, BUDAYA DAN LINGKUNGAN HIDUP”**, yaitu :

1. Indeks Pembangunan Manusia (IPM)
 2. Laju Pertumbuhan Ekspor (%)
 3. Laju Pertumbuhan Impor (%)
 4. Investasi
 5. Dana Pihak Ketiga (Perbankan).
- **Capaian Indikator kinerja “Indeks Pembangunan Manusia (IPM)”**,

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Sumatera Utara (Sumut) tahun 2013 secara nasional berada di urutan ke-8 dengan capaian 75,57 persen. Namun, di nilai IPM Sumut ini sudah di atas rata-rata nasional yang sebesar 73,81 persen. Peringkat pertama IPM yaitu DKI Jakarta, disusul Sulawesi Utara, Riau, Yogyakarta, Kalimantan Timur, Kepulauan Riau, Kalimantan Tengah, dan Sumatera Utara di



posisi ke-8. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) tersebut, tidak hanya menyangkut di bidang kesehatan saja tetapi menyangkut semua bidang seperti pendidikan. Terkait dengan Capaian Indeks Pembangunan Manusia (IPM) tersebut, terdapat 4 (empat) komponen IPM yaitu :

- 1) Angka Melek Huruf
- 2) Angka Harapan Hidup yang masuk di bidang kesehatan,
- 3) Rata-rata lama sekolah, dan
- 4) Pengeluaran per kapita Provinsi Sumut.

Maka untuk Angka Harapan Hidup perlunya diterapkan pola gaya hidup bersih dan sehat yang harus ditingkatkan melalui promosi kesehatan. Di Sumut sendiri, untuk IPM kabupaten/kota tahun 2013 tertinggi dan berada di atas capaian nasional dan Sumut capaian tertingginya yaitu Kota Medan dan Kota Pematang Siantar dengan capaian 78,62 persen. IPM terendah yakni Nias Barat 47,91 persen, Nias Selatan 68,58 persen, dan Nias Utara 69,39 persen.

Dalam meningkatkan IPM ini, salah satu upaya diperlukannya peran puskesmas yang saat ini menangani 155 jenis penyakit. Pemerintah Provinsi Sumatera Utara melalui Dinas Kesehatan, tidak bisa langsung memberikan bantuan ke puskesmas tapi dari ketenagakerjaan melalui pusat men-drop dokter PTT dan bidan PTT yang digaji dari pusat. Pemenuhan itu, dikhususkan ke daerah terpencil yang merupakan program ke perdalaman di mana dokter PTT dan bidan PTT lebih gampang masuknya.

Sementara untuk indikator sasaran pembangunan kesehatan, Pemerintah Provinsi Sumatera Utara pada Tahun 2016, indikator Angka Kematian Bayi (per 100 kelahiran hidup) capaian 2014 yaitu 20,22 dan sasaran 2016 sebesar 20. Angka Kematian Ibu (per 100 ribu kelahiran hidup) capaian 2014 sebesar 268 dan tahun 2016 sarannya 250. Prevalensi kekurangan gizi (%) capaian 2014 sebesar 21,5 maka di tahun 2016 sarannya sebesar 21. Untuk Umur Harapan Hidup (tahun 2014 capaiannya 70,13 dan pada tahun 2016 sarannya 71,9. Sehingga program prioritas pembangunan kesehatan yaitu program obat dan



perbekalan kesehatan, upaya kesehatan masyarakat, promosi kesehatan dan pemberdayaan masyarakat, perbaikan gizi masyarakat, lingkungan sehat, pencegahan dan pengendalian penyakit, upaya kesehatan per orangan, sumber daya kesehatan, kebijakan dan manajemen pembangunan kesehatan, dan program penelitian dan pengembangan kesehatan.

- **Capaian Indikator kinerja “Laju Pertumbuhan Ekspor (%)”**,

Kinerja ekspor Sumatera Utara Provinsi Sumatera Utara yang terus mencatatkan nilai negatif sepanjang tahun lalu diperkirakan akan berlanjut tahun ini. Hal tersebut tentu akan menghambat laju pertumbuhan ekonomi yang diprediksi Bank Indonesia (BI) mencapai angka 5,8% tahun ini, meskipun Pemerintah sendiri tetap memasang target pertumbuhan di atas 6%.

Dengan keadaan demikian, devisa Provinsi Sumatera Utara dari pasar ekspor tergerus, dimana pada 2014 hanya sebesar US\$9,36 miliar atau turun 2,47% dibanding tahun sebelumnya yang mampu mencatat angka US\$9,60 miliar. Kondisi tersebut terkait belum pulihnya ekonomi global, yang dicerminkan pada ekspor yang mengalami penurunan.

Kinerja ekspor yang buruk itu otomatis mengambat laju ekonomi Provinsi Sumatera Utara pada tahun lalu yang melambat di angka 5,23% dan pada tahun 2015 ekonomi diprediksi membaik dimana, penopangnya dari sektor lain. Indikasi meningkatnya pertumbuhan ekonomi Sumut didukung oleh menguatnya daya beli masyarakat sejalan dengan penurunan harga BBM di awal tahun. Selain didorong daya beli, kegiatan investasi pada tahun 2015 yang diperkirakan meningkat, juga akan mendorong perekonomian di Provinsi Sumatera Utara. Begitupun, kuncinya ada di belanja pemerintah. Semakin cepat pemerintah membelanjakan anggaran maka serapannya akan memberikan dampak yang lebih besar bagi pertumbuhan ekonomi di Provinsi Sumatera Utara. Selain itu, jika semua program infrastruktur mampu dipercepat bisa jadi ekonomi Sumut akan tumbuh di level 5,7%.



- **Capaian Indikator kinerja “Laju Pertumbuhan Impor (%)”**,

Impor barang konsumsi ke Sumatera Utara mengalami peningkatan 12,91 persen secara year on year (yoy). Peningkatan tersebut dikarenakan tingkat konsumsi masyarakat yang cukup tinggi terhadap produk impor. Nilai impor barang konsumsi yang masuk ke Sumut periode Agustus 2013 dengan Agustus 2012 mengalami peningkatan sekitar 12,91 persen atau mencapai 701,7 juta Dolar AS. Impor barang konsumsi dilihat dari jenis golongan barang didominasi gandum-gandum. Komoditas impor barang konsumsi gandum-gandum periode Agustus 2013 mencapai 95,89 juta Dolar AS, naik 8,99 persen dari periode yang sama tahun sebelumnya 87,98 juta Dolar AS. Peningkatan tersebut dikarenakan tingkat konsumsi masyarakat cukup tinggi.

Sementara itu, secara umum pangsa impor terbesar untuk periode Januari – Agustus 2013 masih berasal dari golongan bahan baku/penolong yang mencapai 61,12 persen, sementara untuk barang konsumsi dan barang modal pangasanya masing-masing sebesar 22,74 persen dan 16,15 persen. Pangsa impor untuk golongan barang konsumsi mengalami peningkatan dibanding tahun sebelumnya, sebaliknya pangsa impor untuk bahan baku penolong dan barang modal mengalami penurunan. Nilai impor melalui Sumatera Utara di bulan Maret 2014 tercatat mencapai US\$ 398,77 juta, atau naik sebesar 9,80 persen dibanding bulan Februari 2014 yang sebesar US\$ 363,19 juta. Namun demikian, bila dibandingkan dengan bulan yang sama tahun sebelumnya, angka impor Maret 2014 mengalami penurunan sebesar 11,30 persen.

Sementara itu neraca perdagangan luar negeri Sumatera Utara bulan Maret 2014 mengalami surplus dari sisi nilai sebesar US\$ 439,04 juta, angka ini turun sebesar 5,89 persen dibandingkan dengan bulan sebelumnya yaitu sebesar US\$466,54 juta.



Walaupun sejauh ini neraca perdagangan Sumut masih mengalami surplus, akan tetapi yang perlu diperhatikan adalah membaiknya perekonomian Sumut juga memberikan efek negatif terhadap impor yang juga mengalami kenaikan.

- **Capaian Indikator kinerja “Nilai Investasi”**, capaian kinerja investasi di Provinsi Sumatera Utara akan diuraikan sebagai berikut :

a. Jumlah investor berskala nasional (PMDN/PMA) dan nilai investasinya

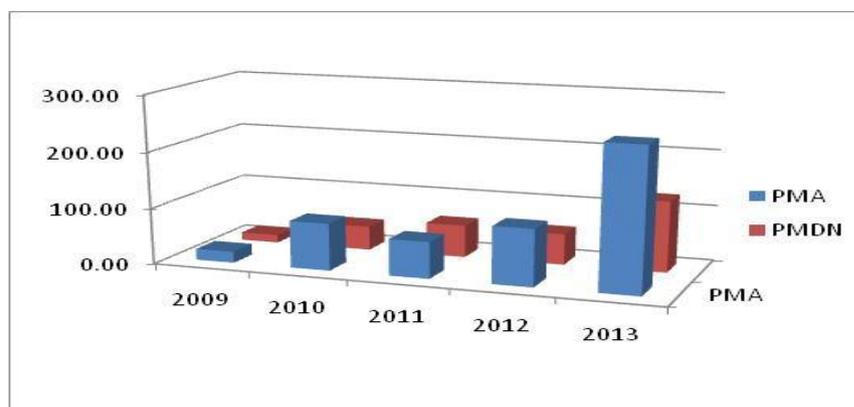
Untuk menjelaskan jumlah investor yang telah menanamkan modalnya di Sumatera Utara untuk tahun 2009-2013 dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 92
Jumlah Investor PMDN/PMA Tahun 2009 - 2013
Provinsi Sumatera Utara

Tahun	Uraian	PMDN	PMA	Total
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
2009	Jumlah Investor	14	20	34
2010	Jumlah Investor	43	84	127
2011	Jumlah Investor	58	65	123
2012	Jumlah Investor	55	101	156
2013	Jumlah Investor	126	252	378
J U M L A H		522	296	818

Sumber : Badan Penanaman Modal dan Promosi Provsu

Grafik 42
Jumlah Investor PMDN/PMA Provinsi Sumatera Utara
Tahun 2009 - 2013





Dari tabel dan grafik di atas terlihat kenaikan yang signifikan untuk jumlah investor PMA maupun PMDN. Jumlah investor PMDN mengalami peningkatan yang signifikan dari 14 jumlah proyek ditahun 2009 menjadi 126 proyek ditahun 2013, begitu juga dengan Penanaman Modal Asing (PMA) mengalami kenaikan dari semula 20 proyek menjadi 252 jumlah proyek yang terealisasi di Sumatera Utara.

b. Jumlah nilai investasi berskala nasional (PMDN/PMA)

Perkembangan jumlah proyek dan nilai investasi baik yang masih dalam tahap persetujuan maupun yang sudah direalisasi di Sumatera Utara untuk tahun 2009-2013 dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 93
Jumlah dan Nilai Investasi PMDN/PMA Tahun 2009 – 2013

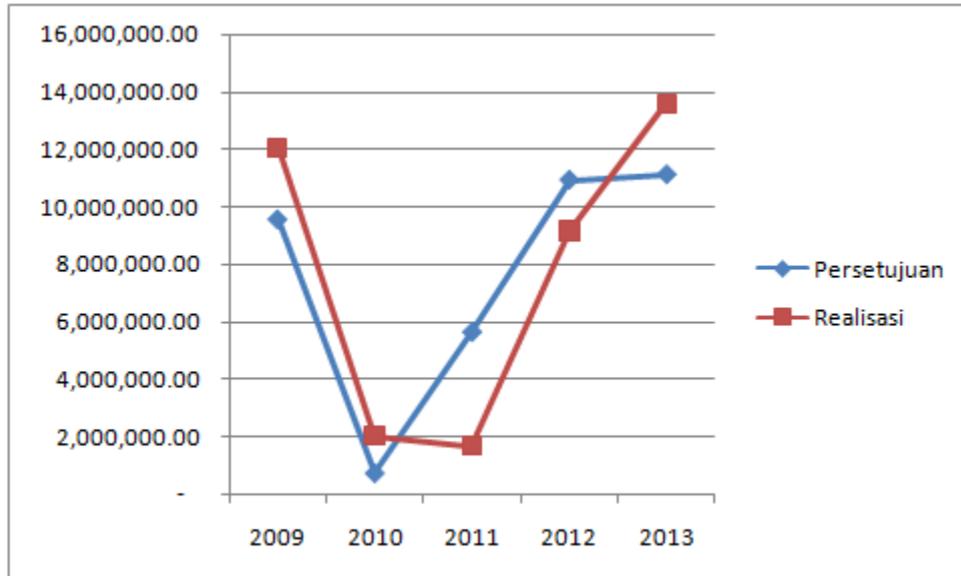
Tahun	Persetujuan		Realisasi	
	Jumlah Proyek	Nilai Investasi	Jumlah Proyek	Nilai Investasi
2009	74	9.546.173,77	34	12.047.929,86
2010	54	747.349,91	127	2.024.885,56
2011	54	5.644.561,01	123	1.662.522,50
2012	33	10.921.354,71	156	9.163.446,19
2013	75	11.106.765,19	378	13.588.420,60
Total	290	37.966.204,59	818	38.487.204,71

Sumber : Badan Penanaman Modal dan Promosi Provsu.

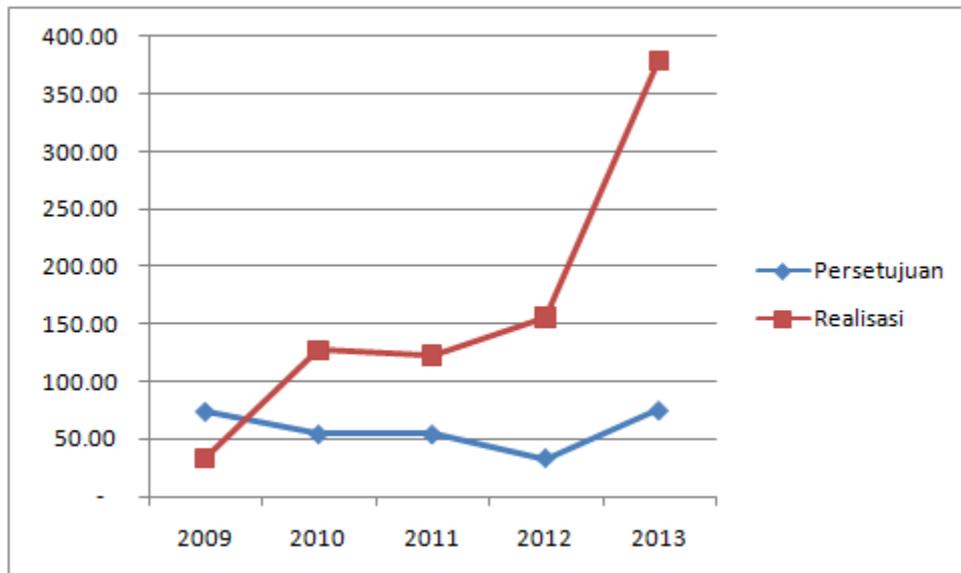
Perkembangan penanaman modal baik Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) maupun Penanaman Modal Asing (PMA), terus mengalami pasang surut dalam lima tahun terakhir ini, baik dilihat dari jumlah proyek maupun jumlah dana yang terealisasi. Namun pada tahun 2013 terjadi peningkatan nilai investasi yang disetujui dan yang direalisasikan.



Grafik 43
Nilai Investasi PMDN/PMA Tahun 2009 – 2013
Provinsi Sumatera Utara (Juta Rp.)



Grafik 44
Jumlah Investasi Proyek PMDN/PMA Tahun 2009 – 2013
Provinsi Sumatera Utara



c. Rasio daya serap tenaga kerja

Rasio daya serap tenaga kerja Perusahaan Modal Asing (PMA) dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

Tabel 94
Rasio Daya Serap Tenaga Kerja (PMA/PMDN) Provinsi Sumatera Utara
Tahun 2009 - 2013

No	Uraian	2009	2010	2011	2012	2013
1	Jumlah Tenaga Kerja yg Bekerja pada Perusahaan PMA/PMDN	11.672	13.995	12.826	27.092	47.696
2	Jumlah Seluruh PMA/PMDN	34	127	123	156	378
3	Ratio Daya Serap Tenaga Kerja	343,3	110,2	104,3	173,7	126,18

Sumber : Badan Penanaman Modal dan Promosi Provsu

PENCAPAIAN DAYA SAING SUMATERA UTARA TAHUN 2014 BIDANG KETAHANAN PANGAN



Terkait dengan capaian Daya Saing Provinsi Sumatera Utara pada Tahun 2014 di bidang Ketahanan Pangan juga dipengaruhi oleh aspek 5 (lima) yang selanjutnya dapat dikatakan sebagai Sub Indikator Kinerja atau Indikator Pendukung dalam rangka keberhasilan Sasaran Strategis **“TERWUJUDNYA PENINGKATAN DAYA SAING PROVINSI SUMATERA UTARA BAIK DI BIDANG EKONOMI, SOSIAL, BUDAYA DAN LINGKUNGAN HIDUP”**, yaitu :

1. Swasembada Pangan, mencakup Aspek Swasembada Beras dan Jagung
2. Angka Kecukupan Energi dan Protein
3. Jumlah Desa Rawan Pangan
4. Pola Pangan Harapan



5. Nilai Tukar Petani (NTP), yang terdiri-dari :

- a) NTP Peternakan
- b) NTP Pangan
- c) NOT Hortikultura, dan
- d) NTP Perikanan.

URAIAN :

▪ **Capaian Indikator kinerja “Swasembada Pangan”,**

Berkenaan dengan swasembada pangan ini, adalah mencakup 2 (dua) hal yaitu Swasembada Beras dan Jagung.

○ **Capaian Swasembada Beras**

Pencapaian Produksi untuk komoditi Padi dengan target 3.771.545 ton telah terealisasi sebesar 3.628.968 ton atau sebesar 96,22 % berdasarkan Angka Sementara (ASEM) Tahun 2014 . Pencapaian produktivitas untuk komoditi Padi telah mencapai 5,05 ton/ha dari target sebesar 4,99 ton/ha. Berdasarkan Angka Sementara (ASEM) tahun 2014 bahwa produksi padi sebesar 3.628.968 ton atau turun sebesar 2,64 % bila dibandingkan dengan produksi padi di tahun 2013. Hal ini disebabkan oleh karena di tahun 2014 telah terjadi anomali iklim yang menyebabkan kekeringan pada periode Januari-Mei 2014 sehingga pada beberapa kabupaten/kota tidak dapat bertanam atau melakukan pergeseran tanam, hal ini berdampak pada pencapaian produksi yang telah ditetapkan sehingga target tanam maupun panen tidak dapat tercapai.

○ **Capaian Swasembada Jagung,**

Pencapaian Produksi untuk komoditi Jagung dengan target 1.529.636 ton telah terealisasi sebesar 1.159.698 ton atau 75,82 % berdasarkan Angka Sementara (ASEM) Tahun 2014. Pencapaian produktivitas untuk komoditi Jagung telah mencapai 5,60 ton/ha dari target sebesar 5,65 ton/ha.



Produksi jagung pada ASEM tahun 2014 turun sebesar 1,97%, hal ini disebabkan pada terjadinya kemarau dan pada beberapa kabupaten yang pertanaman jagungnya sebagai tanaman sela di areal perkebunan, sudah tidak bisa lagi bertanam. Produksi kedelai berdasarkan ASEM Tahun 2014 naik sebesar 76,68 % disebabkan karena sentra pertanaman kedele yang berada di Kabupaten Deli Serdang dan Serdang Bedagai oleh karena Kabupaten ini melakukan pergeseran tanam padi maka sebahagian kecamatannya mengalihkan pertanamannya ke komoditi kedele.

▪ **Capaian Indikator kinerja “Angka kecukupan Energi dan Protein”**

Ketersediaan energi rata-rata penduduk Sumatera Utara tahun 2013 sebesar 3.868 k.kal/kap/hr dan pada tahun 2014 meningkat menjadi 3.887 k.kal/kap/hr (meningkat sebesar 0,49%). Ketersediaan protein tahun 2013 sebesar 76,18 gr/kap/hr dan tahun 2014 sebesar 76,96 gr/kap/hr (meningkat sebesar 1,02 %). Karbohidrat : 3.872 k.kal, Protein 76,58 gram. Ketersediaan energi 3.887 k.kal/kap/hari, protein 76,96 gram/kap/hari. Bila dibandingkan target dan hasil terdapat peningkatan sebesar 0,49 persen untuk ketersediaan energi dan 1,02 persen ketersediaan protein , angka ini diperoleh melalui analisis Neraca Bahan Makanan.

Untuk ukuran Nasional keadaan ini menggambarkan ketersediaan pangan di Sumatera Utara sangat aman, karena target nasional ketersediaan energi per kapita minimal 2.400 k.kal per kapita per hari dan penyediaan protein 63 gram per kapita per hari. Keberhasilan ini ditunjukkan oleh terlaksananya swasembada pangan di Sumatera Utara dan tersedianya sumber protein yang cukup, yang berasal dari daging, ikan.

▪ **Capaian Indikator kinerja “Jumlah Desa Rawan Pangan”.**



Jumlah desa miskin/rawan pangan sebanyak 75 desa, yang diberdayakan melalui penguatan modal usaha kelompok sebanyak 35 kelompok di 13 Kab/kota desa Gemapangan dan Demapan .Pemberian bantuan untuk masyarakat terkena erupsi Gunung Sinabung di Desa Guruhkinayang Kec. Payung Kab.Karo

- **Capaian Indikator Kinerja “Pola Pangan Harapan”.**

Tercapainya Pola Pangan Harapan (PPH) sebesar 84,5 dan konsumsi beras 128,65 kg/kap/tahun. Pola Pangan Harapan (PPH) Sumatera Utara tahun 2013 sebesar 83,6 dan tahun 2014 meningkat menjadi 84,8 (meningkat sebesar 1,43 %) dan konsumsi beras tahun 2013 sebesar 130,61 kg/kap/tahun, bila dibandingkan dengan konsumsi beras tahun 2014 sebesar 128,53 kg/kap/tahun, terjadi penurunan sebesar 1,60%.

- **Capaian Indikator kinerja “Nilai Tukar Petani”.**

Nilai Tukar Petani (NTP) merupakan indikator proxy kesejahteraan petani yaitu perbandingan antara indeks harga yang diterima petani dengan (It) dengan indeks harga yang dibayar petani (Ib). $NTP > 100$ berarti petani mengalami surplus. Harga produksi naik lebih besar dari kenaikan harga konsumsinya. Pendapatan petani naik lebih besar dari pengeluarannya. $NTP = 100$ berarti petani mengalami impas. Kenaikan/penurunan harga produksinya sama dengan persentase kenaikan/penurunan harga barang konsumsi. Pendapatan petani sama dengan pengeluarannya. $NTP < 100$ berarti petani mengalami defisit. Kenaikan harga produksi relatif lebih kecil dibandingkan dengan harga barang konsumsinya. Pendapatan petani turun, lebih kecil dari pengeluarannya.

NTP Sumatera Utara pada tahun 2014 sebesar 100,18 atau naik 0,72% bila dibandingkan dengan tahun 2013, namun bila dilihat dari NTPH (Nilai Tukar Petani Hortikultura) terjadi penurunan. Penurunan disebabkan oleh karena fokus kegiatan hortikultura khususnya sayuran dan buah-buahan masih di Dataran Tinggi terutama di Kabupaten Karo. Seperti kita ketahui sampai saat ini di Kabupaten Karo masih terjadi erupsi Gunung Sinabung sehingga menyebabkan



kerusakan tanaman hortikultura dimana banyak tanaman yang rusak tidak dipanen dan sebagian yang tidak rusak namun tidak dapat berproduksi secara optimal. Perkembangan Nilai Tukar Petani Sektor Tanaman Pangan dan Hortikultura Tahun 2013 dan Tahun 2014 dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 95
Perbandingan Nilai Tukar Petani (NTP)
Tahun 2013 dan 2014

URAIAN	2013	2014*
Nilai Tukar Petani (NTP)	99,48	100,18
• Nilai Tukar Petani Padi & Palawija (NTPP)	99,29	99,54
• Nilai Tukar Petani Hortikultura (NTPH)	102,16	98,14

Sumber : Dinas Pertanian Prov. Sumatera Utara Tahun 2014

o **Capaian NTP Peternakan**

Capaian kinerja Peternak dari program peningkatan program peningkatan kesejahteraan petani dapat dilihat dari nilai NTP (%). **Meningkatnya Nilai tukar petani peternak (NTP).** Nilai Tukar Petani (NTP) yang diperoleh dari perbandingan indeks harga yang diterima petani terhadap indeks harga yang dibayar petani (dalam persentase), merupakan salah satu indikator untuk melihat tingkat kemampuan/daya beli petani di perdesaan. NTP juga menunjukkan daya tukar (*term of trade*) dari produk pertanian dengan barang dan jasa yang dikonsumsi maupun untuk biaya produksi. Semakin tinggi NTP, secara relatif semakin kuat pula tingkat kemampuan/daya beli petani.

Mulai Januari 2014 dilakukan perubahan tahun dasar dalam penghitungan NTP dari tahun dasar 2007=100 menjadi tahun dasar 2012=100. Perubahan tahun dasar ini dilakukan untuk menyesuaikan perubahan/pergeseran pola produksi pertanian dan pola konsumsi rumah



tangga pertanian di pedesaan, serta perluasan cakupan subsektor pertanian dan provinsi dalam penghitungan NTP, agar penghitungan indeks dapat dijaga ketepatannya.

Perbedaan antara NTP tahun dasar 2007=100 dengan NTP tahun dasar 2012=100 adalah meningkatnya cakupan jumlah komoditas baik pada paket komoditas indeks yang diterima petani (It) maupun indeks yang dibayar petani (Ib). Penghitungan NTP (2012=100) juga mengalami perluasan khususnya pada Subsektor Perikanan.

Nilai Tukar Usaha Rumah Tangga Pertanian (NTUP) diperoleh dari perbandingan It terhadap Ib, dimana komponen Ib hanya terdiri dari Biaya Produksi dan Penambahan Barang Modal (BPPBM). Dengan dikeluarkannya konsumsi dari komponen indeks harga yang dibayar petani (Ib), NTUP dapat lebih mencerminkan kemampuan produksi petani, karena yang dibandingkan hanya produksi dengan biaya produksinya.

Pada akhir bulan Desember 2014, nilai NTP peternakan yang dikeluarkan dari BPS menunjukkan nilai sebesar 106,95 atau mencapai 99,66% dari target yang ditetapkan dari SKPD yaitu 107,32. Hal ini karena perubahan It lebih tinggi dibandingkan perubahan pada Ib. Kenaikan yang terjadi pada It karena kenaikan indeks subkelompok ternak besar, indeks subkelompok ternak kecil, dan indeks subkelompok hasil ternak. Sedangkan indeks subkelompok unggas turun. Sementara itu, penurunan yang terjadi pada Ib karena perubahan pada indeks konsumsi rumah tangga (IKRT) yang turun dan indeks BPPBM yang juga turun.

o **Capaian NTP Pangan**

Nilai Tukar Petani (NTP) merupakan indikator proxy kesejahteraan petani yaitu perbandingan antara indeks harga yang diterima petani dengan (It) dengan indeks harga yang dibayar petani (Ib). $NTP > 100$ berarti petani mengalami surplus. Harga produksi naik lebih besar dari kenaikan harga konsumsinya.



Pendapatan petani naik lebih besar dari pengeluarannya. $NTP = 100$ berarti petani mengalami impas. Kenaikan/penurunan harga produksinya sama dengan persentase kenaikan/penurunan harga barang konsumsi. Pendapatan petani sama dengan pengeluarannya. $NTP < 100$ berarti petani mengalami defisit. Kenaikan harga produksi relatif lebih kecil dibandingkan dengan harga barang konsumsinya. Pendapatan petani turun, lebih kecil dari pengeluarannya.

NTP Sumatera Utara untuk Pangan pada tahun 2014 sebesar 99,54 atau naik 0,25% bila dibandingkan dengan tahun 2013, sedangkan NTPH (Nilai Tukar Petani Hortikultura) terjadi penurunan yaitu dari 102,16 pada tahun 2013 menjadi 98,14 pada tahun 2014 atau turun 3,94 %. Penurunan disebabkan oleh karena fokus kegiatan hortikultura khususnya sayuran dan buah-buahan masih di Dataran Tinggi terutama di Kabupaten Karo. Seperti kita ketahui sampai saat ini di Kabupaten Karo masih terjadi erupsi Gunung Sinabung sehingga menyebabkan kerusakan tanaman hortikultura dimana banyak tanaman yang rusak tidak dipanen dan sebagian yang tidak rusak namun tidak dapat memproduksi secara optimal

o **Capaian NTP- Perikanan.**

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) Tahun 2014, bahwa Nilai Tukar Nelayan di Sumatera Utara adalah sebesar 100,69 dimana hal ini dibandingkan dengan Nilai Tukar Nelayan pada tahun 2013 mengalami penurunan 4%, dimana Nilai Tukar Nelayan pada tahun 2013 adalah sebesar 104,94, sedangkan apabila dibandingkan dengan target yang telah ditetapkan dalam RPJMD Sumut Tahun 2013-2018 sebesar 110, maka persentase indeks nilai tukar nelayan belum tercapai optimal (91,54%).

Nilai Tukar Nelayan Sumatera Utara di atas 100%, ini menggambarkan bahwa keluarga nelayan Sumatera Utara mempunyai tingkat kesejahteraan cukup baik untuk memenuhi kebutuhannya dan mempunyai potensi untuk mengkonsumsi kebutuhan sekunder atau tersiernya atau menabung dalam bentuk investasi barang.



Adapun angka Nilai Tukar Nelayan ini menurun pada tahun 2014 disebabkan oleh beberapa faktor yang mempengaruhi selain keadaan force major, seperti cuaca yang memburuk sehingga nelayan tidak dapat melaut, kelangkaan bbm (solar), sumberdaya ikan yang sudah mulai menurun dikarenakan kurangnya rehabilitasi ekosistem sebagai tempat hidup ikan di laut, dimana perlu adanya: pembuatan rumah ikan di Pantai Barat dan Pantai Timur, Rehabilitasi Ekosistem Terumbu Karang, Transplantasi Terumbu

Karang serta rehabilitasi mangrove. Selain itu, faktor penurunan Nilai Tukar Nelayan tahun 2014 disebabkan oleh seluruh kegiatan berupa bantuan ke masyarakat tidak dilaksanakan oleh Dinas Kelautan dan Perikanan Provsu karena belum memenuhi persyaratan sesuai Permendagri No 32 Tahun 2011 Perihal: Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dimana seluruh kegiatan berupa bantuan kepada masyarakat merupakan hibah/ bantuan sosial yang membutuhkan proposal kelompok masyarakat yang ditujukan kepada Gubernur Sumatera Utara.

Kemudian Gubernur Sumatera Utara meminta kepada SKPD terkait untuk melakukan verifikasi usulan bantuan hibah dari kelompok tersebut dan membuat rekomendasi yang ditujukan kepada Gubernur Sumatera Utara, yang kemudian Gubernur Sumatera Utara menetapkan dalam SK. Mengingat pada tahun 2014, Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sumatera Utara belum melaksanakan seluruh prosedur tersebut oleh karena itu semua kegiatan masyarakat baik untuk nelayan, pembudidaya, pengolahan dan pemasaran tidak dilaksanakan. Hal ini jelas mempengaruhi penurunan indeks nilai tukar nelayan dikarenakan dengan adanya bantuan-bantuan alat tangkap, coolbox dan kapal sangat membantu nelayan dalam meningkatkan produksi tangkapan yang akhirnya mempengaruhi pendapatannya. Terutama melalui mata pencaharian alternatif nelayan untuk mengantisipasi musim yang tidak dapat melaut, sehingga nelayan tetap mendapatkan penghasilan melalui pekerjaan alternatifnya seperti budidaya lele di pekarangan, kepiting bakau, dan sebagainya.

PENCAPAIAN DAYA SAING SUMATERA UTARA TAHUN 2014 BIDANG KETAHANAN ENERGI



Terkait dengan capaian Daya Saing Provinsi Sumatera Utara pada Tahun 2014 di bidang Ketahanan Energi juga dipengaruhi oleh aspek 2 (dua) yang selanjutnya dapat dikatakan sebagai Sub Indikator Kinerja atau Indikator Pendukung dalam rangka keberhasilan Sasaran Strategis **“TERWUJUDNYA PENINGKATAN DAYA SAING PROVINSI SUMATERA UTARA BAIK DI BIDANG EKONOMI, SOSIAL, BUDAYA DAN LINGKUNGAN HIDUP”**, yaitu :

1. Daya Listrik Terpasang
2. Rasio Elektrifikasi.

URAIAN :

▪ **Capaian Indikator kinerja “Ketahanan Energi”,**

Capaian Kinerja pada Indikator ini dipengaruhi oleh 2 (dua) aspek atau sub indikator kinerja, sebagaimana diuraikan sebelumnya, yaitu :

1. Daya Listrik Terpasang

Sistem tenaga listrik Provinsi Sumatera Utara tidak bisa dilepaskan dari sistem Sumatera Bagian Utara (SUMBAGUT) PT. PLN (Persero). Tenaga listrik dipasok kepada masyarakat melalui sistem terintegrasi pembangkit, transmisi dan distribusi. Karena seluruh wilayah Indonesia termasuk Provinsi Sumatera Utara merupakan wilayah usaha PT. PLN (Persero), penyediaan tenaga listrik terintegrasi hanya dilakukan oleh PT. PLN (Persero). Sistem ketenagalistrikan SUMBAGUT terdiri dari Provinsi Aceh dan Provinsi Sumatera Utara. Sistem SUMBAGUT dipasok dari beberapa pembangkit listrik yang pada umumnya berada di Sumatera Utara. Sumber energi primer yang digunakan untuk membangkitkan energi listrik sistem SUMBAGUT bervariasi dari minyak bumi, gas, batubara, air dan panas bumi. Berikut ini data pembangkit terpasang di Sumatera Utara yang memasok listrik ke sistem SUMBAGUT:



Kapasitas terpasang pembangkit listrik di Provinsi Sumatera Utara yang memasok daya ke sistem SUMBAGUT adalah sebesar 2.855,3 MW. Selain menggunakan bahan bakar terbarukan berupa diesel dan batubara, beberapa pembangkit listrik memanfaatkan sumber energi terbarukan seperti tenaga air, panas bumi dan biomassa. Kapasitas pembangkit berbasis energi fosil dan energi terbarukan masing-masing 2469 MW dan 386,3 MW. Komposisi pembangkit listrik berbasis energi terbarukan yaitu sebesar 13,5 % dari total kapasitas terpasang di Provinsi Sumatera Utara. Berdasarkan data UPB PT. PLN Sumatera Utara, kapasitas terpasang pembangkit listrik yang berlokasi di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam adalah sebesar 463 MW.

Jadi, total kapasitas terpasang pembangkit sistem SUMBAGUT yaitu sebesar 3318,3. Sedangkan daya mampu pasok pembangkit sistem SUMBAGUT hanya sekitar 1500 MW atau sekitar 45,2 % dari total kapasitas terpasang. Kemampuan pasok pembangkit relatif rendah disebabkan oleh beberapa hal yaitu:

1. Kondisi pembangkit eksisting yang sudah berumur di atas 20 tahun khususnya di pembangkit sektor Belawan dan Medan sehingga rentan mengalami kerusakan.
2. Pembangkit-pembangkit baru dibangun berbahan bakar batubara justru sering tidak stabil atau keluar sistem kelistrikan seperti PLTU Labuhan Angin (230 MW).
3. PLTU Nagan Raya (220 MW) dan PLTU Pangkalan Susu (440 MW) belum beroperasi maksimal terkendala persoalan teknis.

Penyediaan energi listrik di sisi pembangkit sangat terbantu oleh kebijakan PT. PLN (Persero) melakukan sewa pembangkit diesel (455 MW) yang tersebar di sektor Medan dan Belawan.



2. Rasio Elektrifikasi

Rasio elektrifikasi Provinsi Sumatera Utara tahun 2014 sebesar 89,91 %, beban puncak sistem Sumatera Bagian Utara pada tahun 2013 dan 2014 sudah mencapai sekitar 1750 MW. Rasio elektrifikasi Kondisi ini tidak dibarengi dengan daya mampu pasok yang hanya sekitar 1500 MW, sehingga terjadi defisit listrik sekitar 250 MW. Kondisi kelistrikan Sumatera Bagian Utara masih jauh dari kondisi ideal yaitu seharusnya memiliki cadangan listrik ideal 30 % dari beban puncak. Apabila beban puncak sistem Sumatera Bagian Utara sekitar 1750 MW maka seharusnya cadangan daya listrik sudah mencapai sekitar 525 MW.

Data Bank Indonesia pada tahun 2014, Provinsi Sumatera Utara mencatat pertumbuhan ekonomi rata-rata sebesar 5,55 %. Jika pertumbuhan kebutuhan listrik optimistik Provinsi Sumatera Utara mengacu kepada angkadi atas pertumbuhan ekonomi rata-rata yaitu sekitar 7 % maka kebutuhan listrik pada Tahun 2015 akan mengalami kenaikan 122,5 MW sehingga beban puncak listrik dapat mencapai angka sekitar 1872,5 MW. Jika tidak maksimal perbaikan kinerja pembangkit eksisting dan tidak adanya pembangunan pembangkit baru di Sumatera Utara maka bisa dibayangkan pertumbuhan sektor listrik tidak bisa menunjang pertumbuhan ekonomi Sumatera Utara yang relatif tinggi.

Pembangunan Listrik Pedesaan Tahun 2013 dan Tahun 2014, dilakukan baik melalui dana APBD maupun APBN. Pada tahun 2014, Pemerintah Provinsi Sumatera Utara melalui Dinas Pertambangan dan Energi telah melaksanakan kegiatan “Pembangunan *Solar Home System* (SHS) 50 Watt peak di Desa Terpencil di Sumatera Utara”.

Kegiatan ini bertujuan memberi penerangan bagi rumah tangga yang berada di desa terpencil dengan kapasitas maksimum 50 Watt peak untuk setiap rumah tangga. Output kegiatan adalah terbangunnya Solar Home



System (SHS) sebanyak : 350 unit pada 6 (enam) kabupaten di Sumatera Utara, yaitu :

- Kabupaten Langkat : 30 unit,
- Kabupaten Labuhan Batu Utara : 30 unit,
- Kabupaten Simalungun : 30 unit,
- Kabupaten Tapanuli Utara : 30 unit,
- Kabupaten Padang Lawas Utara : 81 unit
- Kabupaten Mandailing Natal : 149 unit.

Outcome kegiatan ini adalah masyarakat sebanyak 350 KK (Kepala Keluarga) dapat menikmati penerangan listrik tenaga surya, yang diharapkan dapat meningkatkan kualitas hidup masyarakat di desa terpencil di Sumatera Utara serta meningkatkan rasio elektrifikasi di Provinsi Sumatera Utara. Pembangunan SHS di desa terpencil juga telah dilakukan pada Tahun 2013.

Total SHS yang dibangun yaitu sebanyak : 80 Unit pada 3 (tiga) kabupaten di Sumatera Utara yaitu :

- Kabupaten Langkat : 26 unit,
- Kabupaten Labuhan Batu Utara : 26 unit,
- Kabupaten Tapanuli Selatan : 28 unit,

Apabila dibandingkan dengan tahun anggaran 2013, pembangunan SHS pada tahun anggaran 2014 mengalami peningkatan sebanyak 270 Unit.



PENCAPAIAN DAYA SAING SUMATERA UTARA PADA BIDANG LINGKUNGAN HIDUP TAHUN 2014



Terkait dengan capaian Daya Saing Provinsi Sumatera Utara pada Tahun 2014 di bidang Lingkungan Hidup juga dipengaruhi oleh aspek 4 (empat) yang selanjutnya dapat dikatakan sebagai Sub Indikator Kinerja atau Indikator Pendukung dalam rangka keberhasilan Sasaran Strategis **“TERWUJUDNYA PENINGKATAN DAYA SAING PROVINSI SUMATERA UTARA BAIK DI BIDANG EKONOMI, SOSIAL, BUDAYA DAN LINGKUNGAN HIDUP”**, yaitu :

1. Pelayanan Informasi Status Mutu Air Sungai dan Danau di Reseptor yang sensitif.
2. Pelayanan Informasi Status Mutu Udara Ambient.
3. Cakupan Layanan AMDAL
4. Cakupan Pelayanan Kasus-Kasus Lingkungan Hidup.

Pemerintah Provinsi Su

Sasaran yang ingin dicapai berkenaan dengan Lingkungan Hidup di Provinsi Sumatera Utara, diantaranya adalah :

- 1) Menurunkan tingkat Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup dan Terciptanya Lingkungan Hidup yang bersih dalam Rangka menuju Masyarakat yang sehat dan sejahtera. Indikator kinerjanya meliputi:
 - a) Cakupan pelayanan AMDAL dengan target kinerja yang ditetapkan pada Dokumen Penetapan Kinerja awal tahun 2014 sebesar 100%.
 - b) Cakupan pelayanan kasus-kasus lingkungan hidup dengan target kinerja yang ditetapkan pada Dokumen Penetapan Kinerja awal tahun 2014 sebesar 100%.
 - c) Dokumen pemantauan pengelolaan wilayah pesisir dengan target kinerja yang ditetapkan pada Dokumen Penetapan Kinerja tahun 2014 sebanyak 1 dokumen.



2) Tersedianya Data dan Informasi Sumber Daya Alam Lingkungan Hidup yang Lengkap, Akurat dan Mudah diakses oleh semua pemangku kepentingan dan masyarakat. Indikator kinerjanya meliputi:

- a) Pelayanan Informasi Status Mutu Air Sungai dan Danau di reseptor yang sensitive dengan target kinerja yang ditetapkan pada Dokumen Penetapan Kinerja awal tahun 2014 sebanyak 6 lokasi.
- b) Pelayanan Informasi Status Mutu Udara Ambien dengan target kinerja yang ditetapkan pada Dokumen Penetapan Kinerja awal tahun 2014 sebanyak 5 lokasi.
- c) Publikasi Dokumen Status Lingkungan Hidup dengan target kinerja yang ditetapkan pada Dokumen Penetapan Kinerja awal tahun 2014 sebanyak 1 dokumen.

Guna mewujudkan sasaran tersebut, tentu disikapi dengan menyusun program dan kegiatan yang relevan, diantaranya adalah :

- **Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup.**

Program ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas lingkungan hidup dalam mencegah pencemaran dan perusakan lingkungan hidup baik di darat, perairan tawar dan laut, maupun udara sehingga masyarakat memperoleh kualitas lingkungan yang baik.

Sedangkan yang menjadi sasaran strategisnya adalah menurunnya tingkat pencemaran lingkungan hidup dan terciptanya lingkungan hidup yang bersih dalam rangka menuju masyarakat yang sehat dan sejahtera dan tersedianya data dan informasi sumber daya alam dan lingkungan hidup yang lengkap, akurat dan mudah diakses oleh semua pemangku kepentingan dan masyarakat.

- **Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam.**

Program ini bertujuan untuk melindungi sumber daya alam dari kerusakan yang di sebabkan oleh aktivitas pengelolaan yang kurang memperhatikan dampak negatif terhadap potensi sumber daya alam dan



lingkungan hidup serta menyelenggarakan pengelolaan kawasan konservasi untuk menjamin kerjasama ekosistem, sehingga terjaga sistem kehidupan.

Sedangkan yang menjadi sasaran strategisnya adalah tersedianya data dan informasi sumber daya alam dan lingkungan hidup yang lengkap, akurat dan mudah diakses oleh semua pemangku kepentingan dan masyarakat.

Target yang akan dicapai pada program perlindungan dan konservasi sumberdaya alam, yaitu terjaganya kualitas sumber daya alam berupa air, udara dan tanah sebagai media lingkungan berikut upaya pemulihan dan penanggulangannya dengan melibatkan masyarakat.

✓ **Program Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi Sumberdaya Alam dan Lingkungan Hidup**

Program ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas dan akses informasi dan sumber daya alam dan lingkungan hidup dalam rangka mendukung pemanfaatan sumber daya alam dan perlindungan fungsi lingkungan hidup.

Sasarannya adalah tersedianya data dan informasi sumber daya alam dan lingkungan hidup yang lengkap, akurat dan mudah diakses oleh semua pemangku kepentingan dan masyarakat.

✓ **Program Pembinaan Lingkungan Sosial Dana Bagi Hasil Cukai/Hasil Tembakau (DBHC-HT)**

Program ini bertujuan untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat di sekitar perkebunan dan industri dan industri pendukungnya mengenai dampak lingkungan dari industri tembakau serta mengembangkan dan memperkuat partisipasi stakeholder dalam pengelolaan dan pelestarian lingkungan khususnya disektor tembakau.

✓ **Program Pengelolaan dan Rehabilitasi Ekosistem Pesisir dan Laut**

Program ini bertujuan untuk mengelola dan memulihkan kembali sumber daya alam yang disekitar pesisir dan Laut. Adapun sasaran strategis dari program ini adalah menurunnya tingkat pencemaran lingkungan hidup dan terciptanya



lingkungan hidup yang bersih dalam rangka menuju masyarakat yang sehat dan sejahtera.

URAIAN CAPAIAN KINERJA:

- **Capaian Indikator Kinerja “Pelayanan Informasi Status Mutu Air Sungai dan Danau di Reseptor yang sensitif”,**

Pelayanan Status Mutu Air Sungai dan Danau di reseptor yang sensitive, Realisasi kinerja untuk indikator kinerja dari Pelayanan Status Mutu Air Sungai dan Danau di reseptor yang sensitive sesuai dengan target yang telah ditetapkan yaitu sebanyak 6 lokasi yang terdapat di:

1. Sungai Deli

Status mutu air Sungai Deli di 7 titik sampling adalah

- Status Mutu air di 5 titik (Sibayakindo, Jembatan Simalingkar B, Jembatan Jl. Ir. Juanda, Pertemuan antara S.Deli dan S. Babura, dan Jembatan Pulo Brayan) tergolong Cemar Ringan.
- Status mutu air di 2 titik (Pt. Unibis dan Jembatan Medan Labuhan) tergolong Cemar Sedang.

2. Sungai Belawan

Status mutu air di 7 titik sampling (Jembatan Tuntungan, Pertemuan S.Belawan-Krio, PDAM Tirtanadi Medan, PT. Everbright, Pabrik Gulai Sei Semayang, PT. Rubber Hock Lie, Tirtanadi Hamparan Perak) pada Sungai Belawan tergolong Cemar Ringan.

3. Sungai Asahan

Status mutu air Sungai Asahan di 6 titik sampling adalah

- Status Mutu air di 2 titik (Jembatan Jl. Balige Psr. Porsea, Jembatan Desa Meranti Pintu Pohan) tergolong Cemar Ringan.
- Status mutu air di 2 titik (Titi Gantung Deang-deang, Jembatan downstream PKS Pulo Raja) tergolong Cemar Sedang.



- Status mutu air di 2 titik (Jembatan Kuning P.Simardan, Jembatan Tabayong Desa Patembo) tergolong Cemar Berat.

4. Sungai Wampu

Status mutu air di 6 titik sampling (Jembatan Desa Sogong, Jembatan Sei Bahorok, Jembatan Desa Tanjung Lenggang, Penyeberangan Getek Jumari Desa Perhiasan, Jembatan Jl. Umar Baki binjai, Jembatan Desa Stabat) pada Sungai Wampu tergolong Cemar Sedang.

5. Sungai Percut

Status mutu air Sungai Percut di 6 titik sampling adalah

- Status Mutu air di 2 titik (Jembatan Bukum desa Cinta Rakyat dan Jembatan desa Sari laba Jahe) tergolong Cemar Ringan.
- Status mutu air di 3 titik (Jembatan desa Ajibaho Patumbak, Jembatan Medan Amplas dan Jembatan Desa Bandar Setia) tergolong Cemar Sedang.
- Status mutu air di 1 titik (Jembatan Desa Tembung) tergolong Cemar Berat.

6. Sungai Batahan

Status mutu air di 6 titik sampling (Jembatan Gantung Desa Batu, Jembatan Bitungan Bejangkar Baru/Aerapa, Jembatan Bitungan Bejangkar Kampung, Jembatan Rambin tran-1, Jembatan Gantung Simpang Gordes, Lubuk Pusing) pada Sungai Batahan tergolong Cemar Berat.

Tabel 96
Capaian kinerja untuk pelayanan informasi
status mutu air sungai dan danau di reseptor sensitive
dari Tahun 2012- 2014

Tahun	Jumlah Kualitas air sungai dan danau yang dipantau
2012	7
2013	3
2014	6

Sumber : Badan Lingkungan Hidup Prov. Sumut, 2014



Capaian kinerja untuk indikator pelayanan informasi status mutu air sungai dan danau di reseptor sensitive tahun 2014 lebih tinggi dari tahun 2013 namun masih lebih rendah dari tahun 2012. Pencapaian kinerja ini sangat bergantung terhadap penyelenggaraan anggaran pada tahun berjalan.

▪ **Capaian Indikator Kinerja “Pelayanan Informasi Status Mutu Udara Ambient.**

Realisasi kinerja untuk indikator kinerja dari Pelayanan Informasi Status Mutu Udara Ambient masih di bawah target yang telah ditetapkan yaitu sebanyak 4 lokasi yang terdapat di:

- Kota Medan
- Kota Binjai
- Kabupaten Deli Serdang
- Kabupaten Karo

Kualitas Udara untuk parameter SO₂, NO₂, H₂S, NH₃, TSP secara trend nilai keseluruhan di wilayah Medan, Binjai, Deli Serdang, Karo menunjukkan bahwa masih dibawah ambang batas baku mutu kualitas udara ambient. Sedangkan kualitas udara untuk parameter kebisingan di wilayah-wilayah tersebut terdapat trend nilai yang telah melewati ambang batas baku mutu kualitas udara ambient sebagai dampak aktifitas pembangunan dan kegiatan perkotaan.

Capaian kinerja untuk indikator ini hanya mencapai 80% yaitu hanya tercapai 4 lokasi dari 5 lokasi yang ditargetkan. Hal ini disebabkan karena keterbatasan anggaran yang dialokasikan sehingga target tidak terpenuhi dengan baik. Untuk Capaian Kinerja dari indikator ini dari tahun ke tahun dapat dilihat dari Tabel berikut ini:



Tabel 97
Capaian kinerja untuk pelayanan informasi
status mutu udara ambien dari tahun ke tahun

Tahun	Jumlah Kabupaten/Kota yang dipantau Kualitas Udara Ambienya
2012	4
2013	1
2014	4

Sumber : Badan Lingkungan Hidup Prov. Sumut, 2014

Capaian kinerja untuk indikator pelayanan informasi status mutu udara ambien tahun 2014 lebih tinggi dari tahun 2013 dan sama dengan tahun 2012. Pencapaian kinerja ini sangat bergantung terhadap penyelenggaraan anggaran pada tahun berjalan.

▪ **Capaian Indikator Kinerja “Cakupan Layanan AMDAL”.**

Sebagaimana Target Kinerja yang ditetapkan pada Indikator Kinerja untuk indikator kinerja dari **Cakupan Pelayanan AMDAL** ini bahwa Realisasi kinerja adalah 100%, sehingga dengan demikian dapat disimpulkan bahwa Capaian Kinerjanya SANGAT BAIK. Capaian Kinerja tersebut tidak terlepas dari sinertigas antara Pemerintah Provinsi Sumatera Utara melalui Badan Lingkungan Hidup Provinsi Sumatera Utara dengan Perusahaan yang mengajukan pembuatan dokumen AMDAL/UKL-UPL . Pada Tahun 2014 sebanyak 8 perusahaan dan mengajukan dokumen AMDAL/UKL-UPL dan yang sudah selesai dibahas oleh Badan Lingkungan Hidup Provinsi Sumatera Utara tahun 2014 juga sebanyak 8 dokumen.



Berikut judul-judul dokumen AMDAL/RKL-RPL dari 8 Perusahaan tersebut:

Tabel 98
Daftar Dokumen AMDAL/Rkl-Rpl
Yang Sudah Selesai dibahas di Badan Lingkungan Hidup
Provinsi Sumatera Utara Tahun 2014

NO FINAL	JUDUL DOKUMEN	LOKASI KEGIATAN	JENIS DOKUMEN	NO.KEP.KELAYAKAN/REKOMENDASI	PEMRAKARSA
1	KELAYAKAN LINGKUNGAN HIDUP RENCANA KEGIATAN PEMBANGUNAN PEMBANGKIT LISTRIK TENAGA AIR (PLTA) BATANG TORU KAPASITAS 500 MW DAN JARINGAN TRANSMISI 275 KV OLEH PT. NORTH SUMATERA HYDRO ENERGY DARI PLTA BATANGTORU SAMPAI DESA PARSALAKAN KECAMATAN ANGKOLA BARAT KABUPATEN TAPSEL PROV.SU	Desa Persalakan Kec. Angkola Kab. Tapanuli selatan	AMDAL, ERL-EDL	NOMOR : 188.44/135/KPTS/2014 TANGGAL 19 FEBRUARI 2014	PT. NORTH SUMATERA HYDRO ENERGY
2	Rencana Kegiatan Pengembangan Pembangunan Kawasan Industri Medan	Kelurahan Mabar Kec. Medan Deli Kelurahan Tangkahan, Kec. Medan Labuhan Kota Medan Desa Saentis Kec. Percut Sei Tuan Kab. Deli Serdang	AMDAL, ERL-EDL	NOMOR:188.44/179/KPTS/2014 TANGGAL 27 MARET 2014	PT. KIM
3	KEGIATAN PEMASANGAN JARINGAN PIPA SEKUNDER DAN SAMBUNGAN RUMAH (HOUSE CONNECTION) AIR LIMBAH RUMAH TANGGA KEGIATAN METROPOLITAN SANATATION MANAGEMENT AND HEALTH PROJECT (MSMHP)	KOTA MEDAN DAN KABUPATEN DELI SERDANG	AMDAL, ERL, EDL	NOMOR: 188.44/559/HUK/2014 TANGGAL 04 AGUSTUS 2014	DINAS PENATAAN RUANG DAN PERMUKIMAN PROV. SU
4	RENCANA KEGIATAN PEMBANGUNAN LANDFILL LIMBAH B3 SEBAGAI FASILITAS PENUNJANG PROSES PRODUKSI ALUMINIUM INGOT PT. INALUM DI DESA KUALA TANJUNG KECAMATAN SEI SUKA KABUPATEN BATUBARA PROVINSI SUMATERA UTARA OLEH PT. INALUM PERSERO	DESA KUALA TANJUNG KEC. SEI SUKA KAB. BATUBARA	AMDAL, ERL-EDL	NOMOR: 188.44/352/HUK/2014 TANGGAL 06 MEI 2014	PT. INALUM
5	RENCANA KEGIATAN PEMBANGUNAN JALUR GANDA KERETA API SEPANJANG 23,1KM	DARI STASIUN MEDAN KOTA MEDAN SAMPAI STASIUN ARASKABU KAB. DELI SERDANG PROV. SU	AMDAL, ERL-EDL	NOMOR: 188.44/560/KPTS/2014 TANGGAL 04 AGUSTUS 2014	Satker Pengembangan Perkeretaapian SU Direktorat Jend Perkeretaapian Kementerian Perhubungan
6	RENCANA KEGIATAN EKSPOLRASI EMAS DAN MINERAL PENGIKUTNYA DI DALAM WILAYAH KONTRAK KARYA (PENCIUTAN III) PT. AGINCOURT RESOURCES SELUAS 64.138 HA	KAB. TAPANULI SELATAN, KAB. TAPANULI TENGAH DAN TAPANULI UTARA	UKL-UPL	913/BLH-SU/BTL-A/2014 TANGGAL 28 APRIL 2014	PT. AGINCOURT RESOURCES
7	RENCANA KEGIATAN PEMBANGUNAN PABRIK PALM KERNEL (PKO) DAN PABRIK PENGOLAHAN BIJI JARAK	DESA UJUNG GADING JAE, KEC. SIMANGAMBAT KAB. PADANGLA WAS UTARA	ADENDUM AMDAL/ERL-EDL	NOMOR : 188.44/551/KPTS/2014 TANGGAL 25JULI 2014	PT. BARUMUN AGRO SENTOSA
8	RENCANA KEGIATAN PEMBANGUNAN PIPA GAS-KAWASAN INDUSTRI MEDAN (KIM) HINGGA KAWASAN EKONOMI KHUSUS	SEI MANGKEI	UKL-UPL	NOMOR: 07/UKL-UPL TANGGAL 05 SEPT 2014	PT. PERTAMINA SEI MANGKEI



Tabel 99
Capaian Kinerja Cakupan Pelayanan AMDAL dari Tahun 2012-2014

TAHUN	PERUSAHAAN YANG MENGAJUKAN PEMBUATAN DOKUMEN AMDAL/UKL-UPL	DOKUMEN AMDAL/UKL-UPL YANG SUDAH SELESAI DIBAHAS BLH-SU	CAPAIAN KINERJA (%)
2012	5	5	100
2013	20	20	100
2014	8	8	100

Dari Tabel 90 di atas dapat disimpulkan bahwa pencapaian kinerja untuk indikator cakupan pelayanan AMDAL, perusahaan yang mengajukan pembuatan Dokumen AMDAL/UKL-UPL sebanyak 5 (lima) Perusahaan dan dapat terselesaikan, Tahun 2013 sebanyak 20 (dua puluh) perusahaan dan dapat terselesaikan dan Tahun 2014 perusahaan yang mengajukan pembuatan Dokumen AMDAL/UKL-UPL sebanyak 8 (delapan) Perusahaan dan dapat terselesaikan. Dari tabel dapat dilihat bahwa Trend perusahaan yang mengajukan perusahaan yang mengajukan pembuatan Dokumen AMDAL/UKL-UPL naik turun.

▪ **Capaian Indikator Kinerja “Cakupan Pelayanan Kasus-Kasus Lingkungan Hidup.**

Realisasi kinerja untuk indikator kinerja dari Cakupan pelayanan kasus-kasus lingkungan hidup hanya mencapai 59,38% dari target yang ditetapkan yaitu 100 %. Sehingga Capaian Indikator Kinerja ini adalah 58,39 % atau pada Kategori CUKUP BAIK. Capaian ini didapat dari Jumlah pengaduan masyarakat yang diterima instansi lingkungan hidup Provinsi Sumatera Utara dalam 1 tahun sebanyak 32 kasus sedangkan jumlah pengaduan yang ditindaklanjuti hanya 19 kasus.

Permasalahan yang ada terkait dengan Capaian pada Indikator Kinerja disebabkan karena beberapa hal antara lain masih kurangnya koordinasi dengan masyarakat di kabupaten/kota dalam melakukan tindak lanjut pengaduan kasus pencemaran dan/atau perusakan lingkungan sehingga beberapa kasus di kabupaten/kota tidak dapat ditindaklanjuti. Selain itu hal ini juga disebabkan



karena kurangnya personil untuk menindaklanjuti kasus-kasus tersebut serta waktu yang tidak memungkinkan atau terlalu singkat. Data Penanganan Kasus-Kasus Lingkungan Hidup dapat dilihat pada Tabel di bawah ini :

Tabel 100
Capaian Kinerja untuk Cakupan Pelayanan Kasus-kasus Lingkungan Hidup
dari Tahun 2012 – Tahun 2014

Tahun	Jumlah pengaduan masyarakat yang diterima	Jumlah pengaduan masyarakat yang ditindak lanjuti	Pencapaian Kinerja (%)
2012	55	55	100
2013	15	5	33,33
2014	32	19	59,38

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa pencapaian kinerja untuk cakupan pelayanan kasus-kasus lingkungan hidup pada tahun 2014 lebih tinggi dari pada pencapaian kinerja tahun 2013 namun masih lebih rendah daripada pencapaian tahun 2012. Pencapaian kinerja untuk indikator cakupan pelayanan kasus-kasus lingkungan hidup sangat bergantung dengan adanya kerjasama yang baik antara Badan Lingkungan Hidup dengan para stakeholder termasuk masyarakat dan perusahaan/industri untuk penanganan kasus-kasus lingkungan hidup tersebut.

C. REALISASI ANGGARAN TAHUN ANGGARAN 2014

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Pemerintah Provinsi Sumatera Utara adalah rencana keuangan baik dari sisi pendapatan yang akan diperoleh maupun belanja yang akan digunakan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara dalam rangka melaksanakan tugas, fungsi dan tanggung jawab daerah dalam rangka mendukung penyelenggaraan pemerintahan daerah, serta implementasi otonomi dan pelayanan umum selama tahun 2014. APBD Pemerintah Provinsi Sumatera Utara disusun dengan pendekatan kinerja, yang didasarkan pada Rencana Kerja Anggaran (RKA) yang diusulkan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dengan berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Pemerintah Provinsi



Sumatera Utara tahun 2013 – 2018 yang telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2014 serta kebijakan dan prioritas pembangunan nasional, pokok-pokok pikiran DPRD, hasil musyawarah perencanaan pembangunan Provinsi Sumatera Utara tahun 2014 dan hasil indentifikasi aspirasi masyarakat lainnya yang disampaikan, baik melalui perangkat Pemerintah Provinsi maupun DPRD Provinsi Sumatera Utara. Kebijakan Umum Pembangunan Provinsi Sumatera Utara tahun 2014 yang disepakati telah dirumuskan dalam Arah Kebijakan Umum APBD tahun anggaran 2014 serta Strategi dan Prioritas APBD tahun 2014.

Selanjutnya, menurut Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. Arah dan Kebijakan Pengelolaan keuangan daerah harus dilakukan secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan yang berlaku, efisien, efektif transparan dan bertanggungjawab dengan memperhatikan asas keadilan dan kepatutan sehingga pelaksanaannya yang dimulai dari proses perencanaan dan penganggaran, pelaksanaan dan penatausahaan, pengawasan/pemeriksaan sampai dengan pertanggungjawaban keuangan daerah yang ditetapkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah yang secara teknis juga diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 jo Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 sebagaimana telah dirubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah menyatakan bahwa, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) merupakan dasar pengelolaan keuangan daerah dalam masa 1 (satu) tahun anggaran, yang terdiri atas Pendapatan Daerah, Belanja Daerah dan Pembiayaan Daerah.



Selanjutnya penyusunan APBD Provinsi Sumatera Utara Tahun Anggaran 2014 ditetapkan dengan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 2 Tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun Anggaran 2014, dan telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 9 Tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan Provinsi Sumatera Utara Tahun Anggaran 2014, yang terdiri dari :

C.1. PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH

C.1.1. INTENSIFIKASI DAN EKSTENSIFIKASI PENDAPATAN DAERAH

Dalam rangka intensifikasi dan ekstensifikasi pendapatan daerah, Pemerintah Provinsi Sumatera Utara telah melakukan berbagai upaya terus menerus melalui program kegiatan prioritas, antara lain :

- 1) Pendataan ulang dan razia terpadu terhadap potensi pajak daerah terhadap kendaraan bermotor – termasuk alat-alat berat/besar dan pajak air permukaan.
- 2) Pendekatan pelayanan kepada wajib pajak melalui pendefinitifan UPT/Samsat pada setiap kabupaten/kota serta pengoperasian gerai samsat.
- 3) Pengiriman Surat Pemberitahuan Pajak Kendaraan Bermotor (Super PKB).
- 4) Peningkatan koordinasi dengan instansi terkait di bidang pengelolaan pendapatan daerah.

Terkait dengan ekstensifikasi pendapatan daerah, setelah disahkannya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah memunculkan situasi yang dilematis terhadap penggalan potensi pendapatan daerah, karena dibatasi dan ditutupnya penggalan sumber pendapatan yang menjadi kewenangan pemerintah provinsi.



Meskipun demikian, Pemerintah Provinsi Sumatera Utara telah berupaya untuk mendapatkan penerimaan dari sektor perkebunan, namun hasil yang dicapai belum sesuai dengan yang diharapkan.

C.1.2. TARGET DAN REALISASI PENDAPATAN

Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera Utara terdiri dari 3 (tiga) sumber penerimaan yakni :

1) Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang terdiri dari Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Laba BUMD dan Lain-lain PAD yang Sah, sebagai berikut :

a. Pajak Daerah, dari total target Rp. 4.662.564.247.086,00,- direalisasi Rp. 4.055.217.776.906,00,- (86,97%). Penerimaan ini bersumber dari :

a) Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), dari target Rp.1.458.995.441.008,00,- direalisasi Rp.1.487.489.752.113,00, (101,95%).

b) Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBN-KB), dari target Rp.1.749.818.556.078,00,- direalisasi Rp. 1.280.838.048.168,00,- (73,20%).

c) Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBB-KB), dari target Rp.846.800.000.000,00,- direalisasi Rp. 823.855.159.113,00,- (97,29%).

d) Pajak Air Permukaan, dari target Rp. 60.000.000.000,00,- direalisasi Rp.68.524,532,854,00,- (114,21%).

e) Pajak Rokok, dari target Rp. 546.950.250.000,00,- direalisasi Rp. 394.510.284.658,00,- (72,13%)

b. Retribusi Daerah, dari target Rp. 73.214.111.645,00,- direalisasi Rp.25.960.647.324,49 (35,46%), penerimaan ini bersumber dari :

a) Retribusi Jasa Umum, dari target Rp. 60.917.943.845,00,- direalisasi Rp.18.357.266.261,49,- (30,13%).

b) Retribusi Jasa Usaha, dari target Rp. 12.046.167.800,00,- direalisasi Rp.7.392.506.063,00,- (61,37%).



c) Retribusi Perizinan Tertentu dari target Rp. 250.000.000,00,- direalisasi Rp.210.875.000,00,- (84,35%).

c. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan/Laba BUMD, dari target Rp. 243.118.049.100.00,- direalisasi Rp. 156.160.197.054,00,- (64,23).

d. Lain - lain Pendapatan Asli Daerah yang sah, dari target Rp. 149.418.723.924,00,- direalisasi Rp. 113.877.715.679,40 (76,21%), penerimaan ini bersumber dari :

a) Hasil penjualan aset daerah yang tidak dipisahkan, dari target Rp.1.900.000.000,00,- direalisasi sebesar Rp. 1.669.348.854,00,- (87,86%).

b) Jasa giro kas daerah, dari target Rp. 35.560.200.000,00,- direalisasi sebesar Rp.22.369.569.895,00,- (62,91%).

c) Pendapatan bunga, dari target Rp. 0,- direalisasi nihil.

d) Pendapatan denda keterlambatan pelaksanaan pekerjaan, dari target Rp. 15.000.000.000,00,- direalisasi sebesar Rp.434.370.107.40 (2,90%).

e) Pendapatan denda pajak, dari target Rp. 57.995.211.624,00,- direalisasi sebesar Rp.56.393.021.823,00,- (97,24%);

f) Fasilitas Sosial dan Fasilitas Umum, dari target Rp. 28.610.782.300,00,- direalisasi sebesar Rp. 25.144.450.000,00,- (87,88%).

h) Pendapatan Dari Penyelenggaraan Diklat, dari target Rp. 10.352.530.000,00,- direalisasi sebesar Rp. 7.866.955.000,00,- (75,99%).

2) Dana Perimbangan yang terdiri dari Bagi Hasil Pajak (BHP) dan Bagi Hasil Bukan Pajak (BHBP), Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus (DAK), dengan penjelasan sebagai berikut :

Dana Perimbangan (DP), dari target Rp. 1.918.210.331.691,00,- direalisasi sebesar Rp.1.812.638.981.079,00,- (94,50%), penerimaan ini diperoleh dari:

a. Dana Bagi Hasil Pajak, dari target Rp. 460.776.894.435,00,-



direalisasi Rp.380.468.138.948,00,- (82,57%)

- b. **Dana Bagi Hasil Bukan Pajak/Sumber Daya Alam, dari target Rp.28.663.311.256,00,-** direalisasi Rp. 23.310.178.131,00,- (81,32%)
- c. **Dana Alokasi Umum (DAU), dari target Rp. 1.349.132.276.000,00,-** direalisasi Rp.1.349.132.276.000,00,- (100%).
- d. **Dana Alokasi Khusus (DAK), dari target Rp. 79.637.850.000,00,-** direalisasi Rp.59.728.388.000,00,- (75%).

3) Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah, dari target Rp. 1.598.978.354.609,00,- berhasil direalisasi sebesar Rp. 1.564.675.518.577,95,- (97,85%), dengan perincian :

- a. Pendapatan hibah dari Jasa Raharja, dari target Rp. 3.083.696.800,00,- direalisasi Rp.4.987.966.000,00,- (161,75%).
- b. Sumbangan pihak ketiga (SP-3), dari target Rp. 35.000.000.000,00,- direalisasi Rp. 4.809.735.000,00,- (13,74%).
- c. Pendapatan hibah dari donor lainnya, dari target Rp. 20.289.654.809,00,- direalisasi Rp. 20.289.654.809,00,- (100%)
- d. Tambahan penghasilan Guru PNSD, dari target Rp. 92.063.000,00,- direalisasi Rp. 92.063.000,00,- (100%)
- e. Dana alokasi bantuan operasional sekolah, dari target Rp. 1.540.512.940.000,00,- direalisasi Rp. 1.508.698,241,934,00,- (97,93%).
- f. Dana pendapatan lainnya/pengembalian dana BOS dari Sekolah Penerima, dari target Nihil, realisasi Rp. 25.797.857.834,95,-.

4) Contra Pos

Dari target nihil terealisasi sebesar Rp. 42.415.145.414,58.

Pada Tahun Anggaran 2014, secara umum penerimaan dari pendapatan asli daerah khususnya pajak daerah mengalami peningkatan secara bervariasi, meski peningkatannya kurang signifikan, namun secara kumulatif cukup positif menutupi belanja pemerintahan yang setiap tahunnya terus meningkat.



Walaupun relatif minim, konstelasi ini membuktikan bahwa sesungguhnya terjadi pertumbuhan di sektor perekonomian daerah yang ditandai dengan semakin meningkatnya pembelanjaan dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan masyarakat. Upaya peningkatan sumber pendapatan daerah ditempuh melalui program peningkatan pendapatan daerah dengan berpedoman pada Rencana Kerja Dinas Pendapatan Provinsi Sumatera Utara TA. 2014 sebagai penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Pemerintah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2013-2018.

Berdasarkan hasil rekonsiliasi data Kas Umum Daerah Provinsi Sumatera Utara, Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera Utara pada tahun 2014 adalah sebesar Rp.7.770.945.982.035,42 (89,88%) dari target Rp. 8.645.503.818.055,00,-.. Rencana penerimaan (target) dan realisasi pendapatan daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun Anggaran 2014 sebagaimana telah diuraikan di atas, dalam bentuk sederhana dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 101
Target & Realisasi Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2014

NO	SUMBER	TARGET	REALISASI	%
	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA)	-	45.200.503.219,79	
I	PAJAK DAERAH	4.662.564.247.086,00	4.055.217.776.906	86,97%
1	Pajak Kendaraan Bermotor	1.458.995.441.008,00	1.487.489.752,113	101,95%
2	Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor	1.749.818.556.078,00	1.280.838.048.168	73,20%
3	Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor	846.800.000.000,00	823.855.159.113	97,29%
4	Pajak Air Permukaan	60.000.000.000,00	68.524.532.854	114,21%
5	Pajak Rokok	546.950.250.000,00	394.510.284.658	72,13%
II	RETRIBUSI DAERAH	73.214.111.645,00	25.960.647.324,49	35,46%
1	Retribusi Jasa Umum	60.917.943.845,00	18.357.266.261,49	30,13%
2	Retribusi Jasa Usaha	12.046.167.800,00	7.392.506.063,00	61,37%
3	Retribusi Izin Tertentu	250.000.000,00	210.875.000,00	84,35%
III	HASIL PENGELOLAAN KEKAYAAN DAERAH	243.118.049.100,00	156.160.197.054,00	64,23%
1	Perusahaan Daerah (PD. Perkebunan)	17.500.000.000,00	17.500.000.000,00	100%
2	Perusahaan Daerah (PT. Bank Sumut)	223.000.000.000,00	136.736.516.054,00	61,32%
3	Perusahaan Daerah (PD. Perhotelan)	700.000.000,00	180.000.000,00	25,71%
4	Perusahaan Daerah (PT. KIM)	1.918.049.100,00	1.743.681.000,00	90,91%



NO	SUMBER	TARGET	REALISASI	%
IV	LAIN-LAIN PAD YANG SAH	149.418.723.924,00	113.877.715.679,40	76,21%
1	Hasil Penjualan Aset Daerah	1.900.000.000,00	1.669.348.854,00	87,86%
2	Jasa Giro Kas Daerah	35.560.200.000,00	22.369.569.895,00	62,91%
3	Pendapatan Bunga	-	-	0,00%
4	Pendapatan Denda	15.000.000.000,00	434.370.107,40	2,90%
5	Pendapatan Denda Pajak	57.995.211.624,00	56.393.021.823,00	97,24%
6	Fasilitas Sosial dan Fasilitas Umum	28.610.782.300,00	25.144.450.000,00	87,88%
7	Pendapatan Dari Penyelenggaraan Diklat	10.352.530.000,00	7.866.955.000,00	75,99%
JUMLAH PAD		5.128.315.131.755,00	4.351.216.336.963,89	84,85%
V	DANA PERIMBANGAN	1.918.210.331.691,00	1.812.638.981.079,00	94,50%
1	Bagi Hasil Pajak	460.776.894.435,00	380.468.138.948,00	82,57%
2	Bagi Hasil Bukan Pajak/Sumber Daya Alam	28.663.311.256,00	23.310.178.131,00	81,32%
3	Dana Alokasi Umum (DAU)	1.349.132.276.000,00	1.349.132.276.000,00	100,00%
4	Dana Alokasi Khusus (DAK)	79.637.850.000,00	59.728.388.000,00	75,00%
VI	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	1.598.978.354.609,00	1.564.675.518.577,95	97,85%
1	Pendapatan Hibah dari Jasa Raharja	3.083.696.000,00	4.987.966.000,00	161,75%
2	Sumbangan Pihak Ketiga (SP-3)	35.000.000.000,00	4.809.735.000,00	13,74%
3	Pendapatan Hibah Dari Donor Lainnya	20.289.654.809,00	20.289.654.809,00	100,00%
4	Tambahan Penghasilan Guru PNSD	92.063.000,00	92.063.000,00	100,00%
5	Dana Alokasi Bantuan Operasional Sekolah	1.540.512.940.000,00	1.508.698.241.934,00	97,93%
6	Dana Pendapatan Lainnya/Pengembalian Dana BOS dari Sekolah Penerima	-	25.797.857.834,95	-
VII	CONTRA POST	-	42.415.145.414,58	-
JUMLAH SELURUHNYA		8.645.503.818.055,00	7.770.945.982.035,42	89,88%

Sumber : Dinas Pendapatan Daerah Provsu

3. Permasalahan dan Solusi

Beberapa hal yang menjadi permasalahan dalam pengelolaan pendapatan daerah (pencapaian target) yang telah ditetapkan oleh Dinas Pendapatan Provinsi Sumatera Utara, yakni :

- 1) Struktur Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang sangat bertumpu pada Pajak Daerah, sementara kewenangan pemerintah provinsi dalam mengembangkan jenis pajak daerah (ekstensifikasi) dan retribusi daerah telah dibatasi, sehingga upaya yang dapat dilakukan terbatas pada intensifikasi. Hal ini



sangat rentan terhadap berbagai resiko, sehingga perlu melakukan penggalan sumber-sumber baru.

- 2) *Law Enforcement* yang tidak tegas diatur dalam peraturan dan perundangan tentang pajak daerah dan retribusi daerah.
- 3) Rendahnya tingkat kepatuhan masyarakat dalam pembayaran pajak daerah dan retribusi daerah.

Untuk mengatasi permasalahan di atas Dinas Pendapatan Provinsi Sumatera Utara telah melakukan upaya ataupun solusi, yaitu :

- 1) Pendekatan pelayanan melalui pengoperasian sentra pelayanan seperti Samsat Gerai, Samsat Corner / Mall, samsat keliling dan Samsat *Drive Thru*.
- 2) Peningkatan kualitas pelayanan melalui peningkatan SDM petugas, peningkatan kualitas sarana dan prasarana serta penyempurnaan regulasi tentang pelayanan.
- 3) Penagihan secara langsung terhadap tunggakan pajak.
- 4) Pengoperasian Payment Point System dalam pembayaran Pajak Daerah bekerjasama dengan PT. Bank Sumut.

C.2. PENGELOLAAN BELANJA DAERAH

Belanja daerah, atau yang dikenal dengan pengeluaran pemerintah daerah dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), merupakan salah satu faktor pendorong pertumbuhan ekonomi daerah. Karena itu, belanja daerah dikenal sebagai salah satu instrumen kebijakan fiskal yang dilakukan pemerintah atau pemerintah daerah. Semakin besar belanja daerah diharapkan akan makin meningkatkan kegiatan perekonomian daerah.

Di sisi lain, semakin besar pendapatan yang dihasilkan dari pajak-pajak dan retribusi atau penerimaan yang bersumber dari wajib pajak dan wajib retribusi, akan mengakibatkan menurunnya kegiatan perekonomian (terjadi kontraksi perekonomian).



Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 menegaskan, belanja daerah merupakan semua pengeluaran dari rekening kas umum daerah yang mengurangi ekuitas dana lancar, yang merupakan kewajiban daerah dalam satu tahun anggaran yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh daerah. Belanja daerah digunakan untuk pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintah daerah yang meliputi urusan wajib dan urusan pilihan. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 juga telah menentukan, struktur belanja terdiri dari belanja tidak langsung, dan belanja langsung.

Belanja tidak langsung merupakan belanja yang dianggarkan tidak terkait secara langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan yang meliputi: belanja pegawai, belanja bunga, belanja subsidi, belanja hibah, bantuan sosial, belanja bagi hasil, bantuan keuangan, dan belanja tidak terduga. Sedangkan belanja langsung merupakan belanja yang dianggarkan terkait secara langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan yang meliputi: belanja pegawai, belanja barang dan jasa, serta belanja modal.

Selain itu belanja penyelenggaraan urusan wajib sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 diprioritaskan untuk melindungi dan meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat dalam upaya memenuhi kewajiban daerah yang diwujudkan dalam bentuk peningkatan pelayanan dasar, pendidikan, kesehatan, fasilitas sosial dan fasilitas umum yang layak serta mengembangkan sistem jaminan sosial.

Penyusunan belanja daerah untuk pelaksanaan urusan wajib dimaksud berdasarkan Standar Pelayanan Minimal (SPM) yang telah ditetapkan dalam program/kegiatan yang tercantum pada APBD dilaksanakan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi daerah, pemerataan pendapatan, serta pembangunan diberbagai sektor yang ada di masyarakat.



C.2.1. KEBIJAKAN UMUM KEUANGAN DAERAH

Dalam menyusun APBD, penganggaran pengeluaran harus didukung dengan adanya kepastian tersedianya penerimaan dalam jumlah yang cukup. Semua belanja dianggarkan secara bruto dan jumlahnya merupakan batas tertinggi untuk setiap jenis belanja bersangkutan dan dilaksanakan melalui kas daerah. Belanja daerah dirinci menurut bidang pemerintahan, organisasi, bagian, kelompok, jenis belanja, objek belanja dan rincian objek belanja. Kelompok pembiayaan dirinci menurut jenis objek penerimaan dan pengeluaran pembiayaan.

Sesuai dengan arah kebijakan dan strategi pembangunan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara Tahun Anggaran 2014, struktur APBD telah disusun sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang perubahan kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri No 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.

Arah kebijakan belanja daerah disusun berdasarkan prinsip-prinsip penganggaran dengan pendekatan anggaran yang berbasis kinerja, dengan memperhatikan tugas pokok dan fungsi masing-masing SKPD, prioritas pembangunan sesuai potensi dan permasalahannya, serta perkiraan situasi dan kondisi pada tahun berikutnya.

C.2.2. TARGET DAN REALISASI BELANJA

Pada tahun anggaran 2014 dialokasikan belanja daerah sebesar Rp. 8.696.929.880.247,- dimana sebesar Rp. 5.755.568.533.254,- atau 66,18 % untuk keperluan belanja tidak langsung dan sisanya 33,82 % atau Rp. 2.941.361.346.993,- untuk keperluan belanja langsung.



Belanja tidak langsung sebesar Rp. 5.755.568.533.254,- dialokasikan untuk keperluan :

- Belanja Pegawai Rp. 1.141.107.908.898,-
- Belanja Hibah Rp. 1.651.261.631.830,-
- Belanja Bantuan Sosial Rp. 1.065.000.000,-
- Belanja Bagi Hasil Rp. 1.703.707.638.578,-
- Belanja Bantuan Keuangan Rp. 1.250.926.353.948,-
- Belanja Tidak Terduga Rp. 7.500.000.000,-

Belanja langsung sebesar Rp 2.941.361.346.993,- ditujukan untuk keperluan :

- Belanja Pegawai Rp. 157.052.730.910,-
- Belanja Barang dan Jasa Rp. 1.340.546.987.236,-
- Belanja Modal Rp. 1.443.761.628.847,-

Data Realisasi belanja berdasarkan realisasi Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) periode 1 Januari s.d 31 Desember 2014 adalah sebesar Rp. 7.809.453.230.328,- atau terealisasi sebesar 89,80 % dari anggaran belanja APBD Pemprovsu TA. 2014.

Bila dilihat dari urusan pemerintahan dan organisasi maka alokasi anggaran belanja sebesar Rp. 8.696.929.880.247,- terbagi pada urusan wajib Rp. 8.278.708.722.116,- atau sebesar 95,19 % dari total belanja APBD Pemerintah Provinsi Sumatera Utara dan urusan pilihan Rp. 418.221.158.131,- atau sebesar 4,81% dari total belanja APBD TA. 2014.



Tabel 102
Alokasi Belanja Langsung dan Tidak Langsung
Berdasarkan SKPD Pengelola Tahun 2014

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	BELANJA		JUMLAH
		TIDAK LANGSUNG	LANGSUNG	
1	Dinas Pendidikan	49,754,833,500.00	152,251,776,900.00	202,006,610,400.00
2	Dinas Kesehatan	98,579,598,000.00	192,595,976,750.00	291,175,574,750.00
3	Rumah Sakit Jiwa Daerah	24,248,529,000.00	16,408,881,841.00	40,657,410,841.00
4	Rumah Sakit Haji	-	103,373,826,504.00	103,373,826,504.00
5	Dinas Bina Marga	58,068,602,000.00	1,076,196,725,085.00	1,134,265,327,085.00
6	Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air	66,411,665,000.00	89,685,667,767.00	156,097,332,767.00
7	Dinas Penataan Ruang dan Permukiman	34,658,804,000.00	125,175,695,034.00	159,834,499,034.00
8	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	11,457,109,000.00	16,596,776,700.00	28,053,885,700.00
9	Dinas Perhubungan	61,914,237,500.00	53,987,621,000.00	115,901,858,500.00
10	Badan Lingkungan Hidup	12,338,832,000.00	21,101,011,262.00	33,439,843,262.00
11	Dinas Kesejahteraan dan Sosial	46,627,415,000.00	49,411,730,000.00	96,039,145,000.00
12	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	24,989,299,000.00	12,760,453,000.00	37,749,752,000.00
13	Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah	10,057,259,000.00	22,430,855,000.00	32,488,114,000.00
14	Badan Penanaman Modal dan Promosi	5,128,291,000.00	13,291,292,891.00	18,419,583,891.00
15	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	17,308,539,000.00	23,595,615,870.00	40,904,154,870.00
16	Dinas Pemuda dan Olah Raga	8,902,112,000.00	60,489,300,400.00	69,391,412,400.00
17	Bakesbangpol dan Linmas	7,694,562,000.00	12,804,434,257.00	20,498,996,257.00
18	Kantor Satuan Polisi Pamong Praja	3,040,162,000.00	11,058,373,163.00	14,098,535,163.00
19	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	5,276,653,000.00	9,988,275,590.00	15,264,928,590.00
20	DPRD	37,603,132,000.00	-	37,603,132,000.00
21	KDH & WKDH	7,795,165,100.00	-	7,795,165,100.00
22	Sekretariat Daerah	4,700,266,121,356.00	167,933,470,179.00	4,868,199,591,535.00
23	Sekretariat DPRD	11,137,728,000.00	83,787,761,925.00	94,925,489,925.00
24	Badan Penelitian dan Pengembangan	6,085,861,000.00	7,638,058,600.00	13,723,919,600.00
25	Inspektorat Provinsi	14,354,157,000.00	24,074,052,500.00	38,428,209,500.00



NO	URUSAN PEMERINTAHAN	BELANJA		JUMLAH
		TIDAK LANGSUNG	LANGSUNG	
26	Kantor Perwakilan Jakarta	5,214,452,000.00	13,208,363,652.00	18,422,815,652.00
27	Dinas Pendapatan	177,621,510,733.00	174,099,608,949.00	351,721,119,682.00
28	Badan Pendidikan dan Pelatihan	9,802,453,000.00	19,431,674,758.00	29,234,127,758.00
29	Badan Kepegawaian Daerah	8,475,083,000.00	11,659,325,885.00	20,134,408,885.00
30	Sekretariat KORPRI	2,309,925,000.00	2,969,290,200.00	5,279,215,200.00
31	Badan Pelayanan Perizinan Terpadu	5,555,847,000.00	10,637,138,625.00	16,192,985,625.00
32	Badan Ketahanan Pangan	8,868,357,000.00	16,747,581,129.00	25,615,938,129.00
33	Badan Koord. Penyuluhan	7,976,349,000.00	18,879,878,650.00	26,856,227,650.00
34	Bapemas dan Pemdes	7,580,272,000.00	8,491,957,600.00	16,072,229,600.00
35	Dinas Komunikasi dan Informatika	12,890,130,000.00	31,020,692,022.00	43,910,822,022.00
36	KPID Sumatera Utara	2,192,242,000.00	5,785,928,676.00	7,978,170,676.00
37	Badan Perpustakaan, Arsip dan Dokumentasi	10,463,089,000.00	45,285,628,313.00	55,748,717,313.00
38	Dinas Pertanian	61,379,098,000.00	89,990,866,227.00	151,369,964,227.00
39	Dinas Perkebunan	14,923,030,065.00	18,338,577,300.00	33,261,607,365.00
40	Dinas Peternakan	8,935,130,000.00	21,157,939,200.00	30,093,069,200.00
41	Dinas Kehutanan	36,021,865,000.00	10,971,329,600.00	46,993,194,600.00
42	Dinas Pertambangan dan Energi	9,538,327,000.00	14,410,828,220.00	23,949,155,220.00
43	Dinas Perikanan dan Kelautan	14,138,108,000.00	66,399,840,369.00	80,537,948,369.00
44	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	27,984,599,000.00	15,237,265,400.00	43,221,864,400.00
	Jumlah	5,755,568,533,254.00	2,941,361,346,993.00	8,696,929,880,247.00

Sumber : Biro Keuangan Setdaprov Sumatera Utara



Tabel 103
Realisasi Belanja Langsung dan Tidak Langsung
Berdasarkan SKPD Pengelola Tahun 2014

No	Urusan Pemerintahan	Belanja		Jumlah
		Tidak Langsung	Langsung	
1	Dinas Pendidikan	41,916,982,241.00	125,377,553,843.00	167,294,536,084.00
2	Dinas Kesehatan	83,102,290,480.00	157,433,540,142.00	240,535,830,622.00
3	Rumah Sakit Jiwa Daerah	21,179,535,453.00	15,941,660,384.00	37,121,195,837.00
4	Rumah Sakit Haji	-	58,739,525,432.00	58,739,525,432.00
5	Dinas Bina Marga	48,223,433,343.00	866,461,039,736.00	914,684,473,079.00
6	Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air	60,168,523,400.00	81,244,549,537.00	141,413,072,937.00
7	Dinas Penataan Ruang dan Permukiman	32,240,685,269.00	110,242,930,396.00	142,483,615,665.00
8	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	10,206,323,780.00	15,192,544,951.00	25,398,868,731.00
9	Dinas Perhubungan	57,693,548,895.00	29,322,356,830.00	87,015,905,725.00
10	Badan Lingkungan Hidup	11,040,319,893.00	18,478,246,252.00	29,518,566,145.00
11	Dinas Kesejahteraan dan Sosial	39,600,781,501.00	46,235,395,141.00	85,836,176,642.00
12	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	21,458,520,281.00	11,438,125,433.00	32,896,645,714.00
13	Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah	8,977,901,058.00	19,998,154,316.00	28,976,055,374.00
14	Badan Penanaman Modal dan Promosi	4,801,457,160.00	9,255,508,162.00	14,056,965,322.00
15	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	16,033,661,755.00	22,067,969,770.00	38,101,631,525.00
16	Dinas Pemuda dan Olah Raga	7,868,088,759.00	51,869,850,559.00	59,737,939,318.00
17	Bakesbangpol dan Linmas	6,941,416,885.00	12,813,805,022.00	19,755,221,907.00
18	Satuan Polisi Pamong Praja	2,585,758,526.00	9,290,982,057.00	11,876,740,583.00
19	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	4,628,615,943.00	6,750,192,818.00	11,378,808,761.00
20	DPRD	37,104,608,691.00	-	37,104,608,691.00
21	KDH & WKDH	5,835,183,597.00	-	5,835,183,597.00
22	Sekretariat Daerah	4,432,227,922,387.00	135,383,475,376.00	4,567,611,397,763.00
23	Sekretariat DPRD	10,192,878,191.00	67,885,524,658.00	78,078,402,849.00
24	Badan Penelitian dan Pengembangan	5,083,465,448.00	6,663,486,538.00	11,746,951,986.00
25	Inspektorat Provinsi	12,401,855,133.00	20,172,980,042.00	32,574,835,175.00
26	Kantor Perwakilan Jakarta	4,776,124,814.00	10,852,161,519.00	15,628,286,333.00
27	Dinas Pendapatan	168,160,148,452.00	152,607,650,181.00	320,767,798,633.00
28	Badan Pendidikan dan Pelatihan	8,988,677,839.00	16,731,767,613.00	25,720,445,452.00
29	Badan Kepegawaian Daerah	7,433,324,662.00	9,727,148,303.00	17,160,472,965.00
30	Sekretariat KORPRI	2,064,515,907.00	2,870,816,885.00	4,935,332,792.00
31	Badan Pelayanan Perizinan Terpadu	5,143,882,946.00	9,549,450,241.00	14,693,333,187.00



No	Urusan Pemerintahan	Belanja		Jumlah
		Tidak Langsung	Langsung	
32	Badan Ketahanan Pangan	8,390,294,913.00	16,519,233,217.00	24,909,528,130.00
33	Badan Koord. Penyuluhan	6,294,915,570.00	18,701,978,583.00	24,996,894,153.00
34	Bapemmas dan Pemdes	6,646,194,827.00	7,925,962,122.00	14,572,156,949.00
35	Dinas Komunikasi dan Informatika	11,562,376,252.00	29,898,475,626.00	41,460,851,878.00
36	KPID Sumatera Utara	2,008,458,300.00	5,258,467,847.00	7,266,926,147.00
37	Badan Perpustakaan, Arsip dan Dokumentasi	9,480,984,798.00	41,354,539,782.00	50,835,524,580.00
38	Dinas Pertanian	54,778,458,186.00	79,502,736,301.00	134,281,194,487.00
39	Dinas Perkebunan	13,190,387,058.00	17,989,975,926.00	31,180,362,984.00
40	Dinas Peternakan	8,403,852,312.00	19,838,602,055.00	28,242,454,367.00
41	Dinas Kehutanan	33,680,067,358.00	10,514,872,445.00	44,194,939,803.00
42	Dinas Pertambangan dan Energi	8,384,762,445.00	14,076,712,850.00	22,461,475,295.00
43	Dinas Perikanan dan Kelautan	13,136,858,523.00	59,459,669,260.00	72,596,527,783.00
44	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	24,709,009,121.00	9,066,559,825.00	33,775,568,946,-
	Jumlah	5,378,747,052,352,-	2,430,706,177,976,-	7,809,453,230,328,-

Sumber : Biro Keuangan Setdaprov Sumatera Utara

Tabel 104
Realisasi Belanja Langsung dan Tidak Langsung
Berdasarkan SP2D per 31 Desember 2014

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	REALISASI BELANJA BERDASARKAN SP2D		JUMLAH
		TIDAK LANGSUNG	LANGSUNG	
1	Dinas Pendidikan	41.916.982.241,-	125.377.553.843,-	167.294.536.084,-
2	Dinas Kesehatan	83.102.290.480,-	157.433.540.142,-	240.535.830.622,-
3	Rumah Sakit Jiwa Daerah	21.179.535.453,-	15.941.660.384,-	37.121.195.837,-
4	Rumah Sakit Haji	-	58.739.525.432,-	58.739.525.432,-
5	Dinas Bina Marga	48.223.433.343,-	866.461.039.736,-	914.684.473.079,-
6	Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air	60.168.523.400,-	81.244.549.537,-	141.413.072.937,-
7	Dinas Penataan Ruang dan Permukiman	32.240.685.269,-	110.242.930.396,-	142.483.615.665,-
8	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	10.206.323.780,-	15.192.544.951,-	25.398.868.731,-
9	Dinas Perhubungan	57.693.548.895,-	29.322.356.830,-	87.015.905.725,-
10	Badan Lingkungan Hidup	11.040.319.893,-	18.478.246.252,-	29.518.566.145,-
11	Dinas Kesejahteraan dan Sosial	39.600.781.501,-	46.235.395.141,-	85.836.176.642,-
12	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	21.458.520.281,-	11.438.125.433,-	32.896.645.714,-
13	Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah	8.977.901.058,-	19.998.154.316,-	28.976.055.374,-
14	Badan Penanaman Modal dan Promosi	4.801.457.160,-	9.255.508.162,-	14.056.965.322,-
15	Dinas Kebudayaan dan	16.033.661.755,-	22.067.969.770,-	38.101.631.525,-



NO	URUSAN PEMERINTAHAN	REALISASI BELANJA BERDASARKAN SP2D		JUMLAH
		TIDAK LANGSUNG	LANGSUNG	
	Pariwisata			
16	Dinas Pemuda dan Olah Raga	7.868.088.759,-	51.869.850.559,-	59.737.939.318,-
17	Bakesbangpol dan Linmas	6.941.416.885,-	12.813.805.022,-	19.755.221.907,-
18	Kantor Satuan Polisi Pamong Praja	2.585.758.526,-	9.290.982.057,-	11.876.740.583,-
19	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	4.628.615.943,-	6.750.192.818,-	11.378.808.761,-
20	DPRD	37.104.608.691,-	-	37.104.608.691,-
21	KDH & WKDH	5.835.183.597,-	-	5.835.183.597,-
22	Sekretariat Daerah	4.432.227.922.387,-	135.383.475.376,-	4.567.611.397.763,-
23	Sekretariat DPRD	10.192.878.191,-	67.885.524.658,-	78.078.402.849,-
24	Badan Penelitian dan Pengembangan	5.083.465.448,-	6.663.486.538,-	11.746.951.986,-
25	Inspektorat Provinsi	12.401.855.133,-	20.172.980.042,-	32.574.835.175,-
26	Kantor Perwakilan Jakarta	4.776.124.814,-	10.852.161.519,-	15.628.286.333,-
27	Dinas Pendapatan	168.160.148.452,-	152.607.650.181,-	320.767.798.633,-
28	Badan Pendidikan dan Pelatihan	8.988.677.839,-	16.731.767.613,-	25.720.445.452,-
29	Badan Kepegawaian Daerah	7.433.324.662,-	9.727.148.303,-	17.160.472.965,-
30	Sekretariat KORPRI	2.064.515.907,-	2.870.816.885,-	4.935.332.792,-
31	Badan Pelayanan Perizinan Terpadu	5.143.882.946,-	9.549.450.241,-	14.693.333.187,-
32	Badan Ketahanan Pangan	8.390.294.913,-	16.519.233.217,-	24.909.528.130,-
33	Badan Koord. Penyuluhan	6.294.915.570,-	18.701.978.583,-	24.996.894.153,-
34	Bapemmas dan Pemdes	6.646.194.827,-	7.925.962.122,-	14.572.156.949,-
35	Dinas Komunikasi dan Informatika	11.562.376.252,-	29.898.475.626,-	41.460.851.878,-
36	KPID Sumatera Utara	2.008.458.300,-	5.258.467.847,-	7.266.926.147,-
37	Badan Perpustakaan, Arsip dan Dokumentasi	9.480.984.798,-	41.354.539.782,-	50.835.524.580,-
38	Dinas Pertanian	54.778.458.186,-	79.502.736.301,-	134.281.194.487,-
39	Dinas Perkebunan	13.190.387.058,-	17.989.975.926,-	31.180.362.984,-
40	Dinas Peternakan	8.403.852.312,-	19.838.602.055,-	28.242.454.367,-
41	Dinas Kehutanan	33.680.067.358,-	10.514.872.445,-	44.194.939.803,-
42	Dinas Pertambangan dan Energi	8.384.762.445,-	14.076.712.850,-	22.461.475.295,-
43	Dinas Perikanan dan Kelautan	13.136.858.523,-	59.459.669.260,-	72.596.527.783,-
44	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	24.709.009.121,-	9.066.559.825,-	33.775.568.946,-
	Jumlah	5.378.747.052.352,-	2.430.706.177.976,-	7.809.453.230.328,-

Sumber : Biro Keuangan Setdaprov Sumatera Utara

Tabel realisasi diatas merupakan realisasi berdasarkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) yang dikeluarkan oleh Biro Keuangan Setdaprov su selama Tahun Anggaran 2014 yang merupakan angka realisasi sementara yang belum diaudit



oleh BPK RI. Mengenai angka hasil perhitungan data pertanggungjawaban pelaksanaan APBD TA.2014 belum dapat dijelaskan dari uraian ini karena masih dalam proses perhitungan dan data untuk ini dapat diperoleh nantinya setelah hasil perhitungan disusun oleh Pemerintah Provinsi Sumatera Utara cq. Biro Keuangan dan selanjutnya diaudit oleh BPK-RI Perwakilan Provinsi Sumatera Utara, dan hasilnya akan disampaikan BPK-RI Perwakilan Provinsi Sumatera Utara kepada DPRD Provinsi Sumatera Utara, hasil audit tersebut nantinya merupakan bagian dari pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tahun 2014 yang akan disampaikan Gubernur kepada DPRD Provinsi Sumatera Utara.

Permasalahan :

- 1) Masih dominannya belanja tidak langsung dibandingkan belanja langsung dalam komposisi belanja daerah. Akibatnya, belanja langsung yang digunakan untuk meningkatkan kuantitas dan kualitas pemenuhan hak layanan dasar bagi masyarakat belum optimal.
- 2) Terjadi perubahan peraturan terkait dengan pengelolaan keuangan daerah, sehingga memerlukan waktu bagi SKPD untuk menerapkan dalam mekanisme pengelolaan keuangan.
- 3) Intensitas pertumbuhan pendapatan daerah jauh lebih lambat dibandingkan intensitas pertumbuhan kebutuhan anggaran untuk layanan publik, sehingga dengan keterbatasan relatif kapabilitas pendapatan, menyulitkan perencanaan alokasi belanja untuk layanan publik, yang menyebabkan sering terjadi belanja daerah untuk layanan publik menjadi kurang fokus terhadap pencapaian target-target pembangunan yang diharapkan.

Solusi :

- 1) Menetapkan skala prioritas yang ketat dalam pengalokasian anggaran belanja mengingat sulitnya bagi pemerintah daerah untuk mengakomodasi berbagai usulan.
- 2) Peningkatan kemampuan SDM pengelolaan keuangan bagi seluruh SKPD agar dapat meningkatkan kinerjanya dalam perencanaan, pelaksanaan, dan



pengelolaan administrasi kegiatan sesuai dengan sistem pengelolaan keuangan daerah.

- 3) Meningkatkan kegiatan intensifikasi dan ekstensifikasi terhadap sumber-sumber pendapatan daerah yang belum didayagunakan secara optimal serta melakukan efektivitas kebijakan belanja daerah melalui penciptaan kerja sama yang harmonis antara eksekutif, legislatif, serta partisipasi masyarakat dalam pembahasan dan penetapan anggaran belanja daerah.

C.3. PEMBIAYAAN DAERAH

Pembiayaan daerah adalah semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya, serta dimaksudkan untuk membiayai selisih kurang bila Belanja Daerah lebih besar dari Pendapatan Daerah atau memanfaatkan surplus Pendapatan Daerah.

Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, sumber Penerimaan Pembiayaan Daerah adalah :

1. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Lalu.
2. Pencairan Dana Cadangan.
3. Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan.
4. Pinjaman Dalam Negeri.
5. Penerimaan Kembali Pinjaman.

Sedangkan pengeluaran pembiayaan daerah terdiri dari :

1. Pembentukan Dana Cadangan.
2. Penyertaan Modal Pemerintah Daerah.
3. Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri.
4. Pemberian Pinjaman.



Tahun anggaran 2014 posisi pembiayaan yang digunakan dalam APBD sebesar Rp. 51.426.062.192,- dengan rincian penerimaan pembiayaan daerah yang berasal dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya sebesar Rp.51.426.062.192,- sedangkan pada pos pengeluaran pembiayaan tidak dianggarkan pada struktur APBD TA. 2014 Pemerintah Provinsi Sumatera Utara.

Permasalahan :

1. Permasalahan paling mendasar dalam perumusan belanja daerah tahun 2014 adalah masih terbatasnya sumber-sumber pendapatan daerah, khususnya yang berasal dari Pendapatan Asli Daerah.
2. Adanya perubahan rencana yang menyangkut volume pekerjaan, standar harga dan lokasi sehingga harus ditempuh melalui perubahan APBD.

Solusi :

1. SKPD pengelola PAD diharapkan lebih pro aktif dalam pengelolaan pendapatan yang dibebankan kepada SKPD yang bersangkutan.
2. Dalam rangka peningkatan kinerja keuangan seharusnya tetap mengacu kepada pencapaian nilai manfaat dan efisiensi.



BAB IV. P E N U T U P

Bahwa Tahun 2014 merupakan tahun pertama pelaksanaan pembangunan daerah melalui program dan kegiatan dalam rangka mewujudkan Visi Provinsi Sumatera Utara “MENJADI PROVINSI YANG BERDAYA SAING MENUJU SUMATERA UTARA SEJAHTERA” yang dirumuskan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Tahap III dalam masa Rencana Pembangunan Jangka Panjang yang telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 5 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan jangka Menengah Tahun 2013 – 2018, yang mengarahkan kebijakan pembangunan Sumatera Utara dalam pengelolaan tata pemerintahan yang baik, meningkatkan kemampuan pendapatan daerah, pembangunan index demokrasi dan partisipasi masyarakat di dalam pembangunan, mendorong dinamika kehidupan beragama dan berbudaya, yang dilindungi nilai-nilai moral dan etika, serta harmonisasi kehidupan berbangsa dan bernegara yang berlandaskan semangat persatuan dan kesatuan.

Bahwa pembangunan di Sumatera Utara Dalam prosesnya, baik yang dilaksanakan oleh pemerintah, pemerintah daerah maupun swasta telah memberikan perkembangan ekonomi yang positif hingga melampaui capaian pertumbuhan ekonomi rata-rata nasional, sebagai konsekuensi pengoptimalan pengelolaan sumber-sumber daya ekonomi yang dimiliki oleh Provinsi Sumatera Utara. Struktur ekonomi Sumatera Utara pada tahun 2014 didominasi dari lapangan usaha pertanian, diikuti dengan lapangan usaha kehutanan, perikanan dan industri pengolahan, hal ini menunjukkan pengelolaan potensi yang dimiliki Sumatera Utara semakin optimal.



Tahun 2014 pencapaian kinerja pendidikan terus membaik dilihat dari beberapa indikator yang meningkat, salah satu upaya yang dilakukan dalam peningkatan ini adalah melalui peningkatan kualitas dan potensi guru untuk memiliki ijazah D-4 maupun S-1 serta pembangunan ruang kelas baru untuk memenuhi fasilitas proses belajar mengajar yang memenuhi standar. Upaya peningkatan derajat kesehatan masyarakat dilakukan melalui peningkatan kualitas dan distribusi tenaga medis dan paramedis, pembangunan sarana dan prasarana kesehatan seperti puskesmas, puskesmas pembantu, rumah sakit, serta ketersediaan obat.

Pengelolaan komoditi unggulan Sumatera Utara terus mengalami peningkatan seperti pengelolaan kelapa sawit dan produk turunannya, demikian juga dengan sektor perikanan baik hasil tangkapan maupun budidaya. Sedangkan pengelolaan sektor pertanian terus diupayakan untuk memenuhi kebutuhan pangan penduduk melalui produksi beras Sumatera Utara yang telah mampu memperoleh skor swasembada.

Disamping pencapaian kinerja yang membaik, disisi lain kita terus melakukan kerja keras untuk membangun infrastruktur seperti penyediaan energi listrik dan gas, pembangunan infrastruktur jalan, baik yang menjadi kewenangan provinsi maupun kewenangan kabupaten/kota khususnya yang memfasilitasi ke sentra produksi dengan harapan untuk menekan biaya produksi demi meningkatkan daya saing produk Sumatera Utara, disamping itu kita juga terus berupaya untuk percepatan kawasan ekonomi khusus untuk menumbuh kembangkan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi.

Perekonomian Sumatera Utara tahun 2014 tumbuh sebesar 5,23 persen. Pertumbuhan terjadi pada seluruh lapangan usaha. Informasi dan komunikasi merupakan lapangan usaha yang mengalami pertumbuhan tertinggi sebesar 7,23 persen, diikuti oleh jasa lainnya sebesar 7,04 persen dan jasa kesehatan sebesar 7,00 persen.



Struktur perekonomian Sumatera Utara menurut lapangan usaha tahun 2014 didominasi oleh tiga lapangan usaha utama yaitu: pertanian, kehutanan dan perikanan (23,18%); industri pengolahan (19,90%); serta perdagangan besar-eceran dan reparasi mobil-sepeda motor (17,11%).

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Sumatera Utara (Sumut) tahun 2013 secara nasional berada di urutan ke-8 dengan capaian 75,57 persen. Namun, di nilai IPM Sumut ini sudah di atas rata-rata nasional yang sebesar 73,81 persen. Peringkat pertama IPM yaitu DKI Jakarta, disusul Sulawesi Utara, Riau, Yogyakarta, Kalimantan Timur, Kepulauan Riau, Kalimantan Tengah, dan Sumatera Utara di posisi ke-8. Terkait dengan Capaian Indeks Pembangunan Manusia (IPM) tersebut, terdapat 4 (empat) komponen IPM yaitu : Angka Melek Huruf, Angka Harapan Hidup yang masuk di bidang kesehatan, Rata-rata lama sekolah, dan Pengeluaran per kapita Provinsi Sumut.

Untuk Angka Harapan Hidup perlunya diterapkan pola gaya hidup bersih dan sehat yang harus ditingkatkan melalui promosi kesehatan dan Sumatera Utara, untuk IPM kabupaten/kota tahun 2013 tertinggi dan berada di atas capaian nasional dan Sumut capaian tertingginya yaitu Kota Medan dan Kota Pematang Siantar dengan capaian 78,62 persen. IPM terendah yakni Nias Barat 47,91 persen, Nias Selatan 68,58 persen, dan Nias Utara 69,39 persen.

Kinerja Pemerintah Provinsi Sumatera Utara yang telah dicapai selama tahun 2014 merupakan upaya kerja keras Pemerintah Provinsi Sumatera Utara, pemerintah kabupaten/kota, maupun unsur legislative serta instansi vertikal dan yang juga tidak kalah pentingnya adalah peran swasta. Untuk itu Pemerintah Provinsi Sumatera Utara mengucapkan terimakasih kepada semua pihak baik atas kerjasama dan dukungan dalam proses pembangunan Sumatera Utara yang lebih baik, kedepan dukungan ini terus diharapkan demi mewujudkan visi "Menjadi Provinsi yang Berdaya Saing Menuju Sumatera Utara Sejahtera".



Dalam rangka pencapaian Target Kinerja yang ditetapkan pada Dokumen Penetapan Kinerja Pemerintah Provinsi Sumatera Utara pada awal Tahun Anggaran 2014, bahwa sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku sebagaimana diatur pada Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2010 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah atau disebut dengan SAKIP dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, diwajibkan untuk menyajikan informasi kinerja dalam bentuk Laporan Kinerja (LK) sebagai wujud pertanggungjawaban Pemerintah Provinsi Sumatera Utara terhadap kinerja yang dibiayai negara yang bersumber dari APBD maupun APBD.

Sejalan dengan hal tersebut, dalam pencapaian target tersebut dapat disimpulkan bahwa :

1. Pemerintah Provinsi Sumatera Utara berupaya semaksimal mungkin untuk komit untuk menyelenggarakan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), sekalipun masih terdapat kendala-kendala di dalam pelaksanaannya khususnya pada sisi SDM Aparatur yang belum maksimal memahami teknis penyelenggaraan SAKIP, pasca terbitnya Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 yang seyogianya didahului dengan adanya Sosialisasi atas kedua peraturan tersebut oleh Kementerian terkait.
2. Capaian kinerja Tahun 2014 dari masing-masing Sasaran Strategis pada umumnya telah tercapai dengan baik, dimana keberhasilan pencapaian Sasaran Strtegis dimaksud diukur dengan menggunakan Indikator Kinerja Utama (IKU) sebagaimana yang telah ditetapkan pada BAB V. RPJMD Provinsi Sumatera Utgara periode Tahun 2013-2018.



3. Capaian Kinerja Tahun 2014, telah diupayakan semaksimal mungkin dapat terukur dan berorientasi kinerja, meskipun tidak dapat dipungkiri bahwa masih ada Capaian Kinerja yang belum maksimal yang dikarenakan hal-hal yang bersifat teknis khususnya berkenaan dengan kerangka pendanaan.
4. Sasaran Pemerintah Provinsi Sumatera Utara untuk Terwujudnya Sistem Pemerintahan yang baik berlandaskan Hukum, dari 9 (sembilan) Indikator Kinerja yang digunakan untuk mengukur tingkat keberhasilan dari Sasaran Strategis pada umumnya telah menunjukkan kinerja yang maksimal atau pada kategori SANGAT BAIK.
5. Sasaran Strategis lainnya pada Kategori SANGAT BAIK, hal tersebut ditunjukkan oleh pada Sasaran **“Terwujudnya masyarakat Sumatera Utara yang cerdas, sehat beriman, bermoral, beretika dan berbudaya”**, yang merupakan Sasaran ke-3 pada Tabel 5.1. Bab V RPJMD Provinsi Sumatera Utara Tahun 2013-2018. Dan disusul kemudian dengan Sasaran Strategis yang ke-5 dan 6.

Demikian Laporan Kinerja (LK) Pemerintah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2014 ini disajikan, semoga informasi kinerja yang disajikan dapat mencerminkan kinerja yang sesungguhnya guna mewujudkan Visi dan Misi yang telah ditetapkan pada RPJMD Pemerintah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2013-2018, melalui Program/ kegiatan yang dilaksanakan selama kurun waktu Tahun Anggaran 2014.

Sekian dan terimakasih.

GUBERNUR SUMATERA UTARA,

H. GATOT PUJO NUGROHO, ST, M.Si